

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Banjarbaru Akhir Tahun Anggaran 2018 dapat diselesaikan dan disampaikan sesuai dengan rencana kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru.

Laporan ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 yang secara sistematis mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, **Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

LKPJ juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun serta berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.

Segala hasil pembangunan daerah yang telah dicapai pada tahun 2018 ini tidak terlepas dari upaya bersama oleh karenanya, Terima Kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan di Kota Banjarbaru. Jika masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan ini, kami berharap untuk diberikan rekomendasi DPRD yang bersifat konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan pada masa mendatang.

Demikian LKPJ Tahun 2018 dibuat. Semoga, Allah SWT memberikan karuniaNya dan imbalan yang setimpal atas upaya yang telah kita lakukan bersama dalam rangka mengemban amanat tugas pemerintahan daerah sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat, Aamiin.s

Banjarbaru, Maret 2019
WALIKOTA BANJARBARU

H. NADJMI ADHANI





KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segenap puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Banjarbaru Tahun 2016 ini dapat diselesaikan dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru. Penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2016 ini dilakukan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

LKPJ Tahun 2016 merupakan laporan keterangan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2016. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tersebut disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021

Pencapaian sasaran pembangunan dan kinerja pelaksanaan program kegiatan pada tahun anggaran 2016 menjadi bagian yang harus dipertanggungjawabkan untuk menegaskan komitmen terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dimaksud memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Bab I. Pendahuluan (Dasar Hukum dan Gambaran Umum Kota Banjarbaru), Bab II. Kebijakan Pemerintah Daerah, Bab III. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Bab V. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, Bab VI. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan dan Bab VII. Penutup serta Lampiran.

Kami menyadari dalam penyusunan LKPJ ini masih terdapat kekurangan, berkaitan dengan hal tersebut, masukan dan hasil pembahasan dengan DPRD diharapkan menjadi rekomendasi yang penting untuk melakukan sejumlah perbaikan penyelenggaraan urusan pembangunan di Kota Banjarbaru pada tahun-tahun selanjutnya.

Demikian LKPJ Tahun 2016 ini disusun untuk bisa menjadi pijakan arah pembangunan daerah ke depan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan bagi kita semua untuk senantiasa menuju masa depan yang lebih baik. Aamin.

Banjarbaru, 27 Maret 2017

WALIKOTA BANJARBARU



H. NADJMI ADHANI





BAB I. PENDAHULUAN



Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Walikota
Banjarbaru Akhir Tahun Anggaran
2018 merupakan salahsatu bagian
dari proses pelaksanaan kewajiban
Kepala Daerah sebagaimana Pasal
154 ayat 1 Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.

Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun
2018 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
dimaksud memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Bab I. Pendahuluan (Dasar Hukum dan Gambaran Umum
Kota Banjarbaru), Bab II. Kebijakan Pemerintah Daerah, Bab III. Kebijakan Umum Pengelolaan
Keuangan Daerah, Bab IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Bab V.
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, Bab VI. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
dan Bab VII. Penutup serta Lampiran.

A. DASAR HUKUM

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Banjarbaru Akhir Tahun
Anggaran 2018 disusun dengan berdasarkan kepada peraturan perundang undangan,
yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah
Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 82);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 13);



10. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 46);

B. GAMBARAN UMUM KOTA

1. Kondisi Geografis Daerah

Kota Banjarbaru adalah salahsatu Kota di propinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai luas wilayah sebesar 371, 38 km² dan terletak antara 3°25'40" sampai dengan 3°28'37" Lintang Selatan dan 114°41'22" sampai dengan 114°54'25" Bujur Timur. Secara administrasi Kota Banjarbaru terdiri atas 5 (lima) Kecamatan dan 20 (dua puluh) Kelurahan. Adapun pembagian luas wilayah kecamatan dan kelurahan dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini :

Tabel 1.1

Luas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Banjarbaru

No	Kecamatan/Kelurahan	Luas (km ²)	%
1.	Kecamatan Landasan Ulin	92,42	24,89
	Kelurahan Landasan Ulin Timur	18,76	
	Kelurahan Guntung Payung	15,25	
	Kelurahan Syamsudin Noor	18,67	
	Kelurahan Guntung Manggis	39,74	
2.	Kecamatan Liang Anggang	85,86	23,12
	Kelurahan Landasan Ulin Tengah	23,86	
	Kelurahan Landasan Ulin Utara	19,50	
	Kelurahan Landasan Ulin Barat	16,15	
	Kelurahan Landasan Ulin Selatan	26,35	
3.	Kecamatan Cempaka	146,70	39,50
	Kelurahan Palam	14,75	
	Kelurahan Bangkal	29,80	
	Kelurahan Sungai Tiung	21,50	
	Kelurahan Cempaka	80,65	
4.	Kecamatan Banjarbaru Utara	24,44	6,58
	Kelurahan Loktabat Utara	14,24	
	Kelurahan Mentaos	1,62	
	Kelurahan Komet	2,44	
	Kelurahan Sungai Ulin	6,14	

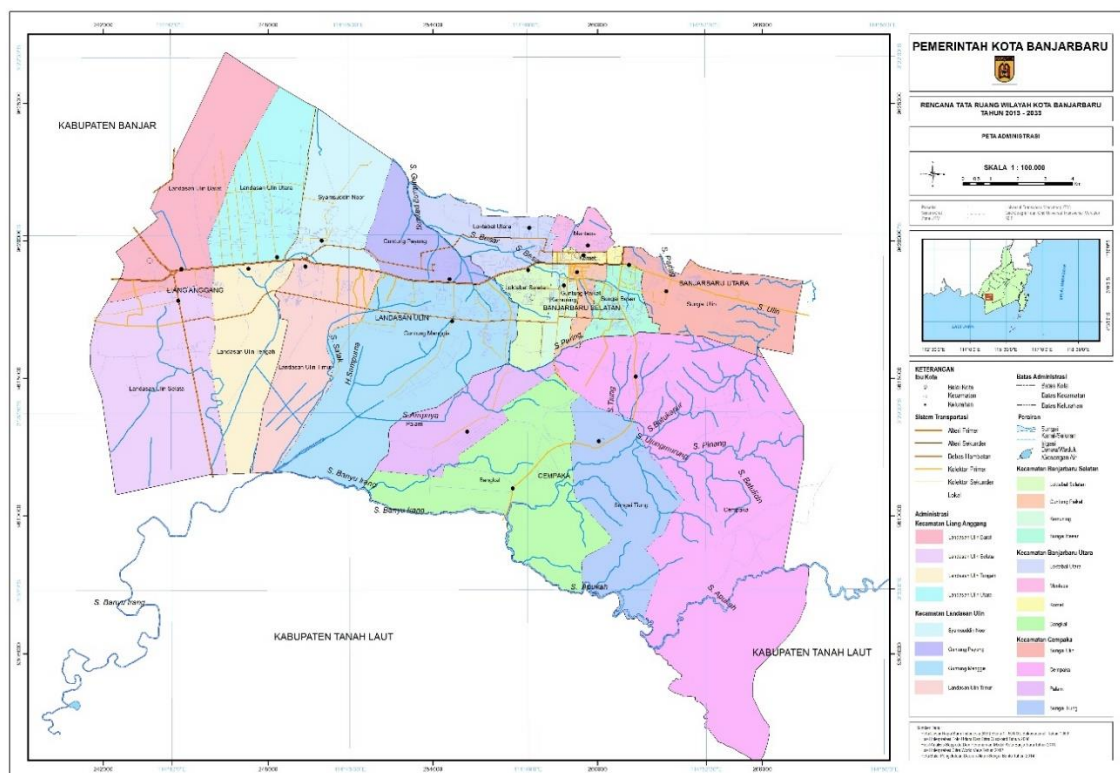


No	Kecamatan/Kelurahan	Luas (km ²)	%
5.	Kecamatan Banjarbaru Selatan	21,96	5,91
	Kelurahan Loktabat Selatan	8,58	
	Kelurahan Kemuning	3,61	
	Kelurahan Guntung Paikat	2,47	
	Kelurahan Sungai Besar	7,30	
Luas Keseluruhan		371,38	100

Sumber : Kota Banjarbaru Dalam Angka 2017, BPS Kota Banjarbaru

Dari sisi kewilayahan Kota Banjarbaru berbatasan dengan 2 (dua) Kabupaten yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Gambut dan Aluh-Aluh Kabupaten banjar
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut



Gambar 1.1

Peta Administrasi Kota Banjarbaru



Topografi Kota Banjarbaru berada pada ketinggian 0 -500 m dari permukaan laut, dengan ketinggian 0-7 m sebanyak 33,49%, 7-25 m sebanyak 48,46%, 25-100 m sebanyak 15,15%, 100-250 m sebanyak 2,55% dan 250-500 m sebanyak 0,35%.

Klasifikasi kelerengan Kota Banjarbaru adalah kelerengan 0-2% mencakup 59,35 persen luas wilayah, kelerengan 2-8% mencakup 25,78 persen wilayah, kelerengan 8-15% mencakup 12,08 persen wilayah. Klasifikasi kedalaman efektif tanah terbagi dalam empat kelas yaitu kedalaman <30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm dan >90 cm. Kota Banjarbaru mempunyai kedalaman efektif lebih dari 90 cm, dimana jenis-jenis tanaman tahunan akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Dilihat dari posisi geografisnya, Kota Banjarbaru berada pada lokasi yang sangat strategis bagi perekonomian regional, karena terletak pada pertemuan poros jalan utama di Kalimantan Selatan, yaitu :

1. Barat-Timur, pada posisi ini Kota Banjarbaru menjadi poros tengah yang menghubungkan antara Kota Banjarmasin sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Banjar dan 6 kabupaten lainnya.
2. Utara-Selatan, menjadi penghubung Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.
3. Menjadi perlintasan jalan trans Kalimantan yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

2. Kondisi Demografis

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Semester II Tahun 2018, Jumlah penduduk Kota Banjarbaru tahun 2018 berjumlah 234.748 jiwa yang terdiri dari 118.541 jiwa penduduk laki-laki dan 116,207 jiwa penduduk perempuan, yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Landasan Ulin dengan jumlah penduduk sebesar 68.169 jiwa dan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Cempaka dengan jumlah penduduk sebesar 33.056 jiwa.

Jumlah penduduk Kota Banjarbaru pada Tahun 2018 menurut jenis kelamin dan kepala keluarga dapat dilihat sebagaimana Tabel 1.2 berikut ini :



Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepala Keluarga
Kota Banjarbaru Tahun 2018

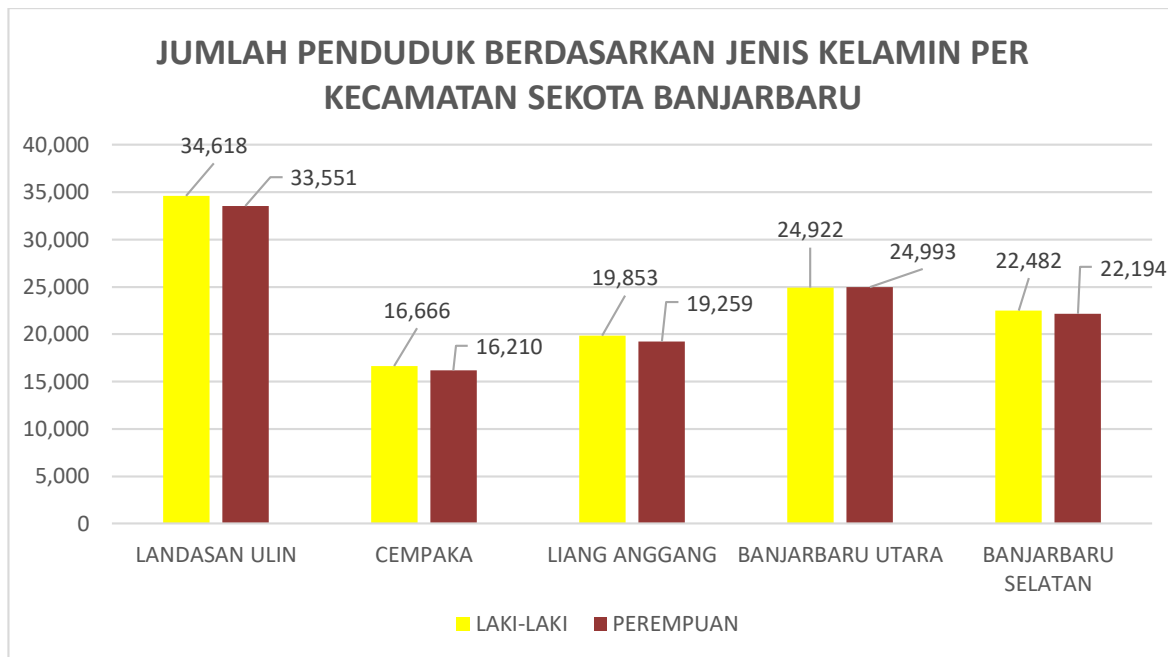
Kecamatan/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Kepala Keluarga	Jumlah
LANDASAN ULIN				68,169
Landasan Ulin Timur	8,623	8,350	5,172	16,973
Guntung Payung	3,890	3,712	2,324	7,602
Guntung Manggis	14,360	13,935	8,535	28,295
Syamsudin Noor	7,745	7,554	4,642	15,299
CEMPAKA				33,056
Palam	2,275	2,233	1,378	4,508
Bangkal	2,397	2,311	1,394	4,708
Sungai Tiung	4,519	4,310	2,691	8,829
Cempaka	7,475	7,356	4,486	15,011
LIANG ANGGANG				39,112
Landasan Ulin Tengah	3,223	3,087	1,913	6,310
Landasan Ulin Utara	3,959	3,872	2,284	7,831
Landasan Ulin Barat	9,676	9,415	5,648	19,091
Landasan Ulin Selatan	2,995	2,885	1,734	5,880
BANJARBARU UTARA				58,915
Loktabat Utara	10,890	10,884	6,652	30,774
Mentaos	4,729	4,769	2,897	9,498
Komet	1,665	1,737	1,144	3,402
Sungai Ulin	7,638	7,603	4,639	15,241
BANJARBARU SELATAN				44,676
Loktabat Selatan	8,634	8,580	5,321	17,214
Kemuning	4,759	4,542	2,861	9,301
Guntung Paikat	4,864	4,860	3,028	9,724
Sungai Besar	4,225	4,212	2,630	8,437
JUMLAH	118.541	116,207	71,373	234,748
KEPADATAN PENDUDUK	632.10			
SEX RATIO	102,01			

Sumber : Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Banjarbaru berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Tahun 2018



Grafik 1.1

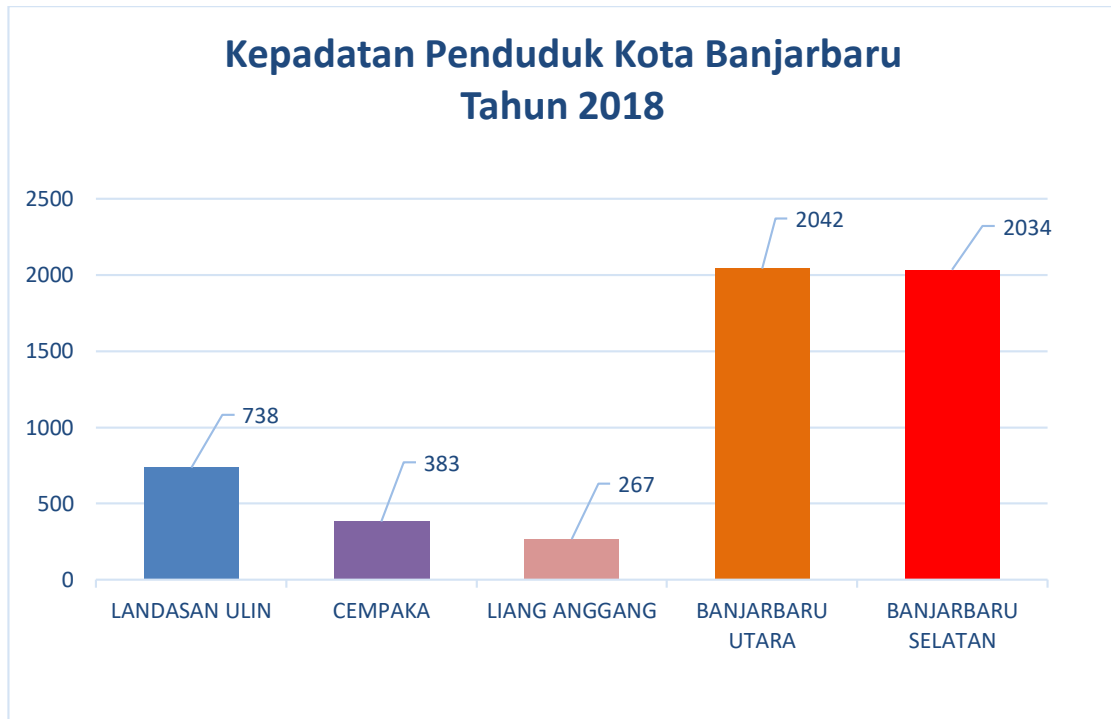
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Kota Banjarbaru Tahun 2018 (Jiwa)



Sumber : Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Banjarbaru berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Tahun 2018

Kepadatan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dan luas wilayah. Di Kota Banjarbaru kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Banjarbaru Utara dengan kepadatan sebesar 2411 jiwa/km² dan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Cempaka dengan kepadatan sebesar 385 jiwa/km². Data kepadatan penduduk Kota Banjarbaru tahun 2018 seperti terlihat pada pada grafik 1.2 di bawah ini :





Sumber : Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Banjarbaru Tahun 2018

Fenomena pertumbuhan jumlah penduduk Kota Banjarbaru tahun 2018 dipengaruhi oleh arus migrasi masuk penduduk dari daerah sekitarnya maupun dari luar Provinsi Kalimantan Selatan sejumlah 5.439 jiwa atau 49,3 % dari pertumbuhan penduduk jika disbanding tahun 2017. Hal ini didasari data bahwa penduduk yang mengurus surat pindah ke Banjarbaru selama tahun 2018 adalah sejumlah 13.002 jiwa dan jumlah penduduk yang mengurus surat tinggal di Banjarbaru adalah sebanyak 7.563 jiwa.

Tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Banjarbaru menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam membuat sebuah kebijakan agar pertumbuhan penduduk menjadi sebuah potensi bagi daerah. Pertumbuhan penduduk tersebut menjadi modal dasar dalam pembangunan, tetapi di sisi lain pertumbuhan penduduk yang tinggi juga mempunyai dampak terhadap tata kelola kota, tingkat penggangguran dan ketimpangan ekonomi serta pada akhirnya harus diimbangi dengan penyediaan pelayanan dasar yang baik memadai.



3. Kondisi Kelembagaan

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas otonomi daerah, Pemerintah Kota Banjarbaru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3822) pada tanggal 20 April 1999 mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Kelembagaan Pemerintah Kota Banjarbaru terakhir dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru yang terdiri dari 2 (dua) Sekretariat, 1 (satu) Inspektorat, 7 (tujuh) Badan, 17 (tujuh belas) Dinas, 5 (lima) Kecamatan dan 20 (dua puluh) Kelurahan. Selengkapny Perangkat Daerah Kota Banjarbaru dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut :

Tabel
1.3

Daftar Perangkat Daerah Kota Banjarbaru

NO	SEKRETARIAT / BADAN / DINAS / KECAMATAN / KELURAHAN
1.	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARBARU
	1. Asisten Tata Pemerintahan
	1.1 Bagian Pemerintahan
	1.2 Bagian Kerjasama dan Keagrarian
	1.3 Bagian Hukum
	2. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
	2.1 Bagian Perekonomian dan Pembangunan
	2.2 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	2.3 Bagian Kesejahteraan Rakyat
	3. Asisten Administrasi Umum
	3.1 Bagian Umum
	3.2 Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
	3.3 Bagian Organisasi
	4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan



	5. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik 6. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
2.	SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU a. Bagian Umum b. Bagian Persidangan dan Risalah c. Bagian Perencanaan dan Keuangan
4.	INSPEKTORAT
5.	BADAN DAERAH 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 4. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7. Satuan Polisi Pamong Praja
6.	DINAS DAERAH 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 4. Dinas Perumahan dan Permukiman 5. Dinas Sosial 6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja 7. Dinas Perhubungan 8. Dinas Komunikasi dan Informatika 9. Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 10. Dinas Perdagangan 11. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 13. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 14. Dinas Lingkungan Hidup 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 16. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah 17. RSDI
7.	KECAMATAN 1. Kecamatan Banjarbaru Utara 2. Kecamatan Banjarbaru Selatan 3. Kecamatan Cempaka 4. Kecamatan Landasan Ulin 5. Kecamatan Liang Anggang
8.	KELURAHAN 1. Kelurahan Loktabat Utara 2. Kelurahan Sungai Ulin



	3. Kelurahan Komet
	4. Kelurahan Mentaos
	5. Kelurahan Loktabat Selatan
	6. Kelurahan Kemuning
	7. Kelurahan Guntung Paikat
	8. Kelurahan Sungai Besar
	9. Kelurahan Cempaka
	10. Kelurahan Sungai Tiung
	11. Kelurahan Bangkal
	12. Kelurahan Palam
	13. Kelurahan Landasan Ulin Barat
	14. Kelurahan Landasan Ulin Tengah
	15. Kelurahan Landasan Ulin Utara
	16. Kelurahan Landasan Ulin Selatan
	17. Kelurahan Landasan Ulin Timur
	18. Kelurahan Syamsuddin Noor
	19. Kelurahan Guntung Payung
	20. Kelurahan Guntung Manggis

4. Kondisi Ekonomi

Gambaran kondisi ekonomi Kota Banjarbaru dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan potensi unggulan daerah.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diartikan sebagai peningkatan secara fisik terhadap produksi barang dan jasa di suatu wilayah. Peningkatan ini dapat dilihat dari bertambahnya produksi barang industri dan barang modal, berkembangnya infrastruktur dan sektor jasa. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dari kebijakan pembangunan yang telah diambil khususnya dalam bidang ekonomi. Indikator ini memiliki arti penting bagi pemangku kebijakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunan selanjutnya.

Kondisi perekonomian Kota Banjarbaru pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru pada tahun 2018 mencapai 6,92%, menurun apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2017 yang mencapai 6,96%. Pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 1.4 dan Grafik 1.3



Tabel 1.4

Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru
Tahun 2015 - 2018

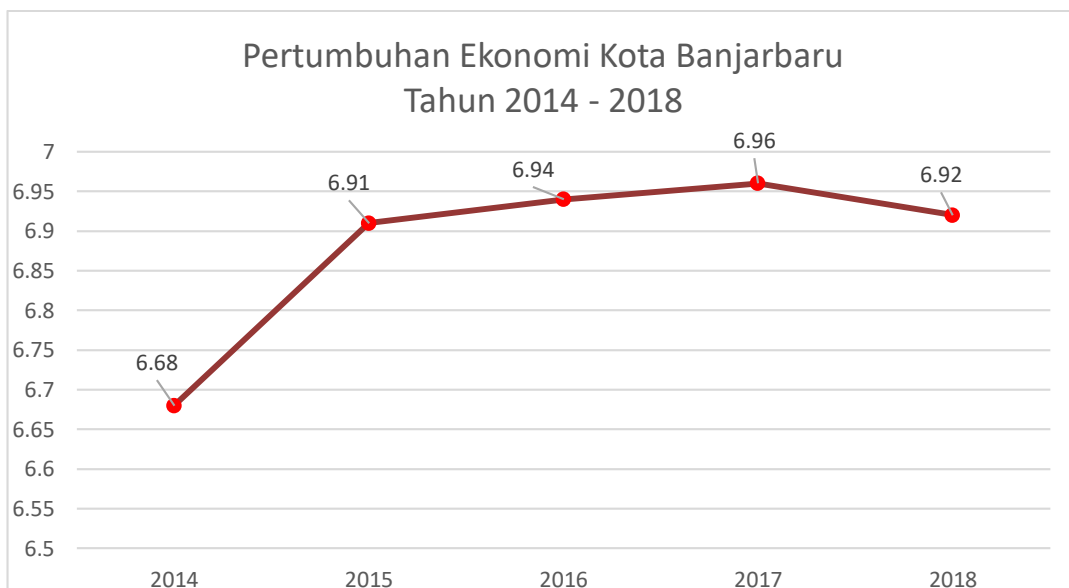
Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2014	6,68
2015*	6,91
2016**	6,94
2017***	6,96
2018***	6,92

Sumber : BPS Kota Banjarbaru 2018

*Angka Sementara **Angka Perkiraan

Grafik
1.3

Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru
Tahun 2014 - 2018



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru, 2018

Penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,04 % di Kota Banjarbaru diperkirakan disebabkan oleh laju pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan Selatan yang cenderung melambat dan disebabkan oleh keadaan ekonomi Indonesia secara umum. Dari jenis lapangan usaha yang menopang pertumbuhan ekonomi, penurunan terbesar adalah pada lapangan usaha Industri Pengolahan 1,08%. Hal ini diperkirakan akibat pasokan bahan baku yang masih tergantung daerah sekitar.



Pada skala regional, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan tahun 2018 juga mengalami penurunan sebesar 0.16% dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terdapat pada dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Secara umum, pertumbuhan PDRB Kota Banjarbaru selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan perhitungan atas dasar harga berlaku, perkiraan nilai tambah yang diciptakan perekonomian Kota Banjarbaru tahun 2018 mampu menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 8,71 triliun rupiah lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yang hanya mencapai 7,94 triliun rupiah. Kondisi ini tidak terlepas dari adanya pertumbuhan pada bagian semua sektor lapangan usaha menjadi pembentuk PDRB secara umum.

PRBD Kota Banjarbaru dapat dilihat pada Tabel 1.5 berikut ini :

Tabel 1.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Tahun 2014 - 2018 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
2014	5.641.963,85
2015	6.501.430,86
2016	7.173.225,18
2017*	7.941.053,24
2018***	8.711.452,50

Sumber : BPS Kota Banjarbaru *Angka Sementara ***Angka Perkiraan

Kenaikan ini diperoleh karena semua sektor mengalami kenaikan output dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, kenaikan harga-harga juga turut memberikan andil terhadap kenaikan nilai tambah atas dasar harga berlaku.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan



ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

c. PDRB per Kapita

Salah satu indikator kesejahteraan penduduk adalah pendapatan per kapita yang dapat diwakili oleh PDRB per kapita. PDRB per kapita Kota Banjarbaru terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita atas dasar harga berlaku pada Tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp. 34.083.000,- dan ini memperlihatkan adanya peningkatan pendapatan perkapita jika dibandingkan dengan Tahun 2017 yang berada pada kisaran Rp. 31.938,-

Peningkatan pendapatan per kapita ini diharapkan diikuti dengan pemerataan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, tumbuhnya perekonomian tidak hanya dinikmati oleh kalangan-kalangan tertentu saja, namun juga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kota Banjarbaru.

PDRB Per Kapita atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan dapat dilihat sebagaimana Tabel 1.6 berikut ini :

Tabel 1.6

PDRB per Kapita Kota Banjarbaru
Tahun 2014 - 2018

Tahun	PDRB PER KAPITA (Dalam Ribu Rupiah)		PERTUMBUHAN (%)	
	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	HARGA BERLAKU	HARGA KONSTAN
2014	24.800	19.617	10,71	3.49
2015	27.767	20.358	11,96	3.78
2016	29.803	21.139	7,33	3.84
2017*	31.938	21.971	7,15	3,94
2018***	34.083	22.828	6,62	3,91

Sumber : BPS Kota Banjarbaru 2018

*) Angka Sementara ***) Angka Perkiraan



d. Potensi Unggulan Daerah

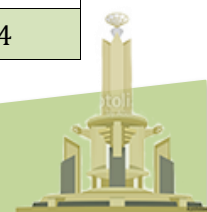
Berdasarkan data yang diperoleh, struktur perekonomian Kota Banjarbaru beberapa tahun belakangan masih di dominasi sektor tersier dan sekunder. Hal ini dikarenakan Kota Banjarbaru tidak memiliki sumber daya alam unggulan. Sektor jasa terus mengalami peningkatan menjadikan peranan sektor jasa yang terus mengalami peningkatan pada tahun 2018. Empat besar komponen pendukung perekonomian di Kota Banjarbaru adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 22,29%, Kontruksi sebesar 15,09%, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial 11,63% dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparsi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,06%.

Kecendrungan pergerakan Struktur Perekonomian Menurut Lapangan Usaha di Kota Banjarbaru Tahun 2014 -2018 dapat dilihat pada Tabel 1.7 berikut ini :

Tabel 1.7

Struktur Perekonomian Menurut Lapangan Usaha di Kota Banjarbaru Tahun 2014 - 2018

No	Sektor	2014	2015	2016	2017*	2018***
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,22	2,13	2,11	2,05	2,00
2	Pertambangan dan Penggalian	4,13	4,06	3,87	3,83	3,76
3	Industri Pengolahan	7,98	7,82	7,88	7,89	7,89
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,14	0,19	0,21	0,22	0,23
5	Pengadaan Air	0,60	0,59	0,58	0,58	0,57
6	Konstruksi	14,51	14,71	14,71	14,95	15,09
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,44	10,42	10,69	10,89	10,06
8	Transportasi dan Pergudangan	21,76	21,93	22,09	22,24	22,29
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,69	2,60	2,59	2,60	2,58
10.	Informasi dan Komunikasi	4,83	4,63	4,64	4,71	4,71
11.	Jasa Keuangan	1,81	1,73	1,73	1,73	1,71
12.	Real Estate	2,26	2,18	2,18	2,14	2,11
13.	Jasa Perusahaan	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44



14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	12,96	13,32	12,62	11,93	11,63
15.	Jasa Pendidikan	8,54	8,49	8,79	8,89	8,98
16.	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	3,01	3,04	3,14	3,17	3,19
17.	Jasa Lainnya	1,68	1,69	1,72	1,75	1,76
	PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kota Banjarbaru Tahun 2018

*) Angka Sementara **) Angka Perkiraan

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

A. VISI DAN MISI

1. VISI

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010,



Visi dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah.

Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap III RPJPD Kota Banjarbaru. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 maka visi Kota Banjarbaru adalah “Terwujudnya Banjarbaru sebagai Kota Empat Dimensi yang Mandiri dan Terdepan”.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Visi Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021, yaitu :

**“TERWUJUDNYA BANJARBARU SEBAGAI KOTA PELAYANAN
YANG BERKARAKTER”**

KOTA PELAYANAN adalah Kota yang memberikan pelayanan secara optimal kepada warga masyarakat dan yang berkunjung di Kota Banjarbaru.

BERKARAKTER Terdiri Atas Dua Aspek Penting Yaitu :

1. Sumber daya manusia yang berkarakter, yaitu terciptanya sumber daya manusia yang sehat, mempunyai etos kerja tinggi dan berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai religius.
2. Kota yang berkarakter, yaitu sebuah kota yang mempunyai ciri khas sebagai kota yang tertata/direncanakan (*urban design*) sehingga menjadi tempat hunian yang indah, aman dan nyaman yang berwawasan lingkungan.

2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi yang mengacu kepada RPJPD Kota Banjarbaru.

Misi Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya saing dan berakhlak mulia.
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata, cerdas dan berwawasan lingkungan
3. Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan.
4. Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.
5. Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy-focused management*). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Disamping Strategi, hal penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan

arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Terdidik, Sehat, Berdaya Saing Dan Berakhlak Mulia			
1. Meningkatkan kualitas pendidikan	1.1 Terwujudnya metode pendidikan yang menyelaraskan pengetahuan dan akhlak	Menyelenggarakan pendidikan yang berkarakter	1. Penyusunan instrumen pendidikan yang berkarakter
			2. Menyisipkan waktu untuk penyampaian pendidikan yang berkarakter
			3. Menyelenggarakan pelatihan pendidikan berkarakter
	1.2 Terwujudnya lulusan yang berkualitas	Peningkatan hasil ujian akhir	1. Peningkatan proses belajar mengajar
			2. Pemberlakuan jam belajar siswa
			3. Penyelenggaraan try out
2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	1.1 Meningkatkan pelayanan pasien miskin	Meningkatkan kapasitas Rumah Sakit dan meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan	1. Penambahan tempat tidur pasien miskin
			1. Sosialisasi kepesertaan BPJS Kesehatan
	1.2 Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	Meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan	1. Peningkatan SDM tenaga kesehatan
			2. Sosialisasi kesehatan bagi ibu dan anak
Misi 2 Meningkatkan Penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata, cerdas dan berwawasan lingkungan			
1. Meningkatkan sistem drainase perkotaan yang baik dan terkoneksi	1.1 Meningkatkan sistem pengelolaan drainase	Pembebasan lahan melalui partisipasi masyarakat	1. Identifikasi kebutuhan jalan, jembatan dan drainase
			2. Merencanakan dan pembangunan jalan, jembatan dan drainase
2. Meningkatkan kualitas	2.1 Berkurangnya luasan permukiman	Penurunan kawasan kumuh melalui	1. Identifikasi kawasan kumuh
			2. Merencanakan dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
perumahan dan permukiman yang layak huni	kumuh	penanganan berbasis masyarakat	menangani kawasan kumuh
	2.2 Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Peningkatan kualitas rumah dengan pemberian bantuan stimulan Rumah Tidak Layak Huni	1. Identifikasi rumah tidak layak huni 2. Merencanakan dan menangani rumah tidak layak huni
3. Meningkatkan Akses terhadap Sanitasi dan Air Bersih	3.1 Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman	Peningkatan kerjasama dengan PDAM	1. Pisanisasi dan penyertaan modal 2. Pengadaan air minum di daerah rawan air
	3.2 Meningkatkan akses terhadap pengelolaan air limbah yang memenuhi standar	Peningkatan penyediaan program dan sarana air limbah yang banyak	1. Pembangunan dan operasional IP2T dan truk tinja 2. Penuntasan BABS
4. Meningkatkan kebersihan dan kualitas lingkungan	4.1 Meningkatkan pelayanan kebersihan lingkungan	Meningkatkan sistem manajemen pengelolaan sampah	1. Pembangunan dan operasional TPS3R dan Bank sampah 2. Pengurangan sampah dari sumbernya
	4.2 Meningkatkan Kualitas lingkungan	Peningkatan kualitas lingkungan udara, tanah dan air (pengurangan pencemaran udara, tanah dan air)	1. Pengawasan terhadap kegiatan usaha yang menghasilkan polutan 2. Penegakan hukum lingkungan
5. Meningkatkan pemenuhan RTH	5.1 Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) public	Peningkatan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik berbasis masyarakat dan kerjasama swasta	1. Menetapkan kawasan yang tidak boleh dibangun dan boleh dibangun 2. Pembangunan taman kota
6. Meningkatkan konektivitas antar perangkat daerah	6.1 Meningkatkan sarana prasarana Teknologi Informasi	Melaksanakan tata kelola infrastruktur jaringan teknologi informasi secara terpadu	1. Memetakan dan menyusun topologi sistem jaringan komunikasi 2. Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana sistem jaringan komunikasi berbasis teknologi informasi terkini

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 3 Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan			
1. Meningkatkan kemandirian fiskal kota	1.1 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	1. Identifikasi sumber PAD 2. Meningkatkan pelayanan pembayaran PAD melalui perbankan
2. Meningkatkan investasi	2.1 Meningkatnya jumlah penanaman modal	Peningkatan investasi melalui peningkatan pelayanan perijinan dan kerjasama dengan swasta	1. Menyusun peluang investasi 2. Memasarkan peluang investasi
3. Meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat	3.1 Meningkatnya pasar tradisional yang dikelola secara modern	Pembangunan pasar tradisional melalui kerjasama dengan swasta	1. Penyediaan lahan 2. Meningkatkan komunikasi dengan swasta
	3.2 Meningkatnya jumlah wirausaha baru	Peningkatan kewirausahaan melalui pengembangan pendidikan kewirausahaan	1. Identifikasi peluang kewirausahaan 2. Mengadakan pelatihan kewirausahaan
Misi 4 Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi			
1. Meningkatkan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi	1.1 Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Peningkatan SDM penyusun Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Melaksanakan bimbingan teknis SDM penyusun Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
	1.2 Meningkatnya Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan SDM pengelolaan keuangan	Melaksanakan bimbingan teknis SDM pengelolaan keuangan
	1.3 Meningkatnya sistem pengendalian internal pemerintah	Peningkatan sistem pengendalian internal pemerintah melalui peningkatan SDM	Melaksanakan bimbingan teknis SDM pengawas
	1.4 Meningkatkan pelayanan pelayanan public	Peningkatan pelayanan perijinan melalui peningkatan SDM dan SOP	1. Melaksanakan bimbingan teknis SDM perijinan 2. Penyederhanaan SOP
Misi 5 Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib			
1. Meningkatkan perlindungan Sosial masyarakat	1.1 Meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan	Peningkatan kerjasama dengan lembaga sosial	1. Pemetaan masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	sosial yang ditangani		2. Identifikasi kebutuhan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
	1.2 Menurunnya Beban Masyarakat Miskin	Peningkatan penerima Raskin dan percepatan pelayanan santunan kematian	1. Meningkatkan subsidi 2. Menyusun regulasi

C. PRIORITAS DAERAH

Prioritas daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 merupakan tindak lanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 diselaraskan dengan program dari SKPD serta berdasarkan isu strategis dan tantangan yang akan dihadapi, maka ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan daerah agar Pembangunan Kota Banjarbaru dalam 5 tahun ke depan fokus yaitu :

1. Banjarbaru dengan Sumber Daya Manusia yang dapat lebih terarah dan lebih Berkualitas
2. Banjarbaru dengan Infrastruktur Kota yang cerdas
3. Banjarbaru daerah tujuan investasi
4. Banjarbaru sebagai kota pelayanan yang berkarakter
5. Banjarbaru aman, tertib dan nyaman

Setiap tahun anggaran perlu diperjelas titik berat yang akan dilaksanakan atau disebut fokus Prioritas Pembangunan yang bertitik tolak dari identifikasi masalah yang ada setiap tahunnya. Gambaran keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD dengan prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2018 disajikan dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

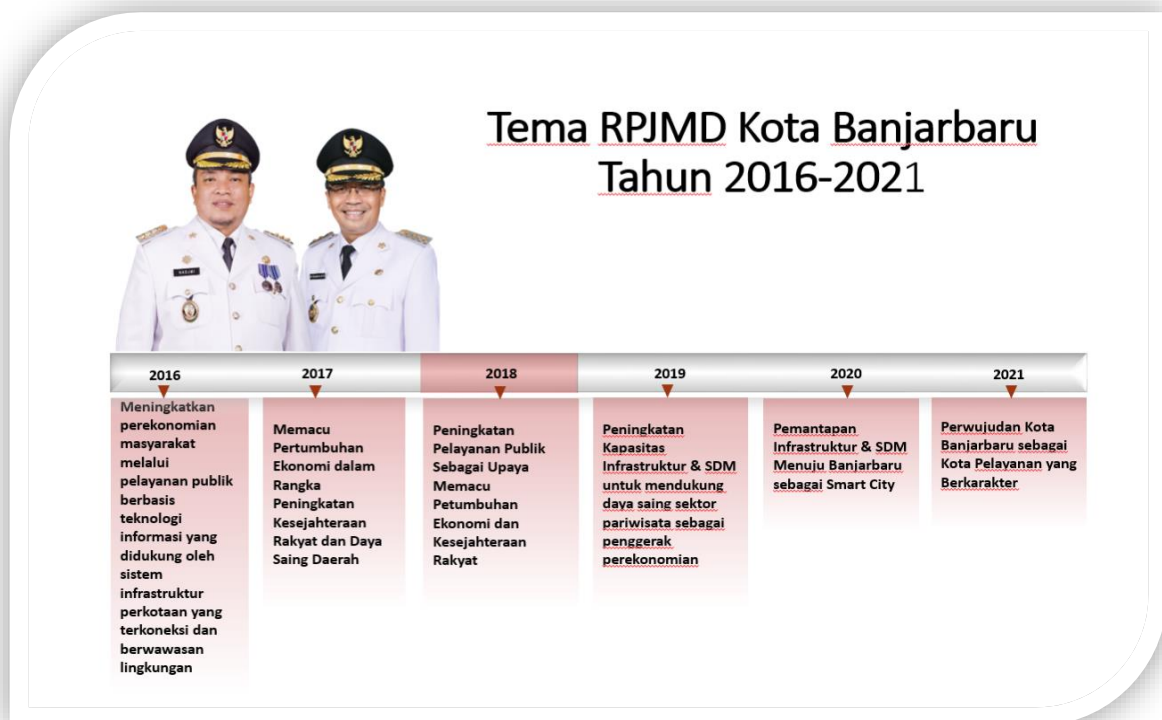
Tabel 2.2

Prioritas RPJMD dengan Prioritas RKPD 2018

Prioritas Pembangunan Daerah (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Tahunan (RKPD)
1. Banjarbaru dengan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	1. Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan dan pelaksanaan pendidikan yang berkarakter 2. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan
2. Banjarbaru dengan Infrastruktur	1. Peningkatan pelayanan infrastruktur kota 2. Peningkatan ketersediaan RTH dan ruang

Prioritas Pembangunan Daerah (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Tahunan (RKPD)
Kota yang cerdas	<ul style="list-style-type: none"> publik 3. Peningkatan koordinasi dan penegakan penyelenggaraan penataan bangunan dan gedung 4. Peningkatan penataan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni 5. Peningkatan pengelolaan sampah 6. Peningkatan pelayanan angkutan umum dan pelajar 7. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga
3. Banjarbaru daerah tujuan investasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan daya saing produk UMKM dan pemasaran 2. Peningkatan investasi daerah 3. Peningkatan ketahanan pangan 4. Peningkatan sarana prasaranan perekonomian
4. Banjarbaru sebagai kota pelayanan yang berkarakter	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi
5. Banjarbaru aman, tertib dan nyaman	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan 2. Peningkatan penanggulangan masalah sosial

Berdasarkan prioritas tahun 2018 tersebut di atas, maka ditetapkan tema Pembangunan yaitu ***"PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI UPAYA MEMACU PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT"***.



Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah, program dan indikator kinerjanya serta target capaian tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018
Berdasarkan RPJMD

No.	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1.	Banjarbaru dengan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan yang berkarakter	100%	Dinas Pendidikan
			Persentase kelulusan : - SD - SMP	100% 100%	
			Angka Melanjutkan : - SD ke SMP - SMP ke SMA	99,97% 88,50%	
			Angka Pendidikan yang Ditamatkan : - SD - SMP	17,83% 6,78%	
		<ul style="list-style-type: none"> Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 	Persentase integrasi Jamkesda ke Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN)	75%	Dinas Kesehatan
			Menurunnya Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (‰)	100,25	
			Menurunnya Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup (‰)	5,57	
		<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Perumahan Program Lingkungan Hidup Sehat Perumahan 	Presentase Berkurangnya luas Permukiman kumuh	0,22%	Dinas Perumahan & Permukiman
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	0,09%	
2.	Banjarbaru dengan Infrastruktur Kota yang cerdas	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Perumahan Program Lingkungan Hidup Sehat Perumahan 	Presentase Berkurangnya luas Permukiman kumuh	0,22%	Dinas Perumahan & Permukiman
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	0,09%	

No.	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		<ul style="list-style-type: none"> • Program Pembangunan Jalan dan Jembatan • Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong • Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan • Program Pengendalian Banjir • Program Pembangunan Fasilitas Umum 	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan Drainase skala kota	47,51%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		• Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Prosentase luasan Ruang Terbuka Hijau publik sesuai ketentuan	10,196%	
		• Program Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	83,17%	
		• Program Penyediaan Sistem Air Limbah	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	90,95%	
		• Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengurangan sampah dari sumbernya	10%	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase sampah terangkut dan diproses ke TPA	88%	
		<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam • Program Peningkatan Pengendalian Polusi 	Indeks pencemaran air	41	
			Indeks pencemaran udara	Sedang	
3.	Banjarbaru daerah tujuan investasi	• Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai Investasi PMDN (Rp. Milyar)	1.496	Dinas Penanaman Modal & PTSP
		• Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Investasi PMA (Rp. Milyar)	59	
		<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Effisiensi Perdagangan Dalam Negeri • Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 	Prosentase kecamatan yang memiliki pasar tradisional	60%	Dinas Perdagangan
		• Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif	Persentase wirausaha dengan	83%	Dinas Koperasi, UKM dan

No.	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		Usaha Kecil Menengah	pertumbuhan usaha positif		Tenaga Kerja
4.	Banjarbaru sebagai kota pelayanan yang berkarakter	• Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	B	Bagian Organisasi-Setdako
		• Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini pemeriksaan Eksternal	WTP	• Badan Pengelola n Pajak & Retribusi Daerah • Badan Pengelola n & Aset Daerah
		• Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Berkembang	Inspektorat
		• Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	B	Lintas SKPD
			Nilai Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan	Hijau	Lintas SKPD
		• Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase SKPD yang menggunakan Teknologi Informasi dalam pelayanan	60%	Dinas Kominfo
5.	Banjarbaru aman, tertib dan nyaman	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial • Program Pembinaan Panti Asuhan, Panti Jompo, SLB dan Pondok Pesantren • Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya) 	Cakupan penanganan PMKS	41,4%	Dinas Sosial
			Masyarakat miskin yang menerima Raskinda (RTSM)	6.186	

BAB III.

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, daerah menerapkan kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Pasal 4 ayat (1) ditentukan bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan

dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah termaksud merupakan sub sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kegiatan pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.



A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah merupakan hak semua daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang dapat diuraikan sebagai berikut:



a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber dari wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1) Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah di Kota Banjarbaru terdiri dari :

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Pengambilan Bahan Golongan C
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Bawah Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- k) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2) Hasil Retribusi Daerah

Berkenaan dengan Retribusi Daerah di Kota Banjarbaru, adalah merupakan pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan yang terdiri dari :

- a) Retribusi Jasa Umum
- b) Retribusi Jasa Usaha
- c) Retribusi Perizinan Tertentu

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4) Sumber pendapatan yang dimaksud di sini adalah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan milik daerah/BUMD. Untuk Kota Banjarbaru



Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah PDAM Intan Banjar.

5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan dinas-dinas yaitu :

- a) Penerimaan Jasa Giro
- b) Penerimaan Bunga Deposito
- c) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)
- d) Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- e) Pendapatan Denda Pajak
- f) Pendapatan Dari Pembelian
- g) Pendapatan BLUD
- h) Lain-lain PAD yang Sah Lainnya
- i) Hasil Penjualan Aset Lainnya
- j) Pendapatan Data Kapitasi JKN
- k) Dana BOS Reguler

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan yang Sah adalah pendapatan bagi hasil yang diterima dari Provinsi, hibah yang diterima dari APBN, dana penyesuaian, bantuan keuangan dari Provinsi dan sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp. **1.087.333.979.004,92** (Satu Triliun Delapan Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Rupiah Sembilan Puluh Dua Sen) dari target yang ditetapkan sebesar Rp. **1.007.157.442.545,00** (Satu



Triliun Tujuh Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) yang terdiri dari :

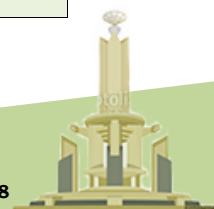
- a. Pendapatan Asli Daerah pada APBD tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. **204.642.528.120,00** (Dua Ratus Empat Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. **229.786.672.728,92** (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah Sembilan Puluh Dua Sen)
- b. Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp. **688.403.776.590,00** (Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. **728.790.689.110,00** (Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Sepuluh Rupiah)
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah ditargetkan sebesar Rp. **114.111.137.835,00** (Seratus Empat Belas Miliar Seratus Sebelas Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) terealisasi sebesar Rp. **128.756.617.166,00** (Seratus Dua Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah)

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kota Banjarbaru Tahun 2018

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
I	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	204.642.528.120,00	229.786.552.300,92	112,29
	▪ Pendapatan Pajak Daerah	107.665.274.440,00	130.839.282.034,00	121,52
	▪ Hasil Retribusi Daerah	10.972.510.000,00	8.186.041.683,00	74,61
	▪ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.930.169.865,00	7.930.169.861,00	100,00
	▪ Lain-lain PAD yang Sah	78.074.573.815,00	82.831.058.722,92	106,09
II	Dana Perimbangan	688.403.776.590,00	728.790.689.110,00	105,87
	▪ Bagi Hasil Pajak & Bagi Hasil Bukan Pajak	104.274.489.000,00	146.446.620.267,00	140,44
	▪ Dana Alokasi Umum	428.542.067.000,00	428.542.067.000,00	100,00
	▪ Dana Alokasi Khusus	155.587.220.590,00	153.802.001.843,00	98,85
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	114.111.137.835,00	128.756.617.166,00	112,83



NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
	▪ Pendapatan Hibah	25.694.585.535,00	27.005.324.013,00	105,10
	▪ Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	79.666.552.300,00	93.001.293.153,00	116,74
	▪ Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	8.750.000.000,00	8.750.000.000,00	100,00
JUMLAH		1.007.157.442.545,00	1.087.333.858.577,92	107,96

Sumber : BPKAD Kota Banjarbaru Tahun 2018

Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2

Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
I	Pendapatan Pajak Daerah	107.665.274.440,00	130.839.282.034,00	121,52
	▪ Pajak Hotel	8.578.627.500,00	8.096.722.430,00	94,38
	▪ Pajak Restoran	18.696.268.500,00	25.045.629.981,00	133,96
	▪ Pajak Hiburan	3.832.000.000,00	3.779.544.310,00	98,63
	▪ Pajak Reklame	2.007.825.000,00	3.203.597.103,00	159,56
	▪ Pajak Penerangan Jalan	29.736.150.000,00	31.541.976.709,00	106,07
	▪ Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	308.180.598,00	212.145.600,00	68,84
	▪ Pajak Parkir	4.920.342.822,00	5.543.099.050,00	112,66
	▪ Pajak Air Bawah Tanah	770.000.000,00	792.518.731,00	102,92
	▪ Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	12.222.550,00	24,45
	▪ Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	11.122.559.825,00	13.600.028.164,00	122,27
	▪ Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	27.643.320.195,00	39.011.797.406,00	141,13
II	Hasil Retribusi Daerah	10.972.510.000,00	8.186.041.683,00	74,61
	▪ Retribusi Jasa Umum	1.913.710.000,00	1.485.809.350,00	77,64
	▪ Retribusi Jasa Usaha	4.182.800.000,00	4.274.223.964,00	102,19
	▪ Retribusi Perizinan Tertentu	4.876.000.000,00	2.426.008.369,00	49,75

Sumber : BPPRD Kota Banjarbaru Tahun 2018

3. Permasalahan dan Solusi

a. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah

1) Permasalahan :

- 1.1. Pemilik Restoran, hotel, hiburan sebagian tidak melampiri bukti pembayaran (kwitansi, nota, bill dsb) sehingga sulit diketahui kebenaran omset yang diperoleh.
- 1.2. Pemilik restoran tidak membuat pembukuan dan berdalih tidak memungut pajak restoran dari konsumen sehingga saat pembayaran pajak akan merasa keberataan.
- 1.3. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai.
- 1.4. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang – undangan masih kurang.
- 1.5. Tidak terealisasi pencapaian target pada empat (4) item pajak yaitu pajak hotel, pajak sarang burung walet, pajak hiburan, pajak bahan galian golongan C / galian mineral bukan logam di tahun 2018.
- 1.6. Alasan pajak hotel dikarenakan belum optimalnya pemeriksaan yang dibayar oleh pihak objek pajak hotel berbintang sehingga pemungutan pajaknya belum optimal dan pendataan wajib pajak kost atau penginapan yang ada di Wilayah Kota Banjarbaru yang belum maksimal.
- 1.7. Pajak Sarang Burung Walet dikarenakan target yang diadakan pada tahun 2018 adalah target yang pertama kali yang direalisasikan dan pemindahan objek yang akan dicari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) sehingga belum optimal dalam pencapaian, dan dalam pemungutan pajaknya terkendala dengan kegiatan realisasi hasil panen sarang burung walet yang tidak bisa dimonitor secara real di lapangan.
- 1.8. Pajak hiburan tidak tercapai target dikarenakan target sebelumnya di Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.667.662.179,- dan di Tahun 2018 dinaikkan menjadi Rp.3.832.000.000,- sehingga kenaikan target melebihi 247,78 % dan banyak kegiatan pajak hiburan yang ditutup / tidak beroperasi seperti : Ramona karaoke, Bintang karaoke, Bensco bilyard dll.
- 1.9. Pajak mineral bukan logam dan batuan tidak mencapai target dikarenakan ada aturan / regulasi yang bertentangan dengan kondisi Kota Banjarbaru yang merupakan Kota yang bukan menjadi tempat pertambangan, sehingga pemungutan pajak tidak dapat secara optimal .



2) Solusi :

- 1.1. Melakukan koordinasi yang intensif sosialisasi secara terus menerus tentang pajak daerah.
- 1.2. Melakukan komunikasi dan informasi kepada wajib pajak.
- 1.3. Melakukan pendekatan lapangan langsung ke wajib pajak.
- 1.4. Melakukan pemeriksaan pajak pada objek pajak yang dicurigai tidak sesuai dengan dibayarkan.
- 1.5. Diusulkan PERDA dan Target Pajak Mineral bukan logam dihapus karena di tata ruang Banjarbaru tidak ada izin pertambangan.

b. Bidang PBB dan BPHTB

1) Permasalahan :

- 1.1. Data PBB yang belum update.
- 1.2. Data PBB yang belum valid.
- 1.3. Belum terdapat peta PBB yang terbaru .
- 1.4. Nilai piutang PBB yang semakin meningkat.
- 1.5. Pendataan objek PBB yang belum dilakukan secara optimal.
- 1.6. Penagihan objek PBB belum dilakukan secara optimal.
- 1.7. Pelaporan piutang PBB pada Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (E-PBB) yang belum menunjukkan keakuratan.

2) Solusi :

- 1.1. Melakukan pemutakiran data PBB sehingga potensi PBB dapat dioptimalkan
- 1.2. Melakukan validasi data PBB sehingga menghasilkan kebenaran dan kesesuaian data PBB dengan dengan kondisi riil yang ada.
- 1.3. Melakukan kegiatan pemetaan PBB sehingga menghasilkan peta PBB Kota Banjarbaru.
- 1.4. Melakukan validasi data piutang PBB sehingga dapat dilakukan penagihan dan / penghapusan piutang PBB.
- 1.5. Melakukan pendataan secara rutin atas objek pajak yang belum terdaftar PBB.
- 1.6. Melakukan penagihan secara rutin atas objek yang belum membayar PBB.
- 1.7. Menambahkan fitur pelaporan piutang PBB pada Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (E-PBB).

c. Bidang Pengendalian dan Pengembangan

1) Permasalahan :

- 1.1. Kurangnya tenaga penyuluh / pengawas / pemeriksa.
- 1.2. Masih kurangnya kesadaran tentang pentingnya pajak.
- 1.3. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar bidang.
- 1.4. Sarana dan prasarana kerja yang kurang memadai.

2) Solusi :

- 1.1 Melakukan bimtek kepada ASN mengenai fungsi dan tugas serta tanggungjawab tenaga penyuluh/pengawas/pemeriksa.
- 1.2 Menempatkan petugas pengawas di setiap kecamatan 1 orang.
- 1.3 Meningkatkan volume sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak Kota Banjarbaru.
- 1.4 Melakukan rapat koordinasi secara intensif antar bidang.
- 1.5 Percepatan pemenuhan pembangunan sarana dan prasarana

Pada tahun 2018 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru telah melaksanakan Rekomendasi DPRD Kota Banjarbaru atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Banjarbaru Akhir Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1. Pajak hotel dari target Rp. 8.128.627.500,00 terealisasi Rp. 6.678.978.863,00 atau setara dengan 82,17%.

Dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penetapan target pada tahun 2017 kemungkinan target yang patok terlalu tinggi atau tidak sesuai dengan potensi sesungguhnya.
 - b. Tidak menutup kemungkinan juga laporan yang disampaikan wajib pajak tidak berdasarkan fakta mengingat metode yang dipakai adalah self Assesment.
 - c. Pada tahun 2017 penerimaan difokuskan pada pajak restoran dan hasilnya memuaskan dari target Rp. 15.139.218.500,00 terealisasi Rp. 19.332.619.681,00 atau setara dengan 127,70%.
2. Pajak Reklame hanya terealisasi Rp. 1.910.769.970,00 dari target Rp. 2.807.825.000,00 atau 68,05%. Pada posisi seperti ini dapat dijelaskan bahwa pajak reklame baik pengelolaan maupun penetapan target dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru, baru tahun 2018 sejak januari penetapan target maupun pemungutan pajak reklame menjadi kewenangan BPPRD Kota Banjarbaru.



B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

1. Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam belanja daerah adalah :

- a. Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang dituangkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.
- c. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud, ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Belanja Daerah terdiri dari :



a. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNS.

2) Belanja Hibah

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Penerima dana hibah harus mempertanggungjawabkan penggunaan atau pemanfaatan dana hibah sesuai dengan RAB yang disampaikan.

3) Belanja Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

4) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

5) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dan merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dana pendamping DAK yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan tahun berjalan, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

b. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Belanja yang dianggarkan untuk membayar honorarium PNS, honorarium non PNS, uang lembur, belanja honorarium non pegawai dan belanja pegawai operasional BLUD.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja yang dianggarkan yaitu pengadaan barang-barang yang dipakai habis termasuk jasa dan perjalanan dinas, belanja beasiswa pendidikan PNS dan bimbingan teknis PNS, belanja pemeliharaan dan jasa konsultasi, serta belanja barang dan jasa BLUD.

3) Belanja Modal

Belanja Modal adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk pengadaan perlengkapan yang tidak habis dipakai atau yang mempunyai umur lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

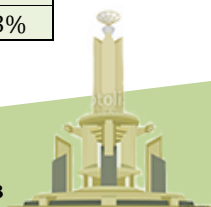
2. Target dan Realisasi Belanja

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kota Banjarbaru per SKPD pada Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2

Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2018
per SKPD Tahun 2018

NO.	SKPD	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN
1	Dinas Pendidikan	243.321.640.399,00	233.672.664.381,19	96,03%
2	Dinas Kesehatan	94.571.619.439,00	88.680.607.174,80	93,77%
3	RSD Idaman Kota Banjarbaru	139.673.333.902,00	140.829.314.897,00	100,83%
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	219.208.783.412,00	186.089.814.468,00	84,89%
5	Dinas Perumahan Dan Permukiman	33.990.808.411,00	33.123.623.943,00	97,45%
6	Satuan Polisi Pamong Praja	11.005.605.616,00	10.207.728.019,00	92,75%
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	5.006.818.860,00	4.700.260.458,00	93,88%
8	Dinas Sosial	7.286.708.450,00	6.332.413.117,00	86,90%
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.823.509.600,00	2.613.177.296,00	92,55%
10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	15.749.812.084,00	14.833.121.176,00	94,18%
11	Dinas Lingkungan Hidup	27.271.059.022,00	24.908.986.583,00	91,34%
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	7.362.787.435,00	6.927.332.689,00	94,09%
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	8.553.979.560,00	7.673.219.012,00	89,70%
14	Dinas Perhubungan	10.754.277.567,00	10.260.868.761,00	95,41%
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	11.679.662.280,00	10.932.014.625,81	93,60%
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil	7.721.010.090,00	7.507.115.146,00	97,23%



NO.	SKPD	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN
	Menengah Dan Tenaga Kerja			
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.861.626.250,00	5.537.484.301,00	94,47%
18	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata	11.528.322.820,00	10.807.051.839,00	93,74%
19	Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah	6.306.249.291,00	5.957.972.966,00	94,48%
20	Dinas Perdagangan	13.332.765.109,00	12.741.054.182,00	95,56%
21	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	13.916.154.610,00	12.830.300.446,00	92,20%
22	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	781.001.000,00	768.304.356,00	98,37%
23	Sekretariat Daerah	50.058.738.150,00	47.151.132.823,00	94,19%
24	Sekretariat DPRD	31.168.183.896,00	25.315.712.469,00	81,22%
25	Kecamatan Banjarbaru Selatan	8.653.779.520,00	8.444.112.842,00	97,58%
26	Kecamatan Banjarbaru Utara	9.327.287.310,00	8.966.650.068,00	96,13%
27	Kecamatan Cempaka	8.845.965.832,00	8.470.100.741,00	95,75%
28	Kecamatan Landasan Ulin	9.253.546.762,00	8.823.858.856,00	95,36%
29	Kecamatan Liang Anggang	8.260.541.261,00	7.998.581.928,00	96,83%
30	Inspektorat	10.590.986.700,00	10.165.530.050,00	95,98%
31	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	10.802.607.013,00	10.134.517.790,00	93,82%
32	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Skpd)	22.132.199.530,00	18.865.541.660,00	85,24%
33	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Ppkd)	22.332.992.190,00	17.446.407.954,00	78,12%
34	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	17.202.045.600,00	16.257.186.345,00	94,51%
35	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah	11.339.193.974,00	9.603.401.452,00	84,69%
		1.117.675.602.945,00	1.035.577.164.814,80	92,65%

Sumber : BPKAD Kota Banjarbaru Tahun 2018

Belanja daerah per SKPD tersebut diatas terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung untuk Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 1.117.675.602.945,00 (Satu Triliun Seratus Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Lima Juta Enam Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.035.577.164.814,80 (Satu Triliun Tiga Puluh Lima Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah Delapan Puluh Sen) atau 92,65%. Adapun Belanja Daerah yang diuraikan sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Pada Tahun 2018, belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp. 431.017.542.585,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Tujuh Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 413.322.488.370,00 (Empat Ratus Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Dua



Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah) yang terdiri dari :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 408.684.550.395,00 (Empat Ratus Delapan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dan terealisasi Rp 395.876.080.416,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah) atau terealisasi 96,87%.

2) Belanja Subsidi

Pada tahun 2018 tidak terdapat belanja subsidi.

3) Belanja Hibah

Pada tahun 2018 belanja hibah dianggarkan sebesar Rp. 15.739.710.940,00 (Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 15.031.208.840,00 (Lima Belas Miliar Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah) atau sebesar 95,50%.

Daftar Penerima Hibah Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini :

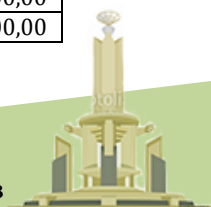
Tabel 3.3

Daftar Penerima Hibah
Tahun Anggaran 2018

No.	Nama Bantuan	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi		7.082.950.000,00	7.047.475.000,00
1	Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Banjarbaru	6.374.750.000,00	6.339.275.000,00
2	Gerakan Pramuka Kwarcab Kota Banjarbaru	308.200.000,00	308.200.000,00
3	Palang Merah Indonesia Kota Banjarbaru	150.000.000,00	150.000.000,00
4	Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarbaru	150.000.000,00	150.000.000,00
5	Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarbaru	100.000.000,00	100.000.000,00
Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat		3.204.334.040,00	3.154.333.840,00
1	National Paralympic Committee Kota Banjarbaru	650.000.000,00	650.000.000,00
2	Yayasan Ikhwanul Muslimin Jalan Jintan Nomor 5 Kelurahan Komet Banjarbaru	101.658.300,00	101.658.300,00
3	Mesjid Hajjah Ratna Assyuhada Jalan Haruan Komplek Ratu Elok Kelurahan Sungai Besar Banjarbaru	263.563.300,00	263.563.300,00
4	Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Banjarbaru Jalan Beringin Nomor 1 Kota Banjarbaru	50.000.000,00	50.000.000,00
5	Mesjid Raudhatul Jannah Jalan Permata	49.912.500,00	49.912.500,00



No.	Nama Bantuan	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)
	Komplek BPI Kelurahan Sungai Ulin Banjarbaru		
6	Gereja Kalimantan Evangelis Jalan Rambai nomor 12 Kelurahan Guntung Paikat Banjarbaru	30.006.000,00	30.006.000,00
7	Yayasan Walisongo Jalan Gutung manggis RT.19 RW 003 Banjarbaru	49.000.000,00	49.000.000,00
8	Sekolah Raudhatul Athfal Irsyadul Aulad Jalan Mistarcokrokusumo RT.12 RW.04 Kelurahan Bangkal Kota Banjarbaru	19.191.000,00	19.191.000,00
9	Pondok Pesantren Mishbahul Munir Kelurahan Landasan Ulin Utara Kota Banjarbaru	49.966.000,00	49.966.000,00
10	Mesjid Assalam Jl. Golf Swargaloka RT.12 Kelurahan Syamsudin Noor Banjarbaru	49.995.000,00	49.995.000,00
11	Pondok Pesantren Waratsatul Fuqaha Jalan Sumber Ilmu Kelurahan Kemuning Kota Banjarbaru	49.600.000,00	49.600.000,00
12	Mesjid Al Mustagfirin Jl. Batu Ampar RT.28 RW.09 Kelurahan Cempaka	49.950.000,00	49.950.000,00
13	Mesjid Al Jafri Jl. KH. Abdul Kholiq No. 42 RT. 13 Kelurahan Kemuning	43.441.000,00	43.441.000,00
14	Mesjid Darul Muttaqim Kecamatan Banjarbaru Utara	50.000.000,00	50.000.000,00
15	Mesjid An Noor Kelurahan Landaan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin	50.000.000,00	50.000.000,00
16	Mesjid Jami Al Mubaraqah Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Landasan Ulin	50.000.000,00	50.000.000,00
17	Musholla Nurul Fatah Kelurahan Campaka	52.620.200,00	52.620.000,00
18	Majelis Al Muhajirin Komp. Citra Bangun Persada Banjarbaru	114.839.000,00	114.839.000,00
19	NPC dana tali asih Peparprov 2017 Tabalong	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
20	TPA Unit 100 Assuhada Guntung Manggis	4.350.000,00	4.350.000,00
21	Musholla Nurul Hasanah	49.992.000,00	49.992.000,00
22	Mesjid An Nur Kelurahan Sungai Ulin	49.887.000,00	49.887.000,00
23	Mesjid Al Miftah Jl. Perambaian 3 Gg. Nangka RT. 30/07 Sungai Ulin	50.000.000,00	-
24	TPA Al Husna Loktabat Utara	10.000.000,00	10.000.000,00
25	Wanita Katholik DPC Bunda Maria Banjarbaru Jalan A. Yani Gg. Musafir Km. 36 Banjarbaru	2.718.750,00	2.718.750,00
26	TPA AL Istiqomah Jl Banua Praja Utara Komplek Cempaka Sari 15	23.669.000,00	23.669.000,00
27	Musholla Raudhatul Falah Kecamatan Liang Anggang	49.520.000,00	49.520.000,00
28	STAI AL Falah Prodi Pendidikan Agama Islam Jl A. Yani Landasan Ulin	49.990.000,00	49.990.000,00
29	Langgar Al Mursyidin Kelurahan Landasan Ulin Timur	33.800.000,00	33.800.000,00
30	Pondok Pesantren/Panti Asuhan Raudhatun Nasyi'en Kelurahan Sungai Besar	56.659.990,00	56.659.990,00
31	Majelis Ta'lim Anwarul Musthofa Kecamatan Liang Anggang	50.005.000,00	50.005.000,00
	Belanja Hibah BOP PAUD Masyarakat/Swasta	5.452.426.900,00	4.829.400.000,00
1	TK RIYADHUS SAADAH KOTA BANJARBARU		24.000.000,00
2	TK KEMALA BHAYANGKARI 03 KOTA BANJARBARU		73.800.000,00
3	TK AL-FALAH KOTA BANJARBARU		25.200.000,00
4	TK AMANAH KOTA BANJARBARU		60.000.000,00
5	TK PERMATA HATI KOTA BANJARBARU		10.200.000,00
6	TK BAITUL MA'MUR KOTA BANJARBARU		93.600.000,00
7	TK AL QURROTA KOTA BANJARBARU		7.800.000,00
8	TK AN NUR KOTA BANJARBARU		20.400.000,00
9	TK CITA ANAK BANGSA KOTA BANJARBARU		19.800.000,00
10	KB HANDAYANI KOTA BANJARBARU		15.000.000,00



No.	Nama Bantuan	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)
11	TPA SABILA PUTIH KOTA BANJARBARU		14.400.000,00
12	KB AL HIDAYAH KOTA BANJARBARU		19.800.000,00
13	TK BUMBLE BEE KOTA BANJARBARU		50.400.000,00
14	TK HUSNA SCHOOL KOTA BANJARBARU		30.000.000,00
15	TK NIRMALA KOTA BANJARBARU		30.000.000,00
16	TK RATU ELOK KOTA BANJARBARU		16.800.000,00
17	TK STRAWBERRY KOTA BANJARBARU		24.000.000,00
18	KB AL QURROTA KOTA BANJARBARU		9.600.000,00
19	TK MATAHARI KOTA BANJARBARU		7.200.000,00
20	TK MUSTIKA KOTA BANJARBARU		13.200.000,00
21	TK TERATAI PUTIH KOTA BANJARBARU		14.400.000,00
22	TK TRISULA KOTA BANJARBARU		25.800.000,00
23	KB SABILA KOTA BANJARBARU		14.400.000,00
24	TK ABA RAHMANIAH KOTA BANJARBARU		61.200.000,00
25	TK ANAK CERIA		13.200.000,00
26	TK. KARTIKA V-36 KOTA BANJARBARU		27.600.000,00
27	TK KEMUNING INDAH AR RAAFIU KOTA BANJARBARU		62.400.000,00
28	TK MA'RIFAH KOTA BANJARBARU		61.800.000,00
29	TK MUNING JAYA LESTARI KOTA BANJARBARU		29.400.000,00
30	PAUD TK PLN KOTA BANJARBARU		39.000.000,00
31	TK RAUDHATUL JANNAH KOTA BANJARBARU		9.000.000,00
32	TK SABILA KOTA BANJARBARU		62.400.000,00
33	KB MUSTIKA ANGKASA, JL. KOMP. MUSTIKA ANGKASA i KOTA BANJARBARU		9.600.000,00
34	KB TUNAS BANGSA, JL. AIRBUS KOMP. CITRA RAYA ANGKASA RT. 25 RW 05 KOTA BANJARBARU		13.800.000,00
35	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL GOLF, JL. GOLF SWARGALOKA RT. 12 RW. 03 KOTA BANJARBARU		67.200.000,00
36	TK NOOR AL KARAMAH		28.800.000,00
37	TK PELITA INSANI KOTA BANJARBARU		52.800.000,00
38	TK SEROJA KOTA BANJARBARU		7.200.000,00
39	TK AL FATTAH AR-RAZZAQ KOTA BANJARBARU		17.400.000,00
40	TK KARAKTER TUNAS BANGSA KOTA BANJARBARU		22.200.000,00
41	TK HUNAFAA KOTA BANJARBARU		21.600.000,00
42	TK CITRA INDONESIA KOTA BANJARBARU		52.200.000,00
43	TK BHAKTI BANGSA KOTA BANJARBARU		30.000.000,00
44	KB GEMBIRA		7.800.000,00
45	TK GEMBIRA KOTA BANJARBARU		25.200.000,00
46	TK TULIP KOTA BANJARBARU		12.600.000,00
47	TK PELITA ANGKASA KOTA BANJARBARU		16.200.000,00
48	TK ANNISA KOTA BANJARBARU		10.800.000,00
49	TKINTAN WELLA SARI KOTA BANJARBARU		27.600.000,00
50	TK CANDRA UTAMA KOTA BANJARBARU		19.800.000,00
51	TK BUKIT INDAH KOTA BANJARBARU		12.600.000,00
52	KB AMANAH KOTA BANJARBARU		9.600.000,00
53	TPA HUSNA SCHOOL KOTA BANJARBARU		7.200.000,00
54	KB MA'RIFAH ASHFIA KOTA BANJARBARU		28.800.000,00
55	TK AL HIDAYAH BANJARBARU KOTA BANJARBARU		12.600.000,00
56	TPA FANTASHA KOTA BANJARBARU		11.400.000,00
57	TK AL HUDDA KOTA BANJARBARU		7.200.000,00
58	TK MELATI KOTA BANJARBARU		27.000.000,00
59	TK KARTIKA V-4 KOTA BANJARBARU		21.600.000,00
60	TK KARTIKA V-3 KOTA BANJARBARU		64.800.000,00
61	TK AL HUSNA KOTA BANJARBARU		18.000.000,00
62	TK KANZUL KHAIRAT KOTA BANJARBARU		84.600.000,00
63	TK AL INAYAH KOTA BANJARBARU		14.400.000,00



No.	Nama Bantuan	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)
64	TK ROSELLA KOTA BANJARBARU		61.200.000,00
65	KB CITRA INDONESIA KOTA BANJARBARU		19.800.000,00
66	TK ANGGREK KOTA BANJARBARU		72.600.000,00
67	TK BINA USAHA KOTA BANJARBARU		31.200.000,00
68	KB ANAK CERIA KOTA BANJARBARU		24.600.000,00
69	TK PELITA BUNDA KOTA BANJARBARU		25.200.000,00
70	TK ANGKASA 2 KOTA BANJARBARU		28.800.000,00
71	TK GLOBAL SCHOOL KOTA BANJARBARU		9.000.000,00
72	TPA RATU ELOK KOTA BANJARBARU		8.400.000,00
73	TPA BINA PUTRA KOTA BANJARBARU		15.600.000,00
74	KB NAZWA KOTA BANJARBARU		25.800.000,00
75	TK AGRINUSA KOTA BANJARBARU		67.800.000,00
76	TK FANTASHA KOTA BANJARBARU		45.000.000,00
77	TK ANGGI KOTA BANJARBARU		10.800.000,00
78	TK MANGGIS KOTA BANJARBARU		21.000.000,00
79	TK JOYCE KOTA BANJARBARU		31.200.000,00
80	TK TRESNANIA KOTA BANJARBARU		34.200.000,00
81	TK KARTIKA V-9 KOTA BANJARBARU		36.000.000,00
82	TK NUSA INDAH KOTA BANJARBARU		36.600.000,00
83	KB TUNAS RIMBA KOTA BANJARBARU		9.000.000,00
84	TK KARYA BERSAMA KOTA BANJARBARU		33.600.000,00
85	TK SALSABILA KOTA BANJARBARU		9.000.000,00
86	TPA CITRA INDONESIA KOTA BANJARBARU		25.200.000,00
87	TK TERATAI KOTA BANJARBARU		52.200.000,00
88	TPA AMANAH BANJARBARU KOTA BANJARBARU		15.600.000,00
89	TK ANANDA KOTA BANJARBARU		8.400.000,00
90	TK ISLAM TERPADU ANAK SHOLEH KOTA BANJARBARU		80.400.000,00
91	TPA BANUA CERDAS KOTA BANJARBARU		9.000.000,00
92	TK TERATAI UNLAM KOTA BANJARBARU		13.800.000,00
93	TK AMANAH BANJARBARU KOTA BANJARBARU		10.800.000,00
94	TK MUSTIKA CEMPAKA KOTA BANJARBARU		25.200.000,00
95	TK BUDI MULIA KOTA BANJARBARU		49.200.000,00
96	TPA GEMBIRA KOTA BANJARBARU		7.800.000,00
97	TK IT ROBBANI KOTA BANJARBARU		26.400.000,00
98	TK TUNAS RIMBA KOTA BANJARBARU		54.000.000,00
99	TPA BUMBLE BEE KOTA BANJARBARU		18.600.000,00
100	TK NURUL IMAN KOTA BANJARBARU		53.400.000,00
101	TK TUNAS BANGSA KOTA BANJARBARU		67.200.000,00
102	KB KANZUL KHAIRAT KOTA BANJARBARU		13.800.000,00
103	TK RAHMATUL MUARIFIN WASAIDIN KOTA BANJARBARU		63.600.000,00
104	TK SWADAYA KOTA BANJARBARU		36.000.000,00
105	KB HUSNA SCHOOL KOTA BANJARBARU		7.800.000,00
106	TK AR RAUDAH KOTA BANJARBARU		38.400.000,00
107	KB NUSANTARA KOTA BANJARBARU		8.400.000,00
108	TKBANUA CERDAS KOTA BANJARBARU		10.200.000,00
109	KB HUMAIRA KOTA BANJARBARU		9.000.000,00
110	TK HUMAIRA KOTA BANJARBARU		26.400.000,00
111	TK SHAHIBUL ANSHAR KOTA BANJARBARU		51.600.000,00
112	TK AN-NUUR KOTA BANJARBARU		9.000.000,00
113	TPA AMALIA KOTA BANJARBARU		34.800.000,00
114	TK AMALIA KOTA BANJARBARU		25.800.000,00
115	KB AS-SHIDDIQI KOTA BANJARBARU		9.000.000,00
116	TPA MARIFAH ASHFIA KOTA BANJARBARU		12.600.000,00
117	KB PELITA ANGKASA KOTA BANJARBARU		8.400.000,00
118	TK PERMATA KELUARGA KOTA BANJARBARU		33.600.000,00
119	KB KARAKTER TUNAS BANGSA KOTA BANJARBARU		7.200.000,00
120	TK SWAKARSA KOTA BANJARBARU		16.800.000,00



No.	Nama Bantuan	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)
121	TK DELIMA TRANS CEMPAKA KOTA BANJARBARU		24.000.000,00
122	TK AL HIKMAH KOTA BANJARBARU		23.400.000,00
123	KB AISYIAH BUSTANUL ATHFAL KOTA BANJARBARU		7.800.000,00
124	TK ANTASARI KOTA BANJARBARU		15.600.000,00
125	TK AL-AMIN KOTA BANJARBARU		90.600.000,00
126	TK SANJAYA KOTA BANJARBARU		54.600.000,00
127	TK MUTIARA INTAN KOTA BANJARBARU		22.200.000,00
128	KB ROSELLA KOTA BANJARBARU		12.000.000,00
129	TK AL HIKMAH KOTA BANJARBARU		10.800.000,00
130	TK AR RAHIM KOTA BANJARBARU		9.000.000,00
131	TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL KOTA BANJARBARU		41.400.000,00
132	TK PERMATA BUNDA KOTA BANJARBARU		33.600.000,00
133	TK PUTERA 1 KOTA BANJARBARU		30.000.000,00
134	TK TBS BUDI MULIA KOTA BANJARBARU		11.400.000,00
135	KB MAWAR KOTA BANJARBARU		12.000.000,00
136	TK MAWAR KOTA BANJARBARU		13.200.000,00
137	TK BINA PUTRA KOTA BANJARBARU		32.400.000,00
138	KB USHULUDDIN KOTA BANJARBARU		10.200.000,00
139	TK ULIN PERMAI KOTA BANJARBARU		33.000.000,00
140	TK MAZRAATUL AKHIRAH KOTA BANJARBARU		31.800.000,00
141	TK NURUL HASANAH KOTA BANJARBARU		69.000.000,00
142	TK NUSANTARA KOTA BANJARBARU		36.600.000,00
143	KB JOYCE KOTA BANJARBARU		9.000.000,00
144	TPA MUTIARA KOTA BANJARBARU		11.400.000,00
145	TK NURUL HIKMAH KOTA BANJARBARU		40.200.000,00
146	TK-AS SHIDDIQI KOTA BANJARBARU		12.000.000,00
147	TK ABA SUNGAI BESAR KOTA BANJARBARU		25.200.000,00
148	KB NURUL HASANAH KOTA BANJARBARU		9.000.000,00
149	KB NURUL HASANAH KOTA BANJARBARU		12.000.000,00
150	KB HUNAFAR KOTA BANJARBARU		7.200.000,00
151	KB RIYADHUS SA'ADAH KOTA BANJARBARU		12.000.000,00
152	TK YASIN KOTA BANJARBARU		40.200.000,00
153	KB SANDHY PUTRA KOTA BANJARBARU		13.200.000,00
154	TK SANDHY PUTRA KOTA BANJARBARU		56.400.000,00
155	KB PLUS CITRA MADINATUL ILMI KOTA BANJARBARU		9.000.000,00
156	TK PLUS CITRA MADINATUL ILMI KOTA BANJARBARU		16.200.000,00
157	TK A BA TA PRESCHOOL KOTA BANJARBARU		10.800.000,00
158	SPS CEMPAKA PUTIH KOTA BANJARBARU		14.400.000,00
159	KB QURROTA A YUN KOTA BANJARBARU		13.800.000,00
160	TK INSAN UTAMA KOTA BANJARBARU		12.000.000,00
161	TK CITRA TUNAS BANGSA KOTA BANJARBARU		51.600.000,00
162	TK SULLAMURRIDWAN KOTA BANJARBARU		14.400.000,00
163	TK KARTIKA V-37 KOTA BANJARBARU		27.000.000,00
164	TK SYABILAL RASYAD KOTA BANJARBARU		27.000.000,00
165	TK HARAPAN MULYA KOTA BANJARBARU		63.600.000,00
166	TK KENANGA KOTA BANJARBARU		21.000.000,00
167	KB AKHLAK MULIA KOTA BANJARBARU		13.800.000,00
168	TK MATAHARIKU KOTA BANJARBARU		30.600.000,00
169	TK ANGKASA I KOTA BANJARBARU		66.600.000,00
170	KB AR-RAHMAN KOTA BANJARBARU		24.600.000,00
171	TK MUSTIKA ANGKASA KOTA BANJARBARU		16.200.000,00
172	TK MUFAKAT KOTA BANJARBARU		22.800.000,00
173	TK KARTINI KOTA BANJARBARU		36.000.000,00
174	TK TUNAS HARAPAN KOTA BANJARBARU		33.600.000,00
175	TK KEMALA BHAYANGKARI 02 KOTA BANJARBARU		36.000.000,00



No.	Nama Bantuan	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)
176	TK MUTIARA BANGSA KOTA BANJARBARU		30.000.000,00
177	KB BUMBLE BEE KOTA BANJARBARU		21.600.000,00

Sumber: BPKAD Kota Banjarbaru Tahun 2018

4) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 1.747.281.250,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.321.980.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 75,66%.

5) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa yang pada tahun 2018 dianggarkan untuk belanja bantuan kepada Partai Politik yaitu sebesar Rp. 1.046.000.000,00 (Satu Miliar Empat Puluh Enam Juta Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.045.457.922,00 (Satu Miliar Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 99,95%.

6) Belanja Tidak Terduga

Pada tahun 2018 belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp. 3.800.000.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 47.761.192,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 1,26%.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 686.658.060.360,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 622.254.676.444,80 (Enam Ratus Dua Puluh Dua Miliar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah Delapan Puluh Sen) atau sebesar 90,62%. Penghematan atas seluruh belanja langsung yang terjadi sebesar Rp. 64.403.383.915,20 (Enam Puluh Empat Miliar Empat Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah Dua Puluh Sen). Belanja Langsung terdiri dari:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 38.274.045.000,00 (Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Puluh Lima



Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 36.218.195.406,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Dua Ratus Delapan Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Rupiah) atau sebesar 94,63%, sehingga terdapat penghematan belanja pegawai sebesar Rp. 2.055.849.594,00 (Dua Miliar Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).

2) Belanja Barang dan Jasa

Pada tahun 2018, Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 329.157.568.423,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 304.609.024.487,99 (Tiga Ratus Empat Miliar Enam Ratus Sembilan Juta Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah Sembilan Puluh Sembilan Sen) atau sebesar 92,54%, sehingga terdapat penghematan atau efisiensi atas belanja barang dan jasa sebesar Rp. 24.548.543.935,01 (Dua Puluh Empat Miliar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah Nol Satu Sen).

3) Belanja Modal

Belanja Modal pada tahun 2018, dianggarkan sebesar Rp. 319.226.446.937,00 (Tiga Ratus Sembilan Belas Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 281.427.456.550,81 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah Delapan Puluh Satu Sen) atau sebesar 88,16%. Terjadi efisiensi belanja modal sebesar Rp. 37.798.990.386,19 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah Sembilan Belas Sen).

3. Permasalahan dan Solusi

a. Perencanaan Penganggaran

Permasalahan:

Untuk menyusun perencanaan anggaran yang baik merupakan hal cukup sulit. Perencanaan anggaran yang baik dapat dilihat dari capaian output dan outcomes atas kegiatan tersebut. Kurang cermatnya perencanaan anggaran sehingga tertinggalnya item yang diperlukan dapat berakibat pada tidak tercapainya output dan outcomes sebagaimana yang telah dirumuskan. Selain itu, ketepatan penempatan rekening



belanja juga merupakan salah satu indikator kesempurnaan perencanaan anggaran. Meskipun output dan outcomes dapat dicapai, namun penggunaan rekening belanja dalam DPA SKPD tidak tepat, maka hal ini akan menjadi masalah.

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) belum sepenuhnya disusun dengan sempurna. RKBMD dan RKPBMMD tersebut seharusnya merupakan dasar untuk penyusunan perencanaan anggaran atas pengadaan barang dan pemeliharaan barang yang menunjang administrasi perkantoran.

Solusi:

Penyebarluasan informasi atas peruntukan sebuah rekening belanja kiranya sudah sering dilaksanakan. Hal tersebut tidak akan membuahkan hasil yang baik jika tidak didukung dengan upaya-upaya dari SKPD dalam mencermati setiap item pada proses perencanaan anggaran. Oleh karena itu, diharapkan masing-masing SKPD dapat mencermati lagi dengan lebih teliti terhadap item-item pada proses perencanaan penganggaran. Pihak SKPD juga diharapkan dapat mengupayakan penyusunan RKBMD dan RKPBMMD dengan lebih cermat lagi.

Penyusunan dan penggunaan Analisis Standar Belanja (ASB) diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan anggaran ke arah yang lebih baik. Melalui penerapan Analisis Standar Belanja, SKPD dapat mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan sebuah kegiatan.

b. Perbendaharaan

Permasalahan:

Unsur-unsur dalam perbendaharaan masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh SKPD. Hal tersebut mengakibatkan pengendalian atau kontrol atas pengelolaan keuangan menjadi terlihat lemah. Unsur-unsur tersebut diantaranya seperti pemeriksaan kas, penutupan kas dan rekonsiliasi penerimaan uang pada Bendahara Pengeluaran.

Solusi:

Penyebarluasan informasi dan dukungan pelaksanaan dari SKPD terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam perbendaharaan akan lebih ditingkatkan lagi.



c. Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Permasalahan:

Kekurangan volume dalam pekerjaan fisik khususnya konstruksi masih selalu ditemui setiap tahun. Meskipun dengan pengembalian belanja dapat menjadikan masalah kekurangan volume tersebut menjadi selesai.

Solusi :

Pelaksana pekerjaan diharapkan agar bekerja dengan lebih cermat dan lebih teliti lagi dalam melaksanakan pekerjaan fisik khususnya konstruksi. Selain itu, pejabat yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut diminta untuk lebih cermat dan lebih teliti lagi.

Permasalahan :

Pengakuan dan penyajian dalam laporan SKPD atas belanja yang telah terealisasi masih belum sepenuhnya terlaksana dengan sempurna, hal ini umumnya terjadi karena kesalahan penggunaan rekening anggaran belanja atau terdapat realisasi belanja dengan karakter tidak seperti biasa. Atas belanja-belanja tersebut perlu pengakuan yang tepat menurut tata cara pelaporan serta akuntansinya.

Solusi :

Atas permasalahan tersebut, dapat diambil langkah-langkah untuk mengatasinya yaitu dengan melaksanakan rekonsiliasi, menyesuaikan pengakuannya melalui jurnal penyesuaian maupun melalui jurnal koreksi. Selain itu, pihak SKPD diminta agar dapat meningkatkan pengetahuan dalam hal pelaporan dan akuntansi.

BAB IV.

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. URUSAN PENDIDIKAN (DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU)

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini
 - a) Pembangunan Gedung Sekolah
 - b) Penambahan Ruang Kelas Sekolah
 - c) Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
 - d) Pengadaan Mebeluer Sekolah
 - e) Pengadaan Perlengkapan Sekolah
 - f) Rehabilitasi Sedang/berat Sarana Air Bersih dan Sanitary
 - g) Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
 - h) Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
 - i) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
 - j) Biaya Operasional Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik)
- 2) Program Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
 - a) Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
 - b) Penyelenggaraan Paket A Setara SD
 - c) Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
 - d) Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary Bina SD
 - e) Rehab Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Bina SD
 - f) Pembangunan Gedung Sekolah Bina SD
 - g) Pembangunan Gedung Sekolah Bina SMP
 - h) Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa Bina SD
 - i) Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa Bina SMP
 - j) Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Bina SD
 - k) Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Bina SMP
 - l) Penyelenggaraan Siswa Baru dan Ujian Bina SD
 - m) Penyelenggaraan Siswa Baru dan Ujian Bina SMP
 - n) Pengadaan Mebeleur Sekolah Bina SD
 - o) Pengadaan Perlengkapan Sekolah Bina SMP



- p) Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Bina SD
- q) Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP/MTs Bina SMP
- r) Pembangunan Ruang Kelas Sekolah Bina SD
- s) Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Bina SD
- t) Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Bina SMP
- u) Pelatihan Penyusunan Kurikulum Bina SD
- v) Pelatihan Penyusunan Kurikulum Bina SMP
- w) Rehabilitasi Sedang/berat Sarana Air Bersih dan Sanitary Bina SMP
- x) Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI (DAK)
- y) Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SMP/MTs (DAK)
- z) Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah Bina SMP
- aa) Rehabilitasi Sedang/berat Perpustakaan Sekolah Bina SD
- bb) Rehabilitasi Sedang/berat Perpustakaan Sekolah Bina SMP
- cc) Pengadaan Meubeler Sekolah Bina SMP
- dd) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler SD
- ee) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler SMP
- ff) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Sekolah Bina SD
- gg) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Sekolah Bina SMP
- hh) Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Serbaguna/Aula Bina SMP
- ii) Pembangunan Ruang Ibadah Bina SD
- 3) Program Pendidikan Non Formal
 - a) Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal
 - b) Pembinaan Pendidikan, Kursus dan Kelembagaan
 - c) Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
 - d) Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal
 - e) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - f) Penyelenggaraan Paket C setara SMU
- 4) Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan
 - a) Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - b) Peningkatan Kesejahteraan PTKBina PAUD Dikmas
 - c) Peningkatan Kesejahteraan PTKBina SD
 - d) Peningkatan Kesejahteraan PTKBina SMP



5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

- a) Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
- b) Pembinaan Dewan Pendidikan
- c) Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan
- d) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- e) Penyusunan Data Pokok Sekolah
- f) Penyelenggaraan Lomba/ Pemilihan PTK Berprestasi
- g) Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan
- h) Pengembangan Sekolah Berbasis Karakter Bina SD
- i) Pengembangan Sekolah Berbasis Karakter Bina SMP

b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat pencapaian kegiatan dari program-program Penyelenggaraan Urusan Pendidikan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, yaitu :

- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), terdiri dari 10 kegiatan dan 1 indikator kinerja.

Indikator kinerja dari Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yaitu :

- a) Persentase APK PAUD Tahun 2018 ditargetkan sebesar 65,10% dan terealisasi sebesar 72,77%.

Kegiatan-kegiatan dari Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yaitu :

- a) Pembangunan Gedung Sekolah dengan realisasi anggaran 93,47% dengan capaian kinerja sebesar 86,98%
- b) Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah dengan realisasi anggaran sebesar 98,41% dengan capaian kinerja sebesar 100%,
- c) Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir dengan realisasi anggaran 98,06% dengan capaian kinerja sebesar 100%,
- d) Kegiatan Pengadaan Mebeluer Sekolah dengan realisasi anggaran sebesar 98,06% dengan capaian kinerja sebesar 100%,
- e) Pengadaan Perlengkapan Sekolah dengan realisasi anggaran sebesar 99,65% dengan capaian kinerja sebesar 100%,
- f) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary dengan realisasi anggaran sebesar 92,45% dengan capaian kinerja sebesar 100%
- g) Kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik dengan realisasi anggaran sebesar 89,95% dengan capaian kinerja sebesar 99,59%,



- h) Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dengan realisasi anggaran sebesar 86,54% dengan capaian kinerja sebesar 99,19%,
- i) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan realisasi anggaran sebesar 91,85% dengan capaian kinerja sebesar 70,99%,
- j) Kegiatan Penyediaan Dana Pengelolaan PAUD (DAK) dengan realisasi anggaran sebesar 61,87% dengan capaian kinerja sebesar 100%, dan
- k) Kegiatan Biaya Operasional Sekolah Pendidikan Anak Usia (DAK Non Fisik) dengan realisasi anggaran sebesar 98,90% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Sedangkan indikator kinerja dari Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yaitu :

- b) Persentase APK PAUD Tahun 2018 ditargetkan sebesar 65,10% dan terealisasi sebesar 72,77%.
- 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, terdiri dari 35 kegiatan dan 21 indikator kinerja.

Indikator kinerja dari Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, yaitu:

- a) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD ditargetkan 65,10% dan terealisasi 72,77%,
- b) Angka Partisipasi Kasar (APK) Untuk Jenjang SD/MI/Paket A ditargetkan 113,35% terealisasi 112,76%,
- c) Angka Partisipasi Kasar (APK) Untuk Jenjang SMP/MTs/Paket B ditargetkan 98% terealisasi 99,43%,
- d) Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SD/MI/Paket A ditargetkan 95,56% dan terealisasi 98,56%,
- e) Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMP/MTs/Paket B ditargetkan 82% dan terealisasi 78,81%,
- f) Angka Rata-Rata Lama Sekolah ditargetkan 10,76% terealisasi 10,76%,
- g) Angka Harapan Lama Sekolah ditargetkan 14,91% terealisasi 14,78%,
- h) Persentase Satuan SD Yang Terakreditasi ditargetkan 97,47% terealisasi 81,61%,
- i) Persentase Satuan SMP Yang Terakreditasi ditargetkan 100% terealisasi 100%,
- j) Persentase Sekolah Hijau SD (Adiwiyata) ditargetkan 87,34% terealisasi 79,31%,
- k) Persentase Sekolah Hijau SMP (Adiwiyata) ditargetkan 63,64% terealisasi 92%,
- l) Persentase Indikator SPM SD ditargetkan 95% terealisasi 92,48%,
- m) Persentase Indikator SPM SMP ditargetkan 95% terealisasi 96,63%,
- n) Persentase Satuan Pendidikan/SD Yang Sudah Melaksanakan Kurikulum Pendidikan Karakter ditargetkan 12,66% terealisasi 21,42%,
- o) Persentase Satuan Pendidikan/SMP Yang Sudah Melaksanakan Kurikulum Pendidikan Karakter ditargetkan 31,28% terealisasi 42,86%,



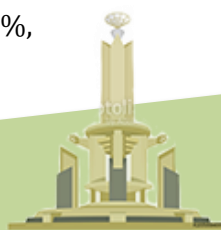
- p) Angka Putus Sekolah SD ditargetkan 0,01 dan terealisasi 0,00%,(tidak ada yang putus sekolah)
- q) Angka Putus Sekolah SMP ditargetkan 0,01 (tidak ada yang putus sekolah) dan terealisasi 0,00%,
- r) Angka Kelulusan SD ditargetkan 100% terealisasi 100%,
- s) Angka Kelulusan SMP ditargetkan 100% dan terealisasi 100%,
- t) Angka Melanjutkan Siswa SD ditargetkan 99,22% terealisasi 113,28%, dan
- u) Angka Melanjutkan Siswa SMP ditargetkan 100% terealisasi 100%.

Kegiatan-kegiatan dari Program Wajib Belajar Sembilan Tahun, yaitu :

- a) Kegiatan Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir dengan realisasi anggaran sebesar 98,23% dengan capaian kinerja sebesar 100%,
- b) Rehabilitasi sedang/berat Sarana Air Bersih dan Sanitary Bina SMP dengan realisasi anggaran sebesar 95,23% dengan capaian kinerja sebesar 100%,
- c) Kegiatan Penyelenggaraan Paket A Setara SD dengan realisasi anggaran sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%,
- d) Kegiatan Penyelenggaraan Paket B Setara SMP dengan realisasi anggaran sebesar 99,18% dengan capaian kinerja sebesar 100%,
- e) Kegiatan Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Bina Dasar dengan realisasi anggaran sebesar 72,22% dengan capaian kinerja sebesar 96,31%,
- f) Kegiatan Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Bina SMP dengan realisasi anggaran sebesar 91,90% dengan capaian kinerja sebesar 100%,
- g) Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary Bina SD dengan realisasi anggaran sebesar 98,78% dengan capaian kinerja sebesar 100%,
- h) Kegiatan Rehab Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Bina SD dengan realisasi anggaran sebesar 99,07% dengan capaian kinerja sebesar 100%,
- i) Kegiatan Rehab Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Bina SMP dengan realisasi anggaran sebesar 93,37% dengan capaian kinerja sebesar 100%,
- j) Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah Bina SD dengan realisasi anggaran sebesar 92,57% dengan capaian kinerja sebesar 100%,
- k) Kegiatan Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa Bina SD dengan realisasi anggaran sebesar 93,33% dengan capaian kinerja sebesar 90,09%,
- l) Kegiatan Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa Bina SMP dengan realisasi anggaran sebesar 71,84% dengan capaian kinerja sebesar 99,09%,
- m) Kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Bina SD dengan realisasi anggaran sebesar 56,79% dengan capaian kinerja sebesar 64,12%,



- n) Kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Bina SMP dengan realisasi anggaran sebesar 81,62% dengan capaian kinerja sebesar 100%,
- o) Kegiatan Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar Bina SD dengan realisasi anggaran sebesar 64,14% dengan capaian kinerja sebesar 87,54%,
- p) Kegiatan Penyelenggaraan Siswa Baru dan Ujian Bina SMP dengan realisasi anggaran sebesar 96,68% dengan capaian kinerja sebesar 99,59%,
- q) Kegiatan Pengadaan Mebeleur Sekolah Bina SD dengan realisasi anggaran sebesar 99,48% dengan capaian kinerja sebesar 100%,
- r) Kegiatan Pengadaan Mebeleur Sekolah Bina SMP dengan realisasi anggaran sebesar 98,29% dengan capaian kinerja sebesar 100%,
- s) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah Bina SD dengan realisasi anggaran sebesar 97,96% dengan capaian kinerja sebesar 100%,
- t) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD dengan realisasi anggaran sebesar 25,80% dengan capaian kinerja sebesar 75%,
- u) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP dengan realisasi anggaran sebesar 26,30% dengan capaian kinerja sebesar 100%,
- v) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuler Sekolah Bina SD dengan realisasi anggaran sebesar 0,63% dengan capaian kinerja sebesar,
- w) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuler Sekolah Bina SMP dengan realisasi anggaran sebesar 0% dengan capaian kinerja sebesar 0%,
- x) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Bina SMP dengan realisasi anggaran sebesar 98,41% dengan capaian kinerja sebesar 100%,
- y) Pembangunan Ruang Ibadah Bina SD dengan realisasi anggaran sebesar 86,96% dengan capaian kinerja sebesar 100%,
- z) Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Bina SD dengan realisasi anggaran sebesar 98,21% dengan capaian kinerja sebesar 97,61%,
- aa) Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP/MTs/ Bina SMP dengan realisasi anggaran sebesar 88,16% dengan capaian kinerja sebesar 85%,
- bb) Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah Bina SD dengan realisasi anggaran sebesar 94,66% dengan capaian kinerja sebesar 72,73%,
- cc) Kegiatan Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI (DAK) dengan realisasi anggaran sebesar 98,97% dengan capaian kinerja sebesar 100%,
- dd) Kegiatan Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SMP/MTs (DAK) dengan realisasi anggaran sebesar 98,61% dengan capaian kinerja sebesar 100%,



- ee) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah Bina SMP dengan realisasi anggaran sebesar 97,72% dengan capaian kinerja sebesar 100%,
 - ff) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Bina SD dengan realisasi anggaran sebesar 99,99% dengan capaian kinerja sebesar 100%,
 - gg) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Bina SMP dengan realisasi anggaran sebesar 97,68% dengan capaian kinerja sebesar 100%,
 - hh) Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Bina SD dengan realisasi anggaran sebesar 90,47% dengan capaian kinerja sebesar 88,50%,
 - ii) Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Bina SMP dengan realisasi anggaran sebesar 93,35% dengan capaian kinerja sebesar 94,57%,
- 3) Program Pendidikan Non Formal, terdiri dari 6 kegiatan dan 5 indikator kinerja.
- Indikator kinerja dari Program Pendidikan Non Formal, yaitu:
- a) Angka Melek Huruf (AMH) ditargetkan 99,55% dan terealisasi 99,57%,
 - b) Persentase Satuan PNF Yang Terakreditasi Secara Lokal ditargetkan 21,82% terealisasi 25,58%,
 - c) Angka Kelulusan Paket A ditargetkan 100% terealisasi 99,57%,
 - d) Angka Kelulusan Paket B ditargetkan 100% terealisasi 82,87%, dan
 - e) Angka Kelulusan Paket C ditargetkan 100% terealisasi 79,88%.
- Kegiatan-kegiatan dari Program Pendidikan Non Formal, yaitu : (data baru)
- a) Kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal dengan realisasi anggaran sebesar 98,89% dengan capaian kinerja sebesar 73,38%,
 - b) Kegiatan Pembinaan Pendidikan, Kursus dan Kelembagaan dengan realisasi anggaran sebesar 91,89% dengan capaian kinerja sebesar 61,95%,
 - c) Kegiatan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan dengan realisasi anggaran sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%,
 - d) Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal dengan realisasi anggaran sebesar 91,01% dengan capaian kinerja sebesar 87,07%, dan
 - e) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan realisasi anggaran sebesar 97,50% dengan capaian kinerja sebesar 80%
 - f) Penyelenggaraan Paket C setara SMU dengan realisasi anggaran sebesar 99,64% dengan capaian kinerja sebesar 95,90%.
- 4) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari 4 kegiatan dan 3 indikator kinerja.
- Indikator kinerja dari Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yaitu :



- a) Meningkatnya Jumlah PTK yang mengikuti PAUD ditargetkan 71,50% terealisasi 75,13%,
- b) Meningkatnya Jumlah PTK yang mengikuti SD ditargetkan 71,00% terealisasi 58,01%, dan
- c) Meningkatnya Jumlah PTK yang mengikuti SMP ditargetkan 71,50% terealisasi 30,39%.

Kegiatan dari program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yaitu :

- a) Kegiatan Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan realisasi anggaran sebesar 46,17% dengan capaian kinerja sebesar 93,45%.
 - b) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan PTK Bina PAUD dan Dikmas dengan realisasi anggaran sebesar 96,80% dengan capaian kinerja sebesar 96,84%.
 - c) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan PTK Bina SD dengan realisasi anggaran sebesar 93,87% dengan capaian kinerja sebesar 52,43%.
 - d) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan PTK Bina SMP dengan realisasi anggaran sebesar 90,86% dengan capaian kinerja sebesar 84,16%.
- 5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, terdiri dari 9 kegiatan dan 4 indikator kinerja.

Indikator kinerja dari Program Manajemen Pelayanan Mutu, yaitu :

- a) Persentase Temuan BPK/Inspektorat Yang Ditindaklanjuti ditargetkan dengan capaian 100% dan terealisasi 100%,
- b) Indeks Kepuasan Pelayanan Internal mendapatkan Opini “Baik” dan terealisasi “Baik”,
- c) Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti ditargetkan 100% dan terealisasi 100%.
- d) Nilai Evaluasi AKIP ditargetkan dengan nilai A dan terealisasi B

Kegiatan-kegiatan dari Program Manajemen Pelayanan Mutu, yaitu :

- a) Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan dengan realisasi anggaran sebesar 64,12% dengan capaian kinerja sebesar 79,34%,
- b) Kegiatan Pembinaan Dewan Pendidikan dengan realisasi anggaran sebesar 73,68% dengan capaian kinerja sebesar 25,92%,
- c) Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan dengan realisasi anggaran sebesar 91,42% dengan capaian kinerja sebesar 100%,



- d) Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan dengan realisasi anggaran sebesar 77,04% dengan capaian kinerja sebesar 100%,
- e) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan realisasi anggaran sebesar 72,97% dengan capaian kinerja sebesar 80%, dan
- f) Kegiatan Penyusunan Data Pokok Sekolah dengan realisasi anggaran sebesar 96,29% dengan capaian kinerja sebesar 93,00%.
- g) Kegiatan Penyelenggara Lomba/Pemilihan PTK Beprestasi dengan realisasi anggaran sebesar 85,31% dengan capaian kinerja sebesar 93,49%.
- h) Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah tentang Isu Pendidikan Bina SD dengan realisasi anggaran sebesar 77,91% dengan capaian kinerja sebesar 92,56%.
- i) Kegiatan Pengembangan Sekolah Berbasis Karakter Bina SD dengan realisasi anggaran sebesar 86,87% dengan capaian kinerja sebesar 80,62%.
- j) Kegiatan Pengembangan Sekolah Berbasis Karakter Bina SMP dengan realisasi anggaran sebesar 86,82% dengan capaian kinerja sebesar 68,84%.

Disamping capaian yang diuraikan sebelumnya, penyelenggaraan urusan pendidikan selama tahun 2018 telah meraih prestasi atau penghargaan berupa Adiwiyata Tahun 2018 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Penghargaan Adiwiyata masing-masing 5 penghargaan Adiwiyata Nasional yaitu SDN 3 Palam, SDN 3 Sungai Besar, SDN 3 Syamsudin Noor, SDN 5 Loktabat Utara, SDN 1 Guntung Paikat dan 10 Penghargaan Adiwiyata Mandiri, yaitu SDN 1 Palam, SDN 4 Loktabat Utara, SDN 1 Guntung Payung, SDN 1 LU Barat, SDN 1 Mentaos, SDN 3 Komet, SDN 4 Komet, SDN 4 Sungai Besar, SDN 2 Komet, SMPN 2 Banjarbaru.



Adapun realisasi dari rekomendasi DPRD Kota Banjarbaru terhadap LKPJ Tahun 2017 dalam hal ini terkait Urusan Pendidikan (Dinas Pendidikan), yaitu :

Tabel 4.1

**Tanggapan Rekomendasi LKPJ Walikota Banjarbaru
Tahun 2017 Bidang Pendidikan**

ASPEK / BIDANG	INVENTARIS PERMASALAHAN	TANGGAPAN
Urusan Pendidikan	Tingkat Pencapaian kinerja program PAUD dengan indikator prosentase APK PAUD formal tahun 2017 terealisasi 55,81% atau tercapai melebihi target yaitu 55,72%	Banyaknya jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang PAUD yang berusia dibawah usia sekolah dan juga siswa yang masuk dari luar daerah, ataupun memang terlambat masuk ke jenjang PAUD.
	Tingkat pencapaian kinerja program wajib belajar 9 tahun dengan indikator prosentase APK untuk jenjang SMP dilaporkan tercapai 113,1% atau melebihi yang ditargetkan yaitu 97%	Masih adanya siswa yang bersekolah tidak sesuai usia SMP 13-15 tahun yang mungkin dikarenakan adanya siswa yang tidak naik kelas, siswa pindahan dari luar daerah, ataupun memang terlambat masuk ke jenjang SMP
	Demikian juga jika dilihat dari realisasi kinerja kegiatan dari 60 kegiatan yang dilaksanakan hampir semuanya mencapai 100% hanya ada 3 kegiatan yg kinerjanya masih kurang yaitu :	
	1. Pada kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan bina SD dengan capaian 50%	Kegiatan Monev dan Pelaporan terserap hanya sekitar 58,96 % dikarenakan kegiatan Sosialisasi juknis BOS tidak dilaksanakan, yang disebabkan Juknis BOS Tahun 2018 belum terbit dari Kemendikbud. Untuk Biaya perjalanan Dinas dalam daerah juga tidak terlaksana karena dana BOS lambat dalam pencairan.
	2. Pada kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan bina SMP dengan capaian 75%	Untuk meningkatkan pencapaian kinerja tersebut ditahun mendatang Dinas Pendidikan akan mengajukan permohonan kepada Kemdikbud untuk mempercepat



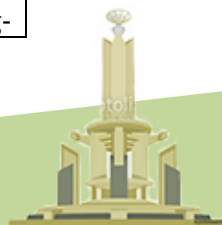
ASPEK / BIDANG	INVENTARIS PERMASALAHAN	TANGGAPAN
		penerbitan Juknis dan pencairan BOSREG.
	3. Pada kegiatan dana pengembangan sekolah untuk SMP/MTs (DAK) dengan capaian 77,78%	<p>1. Saat ini SDN di Kota Banjarbaru memang kekurangan ruang belajar sejumlah 36 ruang, yang sebagian besar dipenuhi dengan memakai ruang lain dan pada Tahun 2018 dianggarkan lanjutan pembangunan ruang kelas baru sebanyak 6 paket. Demikian juga dengan mebeler peserta didik dengan jumlah 693 set dan untuk Tahun 2018 dianggarkan perbaikan mebeler sebanyak 1.300 set. Kondisi tersebut terlihat dari pendataan Sarana dan Prasarana untuk SDN seKota Banjarbaru antara Dinas Pendidikan dengan SMKN 2 Banjarbaru dalam program Takola (Tata Kelola). Untuk tahun yang akan datang Dinas Pendidikan akan mereview data sarana dan prasarana secara berkala. Selanjutnya Dinas Pendidikan akan mengusulkan sarana dan prasarana, dan mohon dukungan kepada DPRD Kota Banjarbaru dalam pemenuhan anggaran tersebut.</p> <p>2) SMPN di Kota Banjarbaru ada sebanyak 14 Sekolah, dari 14 sekolah tersebut ada beberapa sekolah kekurangan RKB sebanyak 9 RKB. Untuk menutupi kekurangan RKB tersebut Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru mengajukan beberapa usulan ke pemerintah pusat lewat Kementerian Pendidikan untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan RKB tersebut baik lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) dan BANTAH (Bantuan Pemerintah). Pada tahun 2018 lewat BANTAH mendapatkan 5 RKB (1 lantai) dan 4 RKB (2 lantai), Laboratorium IPA dan rehab seluruh ruang pada</p>



ASPEK / BIDANG	INVENTARIS PERMASALAHAN	TANGGAPAN
		sekolahan yang mendapatkan BANTAH (ada 4 sekolah).
		3. Untuk usulan DAK tahun 2019 sudah diinput pada tahun 2018 ini dimana usulan berupa rehab, ruang kelas, rehab perpustakaan, rehab laboratorium, rehab ruang kantor, rehab ruang guru, rehab jamban, pembangunan Perpustakaan, RKB, dan peralatan komputer. DAPODIK sekolah sangatlah berpengaruh dalam pengusulan DAK tersebut, untuk itu Dinas Pendidikan melalui Bidang PSMP terus menyampaikan ke sekolah untuk proaktif menyesuaikan pengisian DAPODIK sesuai realitas di sekolah masing-masing khususnya untuk Sarana dan Prasarana.
		4. Pada pelaksanaan UNBK Tahun Ajaran 2017/2018 untuk jenjang SMP sekota Banjarbaru sarana dan prasarana berupa komputer sebanyak 603 unit yang dapat dipergunakan dalam 3 sesi ujian per hari dan untuk kekurangannya menumpang pada SMA/SMK yang ada di Banjarbaru.
		5. Pada Tahun Ajaran 2018/2019 data jumlah siswa yang mengikuti pelaksanaan UNBK sekitar 3095 siswa sedangkan ketersediaan komputer saat ini hanya 603 unit. Kalau pelaksanaan UNBK hanya 1(satu) sesi maka masih kekurangan komputer sekitar 2.492 unit dan Server 140 unit. Anggaran yang diperlukan untuk komputer 2.492 unit dan 140 server sekitar Rp. 23.719.000.000,-. Kendala apabila jumlah komputer tersebut bisa



ASPEK / BIDANG	INVENTARIS PERMASALAHAN	TANGGAPAN
		dipenuhi adalah ketersediaan ruangan untuk meletakkannya dan memerlukan listrik yang cukup besar.
		6. Tahun Anggaran 2018 Dinas Pendidikan melalui Bidang PSMP telah menganggarkan perbaikan meja dan kursi sebanyak 480 set.
	Seperti yang disampaikan oleh sebagian besar Kepala Sekolah pada saat hearing dengan DPRD berkaitan dengan persiapan UNBK yang juga menginformasikan masih mengalami kendala kekurangan komputer, genset dan sebagainya	1. Pelaksanaan UNBK 100% tingkat SMP tahun pelajaran 2017/2018 Kuota Banjarbaru sudah terlaksana dengan menggunakan 3 shift atau 3 sesi walaupun beberapa sekolah masih menggabung ke SMA dan SMK yang ada di Kota Banjarbaru dan ini sudah sesuai dengan POS USBN dan UNBK dari Puspendik dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan mengharuskan pelaksanaan UNBK di semua Sekolah jenjang SMP
		2. Berdasarkan data jumlah siswa kelas 8 saat ini yang nantinya akan melaksanakan UNBK pada Tahun Ajaran 2018/2019 adalah berjumlah 3095 Siswa sedangkan saat ini ketersediaan komputer yang dimiliki di seluruh sekolah yang bisa digunakan untuk pelaksanaan UNBK berjumlah 603 Unit. Kalau pelaksanaan UNBK dilaksanakan di semua SMP dan hanya satu sesi maka kebutuhan komputer yang harus dipenuhi adalah sebesar 2593 unit.
		3. Pada Tahun Ajaran 2018/2019 nanti berdasarkan panduan POS USBN dan UNBK dari Puspendik untuk penggandaan dan pengkoreksi soal USBN jenjang SMP harus dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan masing-



ASPEK / BIDANG	INVENTARIS PERMASALAHAN	TANGGAPAN
		<p>masing Kabupaten/Kota, saat ini Bidang SMP masih meminjam scanner milik Bidang SD untuk pengkoreksian lembar jawaban komputer (LJK) 3 mata pelajaran dengan kemampuan scanner 500 lembar perhari.</p> <p>Dengan jumlah siswa sebanyak 3.095 orang x 11 mata pelajaran maka jumlah LJK yang harus discanner adalah sebesar 34.045 lembar, maka untuk koreksi LJK akan memerlukan waktu selama 34 hari atau dengan kata lain satu bulan lebih. Demi kelancaran dan efisiensi waktu koreksi LJK kegiatan USBN maka Bidang SMP memerlukan mesin scanner LJK minimal 3 unit</p>
	<p>Hal lain yang juga masih menjadi persoalan dalam realitas penyelenggaraan pendidikan adalah berkenaan dengan jumlah guru mata pelajaran yg masih kurang, persoalan guru yg tidak memenuhi standar kompetensi, komposisi jumlah sekolah yang tidak sebanding dengan tingkat kelulusan pada setiap jenjang sekolah yang belum merata pada setiap wilayah kecamatan.</p>	<p>Berkaitan dengan kebutuhan tenaga pendidik pada semua satuan pendidikan di Kota Banjarbaru, Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru terus melakukan pemetaan kebutuhan guru. Hal tersebut sesuai dengan peraturan bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama nomor 05/x/pb/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 tahun 2011, 158/pmk.01/2011, 11 tahun 2011 tentang penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil.</p> <p>Berdasarkan pemetaan yang dilakukan tidak dipungkiri kita masih kekurangan guru pns pada jenjang sd, yaitu guru kelas 209 orang, guru pjok 49 orang dan guru pendidikan agama islam 52 orang. Kemudian untuk jenjang smp ada beberapa mata pelajaran yang masih</p>



ASPEK / BIDANG	INVENTARIS PERMASALAHAN	TANGGAPAN
		<p>kekurangan seperti guru mata pelajaran bahasa indonesia dan guru seni budaya.</p> <p>Kekurangan guru pns tersebut pada saat ini secara umum sebenarnya dapat tertutupi keberadaan guru honorer yang ada atau dengan kata lain tidak terlalu mengganggu proses pembelajaran.</p> <p>Namun demikian dinas pendidikan kota banjarbaru dalam rangka mengantisipasi kekurangan guru pns tersebut melakukan hal-hal sebagai berikut :</p>
		<p>Telah mengusulkan formasi cpns secara bertahap ke BKPP kota banjarbaru untuk pengadaan tahun 2018 sebanyak 73 orang (rincian usul formasi terlampir)</p>
		<p>Menerima usulan mutasi guru daerah lain ke pemerintah kota banjarbaru.</p> <p>Komitmen dinas pendidikan kota banjarbaru akan terus melakukan penataan dan pemerataan guru melalui distribusi guru antar satuan pendidikan.</p> <p>Dinas pendidikan kota banjarbaru juga berkomitmen dengan dukungan dprd kota banjarbaru terus meningkat kompetensi guru melalui program-program pelatihan dan peningkatan profesionalisme guru melalui program sertifikasi guru.</p> <p>Berkaitan dapodik, dinas pendidikan menyadari bahwa dapodik memegang peranan penting dalam pengelolaan pendidikan di kota banjarbaru, karena informasi yang didapat dari sumber dapodik menjadi salah satu patokan dalam menyusun program-program kependidikan, seperti :</p>



ASPEK / BIDANG	INVENTARIS PERMASALAHAN	TANGGAPAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Base data sarana prasarana 2. Base data pemberian bantuan operasional sekolah 3. Base data peserta didik, pendidik dan lain sebagainya. <p>Karena itu dinas pendidikan kota banjarbaru terus melakukan pembinaan kepada operator dapodik untuk melakukan update data secara berkala dan membekali pengetahuan dan kompetensi melalui pelatihan ataupun bimbingan teknis.</p> <p>Kemudian sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada operator dapodik dinas pendidikan kota banjarbaru memberikan insentif setiap bulannya sebesar Rp.450.000,00. Peningkatan kesejahteraan operator dapodik tersebut merupakan salah satu implementasi rekomendasi dprd kota banjarbaru terhadap LKPJ Walikota Banjarbaru tahun 2016.</p>

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Masih terdapatnya anak putus sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs, dan
- b) Penerapan Pendidikan Karakter pada Satuan-satuan Pendidikan masih rendah, dikarenakan hanya sebagian sekolah yang dibina sebagai sekolah Pilotting oleh YKPI.

2) Solusi

- 1) Terus mensosialisasikan secara konsisten tentang Program Indonesia Pintar (PIP) dari Kemdikbud RI kepada sekolah-sekolah di Kota Banjarbaru. Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (6-21 tahun) yang menerima KIP yang berasal dari keluarga miskin dan rentan. Mekanisme pendataannya melalui Dapodik



Sekolah. Salah satu tujuan program ini adalah meningkatkan Angka berkeselamatan Pendidikan yang ditandai dengan menurunnya Angka Putus Sekolah.

- 2) YKPI perlu melibatkan semua sekolah dalam Pendidikan tidak hanya sistem piloting.

2) URUSAN KESEHATAN (DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU)

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021 serta sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, pada tahun 2018 Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru melaksanakan 20 program (5 Program Rutin dan 15 Program Non Rutin) dan 62 kegiatan.

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - a) Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan,
 - b) Distribusi e-Logistik
- 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK Non Fisik).
- 3) Program Peningkatan dan Pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (UKBM)
 - a) Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat, dan
- 4) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 - a) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Status Gizi Masyarakat.
- 5) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
 - a) Kegiatan Peningkatan Penyehatan Lingkungan Air,
 - b) Kegiatan Peningkatan Penyehatan Lingkungan Pemukiman,
 - c) Kegiatan Peningkatan Penyehatan Lingkungan TTU & TPM,
- 6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
 - a) Kegiatan Peningkatan Imunisasi
 - b) Kegiatan Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
 - c) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Haji
 - d) Kegiatan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)
 - e) Kegiatan Surveilans Penyebab Kematian
- 7) Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan
 - a) Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan,
 - b) Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan, dan
 - c) Kegiatan Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik).



- 8) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
 - a) Kegiatan Pelayanan Keluarga Kurang Mampu.
- 9) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
 - a) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas.
 - b) Kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK Fisik)
 - c) Kegiatan Penilaian Kinerja Tenaga Kesehatan Puskesmas
- 10) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
 - a) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi
 - b) Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),
- 11) Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
 - a) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Bagi Tenaga Kesehatan dan Non Tenaga Kesehatan,
 - b) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan Kesehatan,
 - c) Kegiatan Penilaian Kinerja Tenaga Kesehatan Puskesmas, dan
- 12) Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
 - a) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu,
 - b) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak,
 - c) Kegiatan Peningkatan Pelayanan KB, dan
 - d) Kegiatan Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)
- 13) Program Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit
 - a) Kegiatan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang,
 - b) Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular Langsung,
 - c) Kegiatan Fasilitasi Penanggulangan AIDS
- 14) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 - 3) Kegiatan Peningkatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 - 4) Kegiatan Peningkatan/ Pencegahan Pengendalian NAPZA
 - 5) Kegiatan Peningkatan Pencegahan/ Pengendalian Kesehatan Jiwa
 - 6) Kegiatan Kesehatan Lansia
- 15) Program Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - a) Kegiatan Penyelenggaraan Kesehatan Kerja dan Olahraga



b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat pencapaian kegiatan dari program-program Penyelenggaraan Urusan Kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, yaitu :

- 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 indikator kinerja.

Indikator kinerja dari Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, yaitu :

- a) Kegiatan Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan (BAKHP) untuk penunjang kesehatan ditargetkan sebanyak 2 paket dan terealisasi sebanyak 2 paket atau sebesar 100%, dan
- b) Pengadaan Bahan Alat Habis Pakai (BAKHP) ditargetkan sebanyak 1 paket dan terealisasi sebanyak 1 paket, atau sebesar 100%.
- c) Terlaksananya Kegiatan Distribusi Obat dan e-Logistik ditargetkan sebanyak 1 paket dan terealisasi sebanyak 1 paket, atau sebesar 100%.

Kegiatan dari Program Obat dan Perbekalan Kesehatan yaitu :

- a) Kegiatan Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan dengan realisasi anggaran sebesar 89,15% dan capaian kinerja sebesar 100%.
- b) Kegiatan Distribusi e-Logistik dengan realisasi anggaran sebesar 87,85% dan capaian kinerja sebesar 100%.

Sedangkan Program Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 indikator kinerja.

Indikator kinerja dari Program Upaya Kesehatan Masyarakat, yaitu:

- a) Terlaksananya kegiatan bantuan operasional kesehatan (BOK) (DAK Non Fisik) ditargetkan 9 puskesmas dan terealisasi 9 puskesmas atau sebesar 100%.

Kegiatan-kegiatan dari Program Upaya Kesehatan Masyarakat yaitu :

- a) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK Non Fisik) dengan realisasi anggaran sebesar 81,87%.

- 2) Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari 1 kegiatan dan 13 indikator kinerja.

Indikator kinerja dari Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat, yaitu :

- a) Pertemuan Pengelola Program Promkes dan UKS ditargetkan sebanyak 2 kali dan terealisasi sebanyak 2 kali atau sebesar 100%,
- b) Pertemuan Evaluasi Program Promkes dan UKS ditargetkan sebanyak 1 kali dan terealisasi sebanyak 1 kali atau sebesar 100%,
- c) Survei dan Pemetaan PHBS ditargetkan sebanyak 1 kali dan terealisasi sebanyak 1 kali atau sebesar 100%,



- d) Sosialisasi Penerapan Phbs Pada Tatanan Rumah Tangga, Instansi Kesehatan, Tempat Umum Dan Tempat Kerja ditargetkan sebanyak 1 kali dan terealisasi sebanyak 1 kali atau sebesar 100%,
- e) Sosialisasi Penerapan PHBS Sekolah (Workshop Uks, Pertemuan Uks, Peringatan Cuci Tangan Pakai Sabun) ditargetkan sebanyak 1 kali dan terealisasi sebanyak 1 kali atau sebesar 100%,
- f) Mengikuti Pameran ditargetkan sebanyak 2 kali dan terealisasi sebanyak 2 kali atau sebesar 100%,
- g) Rapat Pembinaan UKS Dalam Rangka Lomba Tingkat Provinsi ditargetkan sebanyak 2 kali dan terealisasi sebanyak 2 kali atau sebesar 100%,
- h) Penyuluhan Di Sekolah ditargetkan sebanyak 10 kali dan terealisasi sebanyak 10 kali atau sebesar 100%,
- i) Rapat Pembinaan Posyandu, Kader dan PHBS ditargetkan sebanyak 2 kali dan terealisasi sebanyak 2 kali atau sebesar 100%,
- j) Pembinaan Dan Lomba Posyandu, Kader Dan PHBS ditargetkan sebanyak 3 kali dan terealisasi sebanyak 3 kali atau sebesar 100%,
- k) Pembinaan Dan Lomba Sekolah Sehat ditargetkan sebanyak 2 kali dan terealisasi sebanyak 2 kali atau sebesar 100%,
- l) Promosi Kesehatan / Publikasi Di Radio / Tv Kabel / Tv Local / Media Cetak ditargetkan sebanyak 10 kali dan terealisasi sebanyak 10 kali atau sebesar 100%,
- m) Mengikuti Perkemahan Partibanua ditargetkan sebanyak 1 kali dan terealisasi sebanyak 1 kali atau sebesar 100%,

Kegiatan dari Program Peningkatan Dan Pengembangan Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu:

- a) Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat dengan realisasi anggaran sebesar 96,38% dan capaian kinerja sebesar 100%, dan
- 3) Program Perbaikan Gizi Masyarakat, terdiri dari 1 kegiatan dan 6 indikator kinerja. Indikator kinerja dari Program Perbaikan Gizi Masyarakat, yaitu:
- a) Rakontek Program Gizi ditargetkan sebanyak 30 orang dan terealisasi sebanyak 30 orang atau sebesar 100%,
 - b) Pembinaan / Monev Program Gizi Ke Puskesmas / Pustu / Poskesdes / Polindes / Posyandu ditargetkan sebanyak 4 kali dan terealisasi sebanyak 4 kali atau sebesar 100%,
 - c) Pertemuan Review / Evaluasi Program Gizi ditargetkan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau sebesar 100%,



- d) Pemberian PMT Bagi Balita Gizi Kurang Dan Bumil KEK ditargetkan sebanyak 470 paket dan terealisasi sebanyak 470 paket atau sebesar 100%,
- e) Pemantauan Status Gizi ditargetkan sebanyak 20 orang dan terealisasi sebanyak 20 orang atau sebesar 100%, dan
- f) Pembelajaran Program Gizi Ke Hulu Sungai Utara (HSU) ditargetkan sebanyak 28 orang dan terealisasi sebanyak 28 orang atau sebesar 100%.

Kegiatan dari Program Perbaikan Gizi Masyarakat, yaitu :

- a) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Status Gizi Masyarakat dengan realisasi anggaran sebesar 76,17% dan capaian kinerja sebesar 95%.
- 4) Program Pengembangan Lingkungan Sehat, terdiri dari 3 kegiatan dan 20 indikator kinerja.

Indikator kinerja dari Program Pengembangan Lingkungan Sehat, yaitu :

- a) Pembinaan Dan Pengawasan Untuk Pembuatan Laik Sehat Depot Air Minum (DAM) ditargetkan sebanyak 130 OH dan terealisasi sebanyak 130 OH atau sebesar 100%,
- b) Refreshing Bagi Pemilik Depot Air Minum ditargetkan sebanyak 50 orang dan terealisasi sebanyak 50 orang atau sebesar 100%,
- c) Persentase Sarana Air Minum Yang Dilakukan Pengawasan ditargetkan sebanyak 35% dan teralisasi sebanyak 35% atau sebesar 100%,
- d) Pembinaan Program Penyehatan Air ditargetkan sebanyak 8 OH dan terealisasi sebanyak 8 OH atau sebesar 100%,
- e) Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Provinsi ditargetkan sebanyak 4 op dan terealisasi sebanyak 4 op atau sebesar 100%,
- f) Pertemuan dan Evaluasi Kader Kesehatan Lingkungan ditargetkan sebanyak 2 kali dan terealisasi sebanyak 2 kali atau sebesar 100%,
- g) Monev Program Kesling Dan Wabah/Bencana ditargetkan sebanyak 1 kali dan terealisasi sebanyak 1 kali atau sebesar 100%,
- h) Peningkatan Wawasan Pengelolaan Limbah Medis ditargetkan sebanyak 1 kali dan terealisasi sebanyak 1 kali atau sebesar 100%,
- i) Pertemuan Program Kesling Dan Wabah/ Bencana ditargetkan sebanyak 1 kali dan terealisasi sebanyak 1 kali atau sebesar 100%,
- j) Pemeriksaan Hematologi (Cholinesterase Darah) ditargetkan sebanyak 60 sampel dan terealisasi sebanyak 60 sampel atau sebesar 100%,
- k) Pembinaan Program PLP ditargetkan sebanyak 98 OH dan terealisasi sebanyak 98 OH atau sebesar 100%,
- l) Verifikasi STBM ditargetkan sebanyak 6 kali dan terealisasi sebanyak 6 kali atau sebesar 100%,



- m) Pemeriksaan Kimia Makanan Dan Minuman ditargetkan sebanyak 387 sampel dan terealisasi sebanyak 387 sampel atau sebesar 100%,
 - n) Refreshing Keamanan Pangan Bagi Pengelola Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)/2 Kali ditargetkan sebanyak 80 sampel dan terealisasi sebanyak 80 sampel atau sebesar 100%,
 - o) Refreshing Penjamah Makanan Rm / Restoran / Jasa Boga ditargetkan sebanyak 30 orang dan terealisasi sebanyak 30 orang atau sebesar 100%,
 - p) Sosialisasi Bahan Berbahaya Pada Makanan Jajanan Anak Sekolah (4 SD) ditargetkan sebanyak 4 SD dan terealisasi sebanyak 4 SD atau sebesar 100%,
 - q) Refreshing Sanitasi Salon ditargetkan sebanyak 20 orang dan terealisasi sebanyak 20 orang atau sebesar 100%,
 - r) Bimtek Kantin Sehat Sekolah ditargetkan sebanyak 20 orang dan terealisasi sebanyak 20 orang atau sebesar 100%,
 - s) Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Provinsi ditargetkan sebanyak 2 op dan terealisasi sebanyak 2 op atau sebesar 100%,
 - t) Pembinaan/ Pengawasan TTU/ TPM Dalam Rangka Pemberian Rekomendasi Laik Sehat ditargetkan sebanyak 100 OH dan terealisasi sebanyak 100 OH atau sebesar 100%,
 - u) Pembinaan program TTU/ TPM Ke Puskesmas ditargetkan sebanyak 8 OH dan terealisasi sebanyak 8 OH atau sebesar 100%,
- Kegiatan-kegiatan dari Program Pengembangan Lingkungan Sehat yaitu :
- a) Kegiatan Peningkatan Penyehatan Lingkungan Air dengan realisasi anggaran sebesar 99,77% dan capaian kinerja sebesar 100%.
 - b) Kegiatan Peningkatan Penyehatan Lingkungan Permukiman dengan realisasi anggaran sebesar 98,19% dan capaian kinerja sebesar 100%.
 - c) Kegiatan Peningkatan Penyehatan Lingkungan TTU dan TPM dengan realisasi anggaran sebesar 99,88% dan capaian kinerja sebesar 100%.
- 5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, terdiri dari 5 kegiatan dan 5 indikator kinerja.
- Indikator kinerja dari Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, yaitu :
- a) Tercapainya Puskesmas yang melaksanakan imunisasi dasar ditargetkan sebanyak 9 puskesmas dan terealisasi sebanyak 9 puskesmas atau sebesar 100%,
 - b) Tercapainya Desa/Kelurahan yang sudah UCI ditargetkan sebanyak 20 kelurahan dan terealisasi sebanyak 20 kelurahan atau sebesar 100%,



- c) Tercapainya Puskesmas yang melaksanakan imunisasi Dasar Anak Usia Sekolah yang mendapat imunisasi ditargetkan sebanyak 9 puskesmas dan terealisasi sebanyak 9 puskesmas atau sebesar 100%,
- d) Jumlah Puskesmas yang melaksanakan respon sinyal kewaspadaan dini ditargetkan sebanyak 9 puskesmas dan terealisasi sebanyak 9 puskesmas atau sebesar 100%,
- e) Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Calon Jamaah Haji ditargetkan sebanyak 9 puskesmas dan terealisasi sebanyak 9 puskesmas atau sebesar 100%,
- f) Persentase Puskesmas yang menangani KLB < 24 jam ditargetkan sebanyak 9 puskesmas dan terealisasi sebanyak 9 puskesmas atau sebesar 100%,
- g) Cakupan Puskesmas yang melaksanakan autopsi verbal penyebab kematian ditargetkan sebanyak 9 puskesmas dan terealisasi sebanyak 9 puskesmas atau sebesar 100%,

Kegiatan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yaitu :

- a) Kegiatan Imunisasi realisasi anggaran sebesar 99,91% dan capaian kinerja sebesar 100%
 - b) Kegiatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah realisasi anggaran sebesar 98,27% dan capaian kinerja sebesar 100%
 - c) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Haji realisasi anggaran sebesar 99,88% dan capaian kinerja sebesar 100%
 - d) Kegiatan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) realisasi anggaran sebesar 80,58% dan capaian kinerja sebesar 100%
 - e) Kegiatan Surveillance Penyebab Kematian realisasi anggaran sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 100%
- 6) Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan, terdiri dari 3 kegiatan dan 7 indikator kinerja.

Indikator kinerja dari Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan, yaitu :

- a) Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Sarana Kesehatan Puskesmas ditargetkan sebanyak 148 buah dan terealisasi sebanyak 148 buah atau sebesar 100%,
- b) Proses penerbitan Perda perizinan dan pelayanan kesehatan ditargetkan sebanyak 1 buah dan terealisasi sebanyak 1 buah atau sebesar 100%,
- c) Proses pertemuan ketenagaan kesehatan ditargetkan sebanyak 4 kali dan terealisasi sebanyak 4 kali atau sebesar 100%,
- d) Proses Rekomendasi Perizinan Nakes ditargetkan sebanyak 200 buah dan terealisasi sebanyak 200 buah atau sebesar 100%.



- e) Penerapan sistem akreditasi puskesmas ditargetkan sebanyak 2 PKM dan terealisasi sebanyak 2 PKM atau sebesar 100%.
- f) Pendampingan PPK BLUD ditargetkan sebanyak 2 PKM dan terealisasi sebanyak 2 PKM atau sebesar 100%.
- g) Terakreditasinya puskesmas ditargetkan sebanyak 2 PKM dan terealisasi sebanyak 2 PKM atau sebesar 100%.

Kegiatan- kegiatan dari Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan, yaitu :

- a) Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan dengan realisasi anggaran sebesar 96,41% dan capaian kinerja sebesar 100%
 - b) Kegiatan Evaluasi Dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan dengan realisasi anggaran sebesar 84,58% dan capaian kinerja sebesar 100%
 - c) Kegiatan Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik) dengan realisasi anggaran sebesar 96,44% dan capaian kinerja sebesar 100%
- 7) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 indikator kinerja.

Indikator kinerja dari Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, yaitu :

- a) Terlayannya Keluarga Kurang Mampu ditargetkan sebanyak 12 bulan dan terealisasi sebanyak 12 bulan atau sebesar 100%. Hal ini menunjukkan terlayannya keluarga kurang mampu dalam hal pembayaran tagihan rumah sakit rujukan baik provinsi maupun Kota Banjarbaru.

Capaian kegiatan dari Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, yaitu:

- a) Kegiatan Pelayanan Keluarga Kurang Mampu dengan realisasi anggaran sebesar 99,15% dan capaian kinerja sebesar 100%
- 8) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, terdiri dari 3 kegiatan dan 24 indikator kinerja.

Indikator kinerja dari Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, yaitu:

- a) Pengadaan Bahan Obat-Obatan Dan Habis Pakai Kefarmasian ditargetkan sebanyak 6 paket dan terealisasi sebanyak 6 paket atau sebesar 100%,
- b) Perbaikan Alkes Dan Kalibrasi ditargetkan sebanyak 1 paket dan terealisasi sebanyak 1 paket atau sebesar 100%,
- c) Pengadaan Printer Dan Lcd Proyektor ditargetkan sebanyak 35 buah dan terealisasi sebanyak 35 buah atau sebesar 100%,



- d) Pengadaan Meubelair Puskesmas Guntung Manggis, Puskesmas Liang Anggang, dan Puskesmas Cempaka ditargetkan sebanyak 3 paket dan terealisasi sebanyak 3 paket atau sebesar 100%,
- e) Pengadaan Kendaraan Roda Dua ditargetkan sebanyak 5 unit dan terealisasi sebanyak 5 unit atau sebesar 100%,
- f) Pengadaan Alat Pendingin ditargetkan sebanyak 40 buah dan terealisasi sebanyak 40 buah atau sebesar 100%,
- g) Pengadaan Komputer/ AC ditargetkan sebanyak 15 buah dan teralisasi sebanyak 15 buah atau sebesar 100%,
- h) Pengadaan Televisi ditargetkan sebanyak 18 buah dan terealisasi sebanyak 18 buah atau sebesar 100%,
- i) Pengadaan Alat Kedokteran Umum ditargetkan sebanyak 1 paket dan terealisasi sebanyak 1 paket atau sebesar 100%,
- j) Pembangunan Kanopi Puskesmas Guntung Manggis ditargetkan sebanyak 1 paket dan terealisasi sebanyak 1 paket atau sebesar 100%,
- k) Pembangunan Halaman Puskesmas Liang Anggang ditargetkan sebanyak 1 paket dan terealisasi sebanyak 1 paket atau sebesar 100%,
- l) Pembangunan IPAL Puskesmas ditargetkan sebanyak 10 paket dan terealisasi sebanyak 10 paket atau sebesar 100%,
- m) Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan ditargetkan sebanyak 6 paket dan terealisasi sebanyak 6 paket atau sebesar 100%,
- n) Pengadaan Generator Set dan Instalasi ditargetkan sebanyak 2 unit dan terealisasi sebanyak 2 unit atau sebesar 100%,
- o) Pengadaan Alat Rumah Tangga Puskesmas Dan Jaringan nya ditargetkan sebanyak 1 paket dan terealisasi sebanyak 1 paket atau sebesar 100%,
- p) Pembangunan Halaman Paving Dan Parkir Puskesmas Guntung Manggis ditargetkan sebanyak 1 paket dan terealisasi sebanyak 1 paket atau sebesar 100%,
- q) Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Cempaka ditargetkan sebanyak 1 paket dan terealisasi sebanyak 1 paket atau sebesar 100%,
- r) Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Dan Jaringan nya ditargetkan sebanyak 1 paket dan terealisasi sebanyak 1 paket atau sebesar 100%,
- s) Pembangunan Aula Puskesmas Sungai Ulin ditargetkan sebanyak 1 paket dan terealisasi sebanyak 1 paket atau sebesar 100%,
- t) Pembangunan Halaman Puskesmas Guntung Manggis ditargetkan sebanyak 1 paket dan terealisasi sebanyak 1 paket atau sebesar 100%,



- u) Pembangunan Gedung Baru Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Ulin ditargetkan sebanyak 1 paket dan teralisasi sebanyak 1 paket atau sebesar 100%, dan
- v) Pengadaan Meubelair ditargetkan sebanyak 1 paket dan terealisasi sebanyak 1 paket atau sebesar 100%.
- w) Terbangunnya Puskesmas Landasan Ulin Timur ditargetkan sebanyak 1 paket dan terealisasi sebanyak 1 paket atau sebesar 100%.
- x) Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan ditargetkan sebanyak 9 puskesmas dan terealisasi sebanyak 9 puskesmas atau sebesar 100%.

Capaian kegiatan dari Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, yaitu :

- a) Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas dengan realisasi anggaran sebesar 95,90% dan capaian kinerja sebesar 100%
 - b) Kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK Fisik) dengan realisasi anggaran sebesar 94,07% dan capaian kinerja sebesar 100%
 - c) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan realisasi anggaran sebesar 99,25% dan capaian kinerja sebesar 100%
- 9) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, terdiri dari 2 kegiatan dan 6 indikator kinerja.

Indikator kinerja dari Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, yaitu :

- a) Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Yang Memerlukan Pelayanan Kesehatan ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau pencapaian sebesar 100%,
- b) Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin ditargetkan sebanyak 13.921 orang dan terealisasi sebanyak 13.921 orang atau sebesar 100%,
- c) Koordinasi Program Sosialisasi dan Pembinaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ditargetkan sebanyak 3 kali dan terealisasi sebanyak 3 kali atau sebesar 100%,
- d) Pembinaan ke Puskesmas ditargetkan sebanyak 3 kali dan terealisasi sebanyak 3 kali atau sebesar 100%,
- e) Rapat Pengelolaan Program JKN/BPJS ditargetkan sebanyak 8 puskesmas dan terealisasi sebanyak 8 puskesmas atau sebesar 100%, dan
- f) Sosialisasi Program JKN/BPJS ditargetkan sebanyak 8 puskesmas dan terealisasi sebanyak 8 puskesmas atau sebesar 100%.



Capaian kegiatan dari Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, yaitu :

- a) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi dengan realisasi anggaran sebesar 0% dan capaian kinerja sebesar 0%
 - b) Kegiatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat (JKN) dengan realisasi anggaran sebesar 81,11% dan capaian kinerja sebesar 100%
- 10) Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari 3 kegiatan dan 7 indikator kinerja.

Indikator kinerja dari Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan, yaitu :

- a) Meningkatnya Kompetensi Nakes dan Non Nakes Di Bidang Teknis Program Kesehatan ditargetkan sebanyak 210 orang dan terealisasi sebanyak 210 orang atau sebesar 100%,
- b) Jumlah bintek Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi Nakes dan Non Nakes ditargetkan sebanyak 7 kali dan terealisasi sebanyak 7 kali atau sebesar 100%,
- c) Nakes Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Per Undang-Undangan Kesehatan, Nakes/Non Nakes Yang Mengikuti Sosialisasi Perundang-Undangan Bidang Kesehatan ditargetkan sebanyak 90 orang dan terealisasi sebanyak 90 orang atau sebesar 100%,
- d) Terbayarnya Kontribusi Penyertaan Diklat atau Seminar dan Lain-Lain ditargetkan sebanyak 61 orang dan terealisasi sebanyak 61 orang atau sebesar 100%,
- e) Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kota ditargetkan sebanyak 9 puskesmas dan terealisasi sebanyak 9 puskesmas atau sebesar 100%,
- f) Persiapan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi ditargetkan sebanyak 9 kategori dan terealisasi sebanyak 9 kategori atau sebesar 100%,
- g) Penilaian Kinerja Puskesmas Berprestasi Tingkat Provinsi ditargetkan sebanyak 1 puskesmas dan terealisasi sebanyak 1 puskesmas atau sebesar 100%, dan

Capaian kegiatan dari Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan, yaitu:

- a) Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Dan Fungsional Bagi Tenaga Kesehatan Dan Non Tenaga Kesehatan dengan realisasi anggaran sebesar 91,10% dan capaian kinerja sebesar 100%
- b) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan Kesehatan dengan realisasi anggaran sebesar 86,58% dan capaian kinerja sebesar 100%
- c) Kegiatan Penilaian Kinerja Tenaga Kesehatan Puskesmas dengan realisasi anggaran sebesar 99,98% dan capaian kinerja sebesar 100%



11) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, terdiri dari 4 kegiatan dan 20 indikator kinerja.

Indikator kinerja dari Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, yaitu :

- a) Laporan Pelaksanaan *Best-Practice* Bidang Kesehatan ditargetkan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau sebesar 100%,
- b) Pengadaan Buku KIA dan stiker P4K ditargetkan sebanyak 3000 buah dan terealisasi sebanyak 3000 buah atau sebesar 100%,
- c) Pertemuan Perencanaan Program Kesehatan Ibu Dan Anak ditargetkan sebanyak 1 kali dan terealisasi sebanyak 1 kali atau sebesar 100%,
- d) Peningkatan Kapasitas Nakes dalam Asuhan Persalinan Normal (APN) ditargetkan sebanyak 12 orang dan terealisasi sebanyak 12 orang atau sebesar 100%,
- e) Evaluasi Pasca Pelatihan PONEB (1 tim 6 orang) ditargetkan sebanyak 2 tim dan terealisasi sebanyak 2 tim atau sebesar 100%,
- f) Pelaksanaan Pengkajian AMP (Audit Maternal Perinatal) ditargetkan sebanyak 3 kali dan terealisasi sebanyak 3 kali atau sebesar 100%,
- g) Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) Program KIA ditargetkan sebanyak 3 kali dan terealisasi sebanyak 3 kali atau sebesar 100%,
- h) Pembinaan Program KIA Ke Puskesmas, Pustu, Polindes Dan Atau Posyandu ditargetkan sebanyak 20 kelurahan dan terealisasi sebanyak 20 kelurahan atau sebesar 100%,
- i) Pertemuan Review Dan Evaluasi Program KIA ditargetkan sebanyak 1 kali dan terealisasi sebanyak 1 kali atau sebesar 100%,
- j) Pertemuan Petugas PWS (Pemantauan Wilayah Setempat) KIA Puskesmas ditargetkan sebanyak 2 kali dan terealisasi sebanyak 2 kali atau sebesar 100%,
- k) Monitoring Penjaringan Anak Sekolah ditargetkan sebanyak 1 kali dan terealisasi sebanyak 1 kali atau sebesar 100%,
- l) Sosialisasi SHK ditargetkan sebanyak 120 orang dan terealisasi sebanyak 120 orang atau sebesar 100%,
- m) Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja ditargetkan sebanyak 30 orang dan terealisasi sebanyak 30 orang atau sebesar 100%,
- n) Sosialisasi Anemia Remaja ditargetkan sebanyak 40 orang dan terealisasi sebanyak 40 orang atau sebesar 100%,
- o) Pertemuan Pengelola Kesehatan Anak ditargetkan sebanyak 27 ok dan terealisasi sebanyak 27 ok atau sebesar 100%,



- p) Pelaksanaan Pemasangan Alat Kontrasepsi Gratis Untuk Masyarakat ditargetkan sebanyak 80 orang dan terealisasi sebanyak 80 orang atau sebesar 100%,
- q) Rakontek KB Tingkat Kota Banjarbaru ditargetkan sebanyak 3 kali dan terealisasi sebanyak 3 kali atau sebesar 100%,
- r) Bintek Implementasi RR (Recording Reporting) KB ditargetkan sebanyak 1 kali dan terealisasi sebanyak 1 kali atau sebesar 100%,
- s) Pelaksanaan Deteksi Dini Kanker Mulut Rahim ditargetkan sebanyak 20 kelurahan dan terealisasi sebanyak 20 kelurahan atau sebesar 100%,
- t) Sosialisasi PKRT ditargetkan sebanyak 27 orang dan terealisasi sebanyak 27 orang atau sebesar 100%,

Capaian kegiatan pada Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yaitu :

- a) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dengan realisasi anggaran sebesar 77,80% dan capaian kinerja sebesar 95%
- b) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dengan realisasi anggaran sebesar 83,45% dan capaian kinerja sebesar 98%
- c) Kegiatan Peningkatan Pelayanan KB dengan realisasi anggaran sebesar 99,20% dan capaian kinerja sebesar 100%
- d) Kegiatan Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik) dengan realisasi anggaran sebesar 14,50% dan capaian kinerja sebesar 61%.

12) Program Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, terdiri dari 3 kegiatan dan 13 indikator kinerja.

Indikator kinerja dari Program Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, yaitu :

- a) Puskesmas Yang Melakukan Pengendalian Vektor Terpadu ditargetkan sebanyak 7 puskesmas dan terealisasi sebanyak 7 puskesmas atau sebesar 100%,
- b) Puskesmas Dengan API kurang dari 1/ 1000 Penduduk ditargetkan sebanyak 7 puskesmas dan terealisasi sebanyak 7 puskesmas atau sebesar 100%,
- c) Puskesmas Dengan IR DBD < 49/ 100.000 Penduduk ditargetkan sebanyak 2 puskesmas dan terealisasi sebanyak 2 puskesmas atau sebesar 100%,
- d) Puskesmas Yang Eliminasi Kasus Gigitan Hewan Tersangka Rabies Pada Manusia ditargetkan sebanyak 4 puskesmas dan terealisasi sebanyak 4 puskesmas atau sebesar 100%,
- e) Puskesmas Cakupan Penemuan Kasus Baru Kusta Tanpa Cacat ditargetkan sebanyak 6 puskesmas dan terealisasi sebanyak 6 puskesmas atau sebesar 100%,



- f) Puskesmas Dengan Angka Keberhasilan Pengobatan TB paru BTA pos (succes rate) ditargetkan sebanyak 8 puskesmas dan terealisasi sebanyak 8 puskesmas atau sebesar 100%,
- g) Puskesmas Yang Melakukan Pemeriksaan Tata Laksana Pneumonia Melalui Program MTBS ditargetkan sebanyak 8 puskesmas dan terealisasi sebanyak 8 puskesmas atau sebesar 100%,
- h) Anak 0-11 bulan Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap ditargetkan sebanyak 2608 anak dan terealisasi sebanyak 2608 anak atau sebesar 100%,
- i) Kegiatan kesekretariatan KPA Kota Banjarbaru ditargetkan sebanyak 1 kali dan terealisasi sebanyak 1 kali atau pencapaian sebesar 100%,
- j) Pembentukan remaja kader HIV/AIDS dan difollow up ditargetkan sebanyak 1 kali dan terealisasi sebanyak 1 kali atau pencapaian sebesar 100%,
- k) Pelatihan guru pendamping kader HIV/AIDS ditargetkan up ditargetkan sebanyak 1 kali dan terealisasi sebanyak 1 kali atau pencapaian sebesar 100%,
- l) Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) HIV/AIDS ke masyarakat potensial ditargetkan sebesar ditargetkan sebanyak 37 kali dan terealisasi sebanyak 37 kali atau pencapaian sebesar 100%,
- m) Rapat stake holder KPA Kota Banjarbaru ditargetkan sebanyak 1 kali dan terealisasi sebanyak 1 kali atau pencapaian sebesar 100%.

Capaian kegiatan dari Program Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, yaitu :

- a) Kegiatan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang dengan realisasi anggaran sebesar 84,97% dan capaian kinerja sebesar 94,12%
 - b) Pengendalian Penyakit Menular Langsung dengan realisasi anggaran sebesar 81,81% dan capaian kinerja sebesar 100%
 - c) Fasilitasi Penanggulangan AIDS dengan realisasi anggaran sebesar 93,80% dan capaian kinerja sebesar 100%
- 13) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, terdiri dari 4 kegiatan dan 7 indikator kinerja.

Indikator kinerja dari Program Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, yaitu :

- a) Cakupan pelayanan kesehatan usia produktif ditargetkan sebanyak 170.932 orang dan terealisasi sebanyak 23.054 orang atau sebesar 13,49%,
- b) Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi ditargetkan sebanyak 49.912 orang dan terealisasi sebanyak 19.138 orang atau sebesar 38,73%,



- c) Cakupan pelayanan penderita Diabetes ditargetkan sebanyak 3.248 orang dan terealisasi sebanyak 6.329 orang atau sebesar 194,87%,
- d) Terlaksananya kegiatan Peningkatan/Pencegahan Pengendalian NAPZA ditargetkan sebanyak 9 puskesmas dan terealisasi sebanyak 9 puskesmas atau sebesar 100%,
- e) Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat ditargetkan sebanyak 286 orang dan terealisasi sebanyak 267 orang atau sebesar 93%,
- f) Lomba senam lansia (1 kali) ditargetkan sebanyak 65 orang dan terealisasi sebanyak 65 orang atau sebesar 100%,
- g) Bintek Pengelola Program lansia ditargetkan sebanyak 18 orang dan terealisasi sebanyak 18 orang atau sebesar 100%,

Capaian kegiatan dari Program Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, yaitu :

- a) Kegiatan Peningkatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dengan realisasi anggaran sebesar 89,58% dan capaian kinerja sebesar 100%
 - b) Kegiatan Peningkatan/ Pencegahan Pengendalian NAPZA dengan realisasi anggaran sebesar 98,18% dan capaian kinerja sebesar 100%
 - c) Kegiatan Peningkatan Pencegahan/ Pengendalian Kesehatan Jiwa dengan realisasi anggaran sebesar 85,78% dan capaian kinerja sebesar 100%
 - d) Kegiatan Kesehatan Lansia Pengendalian Penyakit Menular Langsung dengan realisasi anggaran sebesar 97,24% dan capaian kinerja sebesar 100%
- 14) Program Kesehatan Kerja dan Olahraga, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 indikator kinerja. Indikator kinerja dari Program Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, yaitu :
- a) Jumlah Puskesmas yang membentuk Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) sektor informal ditargetkan sebanyak 2 puskesmas dan terealisasi sebanyak 2 puskesmas atau sebesar 100%,
 - b) Jumlah anak sekolah yang dilakukan tes kebugaran ditargetkan sebanyak 100 anak sekolah dan terealisasi sebanyak 100 anak sekolah atau sebesar 100%,
- Capaian kegiatan dari Program Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, yaitu :
- a) Kegiatan Penyelenggaraan Kesehatan Kerja dan Olahraga dengan realisasi anggaran sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 100%



Adapun hasil capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru keadaan sampai dengan 31 Desember 2018 kami sampaikan dalam matrik berikut :

Tabel 4.2

**Indikator SPM Kota Banjarbaru Tahun 2018
Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru**

NO	INDIKATOR SPM	TARGET NASIONAL (%)	REALISASI (%)
1	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	97,02
2	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	97,91
3	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	98,02
4	Cakupan pelayanan kesehatan anak balita	100	88,50
5	Cakupan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	100	91,10
6	Cakupan pelayanan kesehatan usia produktif 15 s.d 59 tahun	100	13,49
7	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	91,90
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	38,43
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100	194,86
10	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	100	100
11	Cakupan orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100	97,33
12	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100	67,91

Disamping capaian seperti diuraikan sebelumnya, penyelenggaran Urusan Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru telah berhasil membangun Puskesmas Landasan Ulin yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Tahun 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 6.966.605.175 (Enam Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), selain itu berhasil pula meintegrasikan sebanyak 16.227 jiwa penduduk Kota Banjarbaru pemegang Jamkesda ke JKN dari target tahun 2019 sebanyak 26.663 jiwa.



c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Saat pemeriksaan kehamilan terakhir, ibu hamil melahirkan di luar wilayah dan periksa ke dokter spesialis.
- b) Masih adanya persalinan di non tenaga kesehatan, tenaga kesehatan distribusinya tidak merata.
- c) Ada kematian bayi
- d) Pada saat setelah imunisasi dasar selesai pada umumnya tidak membawa anaknya lagi untuk ditimbang dan juga pelayanan dilaksanakan di dokter swasta.
- e) Jadwal pemeriksaan ada siswa yang tidak hadir/ sakit.
- f) Pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 tahun, Hipertensi dan Diabetes Melitus hanya dilakukan di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM) serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. Sedangkan pelayanan di dokter praktik swasta, klinik swasta dan BPM tidak terdata.
- g) Kegiatan skrining faktor risiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku memerlukan perlakuan khusus, sehingga waktu yang diperlukan untuk menangani 1 (satu) pasien cukup lama (15 menit/pasien). Sedangkan jumlah kunjungan pelayanan di Puskesmas rata-rata 50-100 orang per hari.
- h) Konseling tentang faktor risiko PTM dan Gangguan Mental Emosional dan perilaku sering tidak dilakukan sehingga tidak standar pelayanan di Puskesmas.
- i) Belum semua kader dan petugas kesehatan terlatih.
- j) Penyediaan sarana dan prasarana skrining (Posbindu Kit) kurang.
- k) Koordinasi lintas sektor belum optimal.
- l) Sasaran penduduk usia 15 tahun sangat jarang datang untuk berobat ke Puskesmas dan dilakukan pemeriksaan tekanan darah, lebih banyak langsung ke tahap pengobatan sesuai kasus.
- m) Pasien Hipertensi tidak rutin minum obat dan cek tekanan darah bulanan. Pola makan dan faktor kebiasaan masyarakat konsumsi garam berlebih yang sulit dihilangkan.
- n) Tidak rutin cek kesehatan pada pasien yang sudah didiagnosis Diabetes Melitus.
- o) Penyediaan obat jiwa terbatas dan keluarga kadang menyembunyikan pasien jiwa serta petugas belum terlatih semua.
- p) Penemuan kasus Tuberkulosis masih bersifat pasif (pasien datang sendiri ke fasyankes) dan pelacakan kasus orang terduga Tuberkulosis oleh petugas Puskesmas masih belum maksimal.
- q) Pasien yang sudah didiagnosis positif TBC tidak mau berobat.



- r) Kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri ke fasyankes masih kurang.
- s) Kader TB belum berfungsi secara optimal.
- t) Orang yang berisiko tidak selalu mau mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan untuk tes HIV (atas keinginan sendiri) dan orang yang berisiko tidak selalu mau ikut tes walaupun sudah didatangi petugas.

2. Solusi

- a) Melaksanakan kunjungan rumah.
- b) Peningkatan kapasitas KIE sert pendistribusian tenaga kesehatan.
- c) Optimalkan sistem rujukan dan pelayanan kesehatan di PAUD.
- d) Operasi timbang dilaksanakan setiap bulan Februari dan Agustus.
- e) Pelaksanaan pelayanan skrining kesehatan pada saat penjangkaran kesehatan masuk sekolah tahun ajaran baru.
- f) Membentuk jejaring kerjasama dengan dokter praktik swasta, klinik swasta dan BPM. Dibentuk Posbindu di sekolah untuk menjangkari anak usia 15 tahun. Di setiap kelurahan juga akan dibentuk Posbindu PTM untuk menjangkari warga masyarakat yang tidak sempat datang ke Puskesmas.
- g) Dibuat alur pelayanan di Puskesmas khusus untuk menjangkari warga agar pelayanan terstandar dan sesuai SOP. Membuat list/ tanda di family folder pasien bahwa sudah pemeriksaan standar.
- h) Pelatihan konseling bagi petugas dan pelatihan Posbindu PTM bagi kader dan petugas kesehatan.
- i) Mengusulkan pengadaan Posbindu kit dari dana APBD.
- j) Pelayanan secara komprehensif dengan pendekatan holistik (sakit sehat) secara optimal.
- k) Sebanyak-banyaknya menjangkari sasaran melalui pembentukan Posbindu di semua kelurahan.
- l) Kerjasama dengan guru UKS untuk membantu mendata siswa dan secara rutin melakukan pemeriksaan tekanan darah dan gula darah. Dibentuk Posbindu PTM di sekolah dan skreening pasien di Puskesmas untuk menjangkari pasien usia 15 tahun.
- m) Penyuluhan kepada pasien dan keluarga pasien agar teratur cek tekanan darah dan gula darah serta membiasakan perilaku pola hidup dan pola makan yang sehat.
- n) Mengusulkan pengadaan obat jiwa sesuai dengan kebutuhan pasien jiwa.
- o) Membentuk kader TBC dalam upaya penemuan terduga TBC.



- p) Membentuk jejaring dengan fasyankes, DPM, klinik dan RSP/swasta serta melaksanakan pertemuan secara berkala dalam upaya memaksimalkan penanggulangan kasus TBC.
- q) Sosialisasi TBC ke Lapas, Pontren, asrama-asrama dan sekolah.
- r) Memberi reward kepada petugas laboratorium dan insentif berupa uang transport bagi kader yang menemukan terduga TB.
- s) Voluntary Counselling Test (VCT) Mobile di instansi pemerintah/swasta, tempat hiburan dan hotel, organisasi wanita/ masyarakat umum dan Lapas.
- t) Penyuluhan/ sosialisasi, membagi leaflet ke sekolah, lapas, kelurahan dan kecamatan serta membagikan kuesioner HIV untuk menilai pengetahuan komprehensif masyarakat tentang HIV.

3. URUSAN KESEHATAN (RSD IDAMAN KOTA BANJARBARU)

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata
 - a) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit, dan
 - b) Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran / Kesehatan dan Bangunan UTDRS (DAK).
- 2) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat (BLUD)
 - a) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Masyarakat (BLUD).

b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat pencapaian kegiatan dari program-program Penyelenggaraan Urusan Kesehatan yang dilaksanakan RSD Idaman Kota Banjarbaru, yaitu :

- 1) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata
 - a) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit dengan realisasi anggaran sebesar 99,74% dan capaian kinerja sebesar 100%.
 - b) Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran / Kesehatan dan Bangunan UTDRS (DAK) dengan realisasi anggaran sebesar 99,29% dan capaian kinerja sebesar 100%.
- 2) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat (BLUD)
 - a) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Masyarakat (BLUD) dengan realisasi anggaran sebesar 104,38% dan capaian kinerja sebesar 100%. Realisasi belanja sebesar 104,38% merupakan realisasi belanja dari anggaran yang bersumber dari BLUD. Hal ini memungkinkan karena RSD Idaman Kota Banjarbaru yang sudah berstatus BLUD Penuh diberikan fleksibilitas menggunakan ambang



batas yang tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit. Dalam penganggaran di BLUD hanya terdiri dari 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan yaitu Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat (BLUD) dan Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Masyarakat (BLUD).

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Belum terintegrasinya SIMIRS pada setiap lini pelayanan.
- b) Pengembangan SIMRS tidak bisa dilakukan serentak, hal ini disebabkan kompleksnya satuan kerja yang terkait dalam sistem.

2) Solusi

- a) Melatih semua admin ruangan baik poli rawat jalan dan poli rawat inap serta semua instalasi dan juga melengkapi sarana dan prasarana (Komputer dan jaringan internet)
- b) Pengembangan SIMRS secara bertahap dengan ditangani oleh tim khusus berbasis IT (Dibentuk instalasi IT Rumah Sakit).

4. URUSAN PEKERJAAN UMUM (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU)

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
 - a) Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan,
 - b) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor,
 - c) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor,
 - d) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
- 2) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - a) Kegiatan Pembangunan Jalan,
 - b) Kegiatan Pembangunan Jembatan, dan
 - c) Kegiatan Pembangunan Jalan (DAK).
- 3) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
 - a) Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong,
 - b) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Lingkungan,
 - c) Kegiatan Normalisasi Drainase Jalan Kota,
 - d) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Kota, dan
 - e) Pemeliharaan Rutin Drainase Jalan Kota.



- 4) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - a) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan,
 - b) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK),
 - c) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan,
 - d) Kegiatan Perbaikan Jalan Lingkungan,
 - e) Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan, dan
 - f) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan.
- 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
 - a) Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-Alat Berat, dan
- 6) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
 - a) Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi, dan
 - b) Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK);
- 7) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Lainnya
 - a) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Sungai dan SDA Lainnya, dan
 - b) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sungai dan SDA Lainnya.
- 8) Program Penyediaan Air Minum
 - a) Kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Minum (DAK),
 - b) Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum,
 - c) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum, dan
- 9) Program Penyediaan Sistem Air Limbah
 - a) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah,
 - b) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK), dan
 - c) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah.
- 10) Program Pembangunan Fasilitas Umum
 - a) Kegiatan Pembangunan Fasilitas Umum
 - b) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas Umum
- 11) Program Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi
 - a) Kegiatan Penyusunan/Pendataan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI), dan
 - b) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi IUJK.
 - c) Kegiatan Pengendalian dan Uji Mutu



b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat pencapaian kegiatan dari program-program Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru, yaitu :

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a) Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%
- b) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%.
- c) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%.
- d) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%.

2) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

- a) Kegiatan Pembangunan Jalan ditargetkan sepanjang 6.456 meter dan terealisasi sepanjang 6.456 meter atau sebesar 100%,
- b) Kegiatan Pembangunan Jembatan ditargetkan sepanjang 10 meter dan terealisasi sepanjang 10 meter atau sebesar 100%, dan
- c) Kegiatan Pembangunan Jalan (DAK) ditargetkan sepanjang 2.503 meter dan terealisasi sepanjang 2.503 meter atau sebesar 100%.

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

- a) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat ditargetkan sebesar 4 unit dan terealisasi sebesar 4 unit atau pencapaian sebesar 100%, dan

4) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- a) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan ditargetkan sepanjang 7.899 meter dan terealisasi sepanjang 7.899 meter atau sebesar 100%,
- b) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan ditargetkan sepanjang 6 dan terealisasi sepanjang 6 meter atau sebesar 100%,
- c) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK) ditargetkan sepanjang 2.745 meter dan terealisasi sepanjang 2.745 meter atau sebesar 100%,
- d) Kegiatan Perbaikan Jalan Lingkungan ditargetkan sepanjang 3.696 meter dan terealisasi sepanjang 5.769 meter atau sebesar 156%,
- e) Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan ditargetkan sepanjang 48.751 meter dan terealisasi sepanjang 67.269 meter atau sebesar 137,98%,
- f) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan ditargetkan 2.123 meter dan terealisasi sepanjang 2.123 meter atau sebesar 100%.



- 5) Program Penyediaan Air Minum
 - a) Kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Minum (DAK) ditargetkan sepanjang 8.499 dan terealisasi sepanjang 8.499 meter atau sebesar 100%,
 - b) Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum ditargetkan sepanjang 5.565 meter dan terealisasi sepanjang 5.565 meter atau sebesar 100%,
 - c) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum ditargetkan sepanjang 8.519 meter dan terealisasi sepanjang 8.519 meter atau sebesar 100%,
- 6) Program Penyediaan Sistem Air Limbah
 - a) Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Limbah ditargetkan sebanyak 22 unit dan terealisasi sebanyak 22 unit atau sebesar 100%,
 - b) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah ditargetkan sebanyak 5 unit dan terealisasi sebanyak 5 unit atau sebesar 100%, dan
 - c) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK) ditargetkan sebanyak 85 unit dan terealisasi sebanyak 85 unit atau sebesar 100%.
- 7) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
 - a) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan irigasi ditargetkan seluas 422 ha dan terealisasi seluas 422 ha atau sebesar 100%, dan
 - b) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) ditargetkan sepanjang 5.639 meter dan terealisasi sepanjang 5.639 meter atau sebesar 100%.
- 8) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Lainnya
 - a) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Sungai dan SDA Lainnya ditargetkan sepanjang 5.350 meter dan terealisasi sepanjang 5.350 meter atau sebesar 100%, dan
 - b) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sungai dan SDA Lainnya ditargetkan sepanjang 4.114 meter dan terealisasi sepanjang 4.114 meter atau sebesar 100%.
- 9) Program Pembangunan Fasilitas Umum
 - a) Kegiatan Pembangunan Fasilitas Umum ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau pencapaian sebesar 100%, dan
 - b) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas Umum ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau pencapaian sebesar 100%.
- 10) Program Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi
 - a) Kegiatan Penyusunan/Pendataan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) ditargetkan sebanyak 7 layanan dan terealisasi sebanyak 7 layanan atau sebesar 100%, dan



- b) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi IUJK ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau pencapaian sebesar 100%.
 - c) Kegiatan Pengendalian dan Uji Mutu ditargetkan sebesar 30 paket pekerjaan dan terealisasi sebesar 49 paket pekerjaan atau sebesar 163%.
- 11) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
- a) Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong ditargetkan sepanjang 9.270 meter dan terealisasi sepanjang 22.302 meter atau sebesar 240,58%,
 - b) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Lingkungan ditargetkan sepanjang 3.106 dan terealisasi sepanjang 12.493 meter atau sebesar 402,23%,
 - c) Kegiatan Normalisasi Drainase Jalan Kota ditargetkan sepanjang 3.466 meter dan terealisasi sepanjang 3.466 meter atau sebesar 100%,
 - d) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Kota ditargetkan sepanjang 3117 meter dan terealisasi sepanjang 3.117 meter atau sebesar 100%, dan
 - e) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Drainase Jalan Kota ditargetkan sepanjang 4.808 meter dan terealisasi sepanjang 4.808 meter atau sebesar 100%.

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru pada Tahun 2018 tidak memiliki permasalahan yang berarti, sehingga seluruh kegiatan telah terlaksana sesuai target yang ditetapkan. Diharapkan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru untuk tahun berikutnya juga dapat dilaksanakan dengan baik dan terealisasi sesuai rencana.

Tanggapan Atas Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Daerah Nomor 050/0435-Sunram&Eva/Bappeda/2018 Tanggal 15 Mei 2018 perihal Penyampaian Tanggapan Atas Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2017, maka Bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021, Dinas PU&PR Kota Banjarbaru diberikan amanat untuk melaksanakan Misi ke-2 Walikota Banjarbaru yaitu “Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Perkotaan yang Merata, Cerdas, dan Berwawasan Lingkungan” dengan salah satu sasarannya adalah “Meningkatkan Sistem Pengelolaan Drainase”.
- b. Dalam rangka untuk melaksanakan sebagaimana amanat pada point 1 di atas, pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru diberikan



alokasi anggaran sebesar Rp. 216.727.379.711,- dengan proporsi untuk program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong sebesar Rp. 38.325.070.500,- atau sebesar 17,68% terhadap pagu. Adapun capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru pada tahun 2017 dalam penanganan saluran drainase agar berfungsi dengan baik sebesar 101,11% (dari target 87,33%) dan Penangan titik rawan banjir sebesar 100% (dari target 35%).

- c. Untuk tahun 2018 ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbau tetap berupaya untuk mengoptimalkan penanganan drainase dan titik rawan banjir. Alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 207.337.792.954,- (menurun sebesar 4,33% dari tahun 2017) dengan proporsi untuk Program Pembangunan saluran Drainase dan Gorong-Gorong sebesar Rp. 34.852.744.400,- atau sebesar 16,81% terhadap pagu (menurun 0,87% dari tahun 2017). Target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2018 dalam penanganan saluran drainase agar berfungsi dengan baik sebesar 87,74% dan penanganan titik rawan banjir sebesar 50%.
- d. Dalam penanganan drainase dan titik rawan banjir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru akan mengoptimalkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yaitu Balai Jalan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

5. URUSAN TATA RUANG (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU)

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Perencanaan Tata Ruang
 - a) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Tata Ruang.
- 2) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - a) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang
- 3) Program Pemanfaatan Ruang
 - a) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang,
 - b) Kegiatan Survei dan Pemetaan untuk Perencanaan Tata Ruang.
- 4) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - a) Kegiatan Perencanaan dan Penataan RTH .



b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat pencapaian kegiatan dari program-program Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru, yaitu :

- 1) Program Perencanaan Tata Ruang
 - a) Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang ditargetkan sebanyak 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen atau sebesar 100%.
- 2) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - a) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan ditargetkan sebanyak 50 lokasi dan terealisasi sebanyak 50 lokasi atau sebesar 100%.
- 3) Program pemanfaatan ruang
 - a) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau pencapaian sebesar 100%,
 - b) Kegiatan Survei dan Pemetaan untuk Perencanaan Tata Ruang ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau pencapaian sebesar 100%.
- 4) Program pengelolaan ruang terbuka hijau
 - a) Kegiatan Perencanaan dan Penataan RTH ditargetkan sebanyak 7 lokasi dan terealisasi sebanyak 7 lokasi atau sebesar 100%.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ada tidak terlalu berpengaruh pada target capaian kinerja, sehingga realisasi capaian kinerja sesuai dengan yang diharapkan. Untuk kedepannya akan lebih mengoptimalkan lagi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan lebih meningkat dan bermanfaat.

6. URUSAN PERUMAHAN (DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BANJARBARU)

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pengembangan Perumahan
 - a) Kegiatan Pengendalian Penyelenggaraan Pengembangan Bangunan dan Perumahan.
- 2) Program Lingkungan Hidup Sehat Perumahan
 - a) Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan,
- 3) Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
 - a) Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh,
 - b) Kegiatan Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh;
 - c) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Permukiman Kumuh



- 4) Program Pembangunan/Pemeliharaan Taman
 - a) Kegiatan Peningkatan Penataan Taman Kota, dan
 - b) Kegiatan Pemeliharaan Taman Kota.
- 5) Program Pengelolaan Areal Pemakaman
 - a) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman,
 - b) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman, dan
 - c) Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
- 6) Program Penataan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
 - a) Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Penerangan Jalan Umum, dan
 - b) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum.

b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat pencapaian kegiatan dari program-program Penyelenggaraan Urusan Perumahan yang dilaksanakan Dinas Perumahan Kota Banjarbaru, yaitu :

1) Program Pengembangan Perumahan

Program Pengembangan Perumahan terdiri atas 1 kegiatan dengan indikator jumlah rekomendasi IMB yang diterbitkan.

- a) Kegiatan Pengendalian Penyelenggaraan Pengembangan Bangunan dan Perumahan ditargetkan sebanyak 300 buah dan terealisasi sebanyak 517 buah atau sebesar 173% dengan realisasi anggaran sebesar 81,9%.

2) Program Lingkungan Hidup Sehat Perumahan

Program ini terdiri atas 1 kegiatan dengan 2 indikator yaitu panjang jalan terbangun di lingkungan perumahan dan jumlah hydrant terbangun di lingkungan perumahan.

- a) Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan ditargetkan sepanjang 5000 m² dan terealisasi sebanyak 5000 m² atau sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 93,7%.

3) Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini terdiri atas 3 kegiatan dengan 2 indikator yaitu panjang jalan lingkungan yang terbangun dan terpelihara di kawasan permukiman dan luas kawasan kumuh yang dipantau.

- a) Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh ditargetkan sebanyak 5 dokumen dan terealisasi sebanyak 5 dokumen atau sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 99%.
- b) Kegiatan Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh ditargetkan sebanyak 1 kali dan terealisasi sebanyak 1 kali atau sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 99,9%.



- c) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Permukiman Kumuh ditargetkan 12 kali dan terealisasi sebanyak 12 kali atau sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 95,9%.
- 4) Program Pembangunan/Pemeliharaan Taman

Program Pembangunan/Pemeliharaan Taman terdiri atas 2 kegiatan dengan 2 indikator yaitu jumlah taman yang direhabilitasi dan jumlah taman yang dipelihara.

 - a) Kegiatan Peningkatan Penataan Taman Kota ditargetkan sebanyak 8 lokasi dan terealisasi sebanyak 8 lokasi atau sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 98,7%.
 - b) Kegiatan Pemeliharaan Taman Kota ditargetkan sebanyak 52 buah dan terealisasi sebanyak 52 buah atau sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 98,7%.
- 5) Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Program ini terdiri atas 3 kegiatan dengan 1 indikator yaitu bertambahnya lahan TPU.

 - a) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman ditargetkan sebanyak 3 paket dan terealisasi sebanyak 3 paket atau sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 99,3%.
 - b) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman ditargetkan sebanyak 12 paket dan terealisasi sebanyak 12 paket atau sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 97,5%.
 - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan realisasi anggaran sebesar 100%.
- 6) Program Penataan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

Program Penataan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum ini terdiri atas 2 kegiatan dengan 1 indikator yaitu meningkatnya PJU dalam kondisi baik

 - a) Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Penerangan Jalan Umum ditargetkan sebanyak 5 lokasi dan terealisasi sebanyak 5 lokasi atau sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 96,6%.
 - d) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum ditargetkan sebanyak 7 lokasi dan terealisasi sebanyak 7 lokasi atau sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 98,5%.

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Belum optimalnya penanganan kawasan permukiman kumuh, namun kemajuan progres pencapaian target pengurangan luas kawasan permukiman kumuh mengalami kemajuan yang signifikan.
- b) Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni.



- c) Prasarana, sarana dan Utilitas perumahan yang dilaksanakan belum dapat mencakup keseluruhan indikator.
- d) Belum terbangunnya Taman Pemakaman Umum di 3 (tiga) lokasi milik pemerintah Kota Banjarbaru.
- e) Minimnya Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan.

2) Solusi

- a) Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan untuk pengurangan luas kawasan permukiman kumuh sehingga dapat mencapai target 0% di tahun 2019 sesuai RPJMN.
- b) Melaksanakan kegiatan untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni.
- c) Perlu segera mungkin dibangun Taman Pemakaman Umum di 3 (*tiga*) lokasi milik Pemerintah Kota Banjarbaru dengan penambahan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan Taman Pemakaman Umum tersebut.
- d) Mengoptimalkan Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan.

7. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARBARU)

a. Program dan Kegiatan

1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - a) Kegiatan Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan dalam teknik Pencegahan Kejahatan
 - b) Kegiatan Patroli Kamtrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - c) Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Pengamanan Acara Insidentil
2. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
 - a) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Walikota, dan Penertiban Perijinan
 - b) Kegiatan Pengawasan Potensi Pelanggaran Perda dan Perwali
 - c) Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan/Sosialisasi Perda dan Perwali
3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - a) Kegiatan Pembangunan pos jaga /ronda
 - b) Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Swakarsa
 - c) Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan
4. Program Pengamanan Pejabat dan Aset Daerah
 - a) Kegiatan Pengamanan Rutin Rumah Dinas dan Aset



- b) Kegiatan Pengamanan Pejabat
- 5. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
 - a) Kegiatan Pemberdayaan Satlinmas untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
- 6. Program Penanggulangan Kebakaran
 - a) Kegiatan Peningkatan Kesiapan Penanggulangan Kebakaran

b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat pencapaian kegiatan dari program-program Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru, yaitu :

1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, terdiri dari 3 kegiatan, yaitu :
 - a) Kegiatan Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan dalam teknik Pencegahan Kejahatan dengan target indikator jumlah kegiatan tim terpadu pemeliharaan tribun transmas dan pencegahan pekat sebanyak 2 kegiatan dan realisasi sebanyak 2 kegiatan atau 100% realisasi anggaran pada kegiatan ini yaitu 97,34%.
 - b) Patroli Kamtrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan target indikator sebanyak 180 kegiatan dan realisasi 240 kegiatan atau 133,3% dan realisasi anggaran pada kegiatan ini yaitu 99,99%,
2. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
 - a) Penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Walikota, dan Penertiban Perijinan dengan target indikator jumlah kasus pelanggaran perda yang ditegur dan ditindak sebanyak 600 kasus dan realisasi 549 kasus atau 92% dan realisasi anggaran pada kegiatan ini yaitu 99,99%,
 - c) Pengawasan Potensi Pelanggaran Perda dan Perwali dengan target indikator jumlah pengawasan kasus pelanggaran perda pasca peneguran dan penindakan sebanyak 450 kasus darealisasi anggaran pada kegiatan ini yaitu 99,95% dengan capaian 100%.
 - d) Pembinaan dan Penyuluhan/Sosialisasi Perda dan Perwali dengan target indikator jumlah perda yang disosialisasikan sebanyak 4 perda dam terealisasi sebanyak 5 perda realisasi anggaran pada kegiatan ini yaitu 99,36%.
3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - a) Pembangunan pos jaga /ronda ditargetkan sebanyak 3 pos dan terealisasi sebanyak 3 pos atau sebesar 100%, sedangkan realisasi anggaran pada kegiatan ini mencapai 98,14%



- b) Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Swakarsa ditargetkan 12 orang dan terealisasi sebanyak 11 orang atau sebesar 92%, sedangkan realisasi anggaran pada kegiatan ini mencapai 53,53%
- c) Pengendalian keamanan lingkungan ditargetkan sebanyak 360 kegiatan dan terealisasi sebanyak 119 kegiatan atau sebesar 33%, sedangkan realisasi anggaran pada kegiatan ini mencapai 99,27%
- 4. Program Pengamanan Pejabat dan Aset Daerah
 - a) Pengamanan Rutin Rumah Dinas dan Aset ditargetkan sebanyak 360 kegiatan dan terealisasi sebanyak 360 kegiatan atau sebesar 100%, sedangkan realisasi anggaran pada kegiatan ini mencapai 99,99%
 - b) Pengamanan Pejabat ditargetkan sebanyak 150 kegiatan dan terealisasi sebanyak 150 kegiatan atau sebesar 100%, sedangkan realisasi anggaran pada kegiatan ini mencapai 99,92%
- 5. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
 - a) Pemberdayaan Satlinmas untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan ditargetkan sebanyak 5 orang dan terealisasi sebanyak 5 orang atau sebesar 100%, sedangkan Realisasi anggaran pada kegiatan ini mencapai 14,99%
- 6. Program Penanggulangan Kebakaran (UPT Pemadam Kebakaran)
 - a) Kegiatan Kesiagaan Penanggulangan Kebakaran dengan realisasi anggaran sebesar 73,08

c. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a) Kurangnya PPTK dalam hal perencanaan pengelolaan pencapaian target kinerja selama 12 bulan
- b) Kurang Memahami dalam pembuatan/perencanaan awal DPA tahun 2018 sehingga terdapat dan lebih / saldo per program / kegiatan

2. Solusi

- a. Perlunya perencanaan matang dari PPTK selaku penanggung jawab program / kegiatan.
- b. Pentingnya RKA / DPA yang berkualitas
- c. Pentingnya penambahan wawasan bagi PPTK tentang program / kegiatan yang dilaksanakan.



8. URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARBARU)

a. Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - a) Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan,
 - b) Kegiatan Pemantauan kegiatan orang asing, LSM/NGO dan lembaga asing,
 - c) Kegiatan Sosialisasi Peraturan /Kebijakan Pemerintah.
2. Program Pengembangan Wasasan Kebangsaan
 - a) Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan,
 - b) Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara,
 - c) Kegiatan Gugus Gerakan Revolusi Mental
3. Program Pendidikan Politik Masyarakat
 - a) Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat,
 - b) Kegiatan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan,
 - c) Kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan Bantuan Keuangan Parpol
 - d) Kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan tentang Pemilu
 - e) Kegiatan Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia
 - f) Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Pemilu
4. Program Peningkatan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
 - a) Kegiatan Rakor, raker, Sosialisasi Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi,
 - b) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Ormas, Verifikasi Faktual, dan Penertiban SKT,
 - c) Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama.

b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat pencapaian kegiatan dari program-program Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banjarbaru yaitu :

1. Program Pendidikan Politik Masyarakat, terdiri dari 6 kegiatan dengan indikator kinerja Cakupan Pelaksanaan Pendidikan Politik ditargetkan 70% dengan capaian sebesar 91% dan realisasi anggaran 64,59%.
 - a) Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat dengan realisasi anggaran sebesar 99,23% dan capaian sebesar 100%.
 - b) Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan dengan realisasi anggaran sebesar 75,02% dan capaian sebesar 100%.



- c) Kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan Bantuan Keuangan Parpol dengan realisasi anggaran sebesar 93,14% dan capaian sebesar 100%.
 - d) Kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan tentang Pemilu dengan realisasi anggaran sebesar 87,26% dan capaian sebesar 71%.
 - e) Kegiatan Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia dengan realisasi anggaran sebesar 47,43% dan capaian sebesar 66%.
 - f) Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Pemilu dengan realisasi anggaran sebesar 43,11% dan capaian sebesar 100%.
2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, terdiri dari 3 kegiatan dengan indikator kinerja Cakupan Potensi Konflik yang ditangani ditargetkan 100% dengan capaian 79% dan realisasi anggaran 87,45%
- a) Kegiatan Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan realisasi anggaran sebesar 89,16% dan capaian sebesar 100%.
 - b) Kegiatan Pemantauan Kegiatan Orang Asing, LSM/NGO dan Lembaga Asing dengan realisasi anggaran sebesar 69,55% dan capaian sebesar 60%.
 - c) Kegiatan Sosialisasi Peraturan /Kebijakan Pemerintah dengan realisasi anggaran sebesar 92,43% dan capaian sebesar 77%.
3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, terdiri dari 3 kegiatan dengan indikator kinerja Persentase Pembinaan/ sosialisasi tentang Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Bela Negara ditargetkan 100% dengan capaian 100% dan realisasi anggaran 86,32%.
- a) Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan dengan realisasi anggaran sebesar 86,90% dan capaian sebesar 100%.
 - b) Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara dengan realisasi anggaran sebesar 100% dan capaian sebesar 100%.
 - c) Kegiatan Gugus Tugas Gerakan Revolusi Mental dengan realisasi anggaran sebesar 81,85% dan capaian sebesar 100%.
4. Program Peningkatan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi dengan indikator kinerja Persentase Peran Ormas yang Aktif ditergetkan 75% dengan capaian 113,33% dan realisasi anggaran 83,11%.
- a) Kegiatan Rakor, raker, Sosialisasi Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi dengan realisasi anggaran sebesar 80,61% dan capaian sebesar 100%.
 - b) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Ormas, Verifikasi Faktual, dan Penertiban SKT dengan realisasi anggaran sebesar 59,31% dan capaian sebesar 140%.



- c) Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama dengan indikator kinerja dengan realisasi anggaran sebesar 98,14% dan capaian sebesar 100%.

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2018 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru, tentu saja masih ditemui kendala-kendala yang menjadi permasalahan atau hambatan antara lain :

- a) Kegiatan pemantauan kegiatan orang asing, LSM/NGO dan lembaga asing tidak tercapainya target monitoring dan rapat karena realisasi pelaksanaannya di akhir tahun dan terbentur waktu
- b) Kegiatan Sosialisasi Peraturan/kebijakan pemerintah tidak tercapainya target jumlah peserta sosialisasi
- c) Kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan tentang Pemilu tidak tercapainya target jumlah peserta sosialisasi
- d) Kegiatan Dukungan Pelaksanaan PEMILU tidak tercapainya target penertiban Alat Peraga Kampanye karena kegiatan ini dianggarkan melalui ABT APBDP tahun 2018 sehingga keterbatasan waktu penyerapan anggaran dan waktu pelaksanaan

2) Solusi

- a) Kegiatan pemantauan kegiatan orang asing, LSM/NGO dan lembaga asing perlu perencanaan yang lebih matang dalam mensinkronkan antara matrik kegiatan dan waktu pelaksanaan
- b) Kegiatan Sosialisasi Peraturan/kebijakan pemerintah perlu optimalisasi dalam rekrutmen peserta dan penyampaian undangan kepesertaan
- c) Kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan tentang Pemilu perlu optimalisasi dalam rekrutmen peserta dan penyampaian undangan kepesertaan
- d) Kegiatan Dukungan Pelaksanaan PEMILU perlu perencanaan yang lebih matang dalam mensinkronkan antara matrik kegiatan dan waktu pelaksanaan



9. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)

a. Program dan Kegiatan

1. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
 - a) Kegiatan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
 - b) Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana evakuasi
 - c) Kegiatan peningkatan kesiagaan penanggulangan bencana
 - d) Kegiatan simulasi dan peningkatan keterampilan aparat penanggulangan bencana
2. Program penanganan tanggap darurat bencana
 - a) Kegiatan pengerahan SDM dan logistik untuk pemulihan darurat penanggulangan bencana
 - b) Kegiatan pos komando siaga bencana
3. Program pasca bencana
 - a) Kegiatan pendataan dampak bencana
 - b) Kegiatan pengembangan partisipasi dan kerjasama rehabilitasi dan Rekontruksi

b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat pencapaian kegiatan dari program-program Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

1. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
 - a) Kegiatan Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam dengan realisasi anggaran sebesar 99,97% dan capaian kinerja sebesar 100%
 - b) Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Evakuasi dengan realisasi anggaran sebesar 99,27% dan capaian kinerja sebesar 100%
 - c) Kegiatan Peningkatan Kesiagaan Penanggulangan Bencana dengan realisasi anggaran sebesar 98,94% dan capaian kinerja sebesar 100%
 - d) Kegiatan Simulasi Dan Peningkatan Keterampilan Aparat Penanggulangan Bencana dengan realisasi anggaran sebesar 99,99% dan capaian kinerja sebesar 100%
2. Program penanganan tanggap darurat bencana
 - a) Kegiatan Pengerahan SDM Dan Logistik Untuk Pemulihan Darurat Penanggulangan Bencana dengan realisasi anggaran sebesar 95,91% dan capaian kinerja sebesar 100%



- b) Kegiatan Pos Komando Siaga Bencana dengan realisasi anggaran sebesar 99,28% dan capaian kinerja sebesar 100%
- 3. Program pasca bencana
 - a) Kegiatan Pendataan Dampak Bencana dengan realisasi anggaran sebesar 81,60% dan capaian kinerja sebesar 100%
 - b) Kegiatan Pengembangan Partisipasi Dan Kerjasama Rehabilitasi dan Rekontruksi dengan realisasi anggaran sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 100%

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Kurangnya koordinas antara BPBD Kota Banjarbaru dengan BPBD Provinsi, TNI dan Polri terhadap penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla),
- b) Kurangnya pengetahuan dan perilaku kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana,
- c) Kurangnya pelatihan kebencanaan pada petugas lapangan BPBD Kota Banjarbaru.

2) Solusi

- a) Meningkatkan koordinasi terhadap instansi terkait dengan menjalin komunikasi yang lebih baik,
- b) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang penanggulangan bencana terutama di daerah rawan bencana.
- c) Perlu diadakannya pelatihan kepada petugas lapangan untuk mengoptimalkan dalam penanganan bencana.

10. URUSAN SOSIAL (DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU)

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
 - a) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Anak Terlantar dan Keluarga Miskin
 - b) Kegiatan Pendampingan Program Keluarga Harapan
 - c) Kegiatan Santunan Tali Asih Kepada Masyarakat
 - d) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pendataan PMKS
 - e) Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Data, Ekspose dan Pelaporan.
- 2) Program Perlindungan Sosial
 - a) Kegiatan Penyediaan Distribusi dan Konsumsi Beras untuk Keluarga Miskin



- b) Kegiatan Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA).
- 3) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dengan Kegiatan:
 - a) Kegiatan Pembinaan dan Rehabilitasi Para Lanjut Usia (LANSIA)
 - b) Kegiatan Penjangkauan Penyalahgunaan Narkoba
 - c) Kegiatan Pembinaan dan Rehabilitasi para Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar
 - d) Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan bagi Anak Jalanan
- 4) Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma dengan Kegiatan
 - a) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma
- 5) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
 - a) Kegiatan Pelaksanaan Rumah Aman
 - b) Kegiatan Pengelolaan Rumah Singgah
- 6) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 - a) Kegiatan Pembinaan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat
 - b) Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial.
- 7) Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan serta Kesetiakawanan
 - a) Kegiatan Pembinaan Veteran dan Janda Veteran
 - b) Kegiatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional
 - c) Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat pencapaian kegiatan dari program-program Penyelenggaraan Urusan Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Banjarbaru, yaitu :

- 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
 - a) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Anak Terlantar dan Keluarga Miskin dengan indikator Jumlah anak keluarga miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) ditargetkan 20 orang terealisasi 11 orang atau persentase 55%
 - b) Kegiatan Pendampingan Program Keluarga Harapan dengan indikator kinerja yaitu Jumlah laporan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dibuat. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH yang menerima bantuan ditargetkan sebanyak 12 laporan dan terealisasi sebanyak 12 laporan atau sebesar 100%,



- c) Kegiatan Santunan Tali Asih Kepada Masyarakat dengan indikator kinerja yaitu Jumlah masyarakat yang menerima santuan tali asih ditargetkan sebanyak 3500 orang dan terealisasi sebanyak 3500 orang atau sebesar 100%,
 - d) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pendataan PMKS dengan indikator kinerja yaitu Jumlah data PMKS, PSKS dan PBI Jaminan Kesehatan Kota Banjarbaru ditargetkan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau sebesar 100%, dan
 - e) Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Data, Ekspose dan Pelaporan dengan indikator kinerja Jumlah Basis Data Terpadu Kota Banjarbaru ditargetkan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi selama 1 dokumen atau sebesar 100%.
- 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- a) Kegiatan Pembinaan dan Rehabilitasi para Lanjut Usia (Lansia) dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Lanjut Usia Terlantar Yang Mendapatkan Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar ditargetkan sebanyak 70 orang dan terealisasi sebanyak 70 orang atau sebesar 100%,
 - b) Kegiatan Kegiatan Penjangkauan Penyalahgunaan Narkoba dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Sosialisasi Kesadaran Bahaya Narkoba bagi PMKS ditargetkan sebanyak 10 kegiatan dan terealisasi sebanyak 10 kegiatan atau sebesar 100%,
 - c) Kegiatan Pembinaan dan Rehabilitasi para Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Hasil Assesment Gepeng dan Orang Terlantar Yang Terlayani ditargetkan sebanyak 180 orang dan terealisasi sebanyak 40 orang atau sebesar 67%,
 - d) Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Bagi Anak Jalanan dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Anak Jalanan Yang Dibina ditargetkan sebanyak 60 orang dan tidak terealisasi atau sebesar 0%.
- 3) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
- a) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Penyandang Cacat Yang Mendapatkan Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar ditargetkan sebanyak 17 orang dan terealisasi sebanyak 17 orang atau sebesar 100%.
- 4) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
- a) Kegiatan Pelaksanaan Rumah Aman dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Rumah Aman Yang Dikelola Untuk Melayani PMKS ditargetkan sebanyak 1 buah dan terealisasi sebanyak 1 buah atau sebesar 100%, dan



- b) Kegiatan Pengelolaan Rumah Singgah dengan indikator kinerja yaitu Jumlah PMKS yang mendapat bantuan dan Pelayanan Dirumah Singgah ditargetkan sebanyak 1 buah dan terealisasi sebanyak 1 buah atau sebesar 100%.
- 5) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- a) Kegiatan Pembinaan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Dibina ditargetkan sebanyak 3 kegiatan dan terealisasi sebanyak 3 kegiatan atau sebesar 100%, dan
 - b) Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Dibina ditargetkan sebanyak 4 kali dan terealisasi sebanyak 4 kali atau sebesar 100%.
- 6) Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nila-Nilai Kepahlawanan Serta Kesetiakawanan
- a) Kegiatan Pembinaan Veteran dan Janda Veteran dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Veteran dan Janda Veteran Yang Diberikan Bantuan ditargetkan sebanyak 2 kegiatan dan terealisasi sebanyak 2 kegiatan atau sebesar 100%,
 - b) Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dengan indikator kinerja yaitu Jumlah PHBN yang diperingati ditargetkan sebanyak 5 kali dan terealisasi sebanyak 5 kali atau sebesar 100%,
 - c) Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Taman makam Pahlawan yang dipelihara ditargetkan sebanyak 1 buah dan terealisasi sebanyak 1 buah atau sebesar 100%.
 - d) Perubahan dan pembagian PMKS sangat dinamis oleh karena banyak faktor sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan memerlukan data yang update dan terukur dan didukung data yang valid.
- 7) Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nila-Nilai Kepahlawanan Serta Kesetiakawanan
- a) Kegiatan Penyediaan Distribusi dan Konsumsi Beras untuk keluarga miskin dengan indikator kinerja yaitu Jumlah KPM Yang Mendapat Bantuan ditargetkan sebanyak 6525 KPM dan terealisasi sebanyak 6525 KPM atau sebesar 100%,
 - b) Kegiatan Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Anggota TAGANA yang Dibina tanggap darurat bencana ditargetkan sebanyak 40 orang dan terealisasi sebanyak 40 orang atau sebesar 100%.



c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Kurangnya kemampuan dan keterampilan secara teknis sumber daya manusia dalam penanganan PMKS
- b) Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi penanganan PMKS oleh stock holder/ Intansi Praktisi dan Lembaga Sosial Lainnya (LKS).
- c) Masih belum adanya keterpaduan arah program penanganan dan pembinaan kepada masing-masing jenis PMKS di Kota Banjarbaru
- d) Kurang aktifnya Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penanganan PMKS
- e) Belum terlaksananya pembinaan secara maksimal terhadap peran dan tugas LKS, secara umum maupun secara administrative dalam penanganan PMKS
- f) Belum terselenggaranya pelaksanaan pembinaan kepada Keluarga Penerima Manfaat dalam upaya untuk memutus rantai ketergantungan penerimaan bantuan sosial.
- g) Kurangnya kesadaran sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk meningkatkan kesejahteraannya sebagai salah satu dampak ketergantungan penerima bantuan sosial secara terus menerus.

2) Solusi

- a) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis SDM dalam penanganan PMKS dengan mengikut sertakan pada Diklat, Pelatihan, Bimtek dll.
- b) Perlu terarahanya program dan perencanaan penanganan PMKS SKPD terkait organisasi social dan LKS serta pelayanan sehingga penanganan tepat sasaran dan bermanfaat.
- c) Meningkatkan koordinasi baik stock holder, pemerintah propinsi , Kabupaten dan Kota
- d) Adanya keterpaduan Program yang tepat dalam penanganan dan pembinaan masing-masing jenis PMKS di Kota Banjarbaru.
- e) LKS yang terdaftar perlu pembinaan, dimonitoring dan evaluasi
- f) Perlunya Pemberdayaan LKS di Kota Banjarbaru melalui pembinaan dan kerjasama oleh Dinas Sosial Kota Banjarbaru
- g) Perlu dilaksanakan antisipasi pertumbuhan PMKS melalui kebijakan dan tindakan yang nyata yang terkoordinir antara lain melaksanakan inovasi program yang tepat guna dan tepat sasaran.



- h) Melaksanakan pendataan terhadap PMKS di kota banjarbaru dengan tersedianya data, sebagai dasar pemngambilan kebijakan.
- i) Pemberdayaan Sosial Ekonomi PMKS melalui kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebagai upaya menumbuhkan potensi ekonomi baru dilapisan masyarakat ekonomi lemah sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

1. URUSAN KETENAGAKERJAAN (DINAS KOPERASI, UKM, DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU)

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - a) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja.
- 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - a) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja,
 - b) Kegiatan Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat.
- 3) Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
 - a) Kegiatan Fasilitas penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial,
 - b) Kegiatan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan,
 - c) Kegiatan Sosialisasi upah minimum provinsi kalimantan selatan,
 - d) Kegiatan Pembinaan dan penyuluhan kelembagaan ketenagakerjaan,
 - e) Kegiatan Penyuluhan kelembagaan ketenagakerjaan,
 - f) Kegiatan Forum lembaga kerjasama tripartit,
 - g) Kegiatan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dan
 - h) Kegiatan Pembinaan jaminan sosial.

b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat realisasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan dari program-program Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan yang dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru, yaitu :

- 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri dari 3 indikator dan 1 kegiatan.



Indikator kinerja dari Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja yaitu :

- a) Persentase Pencari Kerja Yang Memiliki Kompetensi Tahun 2018 ditargetkan sebesar 8,47% dan terealisasi sebesar 7,81%.
- b) Besaran tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun 2018 ditargetkan sebesar 55% dan terealisasi sebesar 100%.

Kegiatan dari Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja yaitu :

- a) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja dengan realisasi anggaran sebesar 99,49% dan capaian program sebesar 100%. Kegiatan dilaksanakan sebanyak 9 paket kegiatan berbasis masyarakat dan 1 paket berbasis kompetensi dengan total 144 peserta, adapun 9 paket kegiatan terbagi 4 kejuruan antara lain : Kejuruan menjahit, Kejuruan Komputer, Kejuruan Tata Rias, Kejuruan Las.

2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dari 3 indikator dan 2 kegiatan.

Indikator kinerja dari Program Peningkatan Kesempatan Kerja yaitu :

- a) Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan tahun 2018 ditargetkan sebesar 23,52% dan terealisasi sebesar 21,65%
- b) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat tahun 2018 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%
- c) Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan tahun 2018 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%.

Kegiatan dari Program Peningkatan Kesempatan Kerja yaitu :

- a) Kegiatan Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja dengan realisasi anggaran sebesar 95,09% dan capaian kegiatan sebesar 100%. Penyusunan buku analisa pasar kerja/informasi pasar kerja pada tahun 2018 sebanyak 24 buku. Pelayanan kartu AK-1 bagi para pencari kerja, dimana pada tahun 2018 pencari kerja terdaftar sebanyak 1.843 orang, terdiri dari laki-laki 891 orang dan perempuan 952 orang
- b) Kegiatan Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat dengan realisasi anggaran sebesar 98,92% dan capaian kegiatan sebesar 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan model penerapan teknologi tepat guna (TTG) sebanyak 5 paket / 100 orang yaitu pembuatan aneka kue di Kelurahan Kemuning, Kelurahan Sungai Ulin, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kelurahan Guntung Manggis.



3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan terdiri dari 5 indikator dan 8 kegiatan.

Indikator kinerja dari Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan yaitu :

- a) Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Tahun 2018 ditargetkan sebesar 66,80% dan terealisasi sebesar 72,27%
- b) Angka sementara pengusaha-pekerja per tahun 2018 ditargetkan sebesar 25% dan terealisasi sebesar 29,25%
- c) Besaran pekerja/buruh yang menjadi Peserta Program Jamsostek Tahun 2018 ditargetkan sebesar 75,78% dan terealisasi sebesar 63,52%
- d) Persentase perusahaan yang membayar upah pekerja sesuai UMP Tahun 2018 ditargetkan sebesar 75,78% dan terealisasi sebesar 63,52%
- e) Persentase perusahaan yang melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan Tahun 2018 ditargetkan sebesar 10,82% dan terealisasi sebesar 17,28%

Kegiatan dari Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan yaitu :

- a) Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan realisasi anggaran sebesar 91,52% dan capaian kegiatan sebesar 100%. Persentase penyelesaian kasus PHI dan PHK pada Tahun 2018 mencapai 100% dimana ada 11 kasus telah ditindak lanjuti, dari 11 kasus tersebut 8 kasus dapat diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) ditingkat mediasi dan 3 kasus diselesaikan melalui mediasi (bantu tingkat mediasi) oleh tim mediator diteruskan anjuran ke pengadilan hubungan industrial di Banjarmasin.
- b) Kegiatan Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan dengan realisasi anggaran sebesar 88,89% dan capaian kegiatan sebesar 100%. Sosialisasi ini dilaksanakan sebanyak 3 tahap dimana peserta sosialisasi terdiri dari 26 perusahaan
- c) Kegiatan Sosialisasi Upah Minimum Provinsi Kalimantan Selatan dengan realisasi anggaran sebesar 71,09% dan capaian kegiatan sebesar 100%. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember 2018 di Aula Gawi Sabarataan Balai Kota Banjarbaru yang diikuti oleh 75 perusahaan di Kota Banjarbaru
- d) Kegiatan pembinaan dan penyuluhan kelembagaan ketenagakerjaan dengan realisasi anggaran sebesar 99,99% dan capaian kegiatan sebesar 100%. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan kelembagaan ketenagakerjaan dilaksanakan pada 30 perusahaan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perusahaan mengenai peraturan ketenagakerjaan



- e) Kegiatan Penyuluhan Kelembagaan Ketenagakerjaan dengan realisasi anggaran sebesar 89,68 dan capaian kegiatan sebesar 100%. Kegiatan penyuluhan LKS Bipartit secara klasikal sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah peserta 60 (enam puluh) orang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada calon pekerja.
- f) Kegiatan Forum Lembaga Kerjasama Tripartit dengan realisasi anggaran sebesar 86,28% dan capaian kegiatan sebesar 100%, Pada tahun 2018 dilaksanakan 3 (tiga) kali Rapat Sekretariat Bersama dan Rapat Pleno LKS Tripartit. Diharapkan dengan dilaksanakannya dengan forum LKS Tripartit dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pekerja dan pengusaha tentang hakekat hubungan industrial
- g) Kegiatan Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan realisasi anggaran sebesar 86,28% dan capaian kegiatan sebesar 100%, Kegiatan ini dilakukan sebanyak 10 kali pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober dan Nopember yang dilakukan pada 2 (dua) pasar tradisional yaitu Pasar Bauntung dan Pasar Ulin Raya Kec. Landasan Ulin. Dimana Nilai KHL ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan upah minimum yang berlaku bagi buruh/pekerja
- h) Kegiatan Pembinaan Jaminan Sosial dengan realisasi anggaran sebesar 28,84% dan capaian program sebesar 100%. Kegiatan pembinaan jaminan sosial diikuti oleh 35 perusahaan dari 105 perusahaan yang terdiri dari unsur perusahaan swasta maupun BUMN di Kota Banjarbaru. Maksud kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran dan besaran tenaga kerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Kurangnya pemahaman dari pencari kerja yang sudah memperoleh kartu AK/I yang sudah diterima bekerja untuk melaporkan penempatannya kepada petugas penempatan tenaga kerja.
- b) Belum adanya angkutan operasional untuk membawa bahan dan peralatan praktek bagi pelatihan dikelurahan dan kecamatan.
- c) Pengusaha dan pekerja kurang memahami tata cara dan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja.
- d) Kegiatan Pembinaan Jaminan Sosial hanya dapat dilaksanakan 1 kali dari target 3 kali dikarenakan diperlukan surat perjanjian kerjasama dengan pihak BPJS



Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, yang mana surat perjanjian tersebut lama tertahan di bidang Hukum sampai bulan Oktober belum juga selesai.

2) Solusi

- a) Melakukan sosialisasi dan jemput bola kepada pencari kerja untuk data laporan penempatan tenaga kerja
- b) Memerlukan mobil dinas operasional untuk membawa bahan dan peralatan praktek.
- c) Melakukan penyuluhan penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PHI) dan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab/dialog.
- d) Surat perjanjian kerjasama cukup dilakukan oleh Kepala Dinas mewakili Walikota, dan tidak berfokus hanya pada BPJS Kesehatan tetapi juga pada BPJS Ketenagakerjaan dalam pembinaan jaminan sosial.

2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANJARBARU

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan dan Anak
 - a) Kegiatan Pembinaan P2WKS dan GSI
 - b) Kegiatan Pembinaan Perempuan Indonesia Maju Mandiri,
 - c) Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak.
 - d) Kegiatan Kota Layak Anak
- 2) Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
 - a) Kegiatan Sosialisasi Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan,
 - b) Kegiatan Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita (GOW),
 - c) Kegiatan Pembinaan Organisasi DWP,
 - d) Kegiatan Pembinaan Organisasi Gatriwara, dan
 - e) Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan.

b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat pencapaian kegiatan dari program-program Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru yaitu :



- 1) Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan, memiliki 3 indikator dan 4 kegiatan.

Indikator Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan yaitu :

- a) Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga dengan target 100 % realisasi 100 % dan capaian sebesar 100 %
- b) Meningkatnya perekonomian masyarakat dengan target 100 % realisasi 100 % dan capaian sebesar 100 %
- c) Meningkatnya penggarapan kelurahan ramah anak dengan target 25 % realisasi 25 % dengan capaian sebesar 100 %

Kegiatan Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan yaitu :

- a) Kegiatan Pembinaan P2WKSS dan GSI dengan realisasi anggaran sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 100%,
- b) Kegiatan Pembinaan Perempuan Indonesia Maju Mandiri dengan realisasi anggaran sebesar 96,00% dan capaian kinerja sebesar 90%,
- c) Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan realisasi anggaran sebesar 86,10% dan capaian kinerja sebesar 100%.
- d) Kegiatan Kota Layak Anak dengan realisasi anggaran sebesar 99,10% dan capaian kinerja sebesar 100%.

- 2) Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan, memiliki 1 indikator dan 5 kegiatan.

Indikator Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan yaitu :

- a) Meningkatnya Pembinaan Terhadap Organisasi Perempuan di Kota Banjarbaru dengan target 36 organisasi realisasi 36 organisasi dan capaian sebesar 100.

Kegiatan Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan yaitu :

- a) Kegiatan Sosialisasi Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan dengan realisasi anggaran sebesar 78,20% dan capaian kinerja sebesar 80%,
- b) Kegiatan Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dengan realisasi anggaran sebesar 99,80% dan capaian kinerja sebesar 100%,
- c) Kegiatan Pembinaan Organisasi DWP dengan realisasi anggaran sebesar 96,60% dan capaian kinerja sebesar 100%,
- d) Kegiatan Pembinaan Organisasi Gatriwara dengan realisasi anggaran sebesar 98,10% dan capaian kinerja sebesar 100%, dan
- e) Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan dengan realisasi anggaran sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 100%,



c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Realisasi keuangan kegiatan Sosialisasi Kesetaraan Gender dalam Pembangunan yang realisasi keuangannya sebesar 78,2 persen. Adapun permasalahannya adalah tidak terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi PPRG karena belum terbentuknya Tim Monitoring dan Evaluasi PPRG. Adapun solusinya harus segera dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi pada kegiatan PPRG.

2) Solusi

Harus segera dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi pada kegiatan PPRG.

3. URUSAN PANGAN (DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN KOTA BANJARBARU)

a. Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

- a) Kegiatan Laporan Berkala Kondisi Ketahanan pangan Daerah
- b) Kegiatan Pendataan Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan
- c) Kegiatan Pemantauan dan Analisis Akses pangan Masyarakat
- d) Kegiatan Ketersediaan Pangan Masyarakat
- e) Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan (PPH Konsumsi)
- f) Kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif (konsumsi)
- g) Kegiatan Pendataan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan
- h) Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
- i) Kegiatan Pengembangan Informasi dan Kemitraan Pelaku Usaha Pertanian
- j) Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Landasan Ulin
- k) Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Banjarbaru
- l) Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Cempaka
- m) Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Liang Anggang

2) Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan Lapangan

- a) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan

3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

- a) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Penyuluhan, Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
- b) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Penyuluhan Pertanian (DAK)



- c) Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM dan Penerapan Metode Informasi UPT Landasan Ulin
- d) Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM dan Penerapan Metode Informasi UPT BPP Liang Anggang
- e) Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM dan Penerapan Metode Informasi UPT BPP Banjarbaru
- f) Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM dan Penerapan Metode Informasi UPT BPP Cempaka

b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat pencapaian kegiatan dari program-program Penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Dan Perikanan Kota Banjarbaru, yaitu:

1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Program ini memiliki 3 (tiga) indikator kinerja yang capaian kinerjanya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Sembilan (9) Kelompok Bahan Pangan (Score PPH Ketersediaan) : (Padi-padian, Umbi-umbian, Pangan Hewani, Minyak dan Lemak, Buah/Biji Berminyak, Kacang-kacangan, Gula, Sayur dan Buah, dan lain-lain), dari target 82,00 dapat terealisasi 81,93 hal ini menunjukkan ketersediaan bahan pangan di Kota Banjarbaru sudah beragam.
- b) Faktor Pembentuk PPH Konsumsi : Sembilan (9) Kelompok Bahan Pangan Yang Dikonsumsi, dari target 91,29 dapat terealisasi 89,20.
- c) Persentase Sarana Media Elektronik dan Media Cetak Yang Dapat Dijangkau Oleh Penyuluh Pertanian dan Masyarakat Petani, dengan target 66 dapat terealisasi 100%.

Pencapaian kegiatan pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) yaitu :

- a) Kegiatan Laporan Berkala Kondisi Ketahanan pangan Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 100%,
- b) Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan (PPH Konsumsi) dengan realisasi anggaran sebesar 96,95% dan capaian sebesar 100%,
- c) Kegiatan Pendataan Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan dengan realisasi anggaran sebesar 96,86% dan capaian sebesar 100%.
- d) Kegiatan Pemantauan dan Analisis Akses pangan Masyarakat dengan realisasi anggaran sebesar 99,99% dan capaian sebesar 100%.



- e) Kegiatan Ketersediaan Pangan Masyarakat dengan realisasi anggaran sebesar 100% dan capaian sebesar 100%.
 - f) Kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif (konsumsi) dengan realisasi anggaran sebesar 99,22% dan capaian sebesar 100%.
 - g) Kegiatan Pendataan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan dengan realisasi anggaran sebesar 100% dan capaian sebesar 100%.
 - h) Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan dengan realisasi anggaran sebesar 99,69% dan capaian sebesar 100%.
 - i) Kegiatan Pengembangan Informasi dan Kemitraan Pelaku Usaha Pertanian dengan realisasi anggaran sebesar 100% dan capaian sebesar 100%.
 - j) Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Landasan Ulin dengan realisasi anggaran sebesar 100% dan capaian sebesar 100%.
 - k) Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Banjarbaru dengan realisasi anggaran sebesar 100% dan capaian sebesar 100%.
 - l) Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Cempaka dengan realisasi anggaran sebesar 100% dan capaian sebesar 100%.
 - m) Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Liang Anggang dengan realisasi anggaran sebesar 100% dan capaian sebesar 100%.
- 2) Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan Lapangan
- Pencapaian Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan Lapangan dengan indikator kinerja sebagai berikut:
- a) Persentase Tenaga Penyuluh Pertanian PNS Yang Memiliki Sertifikat ditargetkan sebesar 25% dan terealisasi sebesar 6,25% atau pencapaian sebesar 25%,
 - b) Persentase Tenaga Penyuluh Pertanian Non PNS Yang Memiliki STTPL ditargetkan sebesar 38,46% dan terealisasi sebesar 63,63% atau pencapaian sebesar 165%,
 - c) Persentase Tenaga Penyuluh Pertanian Yang Berkinerja Baik ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau pencapaian sebesar 100%, dan
 - d) Persentase Penyuluh Pertanian Swadaya Yang Mengikuti Diklat ditargetkan sebesar 50% dan terealisasi sebesar 50% atau pencapaian sebesar 100%.
- Pencapaian Kegiatan pada Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan Lapangan
- yaitu :
- a) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan dengan realisasi anggaran sebesar 82,81% dan capaian sebesar 100%.



3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Pencapaian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- a) Indikator kinerja Prosentase tenaga Penyuluh Pertanian PNS yang memiliki sertifikat dengan target 25 % dapat terealisasi 6,25% dengan capaian kinerja 25%,
- b) Prosentase tenaga Penyuluh Pertanian Non PNS yang memiliki STTPL dengan target 38,46 % dapat terealisasi 63,63% dengan capaian kinerja 165%.
- c) Prosentase Tenaga Penyuluh Pertanian yang berkinerja baik dengan target 100% dapat terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100%.
- d) Prosentase Penyuluh Pertanian Swadaya yang mengikuti Diklat dengan target 50% terealisasi 50% dengan capaian kinerja 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan:

- a) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Penyuluhan, Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis dengan realisasi anggaran sebesar 97,01% dengan capaian sebesar 100%,
- b) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Penyuluhan Pertanian (DAK) dengan realisasi anggaran sebesar 98,99% dengan capaian sebesar 100%,
- c) Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM dan Penerapan Metode Informasi UPT Landasan Ulin dengan realisasi anggaran sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%,
- d) Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM dan Penerapan Metode Informasi UPT BPP Liang Anggang dengan realisasi anggaran sebesar 97,18% dengan capaian sebesar 100%,
- e) Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM dan Penerapan Metode Informasi UPT BPP Banjarbaru dengan realisasi anggaran sebesar 96,22% dengan capaian sebesar 100%,
- f) Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM dan Penerapan Metode Informasi UPT BPP Cempaka dengan realisasi anggaran sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%,

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani merupakan program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani terutama melalui peningkatan pendapatan petani dan pemenuhan kebutuhan dasar yang terkait dengan pangan petani. Dalam rangka pelaksanaan program tersebut maka dilaksanakan beberapa kegiatan, sebagai berikut :



- a) Peningkatan Kemampuan Lembaga Penyuluhan, Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis dengan indikator kinerja sasaran Prosentase Kelas Kelompok Tani dari target 34,55% realisasi 34,55% tercapai 100%. Kegiatan
- b) Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Penyuluh Pertanian (DAK)
- c) Peningkatan Kualitas SDM dan penerapan Metode Informasi UPT BPP Banjarbaru, Cempaka, Landasan Ulin dan Liang Anggang. Indikator Kinerja Sasaran Prosentase Kenaikan Kelas BPP dapat berjalan dengan baik dengan capaian target 25% tercapai 100%.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

1) Ketersediaan Pangan dan Cadangan Pangan

Terdapat dua indikator yaitu indikator ketersediaan energi dan protein perkapitan dan indikator penguatan cadangan pangan. Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lainnya. Skor PPH tingkat ketersediaan kota Banjarbaru tahun 2018 sebesar 81,93 dan masih berada di bawah skor maksimal 100. Jika dibandingkan dengan skor PPH tahun 2017 sebesar 80,09 terjadi peningkatan. Skor PPH dibawah skor maksimum yaitu terutama pada kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, serta buah dan sayur. Selain itu data untuk minyak kelapa sawit juga belum *up date*. Penguatan cadangan pangan bertujuan meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien untuk menjamin pasokan pangan yang stabil. Penyediaan cadangan pangan ini dilaksanakan selama 2 tahun anggaran yaitu tahun 2017 dan 2018. Stok cadangan pangan pemerintah sampai tahun 2018 sebanyak 28.000 kg .

2) Distribusi dan Akses Pangan

Terdapat dua indikaor yaitu indikator ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah dan indikator stabilitas harga dan pasokan pangan. ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah adalah kumpulan data harga pangan, pasokan pangan dan akses pangan yang dilakukans ecara rutin oleh provinsi, kabupaten dan kota untuk dapat digunakan sebagai bahan analisis. untuk perumusan kebijakan. Stabilitas harga adalah jika harga dinyatakan stabil apabila gejolak harga paangan di suatu wilayah kurang 25% dari kondisi normal. Stabilitas pasokan pangan adalah jika pasokan pangan dinyatakan stabil apabila penurunan pasokan pangan disuatu wilayah berkisar antara 5% - 25%.



3) Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

Terdapat dua indikator yaitu indikator skor pola pangan harapan (PPH) dan indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. Penganekaragaman konsumsi pangan adalah upaya memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Konsumsi energi Kota Banjarbaru tahun 2018 sebesar 1.889,2 kkal/kap/hari. Angka ini sudah mendekati Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dianjurkan yaitu sebesar 2.000 kkal/kap/hari. Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia.

4) Penanganan Kerawanan Pangan

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Daerah rawan pangan pada prinsipnya tidak terlalu signifikan di daerah perkotaan.

Untuk lebih jelasnya Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Ketahanan Pangan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Ketahanan Pangan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM		Realisasi Pencapaian	Target Nasional	Permasalahan	Solusi
1	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	98,9%	90%	Sumber data ketersediaan pangan masih kurang	Harus ada kerjasama yang baik antar Dinas dan pedagang
		2	Penguatan Cadangan Pangan	28%	60%		
2	Distribusi dan Akses Pangan	3	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	80%	90%	Kurang informasi tentang akses pangan daerah	Perlu peningkatan dalam mencapai tujuan akses pangan
		4	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	90%	90%		



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM		Realisasi Pencapaian	Target Nasional	Permasalahan	Solusi
3	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	5	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	89,2%	90%	Kurangnya jumlah rumah tangga sampel yang di data	Perlu penambahan jumlah rumah tangga sampel
		6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80%	80%	Kurangnya jumlah sampel pangan segar yang diuji di Laboratorium	Penambahan jumlah sampel pangan segar yang diuji di laboratorium
4	Penanganan Kerawanan Pangan	7	-	-	60%	Daerah rawan pangan prinsipnya tidak terlalu signifikan di kota	Bisa diatasi dengan bantuan sosial dan cadangan pangan pemerintah

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru ditemukan berbagai permasalahan sebagai berikut :

- a) Skor PPH ketersediaan belum tercapai 100% (dari target skor 82,0 dapat terealisasi 81,93). Skor 81,93 untuk PPH ketersediaan pangan sudah tinggi walaupun belum mencapai target. Hal ini menunjukkan ketersediaan pangan di Kota Banjarbaru sudah beragam walaupun masih di dominasi padi-padian.
- b) Sembilan bahan pangan yang dikonsumsi masih ada yang rendah seperti minyak/lemak, buah/biji berminyak, gula, sayur dan buah. Hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat pengetahuan tentang konsumsi bahan pangan tersebut, Serta ekonomi masyarakat yang masih rendah sehingga daya beli bahan pangan tersebut cukup terbatas.
- c) Masih rendahnya Diklat Sertifikasi yang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang.

2) Solusi

Solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan ketahanan pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah



- a) Melakukan peningkatan produksi melalui penerapan teknologi dan perluasan lahan pertanian dan melalui kebijakan impor dan ekspor untuk jenis-jenis pangan non produksi sehingga ketersediaan pangan yang bisa dikonsumsi masyarakat dapat terus tersedia sepanjang tahun tanpa mengalami lonjakan harga yang tinggi, namun karena data-data yang diperlukan dalam analisis ini masih sangat minim maka diperlukan koordinasi dengan instansi teknis terkait agar data yang dihasilkan benar-benar bisa menjadi dasar pengambilan kebijakan program ketersediaan pangan daerah.
- b) Perlu adanya kegiatan penyuluhan/bimbingan teknis tentang penganekaragaman/diversifikasi dengan sembilan (9) kelompok bahan pangan yang dikonsumsi harus seimbang seperti padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, dan lain-lain melalui pengembangan teknologi pangan untuk menarik minat masyarakat dalam mengkonsumsi pangan non beras.
- c) Membuat surat permohonan kepada lembaga berwenang, agar diklat keahlian dan sertifikasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan selalu dilibatkan.

4. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP (DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARBARU)

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - a) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan,
 - b) Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan,
 - c) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Air Limbah dan Sampah TPA, dan
 - d) Kegiatan Pemeliharaan Rutin TPS dan Kontainer
 - e) Peningkatan Pengelolaan IPLT.
- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - a) Kegiatan Koordinasi penilaian kota sehat / Adipura,
 - b) Kegiatan Pengawasan pelaksanaan kebijakan Bidang lingkungan hidup,
 - c) Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3,
 - d) Kegiatan Pengkajian dampak lingkungan,
 - e) Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih,
 - f) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup,



- g) Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup,
 - h) Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan,
 - i) Kegiatan Kota Bersih, Hijau dan Sehat,
 - j) Kegiatan Peningkatan Pengelola Laboratorium Lingkungan,
 - k) Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Penegakan Hukum.
- 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- a) Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim,
 - b) Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA,
 - c) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem, dan
 - d) Kegiatan Penilaian Kantor berwawasan lingkungan (Eco-Office Award).
- 4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- a) Kegiatan Peningkatan Edukasi dan komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan,
 - b) Kegiatan Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan,
 - c) Kegiatan Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah,
 - d) Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Hidup
- 5) Program Peningkatan Pengendalian Polusi
- a) Kegiatan Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran, dan
 - b) Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan.
- 6) Program Kualitas Kebersihan Lingkungan
- a) Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Kebersihan Kota,
 - b) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebersihan, dan
 - c) Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Kebersihan Lingkungan.

b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat pencapaian kegiatan dari program-program Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru, yaitu :

- 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- a) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan dengan realisasi anggaran sebesar 96,05% dan capaian kinerja sebesar 100%,
 - b) Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan dengan realisasi anggaran sebesar 87,43% dan capaian kinerja sebesar 100%,



- c) Peningkatan Pengelolaan Air Limbah dan Sampah TPA dengan realisasi anggaran sebesar 91,61% dan capaian kinerja sebesar 100%,
 - d) Pemeliharaan Rutin TPS dan Kontainer dengan realisasi anggaran sebesar 96,56% dan capaian kinerja sebesar 100%,
 - e) Peningkatan pengelolaan Instalasi Lumpur Tinja (IPLT) dengan realisasi anggaran sebesar 86,98% dan capaian kinerja sebesar 100%.
- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- a) Koordinasi penilaian kota sehat / Adipura dengan realisasi anggaran sebesar 96,90% dan capaian kinerja sebesar 100%,
 - b) Kegiatan Pengawasan pelaksanaan kebijakan Bidang lingkungan hidup dengan realisasi anggaran sebesar 98,88% dan capaian kinerja sebesar 100%,
 - c) Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 dengan realisasi anggaran sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 100%,
 - d) Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih dengan realisasi anggaran sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 100%,
 - e) Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup dengan realisasi anggaran sebesar 89,06% dan capaian kinerja sebesar 100%,
 - f) Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan dengan realisasi anggaran sebesar 99,09% dan capaian kinerja sebesar 100%,
 - g) Kegiatan Kota Bersih, Hijau dan Sehat dengan realisasi anggaran sebesar 9,587% dan capaian kinerja sebesar 100%,
 - h) Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Penegakan Hukum dengan realisasi anggaran sebesar 99,97% dan capaian kinerja sebesar 100%.
- 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- a) Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim dengan realisasi anggaran sebesar 97,33% dan capaian kinerja sebesar 100%,
 - b) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem dengan realisasi anggaran sebesar 99,97% dan capaian kinerja sebesar 100%, dan
 - c) Kegiatan Penilaian Kantor berwawasan lingkungan (Eco-Office Award) dengan realisasi anggaran sebesar 96,82% dan capaian kinerja sebesar 100%.
- 4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- a) Kegiatan Peningkatan Edukasi dan komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan dengan realisasi anggaran sebesar 89,76% dan capaian kinerja sebesar 100%,



- b) Kegiatan Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 89,94% dan capaian kinerja sebesar 100%.
- 5) Program Peningkatan Pengendalian Polusi
 - a) Kegiatan Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran dengan realisasi anggaran sebesar 97% dan capaian kinerja sebesar 100%, dan
 - b) Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan dengan realisasi anggaran sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 100%.
- 6) Program Kualitas Kebersihan Lingkungan
 - a) Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Kebersihan Kota dengan realisasi anggaran sebesar 90,06% dan capaian kinerja sebesar 100%,
 - b) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebersihan dengan realisasi anggaran sebesar 98,05% dan capaian kinerja sebesar 100%,
 - c) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebersihan (DAK) dengan realisasi anggaran sebesar 97,13% dan capaian kinerja sebesar 100%,
 - d) Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Kebersihan Lingkungan (TPS3R dan Bank Sampah) dengan realisasi anggaran sebesar 93,67% dan capaian kinerja sebesar 100%.

b. Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan Organisasi
 - a) Terdapatnya tupoksi yang rancu antara bidang Tata lingkungan dan Bidang PPLH
 - b) Penamaan jabatan pada level Eselon IV tidak mencerminkan adanya keterkaitan dengan jabatan level Eselon III di atasnya.
- 2) Permasalahan Lingkungan
 - a) Penurunan kualitas air sungai dan udara yang disebabkan oleh kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran.
 - b) Beberapa parameter kualitas air sungai masih melebihi baku mutu air kelas II seperti kandungan bakteri coli, BOD, COD, DO, Phospat, Sulfur, dan minyak/lemak.
 - c) Beberapa parameter kualitas udara ambien masih melebihi baku mutu udara ambien dan baku mutu kebisingan.
 - d) Aturan pengelolaan limbah belum seluruhnya ditaati oleh para pelaku usaha.
 - e) Belum seluruh pelaku usaha melaporkan dokumen pengelolaan lingkungan (Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan/RKL dan RPL) secara rutin sesuai aturan yang berlaku.
 - f) Masih banyanya TPS liar di wilayah Kota Banjarbaru.
 - g) Kurang luasnya lahan untuk wilayah TPA Kota Banjarbaru.



5. URUSAN PERTANAHAN (BAGIAN KERJASAMA DAN AGRARIA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARBARU)

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
 - a) Pembakuan Nama Rupa Bumi,
 - b) Kegiatan Penataan dan Penegasan Tata Batas Wilayah
 - c) Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Tanah dan Sertifikasi Tanah.

b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat pencapaian kegiatan dari program-program Penyelenggaraan Urusan Pertanahan yang dilaksanakan Oleh Bagian Kerjasama Dan Agraria Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru yaitu :

- 1) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
 - a) Kegiatan Pembakuan Nama Rupa Bumi dengan realisasi anggaran sebesar 15,06%,
 - b) Kegiatan Penataan dan Penegasan Tata Batas Wilayah dengan realisasi anggaran sebesar 72,37% dan
 - c) Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Sertifikasi Tanah dengan realisasi anggaran sebesar 91,17%.

c. Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan
 - a) Belum adanya Permendagri tentang Penegasan Batas Daerah antara Kota Banjarbaru dengan Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Banjar sehingga tidak dapat diterbitkan Perwali/SK Walikota tentang Batas Wilayah Administrasi Kelurahan se Kota Banjarbaru.
- 2) Solusi
 - a) Percepatan penyelesaian Penegasan Batas Daerah antara Kota Banjarbaru dengan Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Banjar.

6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARBARU)

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan
 - a) Kegiatan pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
 - b) Kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan



- c) Kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan
- d) Kegiatan Penatausahaan data kependudukan
- e) Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)
- f) Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil

b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat pencapaian kegiatan dari program-program Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yaitu :

1) Program Penataan Administrasi Kependudukan

- a) Kegiatan Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu dengan realisasi anggaran sebesar 9,66% dan capaian kinerja 90,33%,
- b) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan dengan realisasi anggaran sebesar 11,97% dan capaian kinerja 88,02%,
- c) Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dengan realisasi anggaran sebesar 1,54% dan capaian kinerja sebesar 98,45%,
- d) Kegiatan Penatausahaan Data Kependudukan dengan realisasi anggaran sebesar 6,78% dan capaian kinerja sebesar 93,21%,
- e) Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik) dengan realisasi anggaran sebesar 8,63% dan capaian kinerja sebesar 91,50%, dan
- f) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil dengan realisasi anggaran sebesar 21,41% dan capaian kinerja sebesar 78,58%.

Tabel 4.4

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	Tahun 2018
		Indikator	
1	Pelaksanaan program/kegiatan kependudukan		
	a. Pencetakan/penerbitan Kartu Keluarga (KK) untuk penduduk Kota Banjarbaru	- cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK)	100 %
	b. Pencetakan/penerbitan KTP-el untuk penduduk Kota Banjarbaru	- cakupan penduduk ber KTP persatuan wajib KTP	100 %



2	Pelaksanaan program/kegiatan pencatatan sipil		
	a. Pencetakan/penerbitan Kutipan Akta Kelahiran untuk penduduk Kota Banjarbaru	- Cakupan bayi lahir ber akta kelahiran	100 %
	b. Pencetakan/penerbitan Kutipan Akta Kematian untuk penduduk Kota Banjarbaru	- Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	100%

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Dalam tahun 2018 untuk permasalahan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah mulai berkurang disbanding dengan tahun 2017 yang lalu, adapun permasalahan yang masih ada sebagai berikut :

1. Permasalahan Sistem Teknologi Informasi

- Belum terkoneksi jaringan dengan semua SKPD

Permasalahan yang sudah diselesaikan sebagai berikut :

1. Sistem Pelayanan

Untuk pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terbagi 2 (dua) yaitu Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pelayanan di Kecamatan terkadang ada kendala tetapi kendala ini bisa diatasi. Untuk SOP dan SP sudah ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada tahun 2018 ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah ada penambahan terutama untuk petugas pelayanan loket baik loket pelayanan Akta-akta Pencatatan Sipil maupun dokumen kependudukan (KK, KTP dan Surat Pindah Datang).

Terkait dengan penambahan petugas pelayanan perlu adanya pembinaan kepada petugas dalam hal melayani kepada masyarakat, bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengerti, bisa menerima penjelasan – penjelasan dari petugas dalam proses pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sehingga adanya kesalahan dalam proses pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bisa di minimalisir dan petugas loket bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.



2) Solusi

- a) Kedepannya perlu adanya latihan kepribadian yang formal untuk petugas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b) Adanya penempatan petugas dari Disdukcapil pada 5 (lima) Kecamatan untuk verifikasi berkas dan penginputan Kartu Keluarga (KK)

7. URUSAN ADMINISTRASI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANJARBARU

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Keluarga Berencana, dengan kegiatan :
 - a) Kegiatan Bimbingan Teknis Kelompok UPPKS,
 - b) Kegiatan Kesehatan Reproduksi Remaja,
 - c) Kegiatan Kampung KB
 - d) Kegiatan Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi KB,
- 2) Program Penyediaan Data Informasi Kependudukan Dan Keluarga Berencana
 - a) Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Data Informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana, dan
 - b) Kegiatan Penyusunan Laporan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- 3) Program Pengendalian Kependudukan
 - a) Kegiatan Pembinaan Forum Kerjasama Pengendalian Kependudukan.
- 4) Program Peningkatan Dukungan Sarana Peningkatan Pelayanan KB
 - a) Kegiatan Pembangunan Alih/Fungsi Balai Penyuluh (DAK).
- 5) Program Peningkatan Dukungan Operasional KKBPK Lini Lapangan
 - a) Kegiatan Operasional Bagi Balai Penyuluh KB (DAK Non Fisik).

b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat pencapaian kegiatan dari program-program Penyelenggaraan Urusan Administrasi Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru yaitu :

- 1) Program Keluarga Berencana
 - a) Kegiatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Keluarga Berencana dengan realisasi anggaran sebesar 94,50% dan capaian kinerja sebesar 100%,
 - b) Kegiatan Bimbingan Teknis Kelompok UPPKS dengan realisasi anggaran sebesar 99,90% dan capaian kinerja sebesar 100%,



- c) Kegiatan Kampung KB dengan realisasi anggaran sebesar 98,80% dan capaian kinerja sebesar 100%,
- d) Kegiatan Kesehatan Reproduksi Remaja dengan realisasi anggaran sebesar 100 dan capaian kinerja sebesar 100%, dan
- 2) Program Penyediaan Data Informasi Kependudukan Dan Keluarga Berencana
 - a) Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Data Informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan realisasi anggaran sebesar 82,30% dan capaian kinerja sebesar 90%, dan
 - b) Kegiatan Penyusunan Laporan Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan realisasi anggaran sebesar 27,00% dan capaian kinerja sebesar 30%.
- 3) Program Pengendalian Kependudukan
 - a) Kegiatan Pembinaan Forum Kerjasama Pengendalian Kependudukan dengan realisasi anggaran sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 100%.
- 4) Program Peningkatan Dukungan Sarana Peningkatan Pelayanan KB
 - a) Kegiatan Pembangunan Alih/Fungsi Balai Penyuluh (DAK) dengan realisasi anggaran sebesar 99,3% dan capaian kinerja sebesar 100%.
- 5) Program Peningkatan Dukungan Operasional KKBPK Lini Lapangan
 - a) Kegiatan Operasional Bagi Balai Penyuluh KB (DAK Non Fisik) dengan realisasi anggaran sebesar 62,7% dan capaian kinerja sebesar 60%.

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Penyusunan Laporan Kependudukan dan Keluarga Berencana terdapat kegiatan yang sama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi sehingga dana yang ada sebagian besar tidak digunakan
- b) Kegiatan Operasional Bagi Balai Penyuluh KB (DAK Non Fisik) permasalahannya adalah (1) target balai penyuluh ada 3 buah, tetapi pada bulan Oktober 2018 Balai Penyuluhan KB baru bertambah menjadi 3, sehingga operasional balai yang baru tidak bisa maksimal digunakan (2) Pengelolaan keuangan di balai dan kampung KB terbatas sehingga penyerapan menjadi terlambat.

2) Solusi

- a) kedepannya kegiatan tersebut akan ditinjau kembali dan diganti dengan kegiatan lain yang menunjang kegiatan pelaporan kependudukan dan keluarga berencana.
- b) Perencanaan operasional balai penyuluh yang baru seharusnya tidak dibuat setahun tetapi sesuai dengan jadwal pembangunannya,



- c) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola keuangan balai penyuluh dan kampung KB agar pengerjaan pertanggungjawabannya tidak terlambat.

8. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANJARBARU

a. Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan
 - a) Kegiatan Peringatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat,
 - b) Kegiatan Lomba Kelurahan,
 - c) Kegiatan Gerakan Terpadu Pembangunan Masyarakat Untuk Pengentasan Kemiskinan,
 - d) Kegiatan Pembinaan Kelembagaan LPM Kelurahan.
2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
 - a) Kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Nasional Posyandu,
 - b) Kegiatan Pembinaan Peran PKK dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan
 - c) Kegiatan Gelar Sosialisasi Tepat Guna.

b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat pencapaian kegiatan dari program-program Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru yaitu :

1. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan, memiliki 1 indikator dan 4 kegiatan.

Indikator Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan yaitu :

- a) Prosentase peningkatan kontribusi masyarakat dalam membangun kewilayahan dengan target 75 % realisasi 75 % dengan capaian program sebesar 100 %

Sedangkan kegiatan Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan yaitu :

- a) Kegiatan Peringatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dengan realisasi anggaran sebesar 96,9% dan capaian kinerja sebesar 100%,
- b) Kegiatan Lomba Kelurahan dengan realisasi anggaran sebesar 96,10% dan capaian kinerja sebesar 100%,



- c) Kegiatan Gerakan Terpadu Pembangunan Masyarakat Untuk Pengentasan Kemiskinan dengan realisasi anggaran sebesar 74,50% dan capaian kinerja sebesar 80%,
 - d) Kegiatan Pembinaan Kelembagaan LPM Kelurahan dengan realisasi anggaran sebesar 98,80% dan capaian kinerja sebesar 100%.
2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
- a) Kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Nasional Posyandu dengan realisasi anggaran sebesar 99,20% dan capaian kinerja sebesar 100%,
 - b) Kegiatan Pembinaan Peran PKK dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan realisasi anggaran sebesar 99,80% dan capaian kinerja sebesar 100%, dan
 - c) Kegiatan Gelar Sosialisasi Tepat Guna dengan realisasi anggaran sebesar 99,8% dan capaian kinerja sebesar 100%.

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Realisasi keuangan terdapat kegiatan Gerakan Terpadu Pembangunan Masyarakat untuk Pengentasan Kemiskinan yang realisasi keuangannya sebesar 74,5 persen. Adapun permasalahannya adalah terdapat beberapa dana transportasi dalam daerah yang anggarannya melebihi Harga Satuan Kegiatan (HSPK) sehingga pertanggungjawabannya menyesuaikan dengan HSPK yang ada. Ada juga kegiatan makanan dan minuman rapat yang tidak dapat direalisasikan karena tidak dilaksanakan.

9. URUSAN PERHUBUNGAN (DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU)

a) Program dan Kegiatan

- 1) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
 - a) Kegiatan Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat,
 - b) Kegiatan Pelaksanaan penghargaan wahana tata nugraha (WTN).
- 2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
 - a) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan rambu jalan dan lampu peringatan, dan
 - b) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan halte/shelter.
- 3) Program peningkatan pelayanan angkutan
 - a) Kegiatan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya,
 - b) Kegiatan Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudi/ awak kendaraan angkutan umum teladan,



- c) Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan,
- d) Kegiatan Pemilihan pelajar pelopor berlalu lintas.
- 4) Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
 - a) Kegiatan Pengadaan rambu-rambu lalu lintas,
 - b) Kegiatan Pengadaan marka jalan,
 - c) Kegiatan Pengadaan lampu peringatan jalan,
 - d) Kegiatan Pengamanan lalu lintas jalan dan pengawalan.
- 5) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
 - a) Kegiatan Pengawasan dan pembinaan kelaikan kendaraan bermotor,
 - b) Kegiatan Pendataan/pembinaan usaha perbengkelan umum, dan
 - c) Kegiatan Monitoring dan pembinaan usaha perbengkelan umum.

b) Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat pencapaian kegiatan dari program-program Penyelenggaraan Urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru yaitu :

- 1) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
 Indikator Programnya adalah Persentase meningkatnya penggunaan prasarana pelayanan angkutan umum diterminal dengan target sebesar 50% dan Capaian kinerja sebesar 52,17%, sedangkan indikator kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a) Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat dengan realisasi anggaran sebesar 89,05% dan capaian kinerja sebesar 100%,
 - b) Pelaksanaan penghargaan wahana tata nugraha (WTN) dengan realisasi anggaran sebesar 52,11% dan capaian kinerja sebesar 100%.
- 2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
 Indikator Programnya adalah Persentase Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan yang berfungsi dengan baik dengan target sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 100%, sedangkan indikator kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a) Rehabilitasi/pemeliharaan rambu jalan dan lampu peringatan dengan realisasi anggaran sebesar 95,51% dan capaian kinerja sebesar 100%, dan
 - b) Rehabilitasi/pemeliharaan halte/shelter dengan realisasi anggaran sebesar 85,66% dan capaian kinerja sebesar 100%.
- 3) Program peningkatan pelayanan angkutan
 Indikator Programnya adalah Persentase pelajar yang menggunakan angkutan pelajar gratis dengan target sebesar 75% dan capaian kinerja sebesar 83,33%, sedangkan indikator kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a) Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya dengan realisasi



- anggaran sebesar 91,42% dan capaian kinerja sebesar 100%,
- b) Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudi/ awak kendaraan angkutan umum teladan dengan realisasi anggaran sebesar 99,53% dan capaian kinerja sebesar 100%,
 - c) Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan dengan realisasi anggaran sebesar 94,00% dan capaian kinerja sebesar 100%,
 - d) Pemilihan pelajar pelopor berlalu lintas dengan realisasi anggaran sebesar 73,62% dan capaian kinerja sebesar 100%.
- 4) Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
- Indikator Programnya adalah Kondisi fasilitas lalulintas angkutan jalan yang berfungsi dengan baik dengan target sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 100%, sedangkan indikator kegiatannya adalah sebagai berikut :
- a) Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dengan realisasi anggaran sebesar 93,25% dan capaian kinerja sebesar 100%,
 - b) Pengadaan marka jalan dengan realisasi anggaran sebesar 98,00% dan capaian kinerja sebesar 100%,
 - c) Pengadaan lampu peringatan jalan dengan realisasi anggaran sebesar 99,03% dan capaian kinerja sebesar 100%,
 - d) Pengamanan lalu lintas jalan dan pengawalan dengan realisasi anggaran sebesar 99,99% dan capaian kinerja sebesar 100%.
- 5) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
- Indikator Programnya adalah Jumlah alat transportasi yang terlayani KIR dengan target sebesar 5.000 kendaraan dan capaian kinerja 5.092 kendaraan sedangkan indikator kegiatannya adalah sebagai berikut :
- a) Pengawasan dan pembinaan kelaikan kendaraan bermotor dengan realisasi anggaran sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 101,84%,
 - b) Pendataan/pembinaan usaha perbengkelan umum dengan realisasi anggaran sebesar 97,71% dan capaian kinerja sebesar 100%, dan
 - c) Monitoring dan pembinaan usaha perbengkelan umum dengan realisasi anggaran sebesar 92,56% dan capaian kinerja sebesar 100%.

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Program pendukung pengembangan prasarana di bidang Perhubungan masih terdapat beberapa kelemahan.



- b) Masih belum maksimalnya tingkat rasa aman dan nyaman serta laik jalan kendaraan angkutan.

2) Solusi

- a) Penyediaan Angkutan umum untuk pelajar yang gratis dan bersubsidi.
- b) Pengelolaan Terminal dengan baik dari segi system maupun retribusi guna meningkatkan kenyamanan pengguna.
- c) Meningkatkan kelancaran akses lalin pada titik-titik kemacetan yang ada.
- d) Meningkatkan jumlah kendaraan angkutan yang laik jalan.
- e) Peningkatan Informasi pelayanan public yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Kota Banjarbaru.

10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DINAS KOMINFO KOTA BANJARBARU)

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Layanan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Pemanfaatan TIK Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi.
 - a) Kegiatan Penyelenggaraan Akses Internet dan Intranet Pemerintah Daerah
 - b) Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery dan TIK
 - c) Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen Yang Terintegrasi
- 2) Program Layanan Penjaminan Kedaulatan Informasi Pemerintah Daerah
 - a) Kegiatan Penyelenggaraan Nama Domain dan Sub Domain Bagi Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah
 - b) Kegiatan Penyelenggaraan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten / Kota
 - c) Kegiatan Perumusan Regulasi, Kebijakan dan Monev di Bidang Nama Domain, Sub Domain serta Website dan Konten
- 3) Program Layanan Peningkatan Kualitas Layanan Publik Pemerintah Daerah Melalui Pemanfaatan TIK
 - a) Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Publik Berbasis Elektronik



b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat realisasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan dari program-program Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru, yaitu :

- 1) Program Layanan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Pemanfaatan TIK Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi.
 - a) Kegiatan Penyelenggaraan Akses Internet dan Intranet Pemerintah Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 94,02%
 - b) Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery dan TIK dengan realisasi anggaran sebesar 93,25%
 - c) Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen Yang Terintegrasi dengan realisasi anggaran sebesar 38,18%
- 2) Program Layanan Penjaminan Kedaulatan Informasi Pemerintah Daerah
 - a) Kegiatan Penyelenggaraan Nama Domain dan Sub Domain Bagi Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 91,47%
 - b) Kegiatan Penyelenggaraan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten / Kota dengan realisasi anggaran sebesar 93,18%
 - c) Kegiatan Perumusan Regulasi, Kebijakan dan Monev di Bidang Nama Domain, Sub Domain serta Website dan Konten dengan realisasi anggaran sebesar 84,01%
- 3) Program Layanan Peningkatan Kualitas Layanan Publik Pemerintah Daerah Melalui Pemanfaatan TIK
 - c) Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Publik Berbasis Elektronik dengan realisasi anggaran sebesar 78,12%

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Untuk belanja modal perangkat aplikasi mobile tidak bisa digunakan karena pagu anggaran tidak memenuhi harga pasaran perangkat aplikasi mobile yang dibutuhkan dalam menunjang kegiatan

2) Solusi

Melakukan survey harga dan kesediaan perangkat yang dibutuhkan sebelum mengalokasikan keuangan.



11. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (DINAS KOPERASI, UKM, DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU)

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
 - a) Kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah,
 - b) Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Menengah,
 - c) Kegiatan Perluasan Akses Pasar bagi Produk UMKM.
- 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah
 - a) Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan,
 - b) Kegiatan Sarana Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah.
- 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 - a) Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan
 - b) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Masyarakat.
- 4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
 - a) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi,
 - b) Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, dan
 - c) Kegiatan Penyuluhan Perkoperasian.
 - d) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi
 - e) Kegiatan Pembinaan dan Pembenahan Kelompok Usaha Rakyat

b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat realisasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan dari program-program Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UKM yang dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru, yaitu :

- 1) Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, terdiri dari 3 indikator kinerja dan 3 kegiatan.

Indikator kinerja dari Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif yaitu :

- a) Persentase produk UKM (makanan/minuman) ang bersertifikat tahun 2018 ditargetkan sebesar 29,98% dan terealisasi sebesar 27,21%
- b) Persentasi UMKM yang mendapatkan perluasan akses pasar tahun 2018 ditargetkan sebesar 3,29% dan terealisasi sebesar 3,20%
- c) Persentase kelurahan yang memiliki produk unggulan tahun 2018 dtargetkan sebesar 45% dan terealisasi sebesar 45%.



Kegiatan dari Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif yaitu :

- a) Kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah dengan realisasi anggaran sebesar 87,78% dan capaian program sebesar 100% Kegiatan rapat koordinasi dengan kelurahan/kecamatan dalam pengembangan UMKM dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan kegiatan masing-masing sebanyak 30 (tiga puluh) peserta.
 - b) Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Menengah dengan realisasi anggaran sebesar 99,03% dan capaian program sebesar 100% berupa sosialisasi sertifikat produk UMKM yang diikuti oleh 160 UMKM serta ada 34 UMKM yang mendapat sertifikat produk halal, dan
 - c) Kegiatan Perluasan Akses Pasar Bagi Produk UMKM dengan realisasi anggaran sebesar 95,25% dan capaian kinerja sebesar 100% ini berupa bintek dan pertemuan dengan ritel, dimana dalam ritel diikuti UMKM dan pertemuan dengan ritel diikuti oleh 60 UMKM dan Hypermart, agar pelaku usaha dapat dengan mudah memasarkan produknya.
- 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM, terdiri dari 1 indikator kinerja dan 2 kegiatan.

Indikator kinerja dari Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM yaitu :

- a) Jumlah UMKM baru tahun 2018 ditargetkan sebesar 81 dan terealisasi sebesar 157. Kegiatan dari Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM yaitu :
- a) Kegiatan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dengan realisasi anggaran sebesar 97,43% dan capaian kinerja sebesar 100% diselenggarakan sebanyak 6 (enam) kali, yaitu:
 1. Pelatihan Pembuatan Produk Aksesoris Sebanyak 2 (dua) kali dan dalam setiap kegiatan sebanyak 30 (tiga puluh) peserta
 2. Pelatihan Pengolahan Pangan sebanyak 2 (dua) kali dan dalam setiap kegiatan sebanyak 30 (tiga puluh) peserta
 3. Pelatihan Handycraft sebanyak 1 (satu) kali dan dalam setiap kegiatan sebanyak 30 (tiga puluh) peserta
 4. Pelatihan penggunaan aplikasi laporan keuangan usaha Sebanyak 1 (satu) kali dan setiap kegiatan sebanyak 30 (tiga puluh) peserta



- b) Kegiatan Sarana Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah dengan realisasi anggaran sebesar 99,49% dan capaian kinerja sebesar 100% dilaksanakan melalui pameran dan bazar antara lain :
1. KalSel Expo Tahun 2018 yang diikuti oleh 19 UMKM,
 2. Pameran Banjarbaru Fair Tahun 2018 yang diikuti oleh 12 UMKM, dan
 3. Bazar UMKM tahun 2018 yang diikuti oleh 145 UMKM.
- 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, terdiri dari 1 indikator kinerja dan 2 kegiatan.
- Indikator kinerja dari Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu :
- a) Persentase LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang tertib administrasi tahun 2018 ditargetkan sebesar 5,88% dan terealisasi sebesar 5,88%.
- Kegiatan dari Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu :
- a) Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM dengan realisasi anggaran sebesar 93,81% dan capaian kinerja sebesar 100%. Kegiatan ini berupa rapat evaluasi bagi koperasi dan UMKM yang menerima dana bantuan agar melaporkan perkembangan dananya dilaksanakan 2 kali yang diikuti oleh 60 peserta
- b) Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Masyarakat dengan realisasi anggaran sebesar 78,71% dan capaian kinerja sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan pembinaan kepada LKM (Lembaga Keuangan Mikro) di Kota Banjarbaru agar memiliki badan hukum dimana dilaksanakan sebanyak 4 kali dengan peserta pengurus LKM dengan masing-masing kegiatan sebanyak 30 orang.
- 4) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, terdiri dari 1 indikator kinerja dan 5 kegiatan.
- Indikator kinerja Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi yaitu :
- a) Persentase koperasi aktif tahun 2018 ditargetkan sebesar 70,18% dan terealisasi sebesar 72,41%.
- Kegiatan dari Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi yaitu :
- a) Kegiatan Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi dengan realisasi anggaran sebesar 97,71% dan capaian kinerja sebesar 100%. Penilaian yang dilakukan sebanyak 15 koperasi yang salah satu syaratnya telah melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan). Dari hasil penilaian terdapat 3 (tiga) koperasi yang memperoleh predikat berprestasi pada tahun 2018, yaitu :
1. Kopkar Usaha Bersama (Gardu Induk)



2. Kopdit Mekar Sejahtera

3. KPRI Karya Industri

Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi, dimana jumlah koperasi yang dinilai sebanyak 15 koperasi. Dari penilaian tersebut terdapat 3 (tiga) koperasi yang memperoleh koperasi sehat pada tahun 2018, yaitu :

1. Primkoppol Polres Banjarbaru

2. Kopkar Usaha Bersama (PT. POS)

3. Primkop Kartika Tirta Galuh Jaya

- b) Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan dengan realisasi anggaran sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 100% dilaksanakan dengan cara memonitoring sebanyak 35 koperasi yang dibagi 3 tahap antara lain monitoring terhadap koperasi yang akan diperiksa, pemeriksaan terhadap koperasi dan pemberian rekomendasi/ hasil dari pemeriksaan koperasi,
- c) Kegiatan Penyuluhan Perkoperasian dengan realisasi anggaran sebesar 99,66% dan capaian kinerja sebesar 100% dilaksanakan 19 kali kepada pra koperasi yang ada di Kota Banjarbaru.
- d) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi dengan realisasi anggaran sebesar 97,30% dan capaian kinerja sebesar 100%. Bintek manajemen kepada pengelola koperasi pada tahun 2018 dilaksanakan sebanyak 3 kali kepada SDM koperasi di Kota Banjarbaru
- e) Kegiatan Pembinaan dan Pembenahan Kelompok Usaha Rakyat dengan realisasi anggaran sebesar 99,85% dan capaian kinerja sebesar 100%. Kegiatan pelatihan dalam rangka pembinaan dan pembenahan kelompok UMKM sebanyak 5 kali kegiatan dikelompok di Kelurahan Loktabat Selatan, Kelurahan Landasan Ulin Utara 3 angkatan, Kelurahan Guntung Paikat.

Adapun penghargaan atau prestasi yang diraih atas pengelolaan Urusan Koperasi dan UKM pada tahun 2018 yaitu Penghargaan Natamukti yang diberikan kepada kota/kabupaten yang berhasil dalam memasarkan, mendorong peningkatan kualitas, serta membangun ekosistem UMKM di daerahnya.

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Kurangnya kesadaran koperasi untuk melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan),



- b) Adanya image koperasi sebagai suatu opsi ekonomi badan usaha level kedua masih tertanam didalam benak masyarakat sehingga menjadi keengganan bagi masyarakat untuk membentuk koperasi,
- c) Kurangnya sarana dan peralatan untuk mengoptimalkan kegiatan pelatihan yang lebih banyak melakukan praktek secara langsung,
- d) Rendahnya kualitas dan kreatifitas produk sehingga kurang menarik konsumen, dan
- e) Belum mampu membaca peluang pasar.

2) Solusi

- a) Meningkatkan pembinaan dan pendampingan RAT pada koperasi,
- b) Selalu mengadakan pembinaan terhadap koperasi yang telah dibentuk dengan membangun komunikasi kepada para jajaran pengurus melalui kegiatan pembinaan perkoperasian,
- c) Perlunya persiapan dalam hal sarana dan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan materi pelatihan yang dilakukan dan koordinasi dengan narasumber,
- d) Melaksanakan bintek dalam peningkatan kualitas produk dan membangun kreatifitas dalam menciptakan ide atau gagasan dalam menghasilkan produk yang menarik, dan
- e) Melaksanakan bimbingan dalam kemampuan membaca peluang pasar.

12. URUSAN PENANAMAN MODAL (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARBARU)

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - a) Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi
- 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - a) Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal Di Daerah,
 - b) Kegiatan Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat realisasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan dari program-program Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru, yaitu :



1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Indikator kinerja program ini adalah jumlah kerjasama investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan target sebesar 22 investor, realisasi kerjasama investasi PMA dan PMDN sebesar 31 investor atau dengan capaian kinerja sebesar 140,9%, yang didukung oleh kegiatan:

- a) Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi dengan realisasi anggaran sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 98,43%. Kegiatan ini melaksanakan 2 (dua) kali pameran yaitu Banjarbaru Fair dan Apeksi.

2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Jumlah izin penanaman modal yang diterbitkan adalah indikator program ini, target sebesar 25 SK/Perusahaan, realisasi sebesar 31 SK/perusahaan atau dengan capaian sebesar 124%.program ini terdiri dari kegiatan:

- a) Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal Di Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 100%, kegiatan ini melaksanakan penyusunan buku investasi di Kota Banjarbaru.
- b) Kegiatan Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan realisasi anggaran sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 94,60%. keluaran kegiatan ini adalah kegiatan pemantauan perusahaan PMDN/PMA sebanyak 80 kali, melaksanakan pendataan perusahaan perseroan 90 kali, sosialisasi peraturan penanaman modal 1 kali, pelaksanaan pengendalian LKPM sebanyak 30 kali.

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Permasalahan yang terjadi pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan kegiatan tahun 2018 masih dihadapkan kepada berbagai permasalahan dan tantangan yang cukup berat dari berbagai pihak eksternal maupun kelemahan dari instansi sendiri terutama sumber daya manusia dan sarana prasarana;
- b) Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mengurus legalitas perizinannya, salah satunya juga masih banyaknya perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal), sehingga mempersulit dilakukan pengendalian, pemantauan dan pengawasan;
- c) Belum tersedianya sarana dan prasarana promosi potensi unggulan dan peluang investasi;
- d) Lemahnya aturan penindakan bagi perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM.



- e) SDM yang terbatas dalam pelayanan perizinan dan non perizinan terutama dalam implementasi SPIPISE
- f) Kurangnya pembinaan dan pengawasan perizinan PMDN
- g) Minimnya data sementara dari investasi terkait mengenai perusahaan perseroan di Kota Banjarbaru

2) Solusi

- a) Ditahun – tahun yang akan datang akan lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan- pelatihan, Kursus-kursus, Seminar, Semiloka ataupun dengan Study Banding.
- b) Tentang minimnya kegiatan penyelenggaraan pameran, pada tahun- tahun mendatang akan diperbanyak kegiatan-kegiatan pameran dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait serta melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang berkompeten lainnya.
- c) Meningkatkan kemudahan Pelayanan Perizinan Terintegrasi melalui *Online Single Submission (OSS)* bagi pelaku usaha/investor baik yang baru maupun yang sudah melaksanakan kegiatannya;
- d) Memberikan pembinaan kepada perusahaan agar selalu aktif menyampaikan LKPM.
- e) Penambahan SDM dalam pelayanan perizinan dan non perizinan PMDN
- f) Melakukan koordinasi dengan Penanaman Modal tingkat Provinsi dan Pusat untuk penanganan LKPM dan perizinan PMDN.
- g) Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan penanaman modal di Kota Banjarbaru.

13. URUSAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARBARU)

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
 - a) Kegiatan Pendataan dan survey perizinan
 - b) Kegiatan Pendataan dan survey perizinan reklame,
 - c) Kegiatan Pengukuran IKM,
 - d) Kegiatan Pengolahan Data Perizinan.
 - e) Kegiatan Pendataan, Monitoring, dan evaluasi dan Perizinan Tertentu,



b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat realisasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan dari program-program Penyelenggaraan Urusan Urusan Pelayanan Perijinan Terpadu yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru, yaitu :

1) Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Indikator program ini terdiri dari:

- a) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) target pada tahun 2018 sebesar 80,5 dengan realisasi sebesar 84,5 atau dengan capaian sebesar 105,4%.
- b) Jumlah SK perizinan yang diterbitkan dengan target sebesar 3.160 SK terrealisasi sebesar 3.760 SK atau dengan capaian realisasi sebesar 108,9%

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 yaitu:

- a) Kegiatan Pendataan dan survey perizinan dengan realisasi anggaran sebesar 98,01% dan capaian kinerja sebesar 100%. Kegiatan ini melaksanakan 2 kali kegiatan sosialisasi perizinan.
- b) Kegiatan Pendataan dan survey perizinan reklame dengan realisasi anggaran sebesar 74,25% dan capaian kinerja sebesar 80%.
- c) Kegiatan Pengukuran IKM dengan realisasi anggaran sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini dalam melaksanakan 1 kali Survey Kepuasan Masyarakat.
- d) Kegiatan Pengolahan Data Perizinan dengan realisasi anggaran sebesar 92,36% dan capaian kinerja sebesar 100%.
- e) Kegiatan Pendataan, Monitoring, dan evaluasi dan Perizinan Tertentu dengan realisasi anggaran sebesar 61,55% dan capaian kinerja sebesar 75%.
- f) Diterbitkannya perizinan dan perizinan tertentu sebanyak 3.760 SK Izin dari target 3.160 SK Izin, dengan demikian capaian kinerja adalah 118,98% %. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Tahun 2018 atas 150 responden dengan realisasi angka kepuasan 84,85 dengan mutu pelayanan sama dengan kinerja pelayanan sangat baik, atau dengan capaian realisasi sebesar 105,4% dari target sebesar 80,5.

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mengurus legalitas perizinannya, salah satunya juga masih banyaknya perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM



(Laporan Kegiatan Penanaman Modal), sehingga mempersulit dilakukan pengendalian, pemantauan dan pengawasan;

- b) Belum tersedianya sarana dan prasarana promosi potensi unggulan dan peluang investasi;
- c) Lemahnya aturan penindakan bagi perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM.
- d) SDM yang terbatas dalam pelayanan perizinan dan non perizinan terutama dalam implementasi SPIPISE
- e) Kurangnya pembinaan dan pengawasan perizinan PMDN
- f) Minimnya data sementara dari investasi terkait mengenai perusahaan perseroan di Kota Banjarbaru

2) Solusi

- a) Ditahun – tahun yang akan datang akan lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan- pelatihan, Kursus-kursus, Seminar, Semiloka ataupun dengan Study Banding.
- b) Tentang minimnya kegiatan penyelenggaraan pameran, pada tahun- tahun mendatang akan diperbanyak kegiatan-kegiatan pameran dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait serta melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang berkompeten lainnya.
- c) Meningkatkan kemudahan Pelayanan Perizinan Terintegrasi melalui *Online Single Submission (OSS)* bagi pelaku usaha/investor baik yang baru maupun yang sudah melaksanakan kegiatannya;
- d) Memberikan pembinaan kepada perusahaan agar selalui aktif menyampaikan LKPM.
- e) Penambahan SDM dalam pelayanan perizinan dan non perizinan PMDN
- f) Melakukan koordinasi dengan Penanaman Modal tingkat Provinsi dan Pusat untuk penanganan LKPM dan perizinan PMDN.
- g) Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan penanaman modal di Kota Banjarbaru.

14. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, PARIWISATA KOTA BANJARBARU)

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
 - a) Kegiatan Pembinaan Kegiatan Peningkatan Kreatifitas dan Peran Serta Pemuda,
 - b) Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan.



2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga

- a) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga.

b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat pencapaian kegiatan dari program-program Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata Kota Banjarbaru yaitu :

1) Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

- a) Kegiatan Pembinaan Kegiatan Peningkatan Kreatifitas dan Peran Serta Pemuda dengan realisasi anggaran sebesar 95,19 dan capaian kinerja sebesar 100%,
b) Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan dengan realisasi anggaran sebesar 99,92% dan capaian kinerja sebesar 100%.

2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga

- a) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga dengan realisasi anggaran sebesar 98,34% dan capaian kinerja sebesar 100%.

c. Permasalahan dan Solusi

- 1) Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Olahraga Kota Banjarbaru pada Tahun 2018 tidak memiliki permasalahan yang berarti, sehingga seluruh kegiatan telah terlaksana sesuai target yang ditetapkan.
2) Diharapkan Kegiatan pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Olahraga Kota Banjarbaru untuk tahun berikutnya juga dapat dilaksanakan dengan baik dan terealisasi sesuai rencana.

15. URUSAN KEBUDAYAAN (DINAS PEMUDA, OLARHAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA KOTA BANJARBARU)

a. Program dan Kegiatan

1) Program Pengelolaan Keragaman Budaya

- a) Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah,
b) Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah.

b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat pencapaian kegiatan dari program-program Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata Kota Banjarbaru yaitu :

- 1) Program Pengelolaan Keragaman Budaya, terdapat 3 kegiatan dan 7 indikator kinerja.



Indikator Program Pengelolaan Keragaman Budaya yaitu :

- a) Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya ditargetkan sebanyak 9 kali dan terealisasi sebanyak 9 kali atau sebesar 100%,
- b) Cakupan kajian seni dan budaya ditargetkan sebanyak 1 kali dan terealisasi sebanyak 1 kali atau sebesar 100%,
- c) Cakupan gelar seni dan budaya ditargetkan sebanyak 15 kali dan terealisasi sebanyak 15 kali atau sebesar 100%,
- d) Cakupan sumber daya manusia seni dan budaya ditargetkan 883 orang dan terealisasi sebanyak 883 orang atau sebesar 100%.
- e) Jumlah organisasi/grup kesenian ditargetkan 48 orang dan terealisasi sebanyak 50 orang atau sebesar 104%.
- f) Misi kesenian dan kebudayaan ditargetkan sebanyak 15 kali dan terealisasi sebanyak 15 kali atau sebesar 100%.
- g) Jumlah pelestarian peninggalan sejarah yang dilestarikan ditargetkan sebanyak 9 situs dan terealisasi sebanyak 12 situs atau sebesar 133%.

Capaian kegiatan pada Program Pengelolaan Keragaman Budaya yaitu :

- a) Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 98,79% dan capaian sebesar 100%.
- b) Kegiatan Fasilitasi Pelestarian Peninggalan Sejarah dengan realisasi anggaran sebesar 97,69% dan capaian sebesar 100%.

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam mendukung kegiatan seni budaya daerah
- b) Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam mendukung berbagai kegiatan seni budaya
- c) Kurang lengkapnya data organisasi seni budaya daerah
- d) Minimnya pengetahuan masyarakat tentang peninggalan sejarah

2) Solusi

Dari keseluruhan permasalahan yang ada pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru di Bidang Kebudayaan, solusi yang didapat agar tercapainya secara maksimal adalah sebagai berikut :

- a) Perlunya peningkatan sosialisasi tentang peninggalan sejarah kepada masyarakat,



- b) Perlunya meningkatkan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam mendukung kegiatan seni budaya daerah,
- c) Perlunya meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung seniman berkesenian seperti gedung kesenian, panggung kesenian dan alat-alat kesenian,
- d) Perlunya peningkatan pendataan terhadap organisasi seni budaya daerah di Kota Banjarbaru,
- e) Mengembangkan pengetahuan SDM dalam bidang seni budaya melalui pelatihan, workshop, seminar dan lain-lain.

16. URUSAN PERPUSTAKAAN (DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA BANJARBARU)

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 - a) Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca
 - b) Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah.
 - c) Kegiatan Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khususm Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat
 - d) Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
 - e) Kegiatan Pengembangan Perpustakaan
- 2) Program Peningkatan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi
 - a) Kegiatan Peningkatan Layanan Perpustakaan

b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat pencapaian kegiatan dari program-program Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru yaitu :

- 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, dengan indikator kinerja program adalah Jumlah Pengunjung Perpustakaan tahun 2018 ditargetkan sebesar 66.067 orang dan terealisasi 62.932 orang dengan capaian 95,25 %.

Kegiatan-kegiatan dari Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan yaitu :

- a) Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca dengan capaian realisasi keuangan sebesar 100%. Dengan capaian kinerja 100 %
- b) Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah dengan capaian realisasi keuangan sebesar 99,67% dengan capaian kinerja 100 %



- c) Kegiatan Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khususm Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat dengan capaian realisasi keuangan sebesar 83,63%.. dengan capaian kinerja 100 %
 - d) Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya dengan capaian realisasi keuangan sebesar 99,97% dengan capaian kinerja 100 %
 - e) Kegiatan Pengembangan Perpustakaan,dengan capaian realisasi keuangan sebesar 70,36%.
- 2) Program Peningkatan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi sebagai berikut:
- a) Kegiatan Peningkatan Layanan Perpustakaan , dengan capaian realisasi sebesar 89,09%.

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Sangat terbatasnya jumlah dan kualitas SDM Fungsional Pustakawan
- b) Masih terbatasnya layanan perpustakaan khusus bagi masyarakat.

2) Solusi

- a) Mengupayakan penambahan jumlah pejabat fungsional Pustakawan disetiap perpustakaan baik perpustakaan umum/daerah dan perpustakaan sekolah dan mengikut sertakan Diklat Teknis Pustakawan baik yang dilaksanakan Provinsi maupun Pemerintah Pusat,
- b) Membuka akses layanan perpustakaan khusus di lembaga pemerintah dan masyarakat.

17. URUSAN KEARSIPAN (DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA BANJARBARU)

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
 - a) Kegiatan Pengadaan Sarana Penyimpanan
- 2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah
 - a) Kegiatan Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip, dan
 - b) Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah.
- 3) Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
 - a) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Daerah



b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat pencapaian kegiatan dari program-program Penyelenggaraan Urusan kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru yaitu :

1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Indikator Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan adalah Persentase Perbaikan sistem administrasi kearsipan tahun 2018 ditargetkan 100 % dan terealisasi sebesar 100%

- a) Kegiatan Pengadaan Sarana Penyimpanan dengan realisasi anggaran sebesar 53,07%, dengan capaian kinerja 53,07 %

2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah

Indikator Kinerja Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah adalah presentase sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 100%

- a) Kegiatan Pengadaan sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip dengan realisasi anggaran sebesar 87,77%. dengan capaian kinerja 100 %
- b) Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah realisasi anggaran sebesar 62,07%, dengan capaian kinerja 100 %

3) Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana & Prasarana Kearsipan terdiri dari 2 kegiatan .

Indikator kinerja program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana & Prasarana Kearsipan adalah presentase pemeliharaan rutin / berkala Sarana & Prasarana Kearsipan tahun 2018 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 %

Kegiatan-kegiatan program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana & Prasarana Kearsipan yaitu :

- a) Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala arsip daerah dengan realisasi anggaran 98,65 % dengan capaian kinerja 100 %.

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Sangat terbatasnya jumlah dan kualitas SDM Arsiparis
- b) Kurangnya sarana transportasi untuk angkut arsip
- c) Masih terbatasnya layanan arsip bagi Lembaga Pemerintah, Swasta dan masyarakat

2) Solusi

- a) Mengupayakan penambahan jumlah pejabat fungsional Arsiparis disetiap SKPD dan mengikut sertakan Diklat Teknis Arsiparis baik yang dilaksanakan Provinsi maupun Pemerintah Pusat



- b) Mengupayakan tersedianya sarana transportasi mobil pick up dan
- c) Mengupayakan membuka akses layanan arsip bagi lembaga Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.

18. URUSAN STATISTIK (DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOTA BANJARBARU)

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pengembangan Data/Informasi/
 - a) Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan
 - b) Kegiatan Penyusunan dan Analisis data/infomasi perencanaan pembangunan ekonomi, dan
 - c) Kegiatan Penyusunan Profile Daerah.

b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat pencapaian kegiatan dari program-program Penyelenggaraan Urusan Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Banjarbaru yaitu :

- 1) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
 - a) Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan dengan realisasi anggaran sebesar 100%
 - b) Kegiatan Penyusunan dan Analisis data/infomasi perencanaan pembangunan ekonomi dengan realisasi anggaran sebesar 99,99%
 - c) Kegiatan Penyusunan Profile Daerah. dengan realisasi anggaran sebesar 100%

19. URUSAN PERSANDIAN (DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOTA BANJARBARU)

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pengembangan Persandian Nasional
 - a) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian
 - b) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi

b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat pencapaian kegiatan dari program-program Penyelenggaraan Urusan Persandian yang dilaksnakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informasi Kota Banjarbaru yaitu :

- 1) Program Pengembangan Persandian Nasional
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian dengan realisasi anggaran sebesar 38,01% dan capaian kinerja sebesar 100%,



- b. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi dengan realisasi anggaran sebesar 52,47%

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Keraguan merealisasikan anggaran kegiatan menganalisis hasil survei kebutuhan keamanan informasi dikhawatirkan pembayaran tenaga ahli kepada personil pada Dinas Komunikasi dan Informasi yang sudah menjadi tupoksi yang akan jadi temuan pemeriksa.
- c) Karena permasalahan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi terdapat kendala penyesuaian jadwal kegiatan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengingat instansi tersebut baru saja berubah nama dari Lembaga Sandi Negara (Lemseneg) menjadi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada awal 2018, jadi banyak penjadwalan pelaksanaan sosialisasi yang terbentur dengan daerah lain se Indonesia dan juga mengenai pembiayaan di daerah terbatas serta keterbatasan kompetensi dan kuantitas SDM di Bidang Keamanan Informasi.

2) Solusi

- a) Saat merencanakan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informasi akan berkoordinasi secara intensif dengan TAPD Cq. Inspektorat mengenai boleh tidaknya menganggarkan kegiatan tersebut, sehingga pada saat realisasi tidak ada keraguan.
- b) Mengintensifkan koordinasi dengan instansi vertikal pengampu bidang persandian BSSN dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten lain.
- c) Menambah SDM terkait bidang persandian dalam rangka pengamanan informasi bisa melalui pengiriman diklat atau pengadaan SDM yang berkualitas bidang persandian.

C. URUSAN PILIHAN

1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN KOTA BANJARBARU)

a. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada urusan Pertanian yang dilaksanakan adalah :

- 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
 - a) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan



- b) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kelestarian Sumberdaya Perikanan
- c) Kegiatan Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan Air tawar
- 2) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
 - a) Kegiatan Peningkatan usaha Pengolahan Hasil Perikanan
 - b) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Benih Ikan

b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat Pencapaian Kegiatan Dari Program-Program Penyelenggaraan Urusan Kelautan Dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarbaru yaitu :

1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yang capaian kinerjanya jika dibandingkan dengan target dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya ditahun 2018 ditargetkan sebesar 6.119, 59 ton dan terealisasi sebesar 6.500 ton atau 106% dengan kategori capaian sangat tinggi. Kegiatan yang dilaksanakan (1) Pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar dan (2) Pengembangan sarana dan prasarana perbenihan. Produksi perikanan melebihi target yaitu 380,41 ton. Hal ini disebabkan karena banyaknya bantuan/hibah baik melalui pusat maupun DKP Provinsi Kalimantan Selatan. Berupa paket bantuan bibit ikan Lele, ikan nila dan paket bantuan untuk Unit Perbenih Rakyat (UPR), pakan, dan sarana prasarana perikanan budidaya. Bantuan ini langsung diserahkan kepada kelompok pembudidaya ikan. Selain itu juga teknik budidaya ikan telah dikuasai dengan baik oleh pembudidaya.
- b. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap ditargetkan sebesar 59,84 ton dan terealisasi sebesar 59,84 ton dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan yang dilaksanakan Pembinaan Dan Pengawasan Kelestarian Sumberdaya Perikanan.

Capaian Kegiatan pada Program Pengembangan Budidaya Perikanan yaitu :

- a) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan dengan realisasi anggaran sebesar 99,37% dan capaian kinerja sebesar 100%
 - b) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kelestarian Sumberdaya Perikanan dengan realisasi anggaran sebesar 99,55% dan capaian kinerja sebesar 100%
 - c) Kegiatan Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan Air tawar dengan realisasi anggaran sebesar 99,48% dan capaian kinerja sebesar 100%
 - 2) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- Program ini memiliki indikator kinerja Jumlah Produksi Hasil Olahan yang capaian kinerjanya ditahun 2018 ditargetkan sebesar 85,80 ton dan terealisasi sebesar 350 ton



atau 408% dengan kategori capaian sangat tinggi. Kegiatan yang dilaksanakan adalah (1) Peningkatan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dan (2) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Benih Ikan. Produksi Olahan hasil Perikanan melebihi target karena semakin berkembangnya/bertambahnya UKM hasil perikanan di Kota Banjarbaru. Perkembangan UKM ini karena selain dekatnya Kota Banjarbaru dengan bandara juga permintaan pasar pada produk hasil perikanan yang meningkat karena seringnya event-event berskala nasional yang diselenggarakan di Kota Banjarbaru. Selain itu juga salah satu produk olahan perikanan di Kota Banjarbaru yang telah mendapatkan Sertifikat SNI (terlampir) oleh Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Perikanan adalah Poklaksar Impian Bersama dengan Produk Ampang Ikan.

Capaian Kegiatan pada Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan yaitu :

- a) Kegiatan Peningkatan usaha Pengolahan Hasil Perikanan dengan realisasi anggaran sebesar 99,68% dan capaian sebesar 100%
- b) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Benih Ikan dengan realisasi anggaran sebesar 63,57% dan capaian sebesar 75%

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan perikanan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagai berikut:

- a) Kurangnya permodalan dan sarana prasarana bagi pembudidaya perikanan dan pengolah hasil perikanan,
- b) Kurangnya pengetahuan dan keahlian pelaku usaha budidaya perikanan dan pengolah hasil perikanan.

2) Solusi

Solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan perikanan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah:

- a) Agar BUMN/BUMD dan lembaga pemerintah terkait yang bergerak dibidang permodalan agar mempermudah persyaratan penyaluran modal bagi pengusaha yang bergerak di bidang perikanan baik pembudidaya maupun pengolah hasil perikanan.
- b) Meningkatkan penyuluhan dan bimbingan teknologi perikanan bagi pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan.



2. URUSAN PARIWISATA (DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, PARIWISATA KOTA BANJARBARU)

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - a) Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Daerah
 - b) Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi Duta
- 2) Program pengembangan destinasi pariwisata
 - a) Kegiatan Pengembangan Jenis & Paket Wisata Unggulan
 - b) Kegiatan Kegiatan Penataan Kawasan dan Amnesitas Pariwisata (DAK)
- 3) Program pengembangan kemitraan
 - b) Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Terdapat pula tingkat realisasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan dari program-program Penyelenggaraan Urusan Pariwisata yang dilaksanakan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Banjarbaru, yaitu :

- 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan indikator program yaitu :
 - a) Jumlah kunjungan wisatawan ditargetkan sebanyak 76.800 wisatawan dan terealisasi sebanyak 99.973 wisatawan dengan capaian kinerja 130%.
Capaian kegiatan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - a) Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 87,70% dan capaian sebesar 100%,
 - b) Kegiatan Penyelenggaraan seleksi duta dengan realisasi anggaran sebesar 98,18% dan capaian sebesar 100%
- 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, terdapat 2 kegiatan dengan indikator program yaitu :
 - a) Jumlah objek wisata unggulan Kota Banjarbaru ditargetkan sebanyak 24 buha dan terealisasi sebanyak 23 buah dengan capaian kinerja 96%.
 - b) Kegiatan Pengembangan Jenis & Paket Wisata Unggulan dengan realisasi anggaran sebesar 99,61% dan capaian sebesar 100%.
 - c) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Pemasaran Destinasi Pariwisata dengan realisasi anggaran sebesar 80,85% dan capaian sebesar 100%,



- 3) Program pengembangan kemitraan, dengan indikator program yaitu :
- a) Jumlah kemitraan kepariwisataan yang dibina ditargetkan sebanyak 26 kelompok/lembaga terealisasi sebanyak 27 kelompok/lembaga dengan capaian kinerja 104%,
 - b) Jumlah kelembagaan kepariwisataan yang dibina ditargetkan sebanyak 10 lembaga terealisasi sebanyak 11 kelompok lembaga dengan capaian kinerja sebanyak 110%.
- Capaian kegiatan pada Program pengembangan kemitraan yaitu :
- a) Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata dengan realisasi anggaran sebesar 98,9% dan capaian sebesar 100%,

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Belum kuatnya jalinan kemitraan pariwisata disebabkan belum tertatanya informasi dan database pariwisata serta masih rendahnya peran serta masyarakat;
- b) Masih kurangnya koordinasi antara pelaku usaha wisata dan berdampak menghambat berkembangnya industri pariwisata yang dapat menunjang perkembangan destinasi pariwisata daerah;
- c) Masih belum terpusatkannya pasar cinderamata dan kuliner ciri khas Banjarbaru dan kurangnya pemandu wisata dalam menunjang daya saing dan daya jual destinasi pariwisata; dan
- d) Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata yang potensial dalam meningkatkan PAD terutama dalam pelaksanaan Gerakan Sadar Wisata yang memberdayakan masyarakat.
- e) Belum optimalnya pelayanan bagi wisatawan dan belum adanya sertifikasi tenaga kerja di bidang pariwisata,
- f) Masih sulitnya menentukan pengelompokan atau pengklasifikasian usaha jasa pariwisata dalam pendataan.

2) Solusi

- a) Melakukan studi kaji dengan daerah lain atau daerah yang sudah maju,
- b) Melakukan peningkatan wawasan dengan mendatangkan narasumber,
- c) Melakukan rapat koordinasi antar instansi agar dapat berkoordinasi dalam penentuan pembangunan.



3. URUSAN PERTANIAN DAN PETERNAKAN (DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN KOTA BANJARBARU)

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
 - a) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - b) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK)
 - c) Kegiatan Pengembangan Upaya Khusus Padi, Jagung dan Kedelai
 - d) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Hortikultura
 - e) Kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Hortikultura
 - f) Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
 - g) Kegiatan Pengembangan Usaha Perkebunan.
- 2) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
 - a) Kegiatan Pembinaan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - b) Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Zoonosis
 - c) Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Masyarakat
 - d) Kegiatan Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Kesehatan Ternak Milik Masyarakat.
- 3) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
 - a) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak
 - b) Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat
 - c) Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan
 - d) Kegiatan Peningkatan Produksi Hasil peternakan Melalui Pembibitan dan Peneta.

b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat Pencapaian Kegiatan Dari Program-Program Penyelenggaraan Urusan Pertanian dan Peternakan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarbaru yaitu :

1. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan.

Indikator kinerja Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan sebagai berikut:

- a. Total produksi tanaman padi pertahun di tahun 2018 ditargetkan sebesar 6.123 ton dan terealisasi sebesar 7.184 ton atau 112 % dengan kategori capaian sangat tinggi. Tercapainya target disebabkan adanya gerakan peningkatan luasan tambah tanam atau gerakan Upsus Pajale (Upaya Khusus Padi, Jagung dan Kedele), penggunaan bibit unggul, penggunaan yang seimbang dan penggunaan sistem jarak pengaturan



tanam jajar legowo yaitu cara tanam padi dimana padi ditanam dalam beberapa barisan dengan diselingi satu barisan kosong.

- b. Total produksi tanaman cabe pertahun (ton) di tahun 2018 ditargetkan 731 ton dan terealisasi sebesar 941,8 ton atau 128,84 % dengan kategori capaian sangat tinggi. Pencapaian realisasi yang sangat tinggi ini karena cabe sebagai salah satu bagian dari tanaman kelompok hortikultura, salah satu obyek yang memiliki nilai ekonomi yang tidak bisa diabaikan dan memiliki berbagai kegunaan bila dimanfaatkan dengan tepat dan benar.
- c. Total produksi tanaman karet pertahun di tahun 2018 ditargetkan sebesar 952 ton dan terealisasi sebesar 974,945 ton atau sebesar 102,4 % dengan kategori capaian sangat tinggi. Produktivitas meningkat karena tanaman karet yang tahun sebelumnya belum bisa menghasilkan tapi tahun 2018 sudah bisa produktif.

Sedangkan capaian kegiatan pada Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan yaitu :

- a) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan realisasi anggaran sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 100%
 - b) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK) dengan realisasi anggaran sebesar 90,33% dan capaian sebesar 100%
 - c) Pengembangan Upaya Khusus Padi, Jagung dan Kedelai dengan realisasi anggaran sebesar 92,65% dan capaian sebesar 100%
 - d) Pengembangan Sarana dan Prasarana Hortikultura dengan realisasi anggaran sebesar 93,76% dan capaian sebesar 100%
 - e) Pengembangan Intensifikasi Tanaman Hortikultura dengan realisasi anggaran sebesar 50,57% dan capaian sebesar 100%
 - f) Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan dengan realisasi anggaran sebesar 99,72% dan capaian sebesar 100%
 - g) Pengembangan Usaha Perkebunan dengan realisasi anggaran sebesar 96,65% dan capaian sebesar 100%.
2. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- a) Pembinaan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan realisasi anggaran sebesar 98,44% dan capaian sebesar 100%
 - b) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Zoonosis dengan realisasi anggaran sebesar 98,31% dan capaian sebesar 100%
 - c) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Masyarakat dengan realisasi anggaran sebesar 96,45% dan capaian sebesar 100%



- d) Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Kesehatan Ternak Milik Masyarakat dengan realisasi anggaran sebesar 86,03% dan capaian sebesar 100%.
- 3. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan,
 - a) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak dengan realisasi anggaran sebesar 99,50% dan capaian sebesar 100%
 - b) Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat dengan realisasi anggaran sebesar 99,03% dan capaian sebesar 100%
 - c) Pengembangan Agribisnis Peternakan dengan realisasi anggaran sebesar 99,98% dan capaian sebesar 100%
 - d) Peningkatan Produksi Hasil peternakan Melalui Pembibitan dan Penetas dengan realisasi anggaran sebesar 99,52% dan capaian sebesar 100%.

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program dan kegiatan urusan pertanian oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan baik dari teknis, sosial, ekonomi maupun kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a) Adanya serangan hama dan alih fungsi lahan yang cukup tinggi.
- b) Kurangnya minat masyarakat terutama kaum muda dalam beraktivitas di bidang pertanian, hal ini bisa dilihat banyaknya sarjana pertanian yang berprofesi di luar petani.
- c) Adanya perubahan cuaca (pancaroba) sehingga banyak terdapat kasus penyakit AI (Avian Influenza), pada ternak sapi dan kambing (gatalan, demam 3 hari, kembung, sapi ambruk dan sebagainya).
- d) Kasus rabies positif karena pihak pemilik hewan kurang perhatian pada hewan. Produk pangan segar tercemar residu antibiotik dan cemaran mikroba (karena dihampar dibawah/tidak ditempat yang higienis)
- e) Produk pangan segar tercemar residu antibiotik dan cemaran mikroba (karena dihampar dibawah/tidak ditempat yang higienis)

2) Solusi

Solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan pertanian oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah



- a) Perlu adanya peningkatan penyuluhan dan bimbingan teknologi tentang pengendalian hama penyakit tanaman dan regulasi pemerintah tentang alih fungsi lahan.
- b) Melakukan kerja sama dengan pihak perguruan tinggi agar lebih memotivasi mahasiswanya untuk berwirausaha dibidang pertanian, bukan menjadi pegawai negeri, pegawai perusahaan dan lain-lain.
- c) Tata laksana manajemen pemeliharaan ternak, penyuluhan dan pembinaan ke peternak harus lebih ditingkatkan (lebih intensif).
- d) Peningkatan penyuluhan tentang bahaya penyakit rabies.

4. URUSAN PERDAGANGAN (DINAS PERDAGANGAN KOTA BANJARBARU)

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
 - a) Kegiatan Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen.
 - b) Kegiatan Pengawasan Perdagangan
 - c) Kegiatan Uji Petik dan Standarisasi Produk.
- 2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - a) Kegiatan Operasionalisasi Pengembangan Pasar
 - b) Kegiatan Pameran produk nasional
 - c) Kegiatan Pameran Inacraft
 - d) Kegiatan Monitoring Evaluasi.
- 3) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
 - a) Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan.
- 4) Program Peningkatan dan Pengelolaan Pasar
 - a) Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan Pasar
 - b) Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan Pasar (DAK)
 - c) Kegiatan Peningkatan dan Pengawasan PAD Pasar

c. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat realisasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan dari program-program Penyelenggaraan Urusan Perdagangan yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru, yaitu :

- 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, terdiri dari 3 kegiatan dan 2 indikator kinerja. Kegiatan-kegiatan dari Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, yaitu :



- a) Kegiatan Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen dengan realisasi anggaran sebesar 83,62% dan capaian kinerja sebesar 100%,
 - b) Kegiatan Peningkatan Pengawasan Perdagangan dengan realisasi anggaran sebesar 98,53% dan capaian kinerja sebesar 100%, dan
 - c) Kegiatan Uji Petik dan Standarisasi Produk dengan realisasi anggaran sebesar 91,56% dan capaian kinerja sebesar 100%.
- 2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, terdiri dari 3 kegiatan dan 2 indikator kinerja. Kegiatan-kegiatan dari Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri :
- a) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dengan realisasi anggaran sebesar 94,36% dan capaian kinerja sebesar 100%,
 - b) Kegiatan Pameran Inacraft dengan realisasi anggaran sebesar 99,35% dan capaian kinerja sebesar 100%,
 - c) Kegiatan Pameran Produk Nasional dengan realisasi anggaran sebesar 99,35% dan capaian kinerja sebesar 100%,
 - d) Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan Pasar dengan realisasi anggaran sebesar 95,92% dan capaian kinerja sebesar 100%.
- 3) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, terdiri dari 3 kegiatan dan 2 indikator kinerja. Kegiatan-kegiatan dari Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan :
- a) Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan dengan realisasi anggaran sebesar 94,99% dan capaian kinerja sebesar 100%,
- 4) Program Peningkatan dan Pengelolaan Pasar
- a) Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan Pasar dengan realisasi anggaran sebesar 91,86% dan capaian kinerja sebesar 100%
 - b) Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan Pasar (DAK) dengan realisasi anggaran sebesar 92,78% dan capaian kinerja sebesar 100%
 - c) Kegiatan Peningkatan dan Pengawasan PAD Pasar dengan realisasi anggaran sebesar 93,09% dan capaian kinerja sebesar 100%

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT DINAS PERDAGANGAN KOTA BANJARBARU)

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan (UPT Pasar)
 - d) Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan Pasar (UPT Pasar Bauntung),
 - e) Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan Pasar (UPT Pasar Ulin Raya).



- 2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri (UPT Gudang Transito)
 - a) Pengembangan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
- 3) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (UPT Metrologi)
 - a) Kegiatan Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen.

b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat realisasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan dari Unit Pelaksana Teknis di Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru, yaitu :

- 1) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
 - a) Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan Pasar (UPT Pasar Bauntung) dengan realisasi anggaran sebesar 99,35% dan capaian kinerja sebesar 100%.
 - b) Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan Pasar (UPT Pasar Ulin Raya) dengan realisasi anggaran sebesar 99,67% dan capaian kinerja sebesar 100%.
- 2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri (UPT Gudang Transito)
 - a) Pengembangan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan realisasi anggaran sebesar 87,63% dan capaian kinerja sebesar 100%.
- 3) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (UPT Metrologi)
 - a. Kegiatan Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen dengan realisasi anggaran sebesar 89,86% dan capaian kinerja sebesar 100%.

Adapun rekomendasi DPRD Kota Banjarbaru terhadap LKPJ Tahun 2017 dalam hal ini terkait Urusan Perdagangan (Dinas Perdagangan), yaitu :

- 1) Agar Pemerintah Daerah (dalam hal ini Dinas Perdagangan) dalam menyikapi masalah sisa kontrak pekerjaan pembangunan yang tidak selesai berpegang kepada ketentuan yang berlaku dan senantiasa berkoordinasi dengan SKPD teknis terkait (Dinas PU & PR dan BPKAD), untuk memastikan apakah dibenarkan melaksanakan pekerjaan lanjutan dengan addendum kontrak sedangkan dananya tidak tersedia dalam APBD.
- 2) Bahwa keberadaan pasar galuh cempaka sangat diperlukan sebagai sarana aktivitas perdagangan masyarakat dikarenakan di kecamatan Cempaka sendiri tidak memiliki pasar tradisional yang representatif. Oleh karena itu diharapkan Pemerintah Daerah dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk menindaklanjuti penyelesaian pasar dimaksud dengan tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada.

Tanggapan terhadap rekomendasi DPRD Kota Banjarbaru terhadap LKPJ Tahun 2017 yaitu :



- 1) Kegiatan pembangunan Pasar Rakyat Galuh Cempaka yang dibiayai dari Dana APBN Tugas Pembantuan sesuai kontrak senilai Rp. 4.770.301.000,-, hingga 31 Desember 2017 realisasi kegiatan fisik pembangunan baru mencapai Rp. 3.243.804.680,- atau 68%
- 2) Dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru sudah melakukan koordinasi dengan beberapa SKPD Teknis terkait antara lain Dinas PU & PR, BPKAD, Bappeda dan Inspektorat Kota Banjarbaru. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut Dinas Perdagangan mempersiapkan dokumen – dokumen / surat untuk mengajukan proses hibah pembangunan Pasar Galuh Cempaka ke Kementerian Perdagangan RI dan rencana proses hibah tersebut pada bulan Juli – Agustus Tahun 2018.
- 3) Pembangunan Pasar Rakyat Galuh Cempaka yang menggunakan dana APBN / Dana Tugas Pembantuan dilihat dari aspek manfaat keberadaan pasar tersebut sangat diperlukan masyarakat, serta untuk menjaga kepercayaan dari Pemerintah Pusat maka penyelesaian pembangunan pasar tersebut menjadi pilihan yang baik Pemerintah Kota Banjarbaru. Dan itu terbukti dimana Pemerintah Kota Banjarbaru mendapatkan dukungan kembali dari Kementerian Perdagangan RI untuk TA. 2018 dengan mendapatkan anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) sebesar Rp. 4.293.698.000,- dilokasi Pasar Rakyat Abadi Guntung Manggis, Pasar Rakyat Loktabat Utara, Pasar Rakyat Palam, Pasar Rakyat Bangkal , dan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp.6.000.000.000, berlokasi di pasar Rakyat Laura Landasan Ulin Utara.
- 4) Disamping itu Pembangunan Pasar Rakyat Galuh Cempaka merupakan Pembangunan Pasar Tradisional yang merupakan Program Presiden RI dalam Nawacita. Dan sesuai dengan ketentuan Kementerian Perdagangan dimana setiap pasar yang dibangun harus dapat dimanfaatkan berdasarkan hal tersebut dimana Pemerintah Kota Banjarbaru dalam hal ini Dinas Perdagangan memberanikan diri untuk melanjutkan kembali pelaksanaan pekerjaan dengan dana pada APBD Perubahan TA. 2018 dengan jumlah keseluruhan sebesar RP. 1.626.496.320,-. Dalam hal ini juga untuk menghindari kerugian besar jika proyek tersebut dihentikan karena akan terjadinya mangkrak (terbengkalai) dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam hal kegiatan perekonomian di Kota Banjarbaru

C. Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan
 - a) Masih adanya peredaran barang kadaluarsa/tidak layak konsumsi di pasaran,
 - b) Masih kurangnya kesadaran pedagang untuk menera ulang alat UTTP,
 - c) Masih kurangnya tenaga SDM penela di UPT Metrologi, dan



- d) Belum terdapat kawasan yang jelas untuk merelokasikan Pedagang Kaki Lima Pasar Subuh Pasar Bauntung Kota Banjarbaru.

2) Solusi

- a) Perlu pengawasan barang kadaluarsa / tidak layak konsumsi secara berkesinambungan dan sosialisasi tentang Undang – Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
- b) Perlu pengawasan alat UTTP dan Sosialisasi Undang – Undang Nomor 02 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal,
- c) Perlu tambahan Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat untuk menjadi penera di UPT Metrologi, dan
- d) Pemerintah Kota Banjarbaru memberikan himbauan berupa papan nama kawasan yang dilarang berjualan dan kawasan yang boleh untuk berjualan di wilayah Kota Banjarbaru.

5. URUSAN PERINDUSTRIAN (DINAS PERDAGANGAN KOTA BANJARBARU)

a. Program dan Kegiatan

- a) Program Pengembangan Industri Kecil & Menengah
 - a) Kegiatan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri.
 - b) Kegiatan Pengembangan Usaha melalui ekonomi kreatif.
- b) Program Peningkatan Promosi Produk Industri
 - a) Kegiatan Pameran Produk Industri.
- c) Program Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Bahan Tambahan Makanan dan Minuman
 - a) Kegiatan Pengawasan Bahan Tambahan Makanan dan Minuman.

b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat realisasi anggaran dan capaian kegiatan dari program-program Penyelenggaraan Urusan Perindustrian yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru, yaitu :

- 1) Program Pengembangan Industri Kecil & Menengah
 - a) Kegiatan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri dengan realisasi anggaran sebesar 97,44% dan capaian sebesar 100%,



- b) Kegiatan Pengembangan Usaha melalui ekonomi kreatif dengan realisasi anggaran sebesar 95% dan capaian sebesar 100%.
- 2) Program Peningkatan Promosi Produk Industri
 - a) Kegiatan Pameran Produk Industri dengan realisasi anggaran sebesar 97,45% dan capaian sebesar 100%.
- 3) Program Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Bahan Tambahan Makanan dan Minuman
 - a) Kegiatan Pengawasan Bahan Tambahan Makanan dan Minuman dengan realisasi anggaran sebesar 81,92% dan capaian sebesar 100%.

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Secara fisik untuk bidang industri persentase pelaksanaan kegiatan dari alokasi anggaran yang di sediakan sebenarnya menunjukkan hasil yang memuaskan karena persentase fisiknya untuk semua kegiatan sebesar 100%. Permasalahan terjadi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal antara lain kebijakan eksternal dapat mengganggu berkembangnya industri Kecil Menengah..

2) Solusi

Solusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pilihan bidang perindustrian adalah akibat kebijakan eksternal mengupayakan kepada industri kecil dan menengah untuk dapat melakukan diversifikasi bisnis yang selama ini memberikan supply terhadap kebutuhan industri menengah dan besar, dalam upaya pengembangan pasar dan diversifikasi produk yang ada dikota Banjarbaru.

D. URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG

1. URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat
 - a) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah,
 - b) Kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama;
 - c) Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan
 - d) Kegiatan Reses



- e) Kegiatan Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam Daerah;
- f) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
- 2) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
 - a) Kegiatan Legeslasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
 - b) Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
- 3) Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
 - a) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - b) Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

b. Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat Pencapaian Kegiatan Dari Program-Program Penyelenggaraan Urusan Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru yaitu :

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat
 - a) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah,
 Pada Tahun 2018 ini ditargetkan sebanyak 17 (tujuh belas) buah Raperda Kota Banjarbaru, berdasarkan capaiannya Kegiatan tersebut dapat terealisasi yakni sebanyak 14 (tiga belas) buah Raperda Kota Banjarbaru. Untuk pencapaian kinerja sebanyak 82.35 % dan untuk rapat ditargetkan sebanyak 238 (Dua ratus tiga puluh delapan) Kali , berdasarkan capaiannya Kegiatan tersebut dapat terealisasi melebihi target yakni sebanyak 105 (Seratus Lima) Kali ,Untuk pencapaian kinerja sebanyak 90.19 %. Namun dari sisi Keuangan Capaiannya dari Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 7.390.538.000,- direalisasikan sebesar Rp.6.665.529.029 sehingga terdapat penghematan Anggaran Sebesar Rp.725.008.971.00,- .
 - b) Kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama;
 Terlaksana sebanyak 15 kali kegiatan dimana rapat tersebut dilaksanakan disela-sela pelaksanaan Rapat Kerja dengan SKPD atau pada saat acara silaturahmi dengan warga/ Tokoh masyarakat sehingga dana yang dialokasikan terserap hanya 88.23 % dari yang di Anggarkan sebesar Rp. 85.616.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 37.959.500.-



c) Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

Terlaksana sebanyak 131 kali kegiatan yang terdiri dari Kegiatan, Komisi I, II dan III Serta kegiatan Badan Legislasi dan Badan Kehormatan (BK). Dari yang ditargetkan sebanyak 203 Kali. Sementara dari dana yang dialokasikan sebesar Rp. 289.088.500.- terealisasi sebesar Rp. 240.353.500 (Dua ratus enam puluh lima juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah.- Atau 83.14 % Sehingga dapat efisiensi dana sebesar Rp 48.735.000 .- Enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

d) Kegiatan Reses

Dilaksanakan secara rutin oleh Anggota DPRD Kota Banjarbaru sesuai dengan Daerah Pemilihan masing-masing sebanyak 3 kali masa reses sesuai yang dijadwalkan dengan capaian 100 % dengan realisasi anggaran sebesar 69,81%,

e) Kegiatan Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam Daerah;

Terlaksana sebanyak 25 kali kegiatan. Sementara dari dana yang dialokasikan sebesar Rp.469.566.000. terealisasi sebesar Rp. 139.748.000. Sehingga dapat efisiensi dana sebesar Rp.329.818.000.- dengan realisasi anggaran sebesar 29,76%.

f) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Dilaksanakan sebanyak 19 (Sembilan belas) kali dari yang di targetkan 25 (Dua puluh lima) kali, Sementara dari dana yang dialokasikan sebesar Rp.9.839.885 terealisasi sebesar Rp. 7792.421.887. Sehingga dapat efisiensi dana sebesar Rp.2.047.463.113.- dengan realisasi anggaran sebesar 79,19%.

2) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Pelaksanaan program ini pada tahun 2018 tercapai dengan tingkat capaian kinerja kegiatan yaitu sebesar 80.65 %. Sedangkan dari sisi keuangan dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 473.536.175,- Direalisasikan sebesar Rp. 83.000.000,- penyerapan anggaran hanya mencapai Rp. 17,53%.

1) Kegiatan Legeslasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan tercapai 80.65 %

2) Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan dan penyelesaian Sengketa Hukum (Tidak dilaksanakan)



c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan ;

- a) Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Indikator kinerja utama” Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelayanan Sekretariat DPRD, Kegiatan yang dilaksanakan lebih banyak bersifat kegiatan rutin untuk memfasilitasi semua kegiatan anggota dewan, sehingga dapat menghasilkan produk-produk dewan, baik produk hasil bersama dengan eksekutif ataupun produk inisiatif Dewan, yang pada gilirannya tentu diharapkan dapat meningkatkan kegiatan Pemerintah Kota Banjarbaru, yang secara umum tugasnya mendukung kegiatan Pemerintah Kota Banjarbaru.
- b) Tingkat keberhasilan Program Kegiatan belum terukur secara jelas dan ketepatan, kecepatan pelaksanaan kerja masih belum terkoordinasinya perencanaan Bagian-bagian pada lingkup Sekretariat DPRD secara maksimal, sehingga masih terdapat kecenderungan perencanaan yang bersifat mandiri, menyebabkan daya dorong terhadap tercapainya impact (dampak) dari program kegiatan Sekretariat DPRD belum maksimal.

2) Solusi

- a) Indikator kinerja utama” Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelayanan Sekretariat DPRD kegiatan Anggota Dewan untuk menghasilkan produk-produk Dewan sekarang ini pelayanan administrasi akan dioptimalkan dan professional agar produk-produk Dewan yang dihasilkan sesuai dengan usulan Prolegda maupun Pengesahan Peraturan Daerah lainnya di luar Prolegda.
- b) Untuk menyusun dan menetapkan indikator Kinerja sekretariat DPRD melalui koordinasi internal Sekretariat DPRD, untuk membahas dan menyepakati indikator kinerja atas program-program yang dilaksanakan pada bagian-bagian sehingga dapat memperjelas target tujuan yang hendak dicapai dengan ukuran yang tersusun secara sinergi, sistematis dan secara signifikan terhadap peningkatan capaian kinerja Sekretariat DPRD.

2. URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DAERAH)

Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf, dipimpin Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dan menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah.



Sekretariat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah dan lembaga lain.

Sedangkan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit organisasi Sesuai dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian tugas unsur-unsur organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah

2. Asisten Pemerintahan

- 2.1 Bagian Pemerintahan
- 2.3 Bagian Kerjasama dan Keagrariaan
- 2.4 Bagian Hukum

3. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

- 3.1 Bagian Perekonomian dan Pembangunan
- 3.2 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- 3.3 Bagian Kesejahteraan Rakyat

4 Asisten Administrasi Umum

- 4.1 Bagian Umum
- 4.2 Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
- 4.3 Bagian Organisasi

a. Program dan Kegiatan

Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dalam Tahun 2018 menetapkan 19 (sembilan belas) program sebagai indikator kinerja pelayanan. Uraian 19 (sembilan belas) Program Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- 6. Program Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah (2 program)
- 7. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah
- 8. Program Penataan Organisasi dan Anggaran Pemerintah Kelurahan
- 9. Program Peningkatan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah
- 10. Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan
- 11. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala



Daerah

12. Program Peningkatan Kinerja Administratif Perekonomian
13. Program Kerjasama Pembangunan
14. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
15. Program Peningkatan Kinerja Administratif Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat
16. Program Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat
17. Program Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
18. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
19. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah

Dalam rangka menjalankan program tersebut maka dilaksanakan dengan kegiatan kegiatan sebagai berikut :

a. BAGIAN UMUM

- 1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b). Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - c). Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - d). Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - f). Penyediaan Makanan dan Minuman
 - g). Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - h). Penyediaan Jasa Non PNS
- 2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a). Pembangunan Gedung Kantor
 - b). Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - c). Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - d). Pengadaan Mebeleur
 - e). Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
 - f). Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
 - g). Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - h). Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
 - i). Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - j). Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
 - k). Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - l). Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur



- m). Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- n). Penyediaan Sewa Rumah Dinas Pejabat
- o). Pengamanan Gedung Kantor
- 3). Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a). Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - b). Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
 - c). Pengadaan Pakaian Adat
- 4). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a). Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b). Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan
 - c). Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang

b. BAGIAN HUKUM

- 1). Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
 - a). Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan
 - b). Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan
 - c). Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
 - d). Publikasi Peraturan Perundang-undangan
 - e). Penanganan Kasus Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
 - f). Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Perjanjian Kerjasama / MOU
 - g). Pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi
 - h). Sosialisasi Rencana Aksi Nasional HAM

c. BAGIAN PEMERINTAHAN

- 1). Program Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah
 - a). Dialog /Audiensi Dengan tokoh –tokoh Masyarakat Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan.
 - b). Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 2). Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah
 - a). Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional
- 3). Program Penataan Organisasi dan Anggaran Pemerintah Kelurahan.
 - a). Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan
 - b). Pembinaan Administrasi Pemerintahan di Bawahnya



d. BAGIAN ORGANISASI

- 1). Program Peningkatan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah
 - a). Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah
 - b). Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah
 - c). Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
- 2). Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan
 - a). Penyusunan Produk Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah
 - b). Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
 - c). Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarbaru
 - d). Penyusunan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Standar Pelayanan Minimal
 - e). Asistensi/Pendampingan Penyusunan Rancangan & Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) AP dan Standar Pelayanan (SP) SKPD
 - f). Penyusunan Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan

e. BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

- 1). Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
 - a). Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri
 - b). Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
 - c). Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan
 - d). Publikasi Kegiatan Pimpinan
 - e). Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

f. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

- 1). Program Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah
 - a). Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.
- 2). Program Peningkatan Kinerja Administratif Perekonomian
 - a). Peningkatan Koordinasi Pengembangan UKM
 - b). Indeks Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah
 - c). Koordinasi BUMD dan Kajian Investasi



- d) Koordinasi Peningkatan Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah
- e) Koordinasi Penanganan Permasalahan Sarana dan Prasarana Perekonomian
- 3). Program Kerjasama Pembangunan
 - a) Penyelenggaraan Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Dunia Usaha

g. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

- 1). Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - a). Pelaksanaan Rukun Kematian
- 2). Program Peningkatan Kinerja Administratif Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat
 - a). Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
 - b). Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial Budaya
 - c). Koordinasi Pelaksanaan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat
 - d). Fasilitasi Bantuan Sosial
 - e). Pembinaan dan Pengembangan UKS
- 3). Program Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat
 - a). Penyelenggaraan Kegiatan Peribadatan Keagamaan

h. BAGIAN KERJASAMA DAN KEAGRARIAAN

- 1) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
 - a) Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik
- 2) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
 - a) Pembakuan Nama Rupa Bumi
 - b) Penataan dan Penegasan Tata Batas Wilayah
 - c) Penyelesaian Permasalahan Tanah dan Sertifikat Tanah

i. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

- 1). Program Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - a) Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - b) Koordinasi Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - c) Layanan Informasi dan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa



b. Pencapaian Program dan Kegiatan

Anggaran pelaksanaan program kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru menurut Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.31.750.712.150 dan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.36.508.426.050 yang terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung
- Belanja Langsung yang terdiri dari :
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Barang dan Jasa
 - Belanja Modal

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHAN

No.	Uraian	Pagu / Anggaran	Realisasi	Sisa
1.	Belanja Tidak Langsung	13.550.312.100	12.791.531.820	758.780.280
2.	Belanja Langsung			
	Belanja Pegawai	3.513.690.000	3.044.120.000	469.570.000
	Belanja Barang & Jasa	29.994.764.050	28.489.881.223	1.504.882.827
	Belanja Modal	2.999.972.000	2.826.949.780	173.022.220
	JUMLAH	50.058.738.150	47.152.482.823	2.906.255.327

Sumber : Bagian Umum Subbag Keuangan Setda (31 Desember 2018)

1) Bagian Pemerintahan

1. Program Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah
 - a. Kegiatan Dialog /Audiensi Dengan tokoh –tokoh Masyarakat Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan dengan realisasi anggaran sebesar 98,12% dan capaian sebesar 100%.
 - b. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 96,67% dan capaian sebesar 100%.
2. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dengan realisasi anggaran sebesar 99,41% dan capaian sebesar 100%.
3. Program Penataan Organisasi dan Anggaran Pemerintah Kelurahan.



- a. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan dengan realisasi anggaran sebesar 98,00% dan capaian sebesar 100%.
- b. Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan di Bawahnya dengan realisasi anggaran sebesar 88,57% dan capaian sebesar 100%.

No.	Permasalahan	Solusi
1.	<p>Pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah :</p> <p>a) Pengumpulan data dari SKPD dalam bentuk Laporan tahunan masih belum tepat waktu.</p> <p>b) Di tingkat SKPD tidak jarang terjadi mutasi terhadap pejabat/pengelola data dan tidak meninggalkan arsip data secara rapi kepada penggantinya.</p> <p>c) Masih terdapat penyajian data yang belum tepat dengan materi yang disampaikan.</p> <p>d) Terdapat perubahan pedoman penyusunan LPPD pada akhir bulan pertama sehingga perlu disesuaikan dalam permintaan data.</p> <p>e) Belum dipahaminya definisi operasional dari indikator kinerja kunci yang sudah ditetapkan pemerintah pusat.</p>	<p>a) Dari sekretariat tim penyusun LPPD akan lebih intensif berkoordinasi dengan SKPD terkait progress pembuatan laporan tahunan.</p> <p>b) Memperkuat Tim penyusun LPPD, khususnya koordinasi pada level sekretariat dan pengolah data.</p> <p>c) Melaksanakan sosialisasi tentang tata cara penyusunan dan pengisian IKK LPPD kepada semua SKPD.</p> <p>d) Perlu dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak pemerintah pusat.</p> <p>e) Sosialisasi mengenai pemahaman LPPD di rencanakan di awal Tahun agar beriringan dengan hasil evaluasi dan penyusunan LPPD yang baru.</p>
2.	<p>Pada kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional terdapat kesulitan dalam berkoordinasi dengan masing-masing koordinator seksi yang ikut terlibat dalam</p>	<p>Koordinasi aktif dengan semua koordinator yang terpilih dalam kepanitiaan dan membentuk grup kecil untuk masing-masing koordinator.</p>
3.	<p>kepanitiaan.</p> <p>Pada Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas</p>	<p>Melakukan koordinasi secara lebih intensif ke Camat dan Lurah se Kota Banjarbaru untuk mendapatkan data dan</p>



<p>Aparatur Kelurahan, Masalah yang di alami oleh Kecamatan danrd Kelurahan se Kota Banjarbaru sangat banyak dan beragam sedangkan dalam pengakomodiran pembahasan dalam tema Rapat Koordinasi Bulanan Camat Lurah se Kota Banjarbaru sangat terbatas.</p> <p>Belum optimalnya tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Bulanan Camat Lurah se Kota Banjarbaru sebelumnya sehingga terkadang belum menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada Kecamatan dan Kelurahan se Kota Banjarbaru.</p> <p>Pada kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Di Bawahnya, Pengakomodiran pelaksanaan workshop agar dapat menjadi jembatan yang efektif dan efisien bagi Camat Lurah se Kota Banjarbaru dalam perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat</p>	<p>informasi yang lebih akurat terkait permasalahan yang paling <i>urgent</i> untuk diangkat sebagai Tema Rapat Koordinasi Bulanan Camat Lurah se Kota Banjarbaru serta menjaring aspirasi dan komunikasi melalui grup sosial media seperti facebook dan What's App.</p> <p>Melakukan asistensi, konsultasi dan koordinasi ke Camat dan Lurah se Kota Banjarbaru terkait tindak lanjut Rapat Koordinasi Bulanan Camat Lurah se Kota Banjarbaru bulan sebelumnya.</p> <p>Melakukan koordinasi secara lebih intensif ke Camat dan Lurah se Kota Banjarbaru untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih akurat terkait pelaksanaan workshop Camat Lurah se Kota Banjarbaru serta menjaring aspirasi dan komunikasi melalui grup sosial media seperti facebook dan What's App.</p>
--	--

2) Bagian Hukum

1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
 - a. Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan dengan realisasi anggaran sebesar 77,71% dan capaian sebesar 100%.



- b. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan dengan realisasi anggaran sebesar 97,53% dan capaian sebesar 100%.
- c. Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dengan realisasi anggaran sebesar 66,67% dan capaian sebesar 100%.
- d. Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan dengan realisasi anggaran sebesar 87,91% dan capaian sebesar 100%.
- e. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Hukum dengan realisasi anggaran sebesar 97,31% dan capaian sebesar 100%.
- f. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Perjanjian Kerjasama / MOU dengan realisasi anggaran sebesar 12,56% dan capaian sebesar 100%.
- g. Kegiatan Pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi dengan realisasi anggaran sebesar 96,19% dan capaian sebesar 100%.
- h. Kegiatan Sosialisasi Rencana Aksi Nasional HAM dengan realisasi anggaran sebesar 71,02% dan capaian sebesar 100%.

Permasalahan	Solusi
a. Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	
1. Masih banyak SKPD yang belum secara aktif berkoordinasi dengan Bagian Hukum terkait Perda/Perwali yang harus di Evaluasi.	1. Membuat surat edaran yang memerintahkan kepada SKPD untuk Menginventarisir Perda/Perwali yang harus di Evaluasi.
2. Hasil Evaluasi di Kementrian memakan waktu yang cukup lama dan tidak bisa di prediksi selesainya sehingga tertundanya pemberian nomor register produk hukum di Biro Hukum Provinsi.	2. Sering berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi, Kementrian dalam Negeri dan Kementrian Keuangan terkait Penyelesaian hasil Evaluasi.
b. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	
1. Masih kurang aktifnya SKPD untuk mengusulkan pembuatan rancangan peraturan perundang-undangan/produk hukum yang menjadi kebutuhan/dasar hukum pelaksanaan kegiatan.	1. Membuat surat edaran terkait penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan/produk hukum yang merupakan kebutuhan masing-masing SKPD guna kelancaran pelaksanaan kegiatan.
2. Pejabat Fungsional Perancang yang ada di Bagian Hukum belum mengikuti Bintek legal drafting sehingga tidak	2. Mengusulkan kepada BKPP untuk mengikut sertakan bintek legal drafting bagi 2 (dua) orang pejabat



dapat menyandang sebagai status sebagai Legal Drafter	fungsional yang ada di Bagian Hukum
3. Untuk pembuatan Produk Hukum Daerah harus di Fasilitas terlebih dahulu ke Biro Hukum Provinsi dan waktu penyelesaiannya tidak dapat ditentukan.	3. Koordinasi dengan SKPD terkait waktu penyelesaian pembuatan Produk Hukum sehingga SKPD dapat merencanakan dengan baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
4. Masih banyak SKPD yang belum memahami tentang tata cara penyusunan/ pembuatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Produk Hukum .	4. Mengadakan sosialisasi/bimtek tentang tata cara pembuatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan/ Produk Hukum bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
c. Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	
1. Kurangnya inisiatif SKPD untuk mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah yang dibutuhkan sehingga tidak ada acuan yang menjadi dasar untuk pembuatan Naskah Akademik yang menjadi tahapan dalam proses pembuatan Perda.	1. Mengirimkan surat edaran tentang pembuatan Program Pembuatan Perda kepada SKPD sebagai bahan acuan untuk pembuatan Naskah Akademik
d. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Perjanjian Kerjasama	
1. Masih terdapatnya pemahaman yang kurang berkenaan dengan bentuk penulisan dan pembuatan Mou	1. Rapat Koordinasi lingkup Kota Banjarbaru mengenai bentuk, format serta penulisan pembuatan Mou/PKS
2. Masih terdapat tumpang tindih /overlapping tupoksi dengan bagian kerjasama sehingga ini membingungkan bagi SKPD yang ingin membuat Perjanjian Kerjasama/ Mou	2. Usulan perubahan terhadap Peraturan Walikota yang mengatur tentang tupoksi Bagian Hukum dengan Bagian Kerjasama sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih/overlapping tuposi
3. Kurangnya keahlian dalam pembuatan Mou /PKS	3. Perlu mengikutsertakan SDM yang ada pada Bagian Hukum untuk mengikuti Bimtek berkenaan dengan pembuatan Mou/PKS.



4. Masih kurangnya koordinasi internal berkenaan dengan pembuatan Mou dan PKS.	4. dilakukan rapat koordinasi internal terkait pembuatan Mou dan PKS.
e. Kegiatan Sosialisasi Rencana Aksi Nasional HAM	
1. Lambatnya pengumpulan data oleh SKPD terkait Rencana Aksi Nasional HAM untuk bahan Laporan penilaian Kota Peduli HAM.	1. Perlu adanya koordinasi dengan SKPD agar mereka dapat menyiapkan kelengkapan data Rencana Aksi Nasional HAM yang dibutuhkan untuk pelaporan sebelum batas waktu.
2. Masih ada SKPD yang belum memahami terkait data yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran kegiatan Rencana Aksi Nasional HAM	2. dibuatnya Grup Whatsapp sebagai media koordinasi antara SKPD yang terlibat dalam kegiatan RANHAM

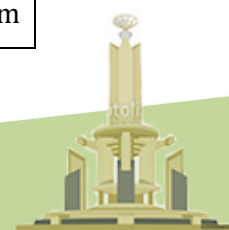
3) Bagian Organisasi

1. Program Peningkatan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah
 - a. Kegiatan Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 93,92% dan capaian sebesar 100%.
 - b. Kegiatan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 99,61% dan capaian sebesar 100%.
 - c. Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dengan realisasi anggaran sebesar 98,54% dan capaian sebesar 100%.
2. Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan
 - a. Kegiatan Penyusunan Produk Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 57,39% dan capaian sebesar 100%.
 - b. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan realisasi anggaran sebesar 94,16% dan capaian sebesar 100%.
 - c. Kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarbaru dengan realisasi anggaran sebesar 100% dan capaian sebesar 100%.
 - d. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Standar Pelayanan Minimal dengan realisasi anggaran sebesar 92,21% dan capaian sebesar 100%.
 - e. Kegiatan Asistensi/Pendampingan Penyusunan Rancangan & Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) AP dan Standar Pelayanan (SP) SKPD dengan realisasi anggaran sebesar 62,82% dan capaian sebesar 100%.



- f. Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan dengan realisasi anggaran sebesar 97,28% dan capaian sebesar 100%.

No.	Permasalahan	Solusi
1.	<p>a) Pemangku kepentingan pada unit penyelenggara pelayanan publik belum memahami apa yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut.</p> <p>b) Masih lemahnya dasar hukum yang dimiliki SKPD misalnya : uraian tugas yang belum selesai/ sinkron sehingga kesulitan dalam membuat dokumen SOP & SP.</p> <p>c) Masih terdapat aturan dari Pusat yang tumpang tindih dan belum disosialisasikan.</p> <p>d) Dalam kegiatan penyusunan laporan kinerja, perjanjian kinerja dan SPM hambatan yang dialami yaitu adanya perbaikan RPJMD yang telah ditetapkan sehingga masih banyak perbaikan yang menyesuaikan untuk dokumen SAKIP.</p> <p>e) IKU dari SKPD (indikator) belum sama dengan IKU Kota yang dimaksud beserta cara perhitungannya.</p> <p>f) Penyusunan SPM terkendala dengan lambatnya penjelasan teknis aturan terbaru dari Kemendagri sehingga data-data SKPD terlambat masuk ke Bagian Organisasi.</p> <p>g) Kurangnya aspirasi dari SKPD dalam menyampaikan masalah yang</p>	<p>a) Mengadakan rapat bersama tim dan unit penyelenggara pelayanan publik Banjarbaru serta melakukan pembinaan yang intensif.</p> <p>b) Berkoordinasi dengan SKPD teknis terkait dan melakukan pembinaan yang intensif.</p> <p>c) Melakukan konsultasi dan mengadakan rapat bersama Tim dan Rapat koordinasi.</p> <p>d) Setelah revisi RPJMD selesai diharapkan seluruh dokumen Perencanaan dapat menyesuaikan.</p> <p>e) Diperbaiki IKU nya agar selaras/berkesesuaian beserta cara perhitungannya.</p> <p>f) Segera dilaksanakan penyusunan SPM 2018 dengan aturan yang lama, untuk mengejar target pelaporan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.</p> <p>g) Menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Selatan dalam</p>



	<p>dihadapi terkait organisasi dan kepegawaian yang sering dihadapi.</p> <p>h) Dalam kegiatan evaluasi kelembagaan perangkat daerah petugas tidak aktif dalam pelaksanaan kegiatan dan bahan yang disampaikan tidak lengkap.</p> <p>i) Penentuan kelas/tipeologi Perangkat Daerah akan berpengaruh terhadap Eselonering Jabatan.</p> <p>j) Dalam kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan jumlah jabatan yang akan di standarisasi sangat banyak sehingga perlu ketelitian dan kehati-hatian dalam menetapkan kriteria dan standarisasi.</p> <p>k) Keterbatasan waktu dan tenaga yang memiliki kompetensi dalam melakukan penyusunan standarisasi jabatan.</p>	<p>menghadapi setiap permasalahan yang terjadi serta menyampaikan surat edaran terkait permintaan inventarisir masalah organisasi dan kepegawaian ke semua SKPD agar segala permasalahan terdeteksi dini untuk dicarikan solusi.</p> <p>h) Penunjukkan petugas Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah adalah Sekretaris dan Pejabat Kepegawaian yang berkenaan langsung dengan kegiatan pada SKPD masing-masing dinas/badan dan tidak boleh diwakilkan oleh pejabat /pegawai lain.</p> <p>i) Membuat Peraturan Walikota tentang Eselonering Jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.</p> <p>j) Melaksanakan rapat secara intensif dengan pimpinan dan pengambil kebijakan / keputusan untuk menentukan kriteria dan standarisasi untuk setiap jabatan sebelum dilakukan penetapan.</p> <p>k) Mengeliminir penggunaan eselonering dalam menetapkan standarisasi jabatan dan mengacu pada pengelompokan jabatan administrator dan jabatan pengawas dengan melakukan perumpunan untuk jabatan sejenis sehingga lebih efektif dalam penyusunan dan penetapannya.</p>
--	--	---



<p>l) Dalam kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan pejabat kepegawaian pada SKPD baru sebagian besar adalah pejabat baru yang belum memiliki pengalaman dalam penyusunan evaluasi jabatan.</p> <p>m) Pemetaan Pegawai pada SKPD baru masih belum sesuai dengan pendidikan dan kompetensi bidang kerja, sehingga dalam menyusun evaluasi jabatan masih memperhatikan pegawai yang bersangkutan yang secara jenjang pendidikan dan syarat jabatan tidak memenuhi jabatan yang dipangkunya.</p>	<p>l) Untuk saat ini hanya akan dilakukan evaluasi kelembagaan dengan memperhatikan urgensi dari SKPD yang perlu dilakukan perubahan struktur organisasi dan tata kerjanya, sedangkan usulan perangkat daerah baru yang memerlukan kajian akademis dan analisis beban kerja akan dikaji lebih lanjut serta perlunya berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjarbaru untuk melakukan inventarisasi jabatan administrator dan jabatan pengawas.</p> <p>m) Secara bertahap Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjarbaru akan melakukan Pemetaan Pegawai dengan menyesuaikan jabatan yang terdapat pada Permenpan 25 Tahun 2016, sehingga dapat diketahui secara pasti jumlah pegawai saat ini serta kebutuhan formasi untuk yang akan datang sesuai dengan syarat jabatan yang seharusnya dan hasil Nilai Jabatan akan dijadikan dasar oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai dasar pembayaran tunjangan pegawai Pemerintah Kota Banjarbaru.</p> <p>n) Biaya pembangunan Sistem Informasi Jabatan (SINJAB)</p>
---	--



	n) Biaya pembangunan Sistem Informasi jabatan (SINJAB) tergolong cukup mahal.	dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru, dimana mekanisme pengimplemetasiannya dilakukan secara bersama dengan Bagian Organisasi dengan melakukan kaji banding ke beberapa daerah yang sudah menerapkan dan bersedia berbagi pakai untuk sistem tersebut.
--	---	--

4) Bagian Kerjasama dan Agraria

1) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

- (a) Kegiatan Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik dengan realisasi anggaran sebesar 84,95% dan capaian sebesar 100%.

2) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah

- (a) Kegiatan Pembakuan Nama Rupa Bumi dengan realisasi anggaran sebesar 15,06% dan capaian sebesar 100%.
- (b) Kegiatan Penataan dan Penegasan Tata Batas Wilayah dengan realisasi anggaran sebesar 72,37% dan capaian sebesar 100%.
- (c) Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Tanah dan Sertifikat Tanah dengan realisasi anggaran sebesar 91,17% dan capaian sebesar 100%.

No.	Permasalahan	Solusi
1.	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih belum diperbaharuinya Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah. b. Tidak terselenggaranya fasilitasi terhadap beberapa pihak yang bekerjasama, sehingga terkendala dalam kesepakatan isi dalam perjanjian kerjasama. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan mempedomani peraturan yang berlaku saat ini. b. Melakukan pembelajaran terhadap bagian kerjasama yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan maupun daerah lain yang dapat



	<p>c. Belum adanya Permendagri tentang Penegasan Batas Daerah antara Kota Banjarbaru dengan Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Banjar sehingga tidak dapat diterbitkan Perwali/SK Walikota tentang Batas Wilayah Administrasi Kelurahan se Kota Banjarbaru.</p> <p>d. Pada kegiatan Penyelesaian Permasalahan Tanah dan Sertifikasi Tanah adanya hambatan ketergantungan dengan instansi lain yaitu Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan.</p> <p>e. Adanya jadwal pengukuran yang padat pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru.</p> <p>f. Untuk perubahan sertifikasi hibah tanah masyarakat bahwa dokumen harus dilakukan perubahan wilayah.</p> <p>g. Pada kegiatan rupa bumi belum adanya SDM tenaga terampil/tenaga teknis yang menguasai toponimi rupa bumi.</p>	<p>dijadikan contoh dan diimplementasikan di Banjarbaru.</p> <p>c. Percepatan penyelesaian Penegasan Batas Daerah antara Kota Banjarbaru dengan Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Banjar.</p> <p>d. Melakukan koordinasi yang intensif dengan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru.</p> <p>e. Perlu adanya bintek dan pelatihan SDM dalam hal penguasaan toponimi rupa bumi</p>
--	---	---

5) Bagian Hukum

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi anggaran sebesar 96,82% dan capaian sebesar 100%.
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan realisasi anggaran sebesar 95,99% dan capaian sebesar 100%.
 - c. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan realisasi anggaran sebesar 99,35% dan capaian sebesar 100%.



- d. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan realisasi anggaran sebesar 99,67% dan capaian sebesar 100%.
 - e. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi anggaran sebesar 99,06% dan capaian sebesar 100%.
 - f. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan realisasi anggaran sebesar 98,88% dan capaian sebesar 100%.
 - g. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 97,21% dan capaian sebesar 97,21%.
 - h. Kegiatan Penyediaan Jasa Non PNS dengan realisasi anggaran sebesar 80,40% dan capaian sebesar 100%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan realisasi anggaran sebesar 98,46% dan capaian sebesar 100%.
 - b. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan realisasi anggaran sebesar 93,16% dan capaian sebesar 100%.
 - c. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan realisasi anggaran sebesar 97,99% dan capaian sebesar 100%.
 - d. Kegiatan Pengadaan Mebelur dengan realisasi anggaran sebesar 98,30% dan capaian sebesar 100%.
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan dengan realisasi anggaran sebesar 90,74% dan capaian sebesar 100%.
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan dengan realisasi anggaran sebesar 87,80% dan capaian sebesar 100%.
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan realisasi anggaran sebesar 94,85% dan capaian sebesar 100%.
 - h. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas dengan realisasi anggaran sebesar 100% dan capaian sebesar 100%.
 - i. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan realisasi anggaran sebesar 99,80% dan capaian sebesar 100%.
 - j. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas dengan realisasi anggaran sebesar 89,90% dan capaian sebesar 100%.
 - k. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan realisasi anggaran sebesar 97,84% dan capaian sebesar 100%.
 - l. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelur dengan realisasi anggaran sebesar 96,57% dan capaian sebesar 100%.



- m. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor dengan realisasi anggaran sebesar 98,70% dan capaian sebesar 100%.
 - n. Kegiatan Penyediaan Sewa Rumah Dinas Pejabat dengan realisasi anggaran sebesar 100% dan capaian sebesar 100%.
 - o. Kegiatan Pengamanan Gedung Kantor dengan realisasi anggaran sebesar 89,67% dan capaian sebesar 100%.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dengan realisasi anggaran sebesar 98,54% dan capaian sebesar 100%.
 - b. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu dengan realisasi anggaran sebesar 99,33% dan capaian sebesar 100%.
 - c. Kegiatan Pengadaan Pakaian Adat dengan realisasi anggaran sebesar 99,08% dan capaian sebesar 100%.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan realisasi anggaran sebesar 99,92% dan capaian sebesar 100%.
 - b. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan dengan realisasi anggaran sebesar 97,82% dan capaian sebesar 100%.
 - c. Kegiatan Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang dengan realisasi anggaran sebesar 84,60% dan capaian sebesar 100%.

No.	Permasalahan	Solusi
	a. Pada Bagian Umum penyediaan barang cetakan dapat direalisasikan dan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan untuk barang cetakan dilaksanakan oleh pihak ketiga dan di stock sampai akhir tahun, serta untuk stock barang cetakan diperlukan gudang yang memadai.	a. Perlu ditambah gudang baru untuk menyimpan barang-barang cetakan.
	b. Pada kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah menyesuaikan permintaan dari bagian-bagian untuk melakukan perjalanan dinas	b. Meningkatkan minat ASN untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan formal untuk



	<p>dan mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan formal sehingga serapan anggaran tidak bisa di prediksi. Serta kurangnya pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti oleh ASN lingkup Setdako.</p> <p>c. Dalam kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan untuk satu penyedia dengan pesanan dalam jumlah yang banyak membuat kesulitan dalam penerimaan dan pemeriksaan hasil pengadaan pakaian.</p> <p>d. Pada Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, makanan dan minuman pegawai/tamu sulit untuk diprediksi karena menyesuaikan dengan giat kepala daerah dan permintaan konsumsi dari luar SKPD yang di setuju oleh Walikota, Makan minum harian pegawai jumlah volumenya menyesuaikan dengan jumlah pegawai pada saat giat termasuk dengan pegawai magang dan pers room.</p> <p>e. Pada Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan data yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan keuangan masih kurang lengkap dan akurat,dan masih memerlukan SDM yang dapat memahami cara pembuatan laporan keuangan berbasis akrual, serta penginputan SPJ pada Sistem Aplikasi SIMDA terkadang mengalami gangguan saat memasukan data.</p>	<p>menunjang kualitas SDM lingkup Setdako Banjarbaru.</p> <p>c. Penyedia dan pembuat pakaian jadi harus diseleksi dengan lebih baik.</p> <p>d. Penganggaran untuk makan minum sebaiknya tidak berdasarkan volume karena macam/jenis/volume makan minum yang diminta, karena pasti akan ada perubahan jumlah pegawai serta untuk makan minum tamu tidak dapat diprediksi atau harus dipertimbangkan lebih matang untuk volume/jenis/macam nya.</p> <p>e. Melakukan koordinasi lebih intensif ke Bagian-Bagian / unit kerja (bendahara pembantu pengeluaran, pengurus, dan penyimpan barang) untuk mendapatkan data (aset dan barang persediaan) serta melakukan konsultasi dan koordinasi yang lebih insentif pada</p>
--	---	---



	<p>f. Dalam kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD masih banyaknya aparatur di lingkup Setda yang kurang memahami dalam perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan serta evaluasi kinerja, sistem aplikasi baik SIMDA, SIRUP, maupun MONEV yang terkadang mengalami gangguan / <i>error system</i> khususnya pada saat melakukan penginputan data (entry data), serta masih ditemukannya kesalahan dalam pengisian indikator kinerja dan penentuan satuan harga anggaran belanja.</p>	<p>setiap Bagian dan Instansi terkait seperti BPKAD.</p> <p>f. Melakukan koordinasi secara lebih intensif ke bagian-bagian untuk mendapatkan data yang lebih akurat serta menjaring aspirasi dan komunikasi melalui kegiatan rapat koordinasi internal serta menggunakan media sosial media seperti <i>What's App</i>, Perlu adanya diklat teknis maupun bimtek untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan pemahaman dalam perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan serta evaluasi kinerja, dan Melakukan asistensi, konsultasi dan koordinasi yang lebih ke instansi terkait seperti Bappeda, BPKAD serta Tim SAKIP Pemerintah Kota Banjarbaru</p>
--	--	---

6) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
 - a. Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri dengan realisasi anggaran sebesar 87,27% dan capaian sebesar 100%.
 - b. Kegiatan Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 98,43% dan capaian sebesar 100%.
 - c. Kegiatan Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan dengan realisasi anggaran sebesar 95,30% dan capaian sebesar 100%.



- d. Kegiatan Publikasi Kegiatan Pimpinan dengan realisasi anggaran sebesar 96,17% dan capaian sebesar 100%.
- e. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 96,70% dan capaian sebesar 100%.

No.	Permasalahan	Solusi
	a) Untuk kegiatan Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan kendala yang dihadapi yaitu kurangnya peralatan (Kamera/Foto) dalam melaksanakan tugas, Kurangnya personil dalam melaksanakan tugas peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan, serta Operasional petugas peliputan dalam melaksanakan tugas.	a) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Sub Bagian Publikasi dalam hal bantuan personil untuk melaksanakan tugas liputan dan dokumentasi. Dan bekerjasama dengan Pers/Awak Media guna mendukung kegiatan peliputan dan dokumentasi.

7) Bagian Perekonomian dan Pembangunan

1. Program Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah
 - a. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dengan realisasi anggaran sebesar 97,90% dan capaian sebesar 100%.
- 2). Program Peningkatan Kinerja Administratif Perekonomian
 - a. Kegiatan Peningkatan Koordinasi Pengembangan UKM dengan realisasi anggaran sebesar 81,08% dan capaian sebesar 100%.
 - b. Kegiatan Indeks Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 100% dan capaian sebesar 100%.
 - c. Kegiatan Koordinasi BUMD dan Kajian Investasi dengan realisasi anggaran sebesar 11,29% dan capaian sebesar 100%.
 - d. Kegiatan Koordinasi Peningkatan Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 70,82% dan capaian sebesar 100%.

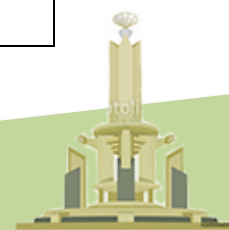


- e. Kegiatan Koordinasi Penanganan Permasalahan Sarana dan Prasarana Perekonomian dengan realisasi anggaran sebesar 59,67% dan capaian sebesar 100%.

3). Program Kerjasama Pembangunan

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Dunia Usaha dengan realisasi anggaran sebesar 46,41% dan capaian sebesar 100%. Pada Tahun 2018 untuk TJSP teralisasi sebesar Rp. 2,7 Milyar (yang dilaporkan sampai bulan Nopember 2018)
- b. Jumlah Perusahaan atau Pendonor yang Berkontribusi terhadap Pembangunan Kota lebih dari yang ditargetkan pada tahun 2018 sangat jauh di bandingkan tahun 2017 karena memang Perwali baru dikeluarkan bulan Desember 2017, Sehingga peranannya belum optimal . Pada tahun 2018 ada beberapa perusahaan yang memberikan kontribusi terbesar dalam memberikan TJSP nya (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) diantaranya:
- c. PT. Angkasa Pura
- d. PT BANK BRI
- e. PT Kalimantan Concrete Engineering
- f. PT. Santury Garuda
- g. BANK KAL SEL

No.	Permasalahan	Solusi
	a) Pada kegiatan Penyelenggaraan Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Dunia Usaha belum ada rujukan /contoh yang bisa diadopsi untuk pengembangan website, yang dapat memudahkan perusahaan berkontribusi secara online.	a) Dilakukan pembelajaran kembali untuk pengembangan website.
	b) Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah Anggarannya tidak terealisasi 100 % karena pelaksanaan rapat atau kordinasi sangat tergantung pada isu yang berpengaruh terhadap inflasi daerah terutama yang berkaitan	b) Perlu dilakukan rapat koordinasi dan monitoring dengan anggota TPID terkait adanya gejolak baik itu harga / stok yang dapat mempengaruhi inflasi daerah.



	<p>dengan kenaikan harga, bahan pangan dan komoditas tertentu.</p> <p>c) Pola kerjasama pembuatan naskah Kajian Investasi pada kegiatan Koordinasi BUMD dan Kajian Investasi sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk tahun 2018 tidak dibuat kajian karena Perda penambahan penyertaan modal masih berjalan.</p> <p>d) Pada kegiatan Indeks Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah data data yang diperlukan masih kurang.</p>	<p>c) Melakukan koordinasi yang intensif.</p> <p>d) Melakukan koordinasi yang intensif agar mendapatkan informasi dan data potensi ekonomi daerah.</p>
--	---	--

8) Bagian Kesejahteraan Rakyat

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Rukun Kematian dengan realisasi anggaran sebesar 83,57% dan capaian sebesar 100%.
2. Program Peningkatan Kinerja Administratif Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat
 - a. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Rakyat dengan realisasi anggaran sebesar 98,39% dan capaian sebesar 100%.
 - b. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial Budaya dengan realisasi anggaran sebesar 96,72% dan capaian sebesar 100%.
 - c. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dengan realisasi anggaran sebesar 98,28% dan capaian sebesar 100%.
 - d. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial dengan realisasi anggaran sebesar 38,55% dan capaian sebesar 100%.
 - e. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan UKS dengan realisasi anggaran sebesar 91,33% dan capaian sebesar 100%.
3. Program Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat

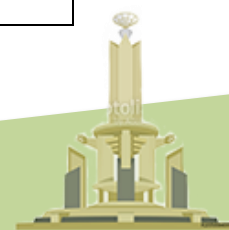


- a. Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Peribadatan Keagamaan dengan realisasi anggaran sebesar 91,43% dan capaian sebesar 100%.

No.	Permasalahan	Solusi
1.	<p>Subbag. Pendidikan, Pembinaan Karakter dan Keagamaan</p> <p>a. Kegiatan MTQ Nasional Tingkat Kota Banjarbaru tidak berjalan sesuai dengan rencana sehingga waktu pelaksanaan terlalu dekat dengan bulan Ramadhan sehingga pelaksanaan terkesan tergesa-tegesa;</p> <p>b. Kurangnya koordinasi antar pengurus LPTQ Tingkat Kota dengan pengurus LPTQ Tingkat Kecamatan dalam mempersiapkan kafilah masing-masing kecamatan;</p> <p>c. Pengkaderan pada Qori/Qoriah, Hafidz/Hafidzah dan cabang lain belum berjalan maksimal, sehingga masih ditemukan peserta yang dari perwakilan Kecamatan mengambil peserta di luar Wilayah Kota Banjarbaru;</p> <p>d. Kegiatan Isbat Nikah tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kelengkapan berkas permohonan isbat nikah banyak yang tidak lengkap dan tidak ada jawaban dari Pengadilan Agama. Bagian Kesra sendiri sudah membuat Surat Edaran tentang</p>	<p>Subbag. Pendidikan, Pembinaan Karakter dan Keagamaan</p> <p>a. Untuk kegiatan MTQ Nasional Tingkat Kota Banjarbaru, pengkaderan Qori/Qoriah, Hafidz/Hafidzah dan cabang lain yang diperlombakan diperlukan usaha yang maksimal dengan mengambil Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Kota Banjarbaru;</p> <p>b. Untuk kegiatan Isbat Nikah, dikarenakan pelaksanaan kegiatan tahun ini yang dijadwalkan pada saat Anggaran Perubahan dimana waktu pelaksanaan yang sangat singkat sedangkan untuk pelaksanaannya sendiri diperlukan waktu yang lebih lama karena dalam mengumpulkan berkas dan koordinasi dengan Pengadilan Agama tidak memerlukan waktu yang sebentar.</p>
2.		



3.	<p>Isbat Nikah dan sudah dikirimkan ke Kelurahan.</p> <p>Subbag. Kemasyarakatan dan Sosial Budaya</p> <p>a. Dalam pelaksanaan kegiatan Perayaan Hari Anak Yatim akan diberikan bingkisan berupa peralatan sekolah dan peralatan sholat yang dalam penganggarnya masuk ke dalam kode rekening barang yang diserahkan kepada masyarakat. Untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat diharuskan ada proposal dalam permintaan barang tersebut, sedangkan data yang diterima langsung didapat dari Kelurahan se Kota Banjarbaru yang bukan berupa proposal.</p> <p>b. Menentukan waktu pelaksanaan Silaturahmi dan Koordinasi Bersama Walikota/Wakil Walikota Banjarbaru dikarenakan jadwal Walikota/Wakil Walikota Banjarbaru yang padat;</p> <p>c. Pada kegiatan Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Rakyat terdapat kendala dalam pelatihan kader guru terkait UKS yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan dalam penyusunan RKA terdapat 2 (dua) kode</p>	<p>Subbag. Kemasyarakatan dan Sosial Budaya</p> <p>a. Untuk Kegiatan kegiatan Perayaan Hari Anak Yatim bekerjasama dengan LPM Kota Banjarbaru dalam pembuatan proposal sehingga bingkisan tersebut dapat diberikan kepada anak yatim.</p> <p>b. Dana untuk pelatihan kader guru terkait UKS digeser menjadi kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Bidang Kesehatan, Pertanian dan KB dengan SKPD dan Stackholder terkait.</p> <p>c. Menyelesaikan renovasi bangunan sekretariat UKS dan mengisi kelengkapannya selain itu juga penambahan pelaksana yang concern dalam mengurus kesekretariatan UKS.</p>
----	---	---



	<p>rekening tidak dicantumkan yaitu honor narasumber/pemberi materi dan uang transportasi untuk peserta pelatihan.</p> <p>d. Sekretariat UKS yang belum berfungsi sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan mengalami kesulitan dalam berkoordinasi dengan stackholder terkait selain disebabkan bangunan sekretariat yang masih dalam tahap renovasi juga kurangnya pelaksana dalam tim sekretariat sehingga kurang maksimal dalam pengelolaan sekretariat tim UKS.</p> <p>Subbag. Fasilitasi Bantuan Sosial</p> <p>a. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi bantuan sosial melalui sosialisasi dan bimbingan teknis serta silaturahmi dan koordinasi melalui kegiatan ini diharapkan semua elemen masyarakat serta instansi terkait dapat mengetahui proses penyaluran bantuan sosial. Karena keterbatasan anggaran untuk mensosialisasikan bantuan sosial maka masih banyak yang belum mengetahui tentang tata cara prosedur pemberian bantuan sosial.</p>	<p>d. Membuat telaahan staf yang berisi jadwal pelaksanaan silaturahmi dan koordinasi dengan menentukan waktu dan tempat pelaksanaan untuk mendapat persetujuan Walikota Banjarbaru yang selanjutnya dijadwalkan dengan berkoordinasi dengan Bagian Humas Setdako Banjarbaru.</p> <p>Subbag. Fasilitasi Bantuan Sosial</p> <p>a. Untuk kegiatan fasilitasi bantuan sosial, agar menganggarkan kembali kegiatan tersebut untuk tahun berikutnya agar seluruh lapisan masyarakat dan SKPD yang belum mengetahui tentang tata cara prosedur pemberian bantuan sosial dapat mengetahuinya.</p>
--	--	---



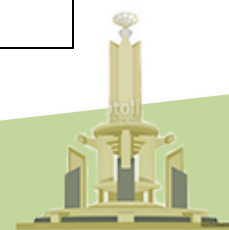
	<p>b. Kegiatan Bimbingan Teknis Pelatihan Penyelenggaraan Pengurusan Jenazah, dalam pelaksanaan kegiatan Rukun Kematian pada Tahun 2018 hanya sebagian rukun kematian yang berada di wilayah Kota Banjarbaru yang dapat diikuti sertakan sebagai peserta bimbingan teknis karena terkendala keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatannya sehingga diusulkan kembali permintaan anggaran untuk tahun berikutnya agar pengurus rukun kematian yang belum pernah mengikuti kegiatan bimbingan teknis ini dapat kesempatan mengikutinya dengan bertahap.</p>	<p>b. Untuk kegiatan rukun kematian, akan dianggarkan kembali kegiatan tersebut untuk tahun berikutnya karena pelaksanaannya (pemberian peralatan/keperluan untuk jenazah) dilaksanakan secara bertahap.</p>
--	---	--

9. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

1. Program Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan realisasi anggaran sebesar 99,30% dan capaian sebesar 100%.
- Koordinasi Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan realisasi anggaran sebesar 43,39% dan capaian sebesar 100%.
- Layanan Informasi dan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan realisasi anggaran sebesar 63,85% dan capaian sebesar 100%.

No.	Permasalahan	Solusi
1.	a. Pada Kegiatan Koordinasi Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adanya perubahan peraturan Perpres 54/2010 ke	a. BPBJ/ UKPBJ Pemko Banjarbaru harus memiliki PPBJ Fungsional tertentu.



	<p>Perpres 16/2018 bahwa untuk Bimtek Peningkatan Kompetensi PPBJ (Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa) adalah PPBJ yang sudah menduduki Jabatan Fungsional. Sedangkan di BPBJ/ UKPBJ belum memiliki PPBJ Fungsional tertentu. Untuk peningkatan Aplikasi Online Silang, dengan adanya peningkatan aplikasi SPSE dari versi 4.2 ke 4.3 maka Aplikasi Online Silang PBJ di hentikan karena isi dari Aplikasi Online Silang telah di akomodir di Aplikasi SPSE V.4.3 LKPP.</p>	<p>BPBJ/ UKPBJ Pemko Banjarbaru telah membuat Aplikasi Online Silang PBJ dan akan membuat Aplikasi yang belum di fasilitasi Aplikasi SPSE LKPP (V.4.3) seperti Aplikasi Kaji Ulang Dokumentasi Pengadaan dan Aplikasi Sanggah Banding.</p>
	<p>b. Pada Kegiatan Layanan Informasi dan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa secara umum kegiatan terlaksana yaitu 2 kali sosialisasi/bimtek, tetapi ada efisiensi bebrapa item pekerjaan dan ada pekerjaan yang tidak direalisasikan seperti pemberian uang transport untuk peserta dan ada honorarium pemberi materi dari pusat yang tidak terealisasi 1 kali karena pemberi materi nya cukup dari internal Pemerintah Kota Banjarbaru.</p>	<p>b. Penyusunan anggaran selanjutnya agar disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.</p>

3. URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (KECAMATAN BANJARBARU SELATAN)

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Pemerintah
 - a. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah
 - b. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Ekonomi dan Pembangunan



- c. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- d. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban

b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat realisasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan dari Program Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Pemerintah yang dilaksanakan oleh Kecamatan Banjarbaru Utara, yaitu :

- a) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah dengan realisasi anggaran sebesar 96,06% dan capaian sebesar 100%.
- b) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Ekonomi dan Pembangunan dengan realisasi anggaran sebesar 99,72% dan capaian sebesar 100%.
- c) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan realisasi anggaran sebesar 99,97% dan capaian sebesar 100%.
- d) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban dengan realisasi anggaran sebesar 99,74% dan capaian sebesar 100%.

Pengelolaan Keuangan Kecamatan dan Kelurahan :

- 1) Dana yang dikelola Kecamatan Banjarbaru Selatan (Belanja Langsung) sebesar Rp. 2.546.346.400,- dengan realisasi Rp. 2.484.262.229,- (97,56%)
- 2) Dana yang dikelola Kelurahan Loktabat Selatan (Belanja Langsung) sebesar Rp. 191.777.800,- dengan realisasi Rp. 180.743.688,- (94,25%)
- 3) Dana yang dikelola Kelurahan Kemuning (Belanja Langsung) sebesar Rp. 237.348.000,- dengan realisasi Rp. 219.805.634,- (92,61%)
- 4) Dana yang dikelola Kelurahan Guntung Paikat (Belanja Langsung) sebesar Rp. 318.743.000,- dengan realisasi Rp. 305.134.871,- (95,73%)
- 5) Dana yang dikelola Kelurahan Sungai Besar (Belanja Langsung) sebesar Rp. 211.049.000,- dengan realisasi Rp. 203.296.873,- (96,33%)

Total Pengelolaan Keuangan Kecamatan Banjarbaru Selatan dan Kelurahan Sekecamatan Banjarbaru Selatan (Belanja Langsung) sebesar Rp. 3.505.264.200,- dengan realisasi Rp. 3.393.243.295,- (96,80%)

c. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik diakui bahwa Kecamatan Banjarbaru Selatan memiliki beberapa permasalahan yang menghambat kelancaran organisasi dalam mencapai tujuannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan beberapa permasalahan tersebut adalah :



- 1) Rendahnya kesadaran masyarakat Kecamatan Banjarbaru Selatan tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan.
- 2) Ketidaktahuan masyarakat mengenai SOP.
- 3) Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2018 tidak mencapai target dikarenakan berkurangnya kewenangan Kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Perizinan Tertentu dari Walikota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sedangkan Solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah :

- a. Masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam melengkapi dokumen kependudukan yang dimiliki dengan mengurus pembuatan dokumen kependudukan secara mandiri.
- b. Sebaiknya Mengikutsertakan masyarakat (yang mewakili berbagai unsur dan profesi antara lain tokoh masyarakat, akademis, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat) dalam menyusun SOP dan mensosialisasikan SOP dan maklumat pelayanan.
- c. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat Kecamatan Banjarbaru Selatan akan pentingnya perijinan khususnya izin Mendirikan Bangunan.
- d. Agar kiranya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Kecamatan Banjarbaru Selatan dapat dirasionalkan sesuai dengan kondisi yang ada.

4. URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (KECAMATAN BANJARBARU UTARA)

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Pemerintah
 - a. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah
 - b. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Ekonomi dan Pembangunan
 - c. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
 - d. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban

b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat realisasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan dari Program Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Pemerintah yang dilaksanakan oleh Kecamatan Banjarbaru Utara, yaitu :



- 1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah dengan realisasi anggaran sebesar 94% dan capaian sebesar 100%.
- 2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Ekonomi dan Pembangunan dengan realisasi anggaran sebesar 93% dan capaian sebesar 100%.
- 3) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan realisasi anggaran sebesar 93% dan capaian sebesar 100%.
- 4) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban dengan realisasi anggaran sebesar 51% dan capaian sebesar 100%.

Pengelolaan Keuangan Kecamatan dan Kelurahan :

- 1) Dana yang dikelola Kecamatan sebesar Rp. 7.929.834.210,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 7.706.612.044 ,-
- 2) Dana yang dikelola Kelurahan Sungai Ulin sebesar Rp. 222.885.600,- dengan realisasi Rp. 189.912.655,-
- 3) Dana yang dikelola Kelurahan Mentaos sebesar Rp. 397.122.000,- dengan realisasi Rp. 358.301.398,-
- 4) Dana yang dikelola Kelurahan Komet sebesar Rp . 368.023.000 ,- dengan realisasi Rp. 336.323.000,-
- 5) Dana yang dikelola Kelurahan Loktabat Utara sebesar Rp. 249.422.500,- dengan realisasi Rp. 239.971.292,-

c. Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan : Selama Tahun 2018 ini permasalahan yang cukup menjadi perhatian, terutama masalah pembangunan (termasuk pengawasan pembangunan) dan tumpang tindih kepemilikan tanah.

Selain itu permasalahan yang menjadi kendala di Kecamatan Banjarbaru Utara juga terdapat pada kegiatan teknis di pelayanan masing-masing seksi yaitu sebagai berikut :

a. Seksi Pemerintahan

- Sarana komunikasi yang minim dengan instansi terkait
- Terjadinya gangguan jaringan/server pada saat perekaman data KTP-El

b. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

- Bangunan yang didirikan tidak sesuai sempadan yang telah ditentukan bahkan jarak dengan bangunan tetangga sangat berdekatan

c. Seksi Kesejahteraan Sosial

- Legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris sering ditemukan permasalahan diantaranya status perkawinan ahli waris yang tidak sah secara hukum serta



adanya status anak diluar nikah

2) Solusi

Untuk mengantisipasi permasalahan tumpang tindih kepemilikan tanah, Pemerintah Kecamatan Banjarbaru Utara berusaha memaksimalkan seluruh potensi yang ada baik internal seperti sarana dan prasarana kantor, sumber daya manusia, penataan manajemen pelayanan prima yang terorganisir secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan mulai dari masyarakat, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan dan Instansi lainnya. Sedangkan eksternal diantaranya peningkatan koordinasi dengan instansi lain, pembinaan kemasyarakatan serta peningkatan kemitraan dengan RT/ RW/ LPM dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Untuk permasalahan yang ada di masing-masing seksi Kecamatan Banjarbaru Utara, solusi yang diberikan yaitu :

- Ketersediaan alat komunikasi dan melakukan koordinasi yang baik dengan dinas terkait sesuai prosedur
- Membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia membongkar bangunan bagi pemilik bangunan apabila sewaktu-waktu ada pelebaran dan surat pernyataan tidak keberatan dari sebelah menyebelah agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dikemudian hari.
- Kelengkapan berkas yang merupakan bukti dukung harus dipenuhi oleh ahli waris sesuai prosedur yang berlaku.

5. URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (KECAMATAN CEMPAKA)

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Pemerintah
 - a. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah
 - b. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Ekonomi dan Pembangunan
 - c. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
 - d. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban

b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat realisasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan dari Program Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Pemerintah yang dilaksanakan oleh Kecamatan Banjarbaru Utara, yaitu :

- 1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah dengan realisasi anggaran sebesar 96% dan capaian sebesar 100%.



- 2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Ekonomi dan Pembangunan dengan realisasi anggaran sebesar 99% dan capaian sebesar 100%.
- 3) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan realisasi anggaran sebesar 97% dan capaian sebesar 100%.
- 4) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban dengan realisasi anggaran sebesar 98% dan capaian sebesar 100%.

Pengelolaan Keuangan Kecamatan dan Kelurahan :

- 1) Dana yang dikelola Kecamatan sebesar Rp. 2.253.096.800,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 2.088.257.496,-
- 2) Dana yang dikelola Kelurahan Cempaka sebesar Rp.418.807.520,- dengan realisasi Rp.374.681.462,-
- 3) Dana yang dikelola Kelurahan Palam sebesar Rp.414.885.610,- dengan realisasi Rp. 393.650.396,-
- 4) Dana yang dikelola Kelurahan Bangkal sebesar Rp.241.374.980,- dengan realisasi Rp. Rp.209.028.647,-
- 5) Dana yang dikelola Kelurahan Sungai Tiung sebesar Rp.431.050.817,- dengan realisasi Rp.393.934.912,-

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan :

- a) Penerimaan retribusi IMB pada tahun 2018 tidak mencapai 100%, dimana target retribusi sebesar Rp. 45.000.000,- hanya terealisasi sebesar Rp. 40.504.300,- atau sekitar 90%,
- b) Masih rendahnya kesadaran masyarakat di Kecamatan Cempaka tentang perizinan seperti Izin Mendirikan Bangunan,
- c) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan ketidaktahuan masyarakat mengenai standar operasional pelayanan (SOP) di Kantor Kecamatan Cempaka,
- d) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

2) Solusi :

- a) Penerimaan retribusi tidak mencapai target 100% dikarenakan pengurusan IMB komersil pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kecamatan hanya melayani IMB Pribadi,



- b) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat Cempaka tentang pentingnya surat Izin Mendirikan Bangunan sehingga tidak mrnyalahi aturan-aturan dalam mendirikan sebuah bangunan,
- c) Mensosialisasikan SOP dan maklumat pelayanan,
- d) Masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam melengkapi dokumen kependudukan yang dimiliki,
- e) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB dengan jalan memberikan sosialisasi dan pengertian tentang pentingnya membayar pajak untuk turut serta dalam pembangunan.

6. URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (KECAMATAN LANDASAN ULIN)

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Pemerintah
 - a. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah
 - b. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Ekonomi dan Pembangunan
 - c. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
 - d. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban

b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat realisasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan dari Program Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Pemerintah yang dilaksanakan oleh Kecamatan Landasan Ulin, yaitu :

Program Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Pemerintah dengan realisasi anggaran sebesar 90,46% dan capaian kinerja 100%

Sedangkan capaian kegiatannya adalah :

- 1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah dengan realisasi anggaran sebesar 90,12% dan capaian sebesar 100%.
- 2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Ekonomi dan Pembangunan dengan realisasi anggaran sebesar 83,29% dan capaian sebesar 100%.
- 3) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan realisasi anggaran sebesar 94,83% dan capaian sebesar 100%.
- 4) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban dengan realisasi anggaran sebesar 92,31% dan capaian sebesar 100%.



Pengelolaan Keuangan Kecamatan dan Kelurahan :

- 1) Dana yang dikelola Kecamatan (Belanja Langsung) sebesar Rp. 2.726.112.950,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 2.481.261.379,- (91,02%)
- 2) Dana yang dikelola Kelurahan Landasan Ulin Timur sebesar Rp.352.121.510,- dengan realisasi Rp.336.933.196,- (95,68%)
- 3) Dana yang dikelola Kelurahan Guntung Payung sebesar Rp.292.018.500,- dengan realisasi Rp. 263.386.737,- (90,19%)
- 4) Dana yang dikelola Kelurahan Syamsudin Noor sebesar Rp.304.947.792,- dengan realisasi Rp. Rp.269.033.079,- (88,22%)
- 5) Dana yang dikelola Kelurahan Guntung Manggis sebesar Rp.357.061.660,- dengan realisasi Rp.314.341.851,- (88,03%)

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian
Program peningkatan pelayanan & kapasitas pemerintah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,5	86,16	100,77%

c. Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan :
 - a) Persoalan Dana BPJS RT/RW yang belum bisa direalisasikan, walaupun sudah ada anggaran, tetapi karena petunjuk dan teknisnya tidak jelas sehingga belum bisa direalisasikan, sehingga menjadi pertanyaan bagi pihak Kelurahan (RT/RW).
 - b) Persoalan E-KTP maupun KK yang kadang masih kurang koordinasi dengan pihak Dukcapil sehingga kadang masyarakat merasa tidak ada kejelasan mengenai kapan dan dimana harus mengambil E-KTP dan KK yang sudah dicetak.
 - c) Persoalan tanah yang kadang masih menimbulkan konflik di masyarakat.
- 2) Solusi :
 - a) Dana BPJS bagi RT/RW harusnya dibuatkan petunjuk teknisnya dulu dan diadakan sosialisasi dengan pihak-pihak terkait, sehingga pada saat dana



tersebut ada dianggarkan, maka dapat direalisasikan sesuai Juknis, sehingga tidak ada lagi pertanyaan dari pihak RT/RW.

- b) Persoalan E-KTP dan KK harus disikapi oleh pihak-pihak terkait, tentang pelimpahan kewenangan kepada Camat pun harus jelas, sehingga pihak kecamatan tidak selalu menjadi bahan amukan warga yang merasa kecewa dengan pelayanan E-KTP dan KK.
- c) Untuk persoalan tanah yang menimbulkan konflik, sebaiknya penyelesaian persoalan tersebut dapat mengundang pihak yang berkonflik baik itu kelurahan yang bersangkutan serta juga pihak kecamatan dan kelurahan yang ada kaitannya dengan kelurahan yang bersangkutan.

7. URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (KECAMATAN LIANG ANGGANG)

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Pemerintah
 - a. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah
 - b. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Ekonomi dan Pembangunan
 - c. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
 - d. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban

b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat realisasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan dari Program Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Pemerintah yang dilaksanakan oleh Kecamatan Liang Anggang, yaitu :

- 1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah dengan realisasi anggaran sebesar 96,43% dan capaian sebesar 100%.
- 2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Ekonomi dan Pembangunan dengan realisasi anggaran sebesar 84,16% dan capaian sebesar 100%.
- 3) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan realisasi anggaran sebesar 92,79% dan capaian sebesar 100%.
- 4) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban dengan realisasi anggaran sebesar 62,02% dan capaian sebesar 100%.
- 5) Pengelolaan Keuangan Kecamatan dan Kelurahan :
 - a) Dana yang dikelola Kecamatan Liang Anggang (Belanja Langsung) sebesar Rp. 2.134.511.744,- dengan realisasi Rp. 2.011.972.198,- (94,26%)
 - b) Dana yang dikelola Kelurahan Landasan Ulin Tengah (Belanja Langsung) sebesar Rp. 192.511.492,- dengan realisasi Rp. 177.650.851,- (92,28%)



- c) Dana yang dikelola Kelurahan Landasan Ulin Utara (Belanja Langsung) sebesar Rp. 306.513.080,- dengan realisasi Rp. 283.580.232,- (92,52%)
 - d) Dana yang dikelola Kelurahan Landasan Ulin Barat (Belanja Langsung) sebesar Rp. 214.636.000,- dengan realisasi Rp. 205.960.023,- (95,96%)
 - e) Dana yang dikelola Kelurahan Landasan Ulin Selatan (Belanja Langsung) sebesar Rp. 270.095.000,- dengan realisasi Rp. 254.226.605,- (94,12%)
- Total Pengelolaan Keuangan Kecamatan Liang Anggang dan empat Kelurahan diwilayah Kecamatan Liang Anggang (Belanja Langsung) sebesar Rp. 3.118.267.316,- dengan realisasi Rp. 2.933.389.909,- (94,07%)

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan :

- a) Penerimaan retribusi IMB pada tahun 2018 tidak mencapai target, dimana target retribusi IMB sebesar Rp. 60.000.000,- , hanya terealisasi sebesar Rp. 33.289.665,- (55 %)
- b) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya perizinan, khusus Izin Mendirikan Bangunan
- c) Masih lambatnya Penyelesaian/cetak E-KTP

2) Solusi :

- a) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat Kecamatan Liang Anggang akan pentingnya perizinan, khususnya Izin Mendirikan Bangunan
- b) Diusulkan agar adanya pengurangan retribusi yang di bayarkan khususnya dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan
- c) Dalam rangka percepatan untuk pencetakan E-KTP maka di sarankan agar di lakukan pencetakan cukup d Kecamatan saja.

8. URUSAN PENGAWASAN (INSPEKTORAT)

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - a) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
 - b) Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
 - c) Kegiatan Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
 - d) Kegiatan Pengawasan Inventarisasi Aset
 - e) Kegiatan Evaluasi Lakip SKPD
 - f) Kegiatan Penanganan Kasus dengan Pemeriksaan tertentu



- 2) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
 - a) Diklat Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat Pencapaian Kegiatan Dari Program-Program Penyelenggaraan Urusan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Banjarbaru yaitu :

- 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH
 - a) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala dengan realisasi anggaran sebesar 91,98 dan capaian sebesar 100%.
 - b) Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan dengan realisasi anggaran sebesar 99,61% dan capaian sebesar 100%.
 - c) Kegiatan Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan realisasi anggaran sebesar 96,88% dan capaian sebesar 100%.
 - d) Kegiatan Pengawasan Inventarisasi Aset dengan realisasi anggaran sebesar 100% dan capaian sebesar 100%.
 - e) Kegiatan Evaluasi Lakip SKPD dengan realisasi anggaran sebesar 95,46% dan capaian sebesar 100%.
 - f) Kegiatan Penanganan Kasus dengan Pemeriksaan tertentu dengan realisasi anggaran sebesar 97,62% dan capaian sebesar 100%.
- 2) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
 - a) Diklat Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan realisasi anggaran sebesar 93,72% dan capaian sebesar 100%.

c. Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan
 - a) Respon obik/SKPD terhadap permintaan dokumen saat dilakukan pengawasan lambat,
 - b) Waktu melakukan pengawasan sangat terbatas dan adanya tugas-tugas mandatori yang diberikan oleh KPK yang semuanya perlu diselesaikan pada waktu bersamaan, sehingga pekerjaan menjadi tertumpuk pada beberapa APIP,
 - c) Tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan yang telah ditindaklanjuti SKPD belum memenuhi target kinerja karena realisasi indikator menunggu verifikasi lembaga eksternal.



2) Solusi

- a) Sebelum jadwal waktu dilakukannya pengawasan Inspektorat telah menyampaikan surat pemberitahuan terlebih dahulu ke SKPD.
- b) Meningkatkan kualitas APIP dengan mengikutsertakan diklat, workshop dan menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan pengawasan yang pasti,
- c) Inspektorat Kota Banjarbaru selalu melakukan koordinasi dengan pihak eksternal (BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan) dan menyampaikan atau mengupdate dokumen hasil tindak lanjut yang telah ditanggapi oleh SKPD.

9. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BANJARBARU)

a. Program dan Kegiatan

1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- a) Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD,
- b) Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang RKPD,
- c) Kegiatan Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan
- d) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah,
- e) Kegiatan Penyusunan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Daerah,
- f) Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota.

2) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- a) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi,
- b) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah.

3) Program Perencanaan Sosial dan Budaya

- a) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya,
- b) Kegiatan Pembinaan Program Kemiskinan.
- c) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya,
- d) Kegiatan Koordinasi Pengembangan Kota Sehat

4) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

- a) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Lingkungan Hidup,
- b) Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Lingkungan Hidup,



- c) Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA.

b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat Pencapaian Kegiatan Dari Program-Program Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru yaitu :

1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- a) Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 95,82%,
- b) Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang RKPD ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 94,50%,
- c) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 91,88%,
- d) Kegiatan Penyusunan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Daerah ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 94,62%
- e) Kegiatan Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 82,50%, dan
- f) Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 93,81%.

2) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- a) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 91,07%,
- b) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 97,26%, dan

3) Program Perencanaan Sosial dan Budaya

- a) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 37,93%,
- b) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 98,11% dengan realisasi anggaran sebesar 95,57%,



- c) Kegiatan Pembinaan Program Kemiskinan ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 71,20%.
 - d) Kegiatan Koordinasi Pengembangan Kawasan Kota Sehat ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 26,19%.
- 4) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
- a) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Lingkungan Hidup ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 99,86%,
 - b) Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Lingkungan Hidup ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 90,07%,
 - c) Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 99,94%.

b. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan kegiatan secara umum kami tidak menemukan permasalahan yang berarti karena telah mencapai target 100%. Hal ini disebabkan antara lain :

- a. Peningkatan kapasitas SDM Bappeda dengan mengikuti kursus/diklat teknis dan fungsional secara berkesinambungan.
- b. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sasaran pada dokumen Renstra dan RKPD terhadap RPJMD pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan sehingga bisa diketahui tingkat konsistensi atau keselarasan antara pelaksanaan dengan perencanaan kegiatan.
- c. Terjadinya ketidakpastian kegiatan pengisian data daerah pada aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) di Kementerian Dalam Negeri, karena aplikasi yang masih dalam proses maintenance dan hal ini menyebabkan honor para operator yang telah dialokasikan pada setiap SKPD tidak terserap.

Pada tahun 2018 realisasi capaian keuangan sebesar 93,82%. Pada Urusan Penunjang Perencanaan dan Perencanaan pembangunan Daerah belum maksimalnya realisasi capaian keuangan disebabkan karena :

- a. Adanya penghematan anggaran dari proses lelang (siswa lelang).
- b. Terjadinya perubahan kebijakan-kebijakan di level pemerintah pusat maupun provinsi pada tahun anggaran berjalan, menyebabkan adanya beberapa target kegiatan tidak tercapai dan program yang tidak terakomodir.



- c. Adanya sisa honor yang tidak habis dikarenakan perbedaan besaran honor antara SK Tim dengan kebijakan daerah.
- d. Adanya rencana perubahan Pokja Kota Sehat yang belum terlaksana sehingga anggaran yang telah ditetapkan tidak semua bisa terserap.
- e. Belum optimalnya koordinasi untuk para stakeholder dilingkup Bidang Sosial Budaya sehingga mempengaruhi serapan anggaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan beberapa kendala yang masih ada saat pelaksanaan pekerjaan kegiatan tersebut maka solusi untuk meningkatkan pencapaian target fisik dan keuangan kedepannya sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan pemahaman kepada SKPD tentang pentingnya data
- 2. Meningkatkan komunikasi dengan lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan
- 3. Dalam hal perencanaan penganggaran kedepannya akan lebih tajam dan terukur.

10. URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BANJARBARU)

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Penelitian dan Pengembangan
 - a) Diseminasi Hasil Penelitian,
 - b) Jaringan Penelitian,
 - c) Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Pemerintahan, dan
 - d) Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.

b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat Pencapaian Kegiatan Dari Program-Program Penyelenggaraan Urusan Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru yaitu :

- 1) Program Penelitian dan Pengembangan
 - a) Kegiatan Diseminasi Hasil Penelitian dengan realisasi anggaran sebesar 25,57% dan capaian target sebesar 75%,
 - b) Kegiatan Jaringan Penelitian dengan realisasi anggaran sebesar 0%, dikarenakan rakor tingkat provinsi tidak dilaksanakan.
 - c) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Pemerintahan dengan realisasi anggaran sebesar 87,59% dan capaian sebesar 100%, dan
 - d) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi dengan realisasi anggaran sebesar 73,76% dan capaian sebesar 100%.



c. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan kegiatan secara umum tidak ditemukan permasalahan yang berarti, beberapa hal yang mengalami kendala disebabkan antara lain :

- 1) Padatnya jadwal tim peneliti yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan tersebut sehingga kesulitan untuk menentukan jadwal Kegiatan Desiminasi Penelitian yang menyebabkan anggaran penyelenggaraan rapat Desiminasi Hasil Peelitian tidak terserap.
- 2) Terjadinya perubahan kebijakan-kebijakan di level pemerintah pusat maupun provinsi pada tahun anggaran berjalan, menyebabkan adanya beberapa target kegiatan tidak tercapai dan program yang tidak terakomodir.

Berdasarkan beberapa kendala yang masih da saat pelaksanaan pekerjaan kegiatan tersebut maka solusi untuk meningkatkan pencapaian target fisik dan keuangan kedepannya sebagai berikut

- 1) Meningkatkan pemahaman kepada SKPD tentang pentingnya data,
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan lembaga yang bergerak dbidang penelitian dan pengembangan.
- 3) Dalam hal perencanaan penganggaran kedepannya akan lebih tajam dan terukur.

11. URUSAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH (BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH)

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a) Kegiatan Penyusunan standar satuan harga,
 - b) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD,
 - c) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD,
 - d) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD,
 - e) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD,
 - f) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
 - g) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,
 - h) Kegiatan Peningkatan manajemen sistem penggajian PNS,
 - i) Kegiatan Peningkatan pengelolaan dan penatausahaan uang dan investasi daerah,



- j) Kegiatan Percepatan penyelesaian masalah aset,
 - k) Kegiatan Peningkatan manajemen aset/barang daerah (SKPKD),
 - l) Kegiatan Rekonsiliasi laporan keuangan terhadap aset lancar dan aset tetap Pemko Banjarbaru dengan SKPD,
 - m) Kegiatan Penyusunan data standar rencana kebutuhan barang unit SKPD,
 - n) Kegiatan Penyusunan barang milik daerah,
 - o) Kegiatan Monitoring dan evaluasi dana perimbangan,
 - p) Kegiatan Rekonsiliasi dana lain-lain pendapatan asli daerah,
 - q) Kegiatan Monitoring dan evaluasi dana lain-lain pendapatan yang sah,
 - r) Kegiatan Penyusunan naskah perjanjian hibah daerah, dan
- 2) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- a) Kegiatan Pendataan dan pengawasan tim penilai tuntutan ganti rugi (TPTGR).
- 3) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- a) Kegiatan Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi keuangan daerah.

b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat pencapaian kegiatan dari program-program Penyelenggaraan Urusan Administrasi Keuangan Daerah yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Banjarbaru, yaitu :

- 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- a) Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga ditargetkan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau sebesar 100%,
 - b) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD ditargetkan sebanyak 1 raperda dan terealisasi sebanyak 1 raperda atau sebesar 100%,
 - c) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD ditargetkan sebanyak 1 raperwali dan terealisasi sebanyak 1 raperwali atau sebesar 100%,
 - d) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD ditargetkan sebanyak 1 raperda dan terealisasi sebanyak 1 raperda atau sebesar 100%,
 - e) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD ditargetkan sebanyak 1 raperwali dan terealisasi sebanyak 1 raperwali atau sebesar 100%,



- f) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ditargetkan sebanyak 1 raperda dan terealisasi sebanyak 1 raperda atau sebesar 100%,
- g) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ditargetkan sebanyak 1 raperwali dan terealisasi sebanyak 1 raperwali atau sebesar 100%,
- h) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ditargetkan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau sebesar 100%,
- i) Kegiatan Rekonsiliasi dana lain-lain pendapatan asli daerah ditargetkan sebanyak 4 dokumen dan terealisasi sebanyak 4 dokumen atau sebesar 100%,
- j) Kegiatan Peningkatan Manajemen Sistem Penggajian PNS ditargetkan sebanyak 112 dokumen dan terealisasi sebanyak 129 dokumen atau sebesar 119%,
- k) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan dan Penatausahaan Uang dan Investasi Daerah ditargetkan sebanyak 5.500 dokumen dan terealisasi sebanyak 6.086 dokumen atau sebesar 110,64%,
- l) Kegiatan Percepatan Penyelesaian Masalah Aset ditargetkan sebanyak 20 dokumen dan teralisasi sebanyak 20 dokumen atau sebesar 100%,
- m) Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah (SKPKD) terdapat 2 indikator kinerja, yaitu Jumlah BMD yang dikuasai pengelola barang yang telah dilakukan pemeliharaan ditargetkan sebanyak 5 unit untuk roda 4 terealisasi sebanyak 5 unit untuk roda 4 atau sebesar 100%,
- n) Kegiatan Penyusunan Data Standart Rencana Kebutuhan Barang Unit SKPD ditargetkan sebanyak 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen atau sebesar 100%,
- o) Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Dana Lain-Lain Pendapatan Yang Sah ditargetkan sebanyak 4 dokumen dan terealisasi sebanyak 4 dokumen atau sebesar 100%,
- p) Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Dana Perimbangan ditargetkan sebanyak 4 dokumen dan terealisasi sebanyak 4 dokumen atau sebesar 100%,
- q) Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Terhadap Aset Lancar Dan Aset Tetap Pemko Banjarbaru Dengan SKPD ditargetkan sebanyak 4 dokumen dan terealisasi sebanyak 4 dokumen atau sebesar 100%,
- r) Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah ditargetkan sebanyak 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen atau sebesar 100%, dan
- s) Kegiatan Penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ditargetkan sebanyak 16 dokumen dan terealisasi sebanyak 16 dokumen atau sebesar 100%.



- 2) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - a) Kegiatan Pendataan dan Pengawasan Tim Penilai Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) ditargetkan sebanyak 20 dokumen dan terealisasi sebanyak 35 dokumen atau sebesar 175%.
- 3) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - a) Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Administrasi Keuangan Daerah terdapat 2 indikator kinerja, yaitu SKPD yang menggunakan Aplikasi SIMDA Keuangan ditargetkan sebanyak 1 aplikasi dan terealisasi sebanyak 1 aplikasi atau sebesar 100% dan Pemeliharaan Perangkat Teknologi Informasi ditargetkan sebanyak 2 server dan terealisasi sebanyak 2 server atau sebesar 100%.

Adapun tanggapan dari rekomendasi DPRD Kota Banjarbaru terhadap LKPJ Tahun 2017 dalam hal ini terkait Urusan Administrasi Keuangan Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah), yaitu :

a. Rekomendasi

Sesuai data yang disajikan dalam LKPJ terlihat bahwa tingkat penyerapan anggaran pada beberapa komponen belanja relatif belum optimal diantaranya:

- Penyerapan anggaran pada komponen belanja tidak langsung yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai hanya terealisasi 93,31%, sehingga masih menyisakan anggaran yang cukup besar yaitu sebesar Rp.29.823.980.879,26,-, dari anggaran sebesar Rp.388.196.356.146,25,-.
- Penyerapan anggaran pada komponen belanja langsung untuk belanja gaji pegawai honorer dan honor tim lintas sektoral terealisasi hanya 88,64% dari rencana belanja Rp.33.496.740.290,- sehingga masih menyisakan sebesar yaitu Rp.3.800.549.772,-
- Penyerapan anggaran untuk komponen belanja barang dan jasa juga relatif rendah yaitu hanya sebesar 88,13% sehingga masih menyisakan anggaran sebesar yaitu Rp.37.012.988.946,-
- Termasuk penyerapan anggaran untuk belanja kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di hampir semua SKPD relatif rendah.

Sehingga kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan apakah dalam proses penyusunan rencana belanja ini telah diperhitungkan secara matang dalam arti telah disusun sesuai data dan kaidah perencanaan yang baik.

- b. Tanggapan Rekomendasi LKPJ Walikota Banjarbaru Tahun 2017 terkait penyerapan anggaran pada komponen belanja tidak langsung sebesar Rp. 358.372.375.266,99 atau terealisasi sebesar 93,31% dari anggaran sebesar Rp.388.196.356.146,25,-. Sehingga



menyisakan anggaran sebesar Rp.29.823.980.879,26,-. Di tahun yang akan datang proses penyusunan anggaran khususnya pada belanja tidak langsung akan lebih cermat lagi sehingga pada tahun yang berikutnya tidak lagi menyisakan anggaran yang besar, agar capaian realisasi anggaran belanja tidak langsung dapat lebih efektif dan efisien. Untuk menghitung proyeksi kebutuhan belanja pegawai, BPKAD akan berkoordinasi dengan BKPP dalam penyusunan anggaran, agar realisasi anggaran dapat tercapai sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan.

- c. Tindak Lanjut dari Rekomendasi LKPJ Walikota Banjarbaru Tahun 2017 Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu masih adanya anggaran yang tidak terealisasi pada komponen belanja langsung dan belanja barang dan jasa, maka kedepannya dalam penyusunan anggaran pada komponen belanja akan memperhatikan skala prioritas dalam menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

c. Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

a) Permasalahan pada Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi :

- 1) Surat Keputusan tentang Kenaikan Pangkat atau Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil diterbitkan sesudah masa berlakunya sehingga terjadi ketidakakuratan dalam pembayaran gaji.
- 2) Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi masih terjadi karena pengelolaan uang daerah masih belum sempurna sehingga menimbulkan kerugian daerah.
- 3) Masih terdapat SKPD yang belum dapat menentukan keadaan kas pada tanggal 31 Desember sebagai efek dari belum tertibnya pengelolaan uang SKPD
- 4) Masih terdapat Kasubag Keuangan dan petugas pelaksana penyusun Laporan Keuangan SKPD yang belum maksimal dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
- 5) Kurangnya koordinasi antara Bendahara Pengeluaran dengan Pengurus Barang pada SKPD dalam meminjamkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Barang Persediaan Pakai Habis sehingga Pengurus Barang mengalami kesulitan dalam menyusun laporan persediaan serta Kepala SKPD yang masih beranggapan bahwa Laporan Barang Persediaan adalah kurang penting.

b) Permasalahan pada Bidang Penatausahaan Aset Daerah.

- 1) Masih rendahnya tingkat kepedulian dalam merencanakan kebutuhan barang dan pemeliharaan barang yang efektif dan efisien.



- 2) Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) dalam memahami pengelolaan barang milik daerah.
 - 3) Masih kurangnya perhatian dari sebagian Kepala SKPD selaku Pengguna barang terhadap Laporan Barang Milik Daerah (BMD) sehingga mengakibatkan keterlambatan pula dalam penyusunan Laporan Keuangan, dan masih kurangnya pengawasan dari Kepala SKPD selaku Pengguna Barang terhadap keberadaan barang milik daerah sehingga menimbulkan kurangnya optimalisasi dalam penggunaan barang dan mengakibatkan kerugian Negara.
 - 4) Pengamanan barang milik daerah berupa pensertipikatan tanah, terkendala dengan dokumen yang masih menggunakan nomor identifikasi bidang (NIB) yang lama sehingga perlu diperbarui, ketidaklengkapan dokumen, adanya overlapping dan informasi yang diperoleh belum akurat.
- c) Permasalahan pada Bidang Anggaran :
- 1) Masih lemahnya pemahaman bagi calon penerima dana Hibah dan Bantuan Sosial mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu mengenai pelaporan pertanggungjawaban terhadap dana hibah yang telah diterima.
 - 2) Masih terdapat SKPD dalam menyusun rencana anggaran (RKA) kurang matang sehingga dalam pelaksanaan anggarannya membutuhkan waktu untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian termasuk melakukan revisi atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
 - 3) Keberadaan server yang digunakan untuk SIMDA keuangan sudah sejak tahun 2010 sehingga mengganggu kelancaran pengelolaan keuangan berbasis online dan juga memerlukan biaya pemeliharaan yang besar

2) Solusi

a) Solusi pada Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi :

- 1) Untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan pembayaran kekurangan gaji kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Namun sangat diharapkan Surat Keputusan tentang Kenaikan Pangkat atau Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil ditebitkan sebelum masa berlakunya sehingga tidak terjadi kekurangan dalam pembayaran gaji.
- 2) Menerbitkan aturan yang dijadikan dasar hukum dalam pengelolaan maupun penatausahaan uang daerah sehingga diharapkan dapat memperkecil peluang terjadinya kesalahan dalam pengelolaan maupun penatausahaan uang daerah



yang dapat mengakibatkan adanya Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

- 3) Melalui penerbitan peraturan yang dijadikan dasar atau pedoman dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat membantu pihak SKPD dalam menentukan keadaan kas pada tanggal 31 Desember. Selain itu pembinaan juga terus-menerus dilakukan baik melalui sosialisasi, bimbingan teknis serta koordinasi yang konsisten.,
- 4) Melaksanakan kordinasi, Bimbingan Teknis serta Asistensi dan pendampingan SKPD dalam penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
- 5) Meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Batas waktu penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah 2 (dua) hari kalender setelah tanggal yang tertera pada SPM.
- 6) Perhatian dari Kepala SKPD untuk lebih mendukung Pengrus Barang dalam menyusun Laporan Persediaan.

b) Solusi pada Bidang Penatausahaan Aset Daerah :

- 1) Analisa kembali kebutuhan barang dan pemeliharaan barang pada setiap SKPD,
- 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan pelatihan dan bimbingan teknis dalam mengelola barang milik daerah,
- 3) Perhatian penuh dari kepala SKPD selaku Pengguna Barang dalam pengelolaan barang milik daerah (BMD) pada SKPD,
- 4) Mengidentifikasi dan inventarisasi ulang tanah milik Pemerintah Kota Banjarbaru dalam 6 (enam) kategori yaitu :
 - Tanah tersebut clear dan clean, dimana dokumen dan keberadaan aset diketahui dan sah secara hukum,
 - Tanah tersebut clear dan clean tapi tidak clean, dimana dokumen dimiliki sedangkan keberadaann aset belum/tidak diketahui /tumpang tindih,
 - Tanah tersebut tidak clear tapi clean, dimana dokumen tidak ada tapi keberadaann tanah diakui milik Pemerintah Kota,
 - Tanah tersebut tidak *clear* dan tidak *clean*, dimana dokumen tidak ada dan keberadaan dan secara hukum tidak sah,
 - Tanah yang masuk dalam gugatan dengan pihak lain, dan
 - Tanah yang menunggu putusan pengadilan/menunggu eksekusi.



5) Inventarisasi ulang data yang dikuasai pihak lain dan jika sesuai ketentuan diperkuat dengan Surat Perjanjian Pinjam Pakai.

c) Solusi pada Bidang Anggaran :

- 1) Melaksanakan sosialisasi terkait dengan Hibah dan Bantuan Sosial kepada seluruh Organisasi dan masyarakat di Kota Banjarbaru, dan
- 2) Melaksanakan koordinasi, serta Asistensi antara SKPD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD di Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru. Sehingga diharapkan untuk dapat mengurangi adanya penyesuaian atau perubahan – perubahan terkait waktu sudah berjalan.
- 3) Diadakan pembelian server yang baru guna menunjang kelancaran pengelolaan keuangan daerah berbasis online.

12. URUSAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH (BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH)

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
 - b) Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak PBB dan BPHTB
 - c) Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan Daerah
 - d) Pembinaan dan Penyuluhan PBB dan Pajak Daerah
 - e) Intensifikasi Penagihan Pajak
 - f) Penyusunan Laporan Pendapatan Pemerintah Daerah
 - g) Rekonsiliasi dan Verifikasi PAD
 - h) Peningkatan Pelayanan Kepada Wajib Pajak
 - i) Penyebarluasan Informasi Tentang Pajak Daerah
 - j) Monitoring dan Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat
 - k) Monitoring Objek Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lain Yang Sah

b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Adapun capaian kinerja berdasarkan target, realisasi dan capaian Tahun 2018 sebagai berikut :

- 1) Jumlah NPWPD di Tahun 2018 ditargetkan sebesar 301 NPWPD dan terealisasi sebesar 256 NPWPD dengan capaian 85,05% masuk kategori penilaian kurang berhasil.



- 2) Jumlah Objek Retribusi di Tahun 2018 ditargetkan sebesar 1.550 Wajib Retribusi dan terealisasi sebesar 2.733 NPWPD dengan capaian 176,32% masuk kategori sangat berhasil.
- 3) Data Objek Retribusi di Tahun 2018 ditargetkan sebesar 1.550 Wajib Retribusi dan terealisasi sebesar 2.733 NPWPD dengan capaian 176,32% masuk kategori penilaian sangat berhasil.
- 4) Jumlah penurunan objek pajak dan retribusi yang menunggak di Tahun 2018 ditargetkan sebesar 37 NPWPD dan terealisasi sebesar 71 NPWPD dengan capaian 191,89 % masuk kategori penilaian sangat berhasil.
- 5) Jumlah NOP PBB-P2 di Tahun 2018 ditargetkan sebesar 90.000 NOP dan terealisasi sebesar 106.304 NOP dengan capaian 118,12% masuk kategori penilaian sangat berhasil.
- 6) Jumlah SSPD BPHTB di Tahun 2018 ditargetkan sebesar 6.000 SSPD dan terealisasi sebesar 4.084 SSPD dengan capaian 68,07% masuk kategori penilaian Hampir berhasil.
- 7) Jumlah SPPT PBB-P2 di Tahun 2018 ditargetkan sebesar 43.000 SPPT dan terealisasi sebesar 78.257 SPPT dengan capaian 181,99% masuk kategori penilaian sangat berhasil.
- 8) Jumlah penurunan tunggakan/piutang di Tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp.7.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.757.601.273,- dengan capaian 139,39% masuk kategori penilaian sangat berhasil.
- 9) Jumlah wajib pajak yang diberi pembinaan dan penyuluhan di Tahun 2018 ditargetkan sebesar 4.850 WP dan terealisasi sebesar 4.842 WP dengan capaian (99,84 %) masuk kategori penilaian hampir berhasil.
- 10) Jumlah wajib pajak yang diberi pelayanan di Tahun 2018 ditargetkan sebesar 1.326 WP dan terealisasi sebesar 1.326 WP dengan capaian 100 % masuk kategori penilaian sangat berhasil.
- 11) Jumlah Objek pajak baru di Tahun 2018 ditargetkan sebesar 1.326 WP dan terealisasi sebesar 1.326 WP dengan capaian 100 % masuk kategori penilaian sangat berhasil.
- 12) Data Potensi pajak di Tahun 2018 ditargetkan sebesar 2.600 WP terealisasi sebesar 2.600 WP dengan capaian 100 % masuk kategori penilaian sangat berhasil.

Sedangkan capaian program dan kegiatan yaitu sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 53,69% dan capaian sebesar 100%,



- b) Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak PBB dan BPHTB dengan realisasi anggaran sebesar 96,23% dan capaian sebesar 100%,
- c) Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 90,65% dan capaian sebesar 100%,
- d) Pembinaan dan Penyuluhan PBB dan Pajak Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 97,05% dan capaian sebesar 100%,
- e) Intensifikasi Penagihan Pajak dengan realisasi anggaran sebesar 96,07% dan capaian sebesar 100%,
- f) Penyusunan Laporan Pendapatan Pemerintah Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 99,46% dan capaian sebesar 100%,
- g) Rekonsiliasi dan Verifikasi PAD dengan realisasi anggaran sebesar 99,82% dan capaian sebesar 100%,
- h) Peningkatan Pelayanan Kepada Wajib Pajak dengan realisasi anggaran sebesar 96,26% dan capaian sebesar 100%,
- i) Penyebarluasan Informasi Tentang Pajak Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 90,68% dan capaian sebesar 100%,
- j) Monitoring dan Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat dengan realisasi anggaran sebesar 99,44% dan capaian sebesar 100%,
- k) Monitoring Objek Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lain Yang Sah dengan realisasi anggaran sebesar 93,93% dan capaian sebesar 100%

c. Permasalahan dan solusi

1) Bidang Pajak dan Retribusi Daerah

Permasalahan :

- a) Pemilik Restoran, hotel, hiburan sebagian tidak melampiri bukti pembayaran (kwitansi, nota, bill dsb) sehingga sulit diketahui kebenaran omset yang diperoleh.
- b) Pemilik restoran tidak membuat pembukuan dan berdalih tidak memungut pajak restoran dari konsumen sehingga saat pembayaran pajak akan merasa keberataan.
- c) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai.
- d) Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang – undangan masih kurang.
- e) Tidak terealisasi pencapaian target pada empat (4) item pajak yaitu pajak hotel, pajak sarang burung walet, pajak hiburan, pajak bahan galian golongan C / galian mineral bukan logam di tahun 2018.



- f) Alasan pajak hotel dikarenakan belum optimalnya pemeriksaan yang dibayar oleh pihak objek pajak hotel berbintang sehingga pemungutan pajaknya belum optimal dan pendataan wajib pajak kost atau penginapan yang ada di Wilayah Kota Banjarbaru yang belum maksimal.
- g) Pajak Sarang Burung Walet dikarenakan target yang diadakan pada tahun 2018 adalah target yang pertama kali yang direalisasikan dan pemindahan objek yang akan dicari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) sehingga belum optimal dalam pencapaian, dan dalam pemungutan pajaknya terkendala dengan kegiatan realisasi hasil panen sarang burung walet yang tidak bisa dimonitor secara real di lapangan.
- h) Pajak hiburan tidak tercapai target dikarenakan target sebelumnya di Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.546.500.000,- dan di Tahun 2018 dinaikkan menjadi Rp.3.832.000.000,- sehingga kenaikan target melebihi 247,79 % dan banyak kegiatan pajak hiburan yang ditutup / tidak beroperasi seperti : Ramona karaoke, Bintang karaoke, Bensco bilyard dll.
- i) Pajak mineral bukan logam dan batuan tidak mencapai target dikarenakan ada aturan / regulasi yang bertentangan dengan kondisi Kota Banjarbaru yang merupakan Kota yang bukan menjadi tempat pertambangan, sehingga pemungutan pajak tidak dapat secara optimal .

Solusi :

- a) Melakukan koordinasi yang intensif sosialisasi secara terus menerus tentang pajak daerah.
- b) Melakukan komunikasi dan informasi kepada wajib pajak.
- c) Melakukan pendekatan lapangan langsung ke wajib pajak.
- d) Melakukan pemeriksaan pajak pada objek pajak yang dicurigai tidak sesuai dengan dibayarkan.
- e) Diusulkan PERDA dan Target Pajak Mineral bukan logam dihapus karena di tata ruang Banjarbaru tidak ada ijin pertambangan.

2) Bidang PBB dan BPHTB

Permasalahan :

- a) Data PBB yang belum update.
- b) Data PBB yang belum valid.
- c) Belum terdapat peta PBB yang terbaru .
- d) Nilai piutang PBB yang semakin meningkat.
- e) Pendataan objek PBB yang belum dilakukan secara optimal.



- f) Penagihan objek PBB belum dilakukan secara optimal.
- g) Pelaporan piutang PBB pada Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (E-PBB) yang belum menunjukkan keakuratan.

Solusi :

- a) Melakukan pemutakiran data PBB sehingga potensi PBB dapat dioptimalkan .
- b) Melakukan validasi data PBB sehingga menghasilkan kebenaran dan kesesuaian data PBB dengan dengan kondisi riil yang ada.
- c) Melakukan kegiatan pemetaan PBB sehingga menghasilkan peta PBB Kota Banjarbaru.
- d) Melakukan validasi data piutang PBB sehingga dapat dilakukan penagihan dan / penghapusan piutang PBB.
- e) Melakukan pendataan secara rutin atas objek pajak yang belum terdaftar PBB.
- f) Melakukan penagihan secara rutin atas objek yang belum membayar PBB.
- g) Menambahkan fitur pelaporan piutang PBB pada Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (E-PBB).

3) Bidang Pengendalian dan Pengembangan

Permasalahan :

- a) Kurangnya tenaga penyuluh / pengawas / pemeriksa.
- b) Masih kurangnya kesadaran tentang pentingnya pajak.
- c) Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar bidang.
- d) Sarana dan prasarana kerja yang kurang memadai.

Solusi :

- a) Melakukan bimtek kepada ASN mengenai fungsi dan tugas serta. tanggungjawab tenaga penyuluh/pengawas/pemeriksa.
- b) Menempatkan petugas pengawas di setiap kecamatan 1 orang.
- c) Meningkatkan volume sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak Kota Banjarbaru.
- d) Melakukan rapat koordinasi secara intensif antar bidang.
- e) Percepatan pemenuhan pembangunan sarana dan prasarana.



13. URUSAN KEPEGAWAIAN (BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH KOTA BANJARBARU)

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, yaitu :
 - a) Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS,
 - b) Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS,
 - c) Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
 - d) Kegiatan Penyusunan Data Formasi,
 - e) Kegiatan Seleksi Jabatan Aparatur Sipil Negara,
 - f) Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar Akademik,
 - g) Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Evaluasi Dokumen Prestasi Kerja Aparatur.
 - h) Kegiatan Mutasi dan Alih Jenis Status Kepegawaian
 - i) Kegiatan Pengembangan Jabatan Fungsional,
- 2) Program Peningkatan Informasi dan Kedudukan Hukum Pegawai, yaitu :
 - a) Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Disiplin Kerja PNS, PTT dan Tenaga Kontrak,
 - b) Kegiatan Penyelenggaraan Pemberhentian, Pensiun dan Usul Penetapan Pertimbangan Status Kepegawaian,
 - c) Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Anggota Korpri.
 - d) Kegiatan Pemberian Penghargaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai,
 - e) Kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin dan Bantuan Hukum PNS,
 - f) Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian
- 3) Program Pendidikan Kedinasan
 - a) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional,
 - b) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan

b. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat Pencapaian Kegiatan Dari Program-Program Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan Daerah Kota Banjarbaru yaitu :

- 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 - a) Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS dengan realisasi anggaran sebesar 46,52% dan capaian sebesar 96,8%,
 - b) Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS dengan



realisasi anggaran sebesar 86,68% dan capaian sebesar 162%,

- c) Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas dengan realisasi anggaran sebesar 41,95% dan capaian sebesar 50%, dikarenakan rendahnya minat PNS untuk mengembangkan diri melalui mekanisme tugas belajar sesuai kebutuhan formasi pendidikan yang ditawarkan.
 - d) Kegiatan Penyusunan Data Formasi dengan realisasi anggaran sebesar 50,36% dan capaian sebesar 94%,
 - e) Kegiatan Seleksi Jabatan Aparatur Sipil Negara dengan realisasi anggaran sebesar 97,68% dan capaian sebesar 100%,
 - f) Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar Akademik dengan realisasi anggaran sebesar 52,30% dan capaian sebesar 84,23%,
 - g) Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Evaluasi Dokumen Prestasi Kerja Aparatur dengan realisasi anggaran sebesar 99,16% dan capaian kinerja untuk verifikasi dan evaluasi dokumen hasil penilaian pegawai 27%, capaian kinerja untuk verifikasi dan evaluasi dokumen SKP 72,9% dan untuk dokumen penilaian angka kredit 42%,
 - h) Kegiatan Mutasi dan Alih Jenis Status Kepegawaian dengan realisasi anggaran sebesar 87,81% dan capaian sebesar 23%, hal ini disebabkan karena pegawai yang mengusulkan pindah masuk ke Pemerintah Kota Banjarbaru kompetensinya tidak sesuai dengan kebutuhan formasi yang diperlukan.
 - i) Kegiatan Pengembangan Jabatan Fungsional dengan realisasi anggaran sebesar 91,89% dan capaian sebesar 142%,
- 2) Program Peningkatan Informasi dan Kedudukan Hukum Pegawai
- a) Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Disiplin Kerja PNS, PTT dan Tenaga Kontrak, dengan realisasi anggaran sebesar 93,54% dan capaian sebesar 100%.
 - b) Kegiatan Penyelenggaraan Pemberhentian, Pensiun dan Usul Penetapan Pertimbangan Status Kepegawaian dengan realisasi anggaran sebesar 90,97% dan capaian sebesar 93%.
 - c) Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Anggota Korpri dengan realisasi anggaran sebesar 85,44% dan capaian sebesar 95%.
 - d) Kegiatan Pemberian Penghargaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai dengan realisasi anggaran sebesar 77,34% dan capaian kinerja sebagai berikut :
 - (1) Pelaksanaan pemberian penghargaan bagi pegawai teladan dengan target 4 terealisasi 4 (100%),



- (2) Pelaksanaan pemberian satya lencana karya satya untuk 100 pegawai, terealisasi sebanyak 319 pegawai (319%),
- (3) Penerbitan usul kenaikan gaji berkala yang ditargetkan 400 SK, terealisasi 705 SK,
- (4) Penyesuaian usulan cuti pegawai ditargetkan 100% ditindak lanjuti dan dapat direalisasikan untuk semua usulan cuti (100%)
- e) Kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin dan Bantuan Hukum PNS dengan realisasi anggaran sebesar 18,99% , target 15 kasus dapat diselesaikan dan direalisasinya 51 kasus disiplin pegawai telah ditindaklanjuti.
- f) Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian dengan realisasi anggaran sebesar 75,71% dan capaian sebesar 100%.
- 3) Program Pendidikan Kedinasan
 - a) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional dengan realisasi anggaran sebesar 92,90% dan capaian sebesar 112%,
 - b) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan dengan realisasi anggaran sebesar 86,59% dan capaian sebesar 100%.

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Pada kegiatan tugas belajar penawaran beasiswa telah disampaikan kepada setiap SKPD, tetapi minat PNS untuk mengembangkan diri relative rendah
- b) Masih terjadi perubahan nomenklatur serta perubahan jumlah pegawai pada SKPD sehingga data formasi selalu berubah-ubah
- c) Pelaksanaan penerimaan mahasiswa sekolah tinggi kedinasan dilaksanakan secara terintegrasi oleh Pemerintah Pusat melalui sistem online
- d) Keterlambatan SKPD terkait dalam mengumpulkan data dukung memproses perpanjangan SK berupa Surat Rekomendasi
- e) Berkurangnya jumlah tenaga PTT disebabkan 1 orang meninggal dunia, 1 orang mengundurkan diri, 1 orang diberhentikan
- f) Pelaksanaan seleksi penerimaan Calon PNS dimulai pada tanggal 26 September 2018 dan pada tanggal 19-21 Desember 2018 dilaksanakan integrasi hasil SKD dan SKB oleh BKN Pusat. Keseluruhan jadwal pelaksanaan rangkaian kegiatan seleksi penerimaan CPNS ditentukan secara terintegrasi oleh Pemerintah Pusat
- g) Penandatanganan pertimbangan teknis tidak sesuai dengan ketentuan SOP dikarenakan pejabat yang berwenang pada BKN Kanreg VIII sering tidak berada ditempat,



- h) Target kinerja dihitung berdasarkan jumlah formasi CPNS serta jumlah pensiun BUP dan meninggal dunia,
- i) Data jumlah PNS yang diusulkan untuk diambil sumpah/janji PNS oleh SKPD selalu berubah-ubah,
- j) Berdasarkan hasil review dan konsultasi dengan inspektorat kota banjarbaru bahwa SKPD tidak diperkenankan membiayai perjalanan dinas pegawai yang bukan dari SKPD tersebut sehingga persatuan pensiun tidak dapat menghadiri acara ulang tahun Persatuan Weradatama,
- k) Tidak ada hambatan/kendala penempatan dalam jabatan structural, meskipun ada beberapa aparatur yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, yang dipersyaratkan, namun yang bersangkutan memiliki kompetensi dan pengalaman pekerjaan dalam bidang tugas yang didudukinya,
- l) Kurangnya tingkat kesadaran setiap aparatur terhadap kewajibannya dalam hal pembuatan dokumen prestasi kerja PNS
- m) Kurangnya pemahaman terhadap penyusunan dokumen prestasi kerja pegawai dan Sipil efek tidak langsung terasa
- n) Usul mutasi yang masuk masih banyak yang tidak sesuai dengan kompetensi formasi yang dibutuhkan
- o) Pemetaan jabatan khususnya jabatan pelaksana pada setiap SKPD belum dilaksanakan sepenuhnya
- p) Pemetaan jabatan fungsional tertentu yang belum ada dasar hukumnya
- q) Pegawai kurang memahami aturan kepegawaian tentang disiplin dan Pengawasan secara berjenjang kurang optimal
- r) Perlu wujud nyata perhatian Pemerintah Kota Banjarbaru kepada pegawainya yang berprestasi dan diharapkan dapat memotivasi dalam bekerja sehingga dapat tercapai aparatur yang memenuhi standar kompetensi serta berkarakter
- s) Penggunaan simpeg belum optimal dan masih terdapat beberapa perbedaan data antara simpeg dan aplikasi kepegawaian lainnya
- t) Pengawasan secara berjenjang kurang optimal
- u) Penggunaan simpeg belum optimal dan masih terdapat beberapa perbedaan data antara simpeg dan aplikasi kepegawaian lainnya

2) Solusi

- a) Melakukan evaluasi terhadap penawaran beasiswa, menyesuaikan penetapan beasiswa tugas belajar dengan kebutuhan pendidikan pada SKPD,
- b) Verifikasi dan validasi data pegawai SKPD secara berkala,



- c) Sosialisasi ke sekolah-sekolah terkait pelaksanaan penerimaan mahasiswa sekolah tinggi kedinasan,
- d) Menghubungi SKPD terkait agar segera melengkapi data dukung tersebut,
- e) Konsultasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan CPNS secara berkala dan update dengan Pemerintah Pusat,
- f) Konsultasi dan koordinasi dengan pejabat berwenang BKN Kanreg VIII agar memprioritaskan pegawai-pegawai yang telah mendekati TMT pensiun,
- g) Membuat surat edaran ke masing-masing SKPD lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru agar mengusulkan setiap pegawainya yang belum memiliki karpeg, karis maupun karsu,
- h) Menghubungi SKPD terkait agar segera memfinalkan jumlah pegawai yang diusulkan untuk diambil sumpah/janji PNS,
- i) Pemberitahuan kepada Ketua Yayasan PWRI Purnabakti bahwa kegiatan purnabakti dapat dikoordinasikan dengan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru,
- j) Melakukan pemetaan pada setiap jabatan structural agar sesuai antara jabatan yang diduduki dengan kompetensi dan latarbelakang pengalaman pekerjaannya,
- k) Memberikan sosialisasi kepada seluruh aparatur
- l) Membentuk Focus Group Discussion (FGD), terkait sasaran kinerja pegawai (SKP) karena banyaknya ASN di Pemko Banjarbaru yang belum memahami tentang SKP
- m) Menerapkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
- n) Membuat dan menerapkan sistem elektronik,
- o) Apabila ada pegawai yang usul mutasi keluar harus melihat ABK pada masing-masing jabatan oleh SKPDnya,
- p) Dibuatkan dsar hukum untuk menentukan analisis kebutuhan masing-masing JFT
- q) Membangun sistem aplikasi elektronik secara online, perangkat pendukung berupa mesin absensi yang terintegrasi dengan sistem aplikasi tunjangan tambahan penghasilan berbasis kinerja,
- r) Dibutuhkan bentuk apresiasi selain materi dan ucapan (kesempatan mengikuti diklat, pengembangan karier jabatan),
- s) Melakukan rotasi/mutasi untuk penyegaran yang disesuaikan dengan kebutuhan/formasi,
- t) Dibutuhkan keberanian pimpinan untuk menjatuhkan hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku,
- u) Penambahan SDM dibidang IT dan terus melakukan rekonsialisasi data kepegawaian.



BAB V.

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Dana Tugas Pembantuan Provinsi adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh kabupaten, atau kota dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten, atau Kota, dan/atau Desa. Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota adalah dana yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten, atau Kota kepada Desa.

Pada tahun 2018 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Banjarbaru yang melaksanakan Tugas Pembantuan adalah Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru dengan dana sebesar Rp. 6.000.000.000 (Enam Milyar Rupiah).

A. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
3. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional , Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/ M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional , Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi melalui Dana Tugas Pembantuan;



7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02 / 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61/ M-DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan ;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34 /M/DAG/PER/5/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/m-DAG/PER/2/2018 tentang Penugasan Gubernur/ Bupati /Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan / Revitalisasi Sarana Perdagangan Yang di Danai dengan Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
10. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Penetapan Penjabat Pengelola Keuangan Kegiatan pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi yang Di Danai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru dan Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok Pelaksana Dinas Perdagangan.

B. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN

Instansi pemberi Dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan dibiayai dari Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2018 dan yang melaksanakan Dana Tugas Pembantuan adalah Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru dengan Kegiatan pembangunan Pasar Rakyat Laura Kelurahan landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru

1. Program dan Kegiatan

Nama Program	: Program Pengembangan Perdagangan dalam Negeri
Kegiatan	: Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan





Gambar 5.1 Pembangunan Pasar Landasan Ulin Utara (LAURA)

2. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dana Tugas Pembantuan dengan jumlah anggaran Rp 6.000.000.000,- (Enam Miliar Rupiah) dari APBN Tahun Anggaran 2018 dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 5.325.388.304 (Lima Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah) atau sebesar 88,76% dengan realisasi fisik 100%.



Gambar 5.2 Pembangunan Pasar Landasan Ulin Utara (LAURA)

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan antara lain :

1. Keterlambatan diterimanya Juknis dan DIPA Tugas Pembantuan, hendaknya dapat diterima diawal tahun anggaran sehingga memudahkan kegiatan, Dinas perdagangan dalam perencanaan , pembangunan fisik dan pengawasan tepat waktu
2. Belum diaturnya didalam juknis untuk perencanaan , pengawasan dan administrasi kegiatan Dana tugas Pembantuan (TP).

Dalam rangka mengoptimalkan kegiatan yang bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP), seyogyanya dana Tugas Pembantuan tidak diturunkan pada pertengahan tahun atau diakhir tahun serta perlunya saling koordinasi dengan daerah daerah lain.

Adapun rekomendasi yang bias disampaikan dalam laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan :

1. Pemantauan kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan fisik hendaknya dapat dilaksanakan rutin mulai dari awal tahun anggaran hingga akhir pelaksanaan sebab pekerjaan fisik memerlukan proses yang panjang dan diperlukan kehati hatian dalam melaksanakan pekerjaan.
2. Evaluasi atas kegiatan yang dipantau hendaknya dapat dilakukan dengan intensif, sehingga hasil pekerjaan dapat lebih optimal
3. Hasil dari evaluasi kegiatan hendaknya dijadikan sebagai salah satu aspek penting dalam merencanakan kegiatan serupa di tahun mendatang
4. Pemantauan dan Evaluasi hendaknya dapat dilakukan untuk seluruh kegiatan, tidak hanya kegiatan tugas pembantuan , mengingat keberhasilan seluruh kegiatan yang dilaksanakan merupakan tolak ukur terpenting dari keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Banjarbaru Perdagangan Kota Banjarbaru.



BAB. VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Kerjasama antar Daerah yang diajak Kerjasama pada tahun 2018 dan Kerjasama yang masih berjalan sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Laut (Kawasan Metropolitan Banjar Bakula)
2. Pemerintah Kota Bandung
3. Pemerintah Pusat
4. Pemerintah Kabupaten Kota Baru
5. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

1. Dasar Hukum

- a. Kesepakatan bersama Nomor : 017 Tahun 2016, Nomor 181/12/KUM/2016, Nomor : 17/KUM/2016, Nomor : 5/NKS/BANJAR/2016, Nomor : 081/01/KUM/2016, Nomor : 180/6-KB-KUM/2016 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kota Banjarmasin, Pemerintah Kota Banjarbaru, Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tentang Kerjasama Pengelolaan Persampahan Regional Di Kawasan Metropolitan Banjarbakula (Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Dan Kabupaten Tanah Laut), Perjanjian Kerjasama Daerah Nomor : HK.02.03-CL/395, Nomor : 019 Tahun 2017, Nomor: 10/KUM/2017, Nomor: 181.2/09/KUM/2017, 4/PKS/Banjar/2017, 181/34/KUM/2017, 180/25/PK-KUM/2017 antara Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kota Banjarmasin, Pemerintah Kota Banjarbaru, Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Dan Adendum atas Perjanjian Kerjasama Nomor : 272/PKS/CL/2018, Nomor : 70 Tahun 2018 Nomor : 325/PKS/KUM/2018, Nomor : 100/01/PKS/Bagpem/XII/2018, Nomor : 16/NKS/Banjar/2018, Nomor : 100/024/Umum-SETDA, Nomor : 188.45/497/ADD Perjanjian-Kum/2018 antara Direktorat Pengembangan



Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kota Banjarbaru, Pemerintah Kota Banjarmasin, Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional di Kawasan Metropolitan banjarbakula. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kota Banjarmasin, Pemerintah Kota Banjarbaru, Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Pemerintah Tanah Laut tentang Kerjasama Angkutan Massal Bus Rapid Transit (BTR) di Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula (Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Laut);

- b. Kesepakatan Bersama Nomor : 21/KUM/2016, Nomor 119/3034- Bag.KS Antara Pemerintah Kota Banjarbaru dengan Pemerintah Kota Bandung Tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan;
- c. Kesepakatan Bersama Nomor : 22/KOMINFO/HK.03.02/05/2018, 33/MOU/KUM/2018 antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Kota Banjarbaru tentang Implemetasi Gerakan Menuju 100 Smart City;
- d. Kesepakatan Bersama Nomor : 110/NK/BEKRAF/XI/2018, Nomor: 46/MOU/KUM/2018 tentang Pengembangan Potensi ekonomi Kreatif di Kota Banjarbaru;
- e. Kesepakatan bersama Nomor : 15/MoU/KUM/2018 antara Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan Pemerintah Kota Banjarbaru tentang Kerjasama Pembangunan Daerah;
- f. Kesepakatan Bersama Nomor : 02 Tahun 2018, Nomor : 05/MOU/KUM/2018 antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kota Banjarbaru tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018.

2. Nama Kegiatan

- a. Kerjasama pengelolaan persampahan regional di Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula (Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut).
- b. Kerjasama angkutan massal bus rapid transit di Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbarubakula (Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Laut).



- c. Ruang Lingkup Kerjasama Pemerintah Kota Banjarbaru dengan Pemerintah Kota Bandung meliputi :
Pengembangan Smart City
 - 1) Penyelenggaraan E-Government terdiri dari Pelaksanaan Aplikasi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia
 - 2) Pengembangan Produk Unggulan Daerah
 - 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Usaha Mikro Kecil Menengah.
- d. Ruang Lingkup Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Banjarbaru dengan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi :
 - 1) Bimbingan teknis penyusunan Masterplan Smart City Kota Banjarbaru.
 - 2) Pertukaran Data dan legal Software menggunakan free and open source software (FOSS).
 - 3) Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Gerakan Menuju 100 Smart City.
 - 4) Integrasi data antar satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- e. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi :
 - 1) Riset, edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif
 - 2) Akses permodalan
 - 3) Infrastruktur
 - 4) Pemasaran
 - 5) Fasilitasi hak kekayaan intelektual dan regulasi
 - 6) Hubungan antar lembaga dan wilayah
 - 7) Kegiatan lain yang dipandang perlu untuk pengembangan ekonomi kreatif
- f. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan Pemerintah Kotabaru meliputi :
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan
 - 2) Kesehatan
 - 3) Penanggulangan Bencana
 - 4) Industri dan Perdagangan
 - 5) Lingkungan Hidup
 - 6) Tata Ruang Wilayah
 - 7) Perhubungan
 - 8) Kepegawaian
 - 9) Pemerintahan
 - 10) Keetrologian
 - 11) Bidang lain yang dibutuhkan oleh kedua daerah

- g. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kota Banjarbaru meliputi : Kepesertaan pelayanan kesehatan, pembiayaan dan koordinasi.

3. Jangka Waktu kerjasama

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Laut (Kawasan Metropolitan Banjar Bakula) berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal sepuluh bulan april tahun dua ribu tujuh belas.
- b. Jangka waktu Kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Laut (Kawasan Metropolitan Banjar Bakula) berlaku selama 12 Bulan sejak tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 10 sepuluh bulan april tahun dua ribu delapan belas.
- c. Jangka Waktu Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Kota Bandung berlaku selama dua tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan juli tahun dua ribu enam belas dan berakhir pada tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas.
- d. Jangka waktu Nota Kesepahaman dengan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika berlaku selama satu tahun sejak tanggal delapan bulan mei tahun dua ribu delapan belas. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang untuk dua tahun berikutnya.
- e. Jangka waktu Kesepakatan Bersama dengan Badan Ekonomi Kreatif berlaku jangka waktu dua belas bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama.
- f. Jangka waktu Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berlaku jangka waktu satu tahun terhitung mulai tanggal satu januari dua ribu delapan belas sampai dengan tiga puluh satu desember dua ribu delapan belas.

4. Hasil Kerjasama

- a. Adanya kesepakatan bersama untuk membangun komitmen dalam melaksanakan perencanaan, pembangunan dan pengelolaan TPA Regional di Kawasan Metropolitan Banjar Bakula yang meliputi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah laut. Disepakati juga bahwa pengelolaan dan pemanfaatan TPA Regional berlokasi di Hutan Panjang Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru.
- b. Adanya kesepakatan bersama untuk mewujudkan Angkutan Massal Bus Rapid Transit (BTR) yang terkoordinasi dan terintegrasi di Kawasan Perkotaan Metropolitan



Banjarkuala yang meliputi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Laut.

- c. Adanya kesepakatan bersama dalam pengembangan Smart City dan pengembangan ekonomi kreatif dengan Kota Bandung.
- d. Adanya Implementasi dan pelaksanaan program gerakan Menuju 100 Smart City di Kota Banjarbaru dengan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- e. Adanya kesepakatan bersama untuk pengembangan potensi ekonomi kreatif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Banjarbaru.
- f. Adanya kesepakatan bersama untuk menunjang keserasian pembangunan lintas daerah, mensinergikan potensi antar daerah, meminimalisir kesenjangan pembangunan antar daerah dan meningkatkan pertukaran pengetahuan dan teknologi.
- g. Adanya Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin di provinsi Kalimantan Selatan guna mencapai Jaminan Kesehatan Kesehatan Semesta (Universal Coverage) dan Millenium Development Goald.

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2018 melakukan kerjasama dengan pihak ketiga baik dengan institusi Pemerintah maupun dengan lembaga pendidikan melalui :

1. Pemerintah Kota Banjarbaru

a. Kebijakan dan Kegiatan

Kerjasama untuk pelatihan kerja pemuda dalam upaya mendukung terwujudnya kampung pemuda di Kota Banjarbaru dilaksanakan Pemerintah Kota Banjarbaru dengan beberapa pihak, antara lain :

- 1) DPD KNPI Kota Banjarbaru
- 2) Balai Latihan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Terwujudnya Kampung pemuda berbasis ketrampilan.
- 2) Terasilitasinya proses sosialisasi pelatihan kerja pemuda tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
- 3) Mempermudah mendapatkan informasi recruitment mengenai latihan kerja kepada pemuda di Kota Banjarbaru.



c. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan dalam kegiatan ini.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarbaru pada tahun 2018 melakukan kerjasama dengan pihak ketiga baik dengan institusi Pemerintah maupun dengan lembaga pendidikan sebagai berikut :

1. DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU

a. Kebijakan dan Kegiatan

The Global Fund adalah lembaga keuangan internasional yang berdedikasi untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana untuk mencegah dan mengobati HIV/AIDS, Tuberkulosis dan Malaria. Lembaga ini merupakan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta dan komunitas yang terdampak . Sejak pembentukannya Tahun 2002, *The Global Fund* telah menjadi lembaga keuangan utama dalam mendanai program penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria. Hingga saat ini 22,6 milyar USD untuk lebih dari 1000 program ATM di 150 negara. Kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan *The Global Fund* ATM dimulai sejak tahun 2002. Hingga saat ini dana hibah Global Fund masih berjalan dengan Kementerian Kesehatan sebagai penerima utama (*Principal Recipient*).

Selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengendalian malaria juga didanai oleh dana bantuan hibah *Global Fund ATM*. Sebagian besar dana bantuan hibah ini digunakan untuk mendukung kegiatan operasional intensifikasi dan integrasi pengendalian malaria di Kabupaten/Kota dan sarana pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 443/Menkes/SK/VI/2009 tentang penetapan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sebagai principal recipient Kementerian Kesehatan dalam pengelolaan Dana Hibah Global Fund AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (GF-ATM). Dalam pelaksanaan pengelolaan hibah ini, Principal Recipient melibatkan lintas sektor program antara lain Dinas Kesehatan Provinsi (Sub Recipient) dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (sub-sub Recipient) sebagai penanggung jawab program. Setiap sub – sub Recipient harus membuat workplan atau rencana kerja kegiatan secara detil selama 5 tahun.

b. Realisasi dan Pelaksanaan Kegiatan

Pada Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru menerima dana bantuan hibah dari GF-ATM yaitu sebesar :



No.	Kegiatan	Dana
1.	Supervisi kegiatan TBC ke Puskesmas	1.350.000,-
2.	ATK Perbaikan Kendaraan Operasional Wasor TB	4.800.000,-
3.	ATK kegiatan Malaria	4.000.000,-
4.	Supervisi kegiatan Malaria	1.500.000,-
5.	Kegiatan Penyelidikan Epidemiologi	1.200.000,-
	Jumlah	12.850.000,-

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dari dana hibah ini adalah:

- 1) Supervisi ke Puskesmas oleh Pengelola Malaria dan Tuberkulosis Dinas Kesehatan (9 puskesmas)
- 2) Transport pengelola malaria dan Tuberkulosis di Puskesmas untuk melaksanakan kegiatan Penyelidikan Epidemiologi (PE) setiap ada kasus malaria diwilayah kerja Puskesmas (12 bulan)
- 3) Terlaksananya kegiatan administrasi/ATK GF-ATM (12 bulan)

c. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan dalam melaksanakan kegiatan

2. Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru

a. Kebijakan dan Kegiatan

Dalam rangka Pelayanan Kesehatan, Rawat Jalan, Rawat Inap, Obat-obatan dan Penunjang Diagnostik, dilakukan oleh RSD Idaman Kota Banjarbaru dengan beberapa pihak antara lain :

1. Daftar Perusahaan yang bekerjasama dengan RSUD Banjarbaru Tahun 2018 yaitu :
 - a) Lapas Kelas II Banjarbaru
 - b) UPT Puskesmas Martapura I
 - c) Dinkes Kabupaten Banjar
 - d) Dinas Kesehatan Banjarbaru
 - e) RSUD Ratu Zalecha
 - f) Klinik Utaman Nirwana Banjarbaru
 - g) PT. Taspen
 - h) PT. Jasa Raharja
 - i) BPJS Kesehatan
 - j) Klub Senam Medika



- k) RSUD Ulin Banjarmasin
- l) Kejaksaan Negeri Banjarbaru
- m) Akper Intan Martapura
- n) PT. Prodia Widyahusada
- o) BPJS Tenaga Kerja
- p) Lab. dr. Suka
- q) Indofood CBP Makmur Tbk Noodle Division
- r) PT. PLN
- s) Kementrian Agama Kota Banjarbaru
- t) Laboratorium Kesehatan Prov Kalsel
- u) Novotel Banjarbaru PT. Bali Sarana Sejahtera
- v) Kepolisian Negara RI Daerah Kalsel Resor Banjarbaru
- w) PT Asuransi Jiwa Ihealth
- x) PT. Indocement Tungal Perkasa, Tbk
- y) PT. Cj Chieljedang Feed Kalimantan
- z) RS Mawar

1. Daftar Akademik yang bekerja sama dengan RSD Idaman Kota Banjarbaru
Tahun 2018 :

- a) Stikes Husada Borneo
- b) Stikes Darul Azhar Batulicin
- c) Memorandum LPP Astikom
- d) Akbid Yabkesbi Banjarbaru
- e) Politeknik Unggulan Kalimantan
- f) Fakultas Kedokteran ULM
- g) Universitas Muhammadiyah Banjarmasin
- h) Stikes Sari Mulia Banjarmasin
- i) Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
- j) STF Borneo Lestari
- k) Akper Pandam Harum
- l) Akbid Sari Mulia Banjarmasin
- m) Akbid Bunga Kalimantan
- n) SMK Kesehatan Yabkesbi Banjarbaru
- o) Akper Intan Martapura
- p) Akbid Yakahuma Banjarbaru
- q) Stikes Cahaya Bangsa Banjarmasin



b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

1. Meningkatnya cakupan dan retribusi pelayanan kesehatan.
2. Meningkatnya retribusi pelayanan kesehatan.

c. Permasalahan dan solusi

Kerja sama dengan pihak ketiga berjalan dengan baik

3. BKPP Kota Banjarbaru

a. Kebijakan dan Kegiatan

Kerjasama bidang kepegawaian terdiri atas :

- 1) Kegiatan Seleksi Jabatan Aparatur Sipil Negara bekerjasama dengan Unit konsultasi dan pelayanan psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat
- 2) BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin
- 3) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis bekerjasama ESQ (PT. Arga Bangun Bangsa)

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Kegiatan Assessment Center dalam rangka Seleksi Kompetensi Manajerial Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
- 2) Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PPNPN di instansi Pemerintah Kota Banjarbaru 788 pegawai dengan rincian 94 orang tenaga PTT dan 694 orang tenaga kontrak.
- 3) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis I (ESQ) yang diikuti oleh 500 orang peserta.

c. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan dalam kegiatan ini

4. Dinas Perumahan dan Permukiman

a. Kebijakan dan Kegiatan

Dinas Perumahan dan Permukiman bekerja sama dengan PT. Vista Media yaitu perusahaan yang bergerak dibidang jasa periklanan khususnya media iklan luar ruangan. Kerjasama dilakukan berupa penyaluran Program Corporate Social Responsibility (CSR) dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.



b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Berupa pembangunan fasilitas umum/publik yaitu Rehabilitasi Fasilitas Taman Kota (Taman Air Amncur Minggu Raya) yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Banjarbaru dengan total anggaran sebesar Rp. 583.232.000,-

c. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan dalam kegiatan ini.

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

1) Kebijakan dan Kegiatan

Kerjasama bidang kepegawaian, dilakukan antara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru dengan beberapa instansi vertikal dengan bentuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Kerja sama dengan BKN Regional VIII dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pemberhentian, Pensiun dan Usul Penetapan Pertimbangan Status Kepegawaian
- b. Kerja sama dengan Kementrian PANRB dalam Kegiatan Penyusunan Data Formasi
- c. Kerja sama dengan BKN Regional VIII dalam Fasilitas Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah,
- d. Kerja sama dengan BKN Regional VIII dalam Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

2) Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- a. Terbitnya SK Pensiun sebanyak 127 orang PNS dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pensiun BUP 101 orang
 - 2) Pensiun Dini 11 orang
 - 3) Pensiun Meninggal 14 orang
 - 4) Pensiun Sakit 1 orang
- b. Tersedianya dokumen formasi PNS sebanyak 2 dokumen, dengan rincian :
 - 1) Dokumen formasi umum Tahun 2018
 - 2) Dokumen formasi lulusan STAN Tahun 2018
- c. Telah diterbitkan SK dengan rincian :
 - 1) Gol. III/d keatas 206 orang
 - 2) Gol. III/d kebawah 768 orang
 - 3) Tidak memenuhi syarat (TMS) karena melewati batas waktu sebanyak 107 orang
 - 4) Dibatalkan persetujuan teknis pertimbangan kenaikan pangkat sebanyak 4 orang



3) Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan :

- a. Pada Penerbitan SK pensiun dari BKN Regional VIII melewati batas TMT pensiun yang bersangkutan, sehingga PNS ybs tidak mendapatkan gaji pangkat pengabdian pada bulan terakhir bekerja.
- b. Permasalahan pada Kegiatan Penyusunan Data Formasi yaitu Masih terjadi perubahan nomenklatur serta perubahan jumlah pegawai pada SKPD sehingga data formasi selalu berubah-ubah

b. Solusi :

- 1) Lebih meningkatkan koordinasi/komunikasi dengan BKN mengenai penerbitan pertimbangan teknis pensiun
- 2) Verifikasi dan validasi data pegawai SKPD secara berkala

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

1. Kebijakan dan Kegiatan 2018

Pada tahun 2018 rata-rata realisasi capaian indikator Sasaran 6 (Meningkatnya Penataan Tata Batas Wilayah Kota Banjarbaru telah diselesaikan batas wilayah antar kelurahan dan atau kecamatan di Kota Banjarbaru yaitu sebanyak 20 kelurahan 5 kecamatan masuk dalam kategori sangat Tinggi. Tercapainya indikator sasaran tersebut karena di tahun 2018 adanya kegiatan Delineasi Batas Wilayah Kelurahan dengan metode Kartometrik (Delineasi dalam arti penggambaran hal penting dengan garis dan lambang (peta) Kartometrik adalah penulisan/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi letak, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap) di Kota Banjarbaru yang didalamnya aspek teknis penetapan dan penegasan batas yang direncanakan semula 1 kecamatan 4 kelurahan menjadi 5 Kecamatan 20 Kelurahan se Kota Banjarbaru sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Desa/Kelurahan mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data geoportal.

Pelaksanaan kegiatan delineasi batas wilayah bekerjasama dan difasilitasi oleh Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial (PPBW BIG) dilaksanakan pada bulan Oktober 2018 dalam kegiatan ini Lurah dan Camat se Kota Banjarbaru mengoreksi dan mengklarifikasi Peta batas wilayah administrasi kelurahan yang telah disediakan oleh Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial (PPBW BIG) dimana ada segmen batas yang perlu diklarifikasi dan disepakati oleh Lurah dan Camat



dan hasil kesepakatan segmen batas wilayah administrasi Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani diatas Peta batas wilayah administrasi kelurahan oleh Lurah dan Camat se Kota Banjarbaru.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Hasil kegiatan Batas Wilayah Administrasi Kelurahan dan Kecamatan meliputi 20 Kelurahan dan 5 Kecamatan telah disepakati segmen batas wilayah administrasi masing – masing Kelurahan di 5 Kecamatan perlu diterbitkan dengan Perwali / SK Walikota tentang batas wilayah administrasi kelurahan dan kecamatan

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Belum adanya Permendagri tentang Penegasan Batas Daerah antara Kota Banjarbaru dengan Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Banjar sehingga tidak dapat diterbitkan Perwali/SK Walikota tentang Batas Wilayah Administrasi Kelurahan se Kota Banjarbaru

b. Solusi

Percepatan penyelesaian Penegasan Batas Daerah antara Kota Banjarbaru dengan Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Banjar

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya

Sepanjang Tahun 2018 berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah terjadi 27 bencana kebakaran yang dapat ditangani oleh UPTD Kebakaran Kota Banjarbaru yang mengakibatkan 13 rumah, 2 bilik kelas (gedung sekolah), 5 gudang terbakar, 1 bengkel, 3 warung atau kios, 2 kamar kost, dan 1 pondok kecil. Selain bencana kebakaran pada perumahan juga terjadi 226 kali peristiwa kebakaran hutan dan lahan yaitu pada Kelurahan Syamsudin Noor, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kelurahan Sungai Ulin, Kelurahan Sungai Tiung, Kelurahan Cempaka, Kelurahan Guntung Paikat, Kelurahan Guntung Manggis, Kelurahan Loktabat Selatan, Kelurahan Loktabat Utara, Kelurahan Kemuning, Kelurahan Palam dan Kelurahan Guntung Payung.

Peristiwa kebakaran yang terjadi di wilayah Kota Banjarbaru dapat tertangani dengan baik, dengan mengerahkan Unit Pasukan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Banjarbaru, disertai dukungan dan kerjasama dari Unit Pemadam Kebakaran swasta/masyarakat yang ada di Kota Banjarbaru.



Pada tahun 2018 juga terjadi 3 kali peristiwa angin puting beliung yang terjadi di Kelurahan Loktabat Utara, Kelurahan Landasan Ulin Utara, dan Kelurahan Landasan Ulin Selatan menyebabkan kerusakan rumah dan berdampak pada 97 jiwa, serta terjadi 5 kali peristiwa banjir yang terjadi di Kelurahan Syamsudin Noor, Kelurahan Cempaka dan Kelurahan Kemuning.

2. Status Bencana

Status bencana yang terjadi di Kota Banjarbaru didapatkan dari hasil rapat koordinasi dan sosialisasi oleh Gubernur Kalimantan Selatan terkait sinergitas PEMDA-TNI-POLRI dan Masyarakat asap akibat Karhutla dan akhirnya ditetapkanlah Status Siaga Penanggulangan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, ditetapkan pada tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Oktober 2018.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Alokasi dana untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana tahun 2018 berasal dari APBD Kota Banjarbaru, melalui kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Anggaran dan Realisasi Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarbaru Tahun 2018 dapat dilihat sebagaimana tabel 6.1 dibawah ini :

Tabel 6.1

Anggaran dan Realisasi Program Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru Tahun 2018

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			PRESENTASE	
		ANGGARAN	REALISASI	SALDO	ANGGARAN	FISIK
1	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	436.085.300	256.121.000	257.635.300	99,88	100
	Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	178.500.000	178.450.000	50.000	99,97	100
	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Evakuasi	68.460.000	67.960.000	500.000	99,27	100
	Peningkatan Kesiagaan Penanggulangan Bencana	89.725.800	88.772.000	953.000	98,94	100
	Simulasi Dan Peningkatan Keterampilan Aparat Penanggulangan Bencana	99.399.500	99.389.000	10.500	99,99	100
2	Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana	403.654.000	397.283.000	6.371.000	98,42	100
	Penggerakan SDM Dan Logistik Untuk Pemulihan Darurat Penanggulangan Bencana	102.858.000	98.653.000	4.205.000	95,91	100
	Pos Komando Siaga Bencana	300.796.000	298.630.000	2.166.000	99,28	100
3	Program Pasca Bencana	46.908.000	40.873.000	6.035.000	88,07	100
	Pendataan Dampak Kejadian Bencana	32.793.000	26.758.000	6.035.000	81,60	100
	Pengembangan Partisipasi Dan Kerjasama Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	14.115.000	14.115.000	-	100	100

Sumber Data : Laporan Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2018

4. Antisipasi Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana di wilayah Kota Banjarbaru dan sekitarnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru mengadakan kegiatan antara lain :

- a. Membentuk masyarakat peduli bencana terhadap kebakaran
- b. Membentuk pelopor (relawan) dalam menghadapi bencana kebakaran lahan/hutan, banjir, tanah longsor dan angin puting beliung di kecamatan dan kelurahan Kota Banjarbaru.
- c. Melakukan pendataan terhadap wilayah-wilayah yang terdapat tanah kosong dan hutan setiap Rukun Tetangga (RT) per Kelurahan dan Kecamatan.
- d. Melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat di wilayah yang memiliki potensi kebakaran agar memiliki rasa kepedulian terhadap pencegahan kebakaran.

b. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

1. Kebakaran Hutan/Lahan dan Permukiman

Pada musim kemarau rawan terjadi kebakaran lahan maupun rumah karena di Kota Banjarbaru lahan yang tidak dirawat oleh pemiliknya menjadi kering sehingga mudah terbakar.

2. Banjir

Bencana banjir juga terjadi apabila memasuki musim penghujan, terutama di wilayah-wilayah dataran rendah, karena apabila memasuki musim penghujan, Kota Banjarbaru termasuk kategori daerah dengan intensitas curah hujan sedang.

3. Angin Puting Beliung

Daerah rawan Puting beliung terdapat di Daerah Cempaka, Landasan Ulin dan Liang Anggang.

4. Longsor

Potensi daerah rawan longsor terdapat di Kecamatan Cempaka, karena di daerah tersebut terdapat tebing-tebing atau pinggiran-pinggiran gunung sehingga apabila curah hujan di wilayah Kota Banjarbaru cukup deras bisa mengakibatkan bencana longsor.



F. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

1) Gangguan di Bidang Sosial dan Politik

Secara umum kondisi stabilitas sosial politik tahun 2018 tetap terjaga dengan baik dengan kondusif, salah satunya dibuktikan dengan tidaknya kejadian/ peristiwa yang bersifat Komunal yang dapat mengganggu stabilitas daerah, yaitu :

- a. Konflik sosial atau kerusuhan yang dipacu oleh latar belakang suku, agama Ras dan antar golongan (SARA)
- b. Tindakan – tindakan yang bersifat pengrusakan- pengrusakan fasilitas Negara atau umum yang anarkis
- c. Peristiwa – peristiwa terorisme dan radikalisme
- d. Kejadian/ peristiwa yang mengganggu stabilitas politik, antara lain :
 - Disharmonisasi kepada Daerah dengan DPRD
 - Demonstrasi / unjuk rasa yang massif ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan – kebijakan pemerintah

Meskipun pada tahun 2018 situasi dan kondisi Kota Banjarbaru tidak ada kejadian/ peristiwa konflik sebagaimana tersebut diatas yang berdampak luas dan mengakibatkan ketidakamanan serta disintegrasi sosial yang dapat mengganggu stabilitas nasional di daerah dan menghambat aktifitas pembangunan, tidak dapat dipungkiri sama halnya dengan kondisi tahun 2016 dan 2017 yang lalu juga masih ada kejadian atau peristiwa yang berpotensi ke arah konflik meskipun tidak bersifat masif yang dilatarbelakangi oleh agama, berupa penolakan masyarakat terhadap pendirian rumah tempat tinggal menjadi tempat ibadah, yaitu :

1. Tindak lanjut dari penyelesaian kesepakatan perselisihan pendirian rumah ibadah gereja Advent Hari ketujuh di jalan kerinci Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan.
2. Rumah tempat tinggal yang dijadikan rumah ibadat di rumah Sdr. Parlin Jalan A.Yani Km.30,2 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Kecamatan Landasan Ulin.
3. Rumah tempat tinggal yang dijadikan rumah ibadat di rumah Pendeta Elisa Christano, Jalan Kurnia Gang Mangga RT 6 RW 3 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang.

2) Gangguan Ketertiban dan Ketentraman Umum (Satpol PP)

Gangguan ketertiban dan ketentraman umum yang masih sering terjadi pada tahun 2018 yaitu pedagang kaki lima (PKL), gelandangan, pengemis dan orang gila, peredaran minuman keras/tuak/miras oplosan, penertiban reklame, penegakan



disiplin PNS, penegakan perda IMB, penertiban anak punk, patroli lingkungan, penegakan perda hotel/penginapan, serta penegakan perda usaha rumah kost.

Tabel 6.2

Daftar Hasil Temuan Kegiatan Patroli dan PAM Pejabat
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Kota Banjarbaru Tahun 2018

No.	Kegiatan	Jumlah Pelanggaran
1.	PKL	126
2.	Gepeng	25
3.	Tempat Hiburan Umum, Rekreasi dan Olahraga	3
4.	Anak Funk/Jalanan	74
5.	Minuman Keras/Beralkohol	46
6.	Obat-obatan Terlarang	1
7.	Rumah Kost	4
8.	Perhotelan dan Penginapan	4
9.	Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	78
10.	Perizinan Usaha dan Reklame	43
11.	Prostitusi	25
12.	Warung Sakadup	-
13.	PAM Pejabat	-
Jumlah Pelanggaran		429

Sumber Data : Satpol PP Kota Banjarbaru Tahun 2018

c. SKPD yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru

d. Keadaan Pegawai yang menangani Ketentraman dan Ketertiban

Jumlah keseluruhan Pegawai Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banjarbaru sampai keadaan Desember tahun 2018 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang yang terdiri atas :

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) = 28 orang
2. Tenaga Kontrak = 7 orang
3. Tenaga kontrak Lepas = 2 orang



Pegawai di Bakesbang dan Politik Kota Banjarbaru menurut tingkat pendidikan dan golongannya tahun 2018 dapat dilihat sebagaimana tabel 6.3 dibawah ini.

Tabel 6.3

Keadaan Pegawai di Bakesbangpol
Kota Banjarbaru Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2018

No	Pendidikan	Jumlah		Golongan	Jumlah		Eselon	Jumlah	
		Lk	Pr		Lk	Pr		Lk	Pr
1.	SLTP	1	-	I/c	1	-	II.b	1	-
2.	SLTA	5	3	II/a	1	-	III.a	1	-
3.	S-1	7	5	II/b	1	-	III.b	3	-
4.	S-2	5	2	II/c	2	2	IV.a	4	4
-	-	-	-	III/a	-	1	-	-	-
-	-	-	-	III/b	2	2	-	-	-
-	-	-	-	III/c	1	-	-	-	-
-	-	-	-	III/d	4	3	-	-	-
-	-	-	-	IV/a	4	1	-	-	-
-	-	-	-	IV/b	1	-	-	-	-
-	-	-	-	IV/c	1	-	-	-	-
	Jumlah	18	10	Jumlah	18	10	Jumlah	9	4

Sumber Data : Laporan Tahunan Bakesbang dan Politik Kota Banjarbaru Tahun 2018

Jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru Tahun 2018 baik itu PNS, maupun Tenaga Kontrak sampai dengan Desember 2018 sebanyak 142 (seratus Empat puluh Dua) orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

Pegawai di Satpol PP Kota Banjarbaru menurut tingkat pendidikan dan golongannya tahun 2018 dapat dilihat sebagaimana tabel 6.4 dibawah ini.

Tabel 6.4

Keadaan Pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Banjarbaru Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2018

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH		GOL	JUMLAH		ESELON	JUMLAH	
		Lk	Pr		Lk	Pr		Lk	Pr
1	SD	1	0	I/a	0	0	non eselon	0	0
2	SLTP	0	0	I/b	0	0	I.a	0	0
3	SLTA	82	10	I/c	0	0	I.b	0	0
4	D-I	0	0	I/d	0	0	II.a	0	0

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH		GOL	JUMLAH		ESELON	JUMLAH	
		Lk	Pr		Lk	Pr		Lk	Pr
5	D-II	0	0	II/a	1	0	II.b	1	0
6	D-III	4	0	II/b	4	0	III.a	1	0
7	D-IV	0	0	II/c	20	0	III.b	4	0
8	S-1	41	4	II/d	7	1	IV.a	12	1
9	S-2	3	1	III/a	4	2	IV.b	0	0
10	S-3	0	0	III/b	10	0	V.a	0	0
11				III/c	8	1	V.b	0	0
12				III/d	2	1			
13				IV/a	5	0			
14				IV/b	1	0			
15				IV/c	1	0			
16				IV/d	0	0			
17				IV/e	0	0			
	JUMLAH	131	15	JUMLAH	63	5	JUMLAH	18	1

Sumber Data : Satpol PP Kota Banjarbaru Tahun 2018

e. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pada Badan Kesbang dan Politik, alokasi dana untuk penyelenggaraan kegiatan, sehubungan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum bersumber dari APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2018, yaitu pada Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Realisasi dan Anggaran Program dan Kegiatan sehubungan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dapat dilihat sebagaimana tabel 6.5 dibawah ini :

Tabel 6.5

Realisasi dan Anggaran Badan Kesbang dan Politik
Kota Banjarbaru Tahun 2018

No	Program / Kegiatan	Anggaran			Presentase	
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	Anggaran (%)	Fisik (%)
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan	382.437.600	334.436.400	48.001.200	87,45	79
	Pengendalian Keamanan Lingkungan	270.465.800	241.139.600	29.326.200	89,16	100
	Pemantauan kegiatan orang asing, LSM/NGO dan Lembaga Asing	44.578.600	31.003.600	13.575.000	69,55	60
	Sosialisasi Peraturan /Kebijakan Pemerintah	67.393.200	62.293.200	5.100.000	92,43	77
2	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	262.538.100	226.628.894	35.909.206	86.32	100
	Sosialisasi pendidikan wawasan kebangsaan	129.024.650	112.124.650	16.900.000	89,90	100

No	Program / Kegiatan	Anggaran			Presentase	
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	Anggaran (%)	Fisik (%)
	Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara	28.754.250	28.754.250	-	100	100
	Gugus Tugas Gerakan Revolusi Mental	104.759.200	85.749.994	19.009.206	81,85	100
3	Program Pendidikan Politik Masyarakat	218.927.000	141.411.300	77.515.700	64,59	83,95
	Penyuluhan kepada Masyarakat	12.929.100	12.829.000	100.000	99,23	100
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	24.019.000	18.019.000	6.000.000	75,02	100
4	Program Peningkatan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	87.171.200	85.552.200	1.619.000	98,14	100
	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	87.171.200	85.552.200	1.619.000	98,14	100

Sumber Data : Laporan Tahunan Bakesbang dan Politik Kota Banjarbaru Tahun 2018

Penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum pada Kantor Satpol PP Kota Banjarbaru bersumber dari APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2018, yaitu pada Program pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

Realisasi dan Anggaran Program dan Kegiatan sehubungan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dapat dilihat sebagaimana tabel 6.6 dibawah ini :

Tabel 6.6

Realisasi dan Anggaran Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru Tahun 2018

No	Program/Kegiatan	Anggaran			Persentase	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran (%)	Fisik (%)
1.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	572.752.700	557.519.500	15.233.200	97,34%	100%
	a. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	360.603.200	335.303.200	25.300.000	91,41%	100%
	b. Patroli kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	753.305.800	752.745.800	560.000	99,99%	100%
2.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	63.241.000	9.480.000	53.761.000	14,99%	14,99%
	a. Sosialisasi Pentingnya Keberadaan dan Fungsi satlinmas dalam Masyarakat	59.788.600	34.728.600	25.060.000	14,99%	14,99%
3.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	119.251.200	113.861.200	5.390.000	83,65%	84,51%

No	Program/Kegiatan	Anggaran			Persentase	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran (%)	Fisik (%)
	a.Pembangunan pos / jaga ronda	48.070.000	47.450.000	620.000	98,14%	98,14%
	b.Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan swakarsa	27.316.750	27.316.750	0	53,53%	53,53%
	d.Pengamanan rutin rumah dinas dan aset	791.478.600	91.470.600	8.000	99,99%	100%
	e.Pengamanan pejabat	59.130.000	59.084.000	46.000	99,92%	100%

Sumber Data : Laporan Tahunan Badan Satpol PP Kota Banjarbaru Tahun 2018

f. Penanggulangan dan Kendala

Sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pada rensta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2016-2021, yaitu strategi-strategi yang ditempuh dalam rangka meningkatkan keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Banjarbaru yang relevan dengan arah kebijakan maka upaya-upaya penanggulangan terhadap kejadian atau peristiwa yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum melalui sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dalam rangka :
 - Peningkatan kapasitas pencegahan kerawanan Ipoleksosbudhankam melalui deteksi dini
 - Peningkatan pengamalan dan pengembangan wawasan kebangsaan, bela negara serta kerukunan dan toleransi antar agama dan etnis
 - Peningkatan pembangunan politik yang demokratis, santun dan beretika
- b. Melaksanakan dialog dan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan agama serta pemberdayaan forum-forum kemitraan dan kerjasama (FKDM, FKUB dan FPK serta dengan kalangan ormas dan kepemudaan lainnya).
- c. Memaksimalkan fungsi dan peranan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) kota Banjarbaru tahun 2018 dalam merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah melalui deteksi dini dan peringatan dini serta alternatif cara bertindak dan tukar menukar informasi intelijen
- d. Melaksanakan monitoring dan pemantauan perkembangan situasi politik daerah dan stabilitas politik pemerintahan, yang dilaksanakan secara terpadu dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat dengan tujuan agar keberadaan dan aktifitasnya dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan Negara serta menghindari keberadaan ormas-ormas yang dapat

meresahkan masyarakat, memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa serta merongrong NKRI

- e. Melaksanakan pemantauan dan monitoring kegiatan-kegiatan atau peristiwa/ kejadian yang bersifat insidental yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan stabilitas daerah
- f. Memaksimalkan koordinasi-koordinasi dengan SKPD-SKPD dan instansi vertikal terkait sampai ke tingkat paling bawah mulai dari Kecamatan sampai dengan Kelurahan.

Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan upaya penanggulangan sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- 1. Kurang optimalnya koordinasi dalam upaya-upaya pencegahan/ antisipatif terhadap gejala-gejala yang timbul secara cepat dan tepat
- 2. Kurang seimbangnya jumlah aparat yang terlibat dalam menangani ketentraman dan ketertiban umum dengan volume kejadian dan peristiwa
- 3. Kurang maksimalnya upaya-upaya pemetaan potensi rawan konflik yang setiap saat muncul dan tidak terprediksi maupun yang bersifat sporadis.

Pada tahun 2018 penanggulangan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru dalam rangka melaksanakan fungsi penanggulangan ketentraman dan ketertiban umum didaerah yaitu :

- a. Melaksanakan tindakan Non Yustisi yaitu berupa peneguran, pembinaan dan penertiban,
- b. Memberikan teguran pertama kepada orang atau badan hukum yang melanggar Perda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,
- c. Memberikan teguran kedua kepada orang atau badan hukum yang melanggar Perda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,
- d. Memberikan teguran ketiga kepada orang atau badan hukum yang melanggar Perda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,
- e. Memberikan Surat Peringatan Pertama dalam waktu yang ditentukan agar orang atau badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri apabila dalam waktu yang ditentukan setelah teguran ketiga,
- f. Memberikan Surat Peringatan Kedua dalam waktu yang ditentukan agar orang atau badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri apabila dalam waktu yang ditentukan setelah teguran ketiga,
- g. Memberikan Surat Peringatan Kedua dalam waktu yang ditentukan. Apabila Surat Peringatan Ketiga tidak diindahkan maka dapat dilakukan penertiban sesuai dengan aturan dan SOP Satpol PP.



- h. Melaksanakan Sidang Yustisi Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) di Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru terhadap orang atau Badan Hukum yang terbukti melanggar Perda Kota Banjarbaru.
- i. Memberikan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya peran masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum di Kota Banjarbaru.
- j. Melaksanakan patroli rutin agar terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib.

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan upaya penanggulangan penanggulangan ketentraman dan ketertiban umum didaerah adalah sebagai berikut :

- a. Sebagaimana masyarakat kurang informasi akan adanya Perda di Kota Banjarbaru,
- b. Sarana dan prasarana operasional khususnya mobil patroli dan prasarana lainnya.
- c. Kurangnya personil lapangan, dimana tidak adanya petugas khusus penindakan.
- d. Belum adanya kebijakan pemerintah daerah terhadap PKL dalam hal relokasi PKL atau tempat khusus terutama PKL buha musiman.
- e. Belum sinerginya penyelesaian masalah/kasus pelanggaran Perda Kota Banjarbaru dengan SKPD teknis di Pemerintah Kota Banjarbaru.

g. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Aparat keamanan yang ikut serta dalam penanggulangan adalah aparat-aparat intelijen dan pengendalian operasi yang berasal dari Polres Banjarbaru dan KODIM 1006 Martapura, Kejaksaan Negeri Banjarbaru, Kantor Kementerian Agama Banjarbaru, Kantor Imigrasi Banjarbaru, Danlanud Syamsudinnoor, Badan Intelijen Negara (BIN) dan BAIS (Badan Intelijen Strategis) yang bertugas di wilayah Kota Banjarbaru

Keikutsertaan aparatur-aparatur keamanan yang dilibatkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru selama Tahun 2018 dalam rangka melaksanakan fungsi penanggulangan ketentraman dan ketertiban umum didaerah yaitu kepolisian Resort Kota banjarbaru, TNI AD dn TNI AU.

G. KERJASAMA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DENGAN PERUSAHAAN MELALUI DANA TSJP/CSR

Sumber pembiayaan pembangunan daerah telah diatur oleh peraturan perundangan-undangan, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Dekonsentrasi, maupun Dana Tugas Pembantuan. Selain itu, pemerintah daerah dapat mengeksplorasi berbagai sumber pendapatan potensial daerahnya yang kita kenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang disebutkan di atas seringkali tidak cukup memadai bagi pemerintah daerah untuk menjalankan beberapa fungsinya seperti pembangunan dan pelayanan. Untuk itu, salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dengan mengikutsertakan entitas bisnis dalam proses pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat melalui Skema Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Program CSR dalam pembangunan yang sedang dijalankan di daerah sebagai penyokong capital resources (sumber dana) yang bersifat non budgetary (bukan bersumber dari APBN/APBD). Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (pasal 15 ayat b) yang berbunyi “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”,

Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP/CSR) didasari oleh Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Bantuan dalam bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada tahun 2018 diberikan dengan total nilai sebesar Rp. 2.702.686.535 (Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) Pelaksanaan TJSP/CSR sangat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, minimnya akses kesehatan dan lain sebagainya serta menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah dan perusahaan.

Daftar Perusahaan yang menyalurkan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP/CSR) di Kota Banjarbaru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.7

Daftar Kerjasama Pemerintah Kota Banjarbaru dengan Perusahaan melalui Dana TSJP/CSR Tahun 2018

NO	NAMA PERUSAHAAN	PENERIMA BANTUAN	PROGRAM PRIORITAS	JENIS BANTUAN	NILAI (Rp.)
1	PT. BANK NEGARA INDONESIA	SD NEGERI 1 MENTAOS	PROGRAM ADYWIYATA MANDIRI	BANTUAN BERUPA PEMBUATAN GREEN HOUSE DI SERAHKAN PADA BULAN MEI	8,000,000

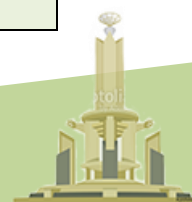


	(PERSERO) Tbk. CABANG BANJARBARU TAHUN 2018			2018	
	95,564,500	SD NEGERI 4 LOKTABAT UTARA	PROGRAM ADYWIYATA MANDIRI	BANTUAN BERUPA PEMBUATAN GREEN HOUSE DI SERAHKAN PADA BULAN MEI 2018	10,000,000
		SD NEGERI 1 PALAM	PROGRAM ADYWIYATA MANDIRI	BANTUAN BERUPA PEMBUATAN GREEN HOUSE DI SERAHKAN PADA BULAN MEI 2018	8,000,000
		SD NEGERI 1 GUNTUNG PAYUNG	PROGRAM ADYWIYATA MANDIRI	BANTUAN BERUPA PEMBUATAN GREEN HOUSE DI SERAHKAN PADA BULAN MEI 2018	7,000,000
		SD NEGERI 1 LANDASAN ULIN TIMUR	PROGRAM ADYWIYATA MANDIRI	BANTUAN BERUPA PEMBUATAN GREEN HOUSE DI SERAHKAN PADA BULAN MEI 2018	7,000,000
		SDIT ROBBANI	PROGRAM ADYWIYATA MANDIRI	BANTUAN BERUPA TEMPAT SAMPAH DI SERAHKAN PADA BULAN MEI 2018	5,000,000
		SMA NEGERI 2 BANJARBARU	PROGRAM ADYWIYATA MANDIRI	BANTUAN BERUPA TEMPAT SAMPAH DI SERAHKAN PADA BULAN MEI 2018	4,000,000
		SD NEGERI 2 KOMET	PROGRAM ADYWIYATA MANDIRI	BANTUAN BERUPA PEMBUATAN SANITARI, DRAINASE DAN RESAPAN DI SERAHKAN PADA BULAN MEI 2018	2,000,000
		SMP NEGERI 2 BANJARBARU	PROGRAM ADYWIYATA MANDIRI	BANTUAN BERUPA PEMBUATAN SANITARI, DRAINASE DAN RESAPAN DI SERAHKAN PADA BULAN MEI 2018	6,000,000
		SD NEGERI 4 SUNGAI BESAR	PROGRAM ADYWIYATA MANDIRI	BANTUAN BERUPA PEMBUATAN SANITARI, DRAINASE DAN RESAPAN DI SERAHKAN PADA BULAN MEI 2018	3,500,000
		SD NEGERI 2 LOKTABAT SELATAN	PROGRAM ADYWIYATA MANDIRI	BANTUAN BERUPA PERBAIKAN PLAPON KELAS, TERAS KELAS, PENGE CETAN, PERBAIKAN LANTAI KELAS, PEMBUATAN GREEN HOUSE, PEMBELIAN/PEMBUA TAN RAK KELAS DI SERAHKAN PADA BULAN MEI 2018	19,064,500
		MUSHOLA HIDAYATUL MUSTAQIM	PROGRAM BINA LINGKUNGAN	BANTUAN BERUPA PEMBELIAN KARPET MUSHOLA BULAN OKTOBER 2018	16,000,000



2	PT. PAMA PERSADA NUSANTARA	PANTI ASUHAN AKHLAK MULIA	SOSIAL	BANTUAN BERUPA SEBAKO DAN SANTUNAN DI SERAHKAN PADA JANUARI	5,007,600
	79,229,535	PANTI ASUHAN IBNU RUSLAN ASSYAFILAH	SOSIAL	BANTUAN BERUPA SEBAKO DAN SANTUNAN DI SERAHKAN PADA MARET	5,067,755
		PANTI ASUHAN RAUDHATUN NASYI'IN	SOSIAL	BANTUAN BERUPA SEBAKO DAN SANTUNAN DI SERAHKAN PADA APRIL	4,991,400
		PANTI ASUHAN AL MIM	SOSIAL	BANTUAN BERUPA SEBAKO DAN SANTUNAN DI SERAHKAN PADA APRIL	5,000,000
		PANTI ASUHAN HIDAYATULLA H & PANTI ASUHAN RAUDHATUN NASYI'IN	SOSIAL	BANTUAN BERUPA SEBAKO DAN SANTUNAN DI SERAHKAN PADA MEI	13,299,300
		PANTI ASUHAN AL MIM	SOSIAL	BANTUAN BERUPA SEBAKO DAN SANTUNAN DI SERAHKAN PADA JUNI	11,256,000
		PANTI ASUHAN AR RAHMAH	SOSIAL	BANTUAN BERUPA SEBAKO DAN SANTUNAN DI SERAHKAN PADA JUNI	4,943,450
		PANTI ASUHAN DARUL AMIN	SOSIAL	BANTUAN BERUPA SEBAKO DAN SANTUNAN DI SERAHKAN PADA JULI	2,997,000
		PANTI ASUHAN BAYAD PRESTASI	SOSIAL	BANTUAN BERUPA SEBAKO DAN SANTUNAN DI SERAHKAN PADA JULI	4,943,450
		PANTI ASUHAN SAHABAT YATIM	SOSIAL	BANTUAN BERUPA SEBAKO DAN SANTUNAN DI SERAHKAN PADA OKTOBER	3,716,080
		PANTI IMMANUEL	SOSIAL	BANTUAN BERUPA SEBAKO DAN SANTUNAN DI SERAHKAN PADA OKTOBER	3,007,500
		BANTUAN GEREJA HKBP	SOSIAL	BANTUAN BERUPA SANTUNAN DI SERAHKAN PADA NOPEMBER	5,000,000
		BANTUAN PEMBANGUNA N MENARA MESJID NURUL MUHAJIRIN	SOSIAL	BANTUAN BERUPA SANTUNAN DI SERAHKAN PADA NOPEMBER	10,000,000
3	BANK KALSEL	SMAN 2 BANJARBARU	PENDIDIKAN	BANTUAN BERUPA PENUNJANG SEKOLAH ADIWIYATA DI	10,000,000

				SERAHKAN LANGSUNG KE SMAN 2 BANJARBARU	
	80,500,000	SMPN 11 BANJARBARU	PENDIDIKAN	BANTUAN BERUPA PENUNJANG SEKOLAH ADIWIYATA DI SERAHKAN LANGSUNG KE SMPN 11 BANJARBARU	15,000,000
		SMPN 2 BANJARBARU	LINGKUNGAN	BANTUAN BERUPA PEMBUATAN TROTOAR DI SERAHKAN LANGSUNG KE SMPN 2 BANJARBARU	4,000,000
		SDN 4 SUNGAI BESAR	LINGKUNGAN	BANTUAN BERUPA GREEN HOUSE DI SERAHKAN LANGSUNG KE SDN 4 SUNGAI BESAR	3,500,000
		SDN 1 LUB	LINGKUNGAN	BANTUAN BERUPA TEMPAT DUDUK JAMUR DI SERAHKAN LANGSUNG KE SDN 1 LUB	10,000,000
		SDIT ROBBANI	PENDIDIKAN	BANTUAN BERUPA UANG TUNAI DI SERAHKAN LANGSUNG KE SDIT ROBBANI	5,000,000
		SDN 1 GUNTUNG PAYUNG	PENDIDIKAN	BANTUAN BERUPA GREEN HOUSE, POJOK LITERASI, POT BUNGA, SUMUR RESAPAN, GAJEBO LANGSUNG DI SERAHKAN PADA SDN 1 GUNTUNG PAYUNG	15,000,000
		SDN 3 KOMET	LINGKUNGAN	BANTUAN BERUPA GERBANG SEKOLAH, PEMBUATAN PENAMPUNGAN AIR WUDHU LANGSUNG DI SERAHKAN PADA SDN 3 KOMET	10,000,000
		SDN 2 KOMET	LINGKUNGAN	BANTUAN BERUPA GERBANG SEKOLAH, KOLAM PEMAMFAATAN AIR WUDHU, RAK HIDROPONIK LANGSUNG DI SERAHKAN PADA SDN 2 KOMET	8,000,000
4	PT.ANGKASA PURA	SDN 5 SYAMSUDINOR	LINGKUNGAN	BANTUAN BERUPA POS SATPAM DI SERAHKAN LANGSUNG KE SDN 5 SYAMNOOR	10,000,000
	665,200,000	SDN 2 GUNTUNG PAYUNG	PENDIDIKAN	BANTUAN BERUPA MEBELER SISWA DI SERAHKAN LANGSUNG KE SDN 2 GUNTUNG PAYUNG	15,000,000
		DINAS KESEHATAN	LAYANAN KESEHATAN KELILING DI	PUSKESMAS GT. PAYUNG	23,625,000



			WILAYAH OPEASIONAL PUSKESMAS		
		DINAS KESEHATAN	LAYANAN KESEHATAN KELILING DI WILAYAH OPEASIONAL PUSKESMAS	PUSKESMAS GT. MANGGIS	23,625,000
		DINAS KESEHATAN	LAYANAN KESEHATAN KELILING DI WILAYAH OPEASIONAL PUSKESMAS	PUSKESMAS LANDASAN ULIN	15,750,000
		DINAS KESEHATAN	LAYANAN KESEHATAN KELILING DI WILAYAH OPEASIONAL PUSKESMAS	PUSKESMAS CEMPAKA	77,700,000
		KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR	FASILITAS UMUM	BANTUAN BERUPA UANG	7,500,000
		KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR	FASILITAS UMUM	BANTUAN BERUPA UANG (LANGGAR NURUL GHAFUR) DISERAHKAN PADA BULAN MARET 2018	20,000,000
		KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR	FASILITAS UMUM	MUSHOLA MIFTAHUL JANNAH (MARET 2018)	4,000,000
		KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR	PENDIDIKAN	SDN 5 SYAMSUDIN NOOR (MARET 2018)	10,000,000
		KELURAHAN LANDASAN ULIN UTARA KECAMATAN LIANG ANGGANG	LINGKUNGAN	BANTUAN PERMODALAN USAHA RAKYAT	150,000,000
		KELURAHAN LANDASAN ULIN UTARA KECAMATAN LIANG ANGGANG	LINGKUNGAN	BANTUAN PEMBANGUNAN POSYANDU JL. ASMI II RT. 06 RW. 02	250,000,000
		KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR KECAMATAN LANDASAN ULIN	LANGGAR	RT. 02 RW. 06 (2013)	8,000,000
		KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR KECAMATAN LANDASAN ULIN	POS KAMLING	RT. 03 RW.02 (2012)	5,000,000
		KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR KECAMATAN LANDASAN ULIN	POS KAMLING	RT. 02 RW.02 (2012)	5,000,000



		KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR KECAMATAN LANDASAN ULIN	GOTONG ROYONG	RT. 04 RW. 02 (2012)	10,000,000
		KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR KECAMATAN LANDASAN ULIN	COR JALAN 37 M	RT. 04 RW. 08 (2013)	30,000,000
5	PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKA SI (MITRA TEL) DISINSENTIF PERUSAHAAN TELEKOMUNIKA SI, JL. NUSANTARA RT.07 RW. 06 KEL. LOKTABAT SELATAN	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN	LINGKUNGAN	BANTUAN BERUPA RANGKA, PINTU GERBANG KANOPI UNTUK PENGEMBANGAN KAMPUNG .PEJABAT DI SERAHKAN PADA TANGGAL 3 AGUSTUS 2018	
	37,000,000	KELURAHAN GT. MANGGIS	LINGKUNGAN	BANTUAN BERUPA : 1 (SATU) UNIT KENDARAAN RODA 3(TIGA) APP KTM DI SERAHKAN PADA BULAN SEPTEMBER 2017	37,000,000
6	PT. CITRA PRIMA UTAMA	KELURAAHAN LANDASAN ULIN SELATAN KECAMATAN LIANG ANGGANG	LINGKUNGAN	PEMBANGUNAN MUSHOLA DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN TAHUN 2013	135,000,000
	147,550,000	KELURAAHAN LANDASAN ULIN SELATAN KECAMATAN LIANG ANGGANG	SOSIAL MASYARAKAT	SANTUNAN FAKIR MISKIN DAN ANAK YATIM DI BERIKAN SETIAP BULAN	2,000,000
		KELURAAHAN LANDASAN ULIN SELATAN KECAMATAN LIANG ANGGANG	SOSIAL MASYARAKAT	BANTUAN UNTUK TPA SABILAL RASYID DI BERIKAN SETIAP BULAN	250,000
		KELURAAHAN LANDASAN ULIN SELATAN KECAMATAN LIANG ANGGANG	SOSIAL MASYARAKAT	BANTUAN UTK KAUM MUSHOLA DIBERIKAN SETIAP BULAN	500,000
		KELURAAHAN LANDASAN ULIN SELATAN KECAMATAN LIANG ANGGANG	SOSIAL MASYARAKAT	BANTUAN DANA 17 AGUSTUS UTK RT.04, RT.05 DAN RT.06 DI BERIKAN SETIAP TAHUN	300,000



		KELURAAHAN LANDASAN ULIN SELATAN KECAMATAN LIANG ANGGANG	SOSIAL MASYARAKAT	BANTUAN DANA PEMADAM KEBAKARAN DI PEMBATAAN RT.04 DI BERIKAN PADA tahun 2017	1,000,000
		KELURAAHAN LANDASAN ULIN SELATAN KECAMATAN LIANG ANGGANG	SOSIAL MASYARAKAT	BANTUAN PERINGATAN HARI BESAR ISLAM DI MESJID DAN MUSHOLA SETEMPAT DI BERIKAN SETIAP TAHUN	500,000
		KELURAHAN MENTAOS, KECAMATAN BANJARBARU UTARA	SOSIAL	DI SERAHKAN PADA BULAN APRIL DAN JULI 2018	8,000,000
7	PT. ASTRA INTERNASIONAL	DINAS PENDIDIKAN	PENDIDIKAN	BANTUAN BERUPA 4 RAK BUKU, 1 KIPAS ANGIN LANGSUNG DI SERAHKAN PADA SDN 2 LUB	5,000,000
	20,050,000	KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR	UMKM (PAMERAN SASIRANGAN)	BANTUAN BERUPA FASILITAS UNTUK MENGIKUTI PAMERAN K.B.A DI SERAHKAN PADA BULAN APRIL 2018	
		KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR	UMKM (PELATIHAN PEMBUATAN SASIRANGAN)	BANTUAN BERUPA PELATIHAN PEMBUATAN SASIRANGAN DI SERAHKAN PADA BULAN JUNI TAHUN 2018	
		KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR	KESEHATAN	BANTUAN BERUPA TENSI DISERAHKAN PADA BULAN MEI 2018	500,000
		KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR	KESEHATAN (POSYANDU CEMPAKA PUTIH)	BANTUAN BERUPA UANG DI SERAHKAN PADA BULAN JULI 2018	1,500,000
		KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR	LINGKUNGAN (PENGEKATAN KBA)	BANTUAN BERUPA UANG DI SERAHKAN PADA BULAN JUNI 2018	1,500,000
		KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR	LINGKUNGAN (PENGEKATAN, KEBERSIHAN KBA)	BANTUAN BERUPA UANG DI SERAHKAN PADA BULAN JULI 2018	1,500,000
			PENDIDIKAN (BEASISWA 25 ANAK SEKOLAH)	BANTUAN BERUPA UANG (LANGSUNG KEPADA YBS) DI SERAHKAN PERSEMESTER JAN- JUN 2018	15,050,000
8	PT. IF ROTE SOLUSI INFOTEK	- KELURAHAN LOKTABAT UTARA KEC. BBU	KEMASYARAKAT AN	MESIN PEMOTONG RUMPUT TANAKA 2 BUAH @ 5.000.000	10,000,000



	28,280,000	KELURAHAN GT. MANGGIS	LINGKUNGAN	1.2 (DUA) UNIT MESIN PEMOTONG RUMPUT	10,000,000
		KELURAHAN GT. MANGGIS	LINGKUNGAN	2.2 (DUA) UNIT MESIN PEMOTONG DAHAN	7,000,000
		KELURAHAN GT. MANGGIS	LINGKUNGAN	3.2 (DUA) BUAH RANTAI SENSO CADANGAN	450,000
		KELURAHAN GT. MANGGIS	LINGKUNGAN	4.2 (DUA) BUAH MATA PISAU PEMOTONG RUMPUT CADANGAN	270,000
		KELURAHAN GT. MANGGIS	LINGKUNGAN	5.5 (LIMA) PASANG SEPATU BOOT DISERAHKAN PADA TANGGAL 4 JULI 2018	560,000
9	PT. KALIMANTAN CONCRETE ENGINEERING PIMPINAN AN. AMRU RUSTAM POHAN	KELURAHAN LANDASAN ULIN TENGAH	KEAGAMAAN	BANTUAN BERUPA : * Mushola Miftahul Jannah dari PT. Kalimantan Concrete Engineering dengan nilai Rp. 230.000.000,-	230,000,000
				* Tanah Mushola Miftahul Jannah dari tanah wakaf Drs. Fahrudin	
				* Lokasi Mushola Jl. Trikora RT. 06 Rw. 02	
				* Bantuan Di serahkan Bulan Juni 2017	
10	PT. QUATRO INTERNASIONAL (DISINSENTIF PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI)	KELURAHAN GT. MANGGIS	LINGKUNGAN	BANTUAN BERUPA : 1 (SATU) UNIT ALAT PEMADAM KEBAKARAN PORTABLE.	750,000
	37,750,000	KELURAHAN GT. MANGGIS	LINGKUNGAN	2. 1 (SATU) UNIT KENDARAAN RODA 2 JENIS TRAIL DI SERAHKAN PADA BULAN SEPTEMBER 2017	37,000,000
11	PT. BANK BRI	KELURAHAN LANDASAN ULIN UTARA KECAMATAN LIANG ANGGANG	LINGKUNGAN	BANTUAN MEMBANGUN GAPURA KAMPUNG SAYUR JL. SUKAMARA RT. 02 RW. 02 DAN MEMBANGUN GEDUNG PERTEMUAN KELOMPOK TANI JL. SETIA KAWAN RT. 04 RW. 03	300,000,000
12	MITRA SELL	- KELURAHAN KOMET KEC. BBU	KEMASYARAKATAN	2 BUAH TENDA	13,000,000
13	PT. PLN UIP KALBAGTENG	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Penanaman Pohon di lokasi Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Kel. Bangkal (Bertahap)	145,000,000
14	PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah KALSELTENG	MASYARAKAT DI KELURAHAN CEMPAKA, KECAMATAN CEMPAKA	PEMBANGUNAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QURAN DI DEKAT JALUR TRANSMISI	BENTUK BANTUAN FISIK YANG DI BERIKAN ADALAH PEMBANGUNAN TEMPAT PENDIDIKAN AL-QURAN DARUL	180,000,000

		(TPA DARUL MUQIMIN)		MUQIMIN DI KEL. CEMPAKA, KEC. CEMPAKA, KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN	
		RUMAH ANAK YATIM AR-RAHMAH (GUNTUNG MANGGIS) DAN YAYASAN PANTI ASUHAN AL-AQSHO HIDAYATULLAH (PALAM)	BERBAGI KEBAHAGIAAN BERSAMA ANAK YATIM DAN DHUAFa	PEMBERIAN BANTUAN SANTUNAN DAN DANA PELAKSANAAN KEGIATAN BUKA BERSAMA ANAK YATIM DAN DHUAFa	50,000,000
15	PT. PERTAMINA DPPU SYAMSUDIN NOOR	KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG	PERTANIAN (TANAMAN HIDROPONIK DAN JAHE	SESUAI DG KEBUTUHAN YANG DI PERLUKAN (SELAMA 5 TAHUN) BANTUAN BERUPA YANG DI SERAHKAN SECARA BERTAHAP	200,000,000
16	CV. AL FALAH YASA PRIMA	KELURAHAN MENTAOS, KECAMATAN BANJARBARU UTARA	SOSIAL	DI SERAHKAN PADA BULAN FEBRUARI 2018	50,000
17	PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA (SNS)	KELURAAHAN LANDASAN ULIN SELATAN KECAMATAN LIANG ANGGANG	PENDIDIKAN	PROGRAM MENGAJAR DI SMK NEGERI 4 BANJARBARU KEPADA JURUSAN PEMASARAN DI SEKOLAH TERSEBUT TTG DUNIA KERJA, SALESMANSHIP & PEMASARAN PRODUK. PERIODE WAKTU PELAKSANAAN PROG. BULAN OKT-NOP 2017	
	2,162,500	KELURAAHAN LANDASAN ULIN SELATAN KECAMATAN LIANG ANGGANG	SERTIFIKAT 25 LEMBAR @ 1.500		37,500
		KELURAAHAN LANDASAN ULIN SELATAN KECAMATAN LIANG ANGGANG	GOODIE BAG 25 BUAH @25.000		625,000
		KELURAAHAN LANDASAN ULIN SELATAN KECAMATAN LIANG ANGGANG	TAS PUNGGUNG 4 BUAH @ 200.000		800,000

		KELURAAHAN LANDASAN ULIN SELATAN KECAMATAN LIANG ANGGANG	SOSIAL	PEMBERIAN HADIAH PADA ACARA 17 AGUSTUS 2017 DI PASAR PEMBATAAN	450,000
		KELURAAHAN LANDASAN ULIN SELATAN KECAMATAN LIANG ANGGANG	SOSIAL	PEMBAGIAN PRODUK UNTUK ACARA MAULID NABI DI RT.04 KELURAHAN LANDASAN ULIN SELATAN	250,000
18	PT. SAHABAT PANGAN	KELURAAHAN LANDASAN ULIN SELATAN KECAMATAN LIANG ANGGANG	LINGKUNGAN	PEMBUATAN PENERANGAN JALAN UMUM (JL. ALKAH) 250 M RT 06/02 KEL. LANDASAN ULIN SELATAN	15,000,000
	77,500,000	KELURAAHAN LANDASAN ULIN SELATAN KECAMATAN LIANG ANGGANG	LINGKUNGAN	PENGUKURAN DAN PENGKERASAN JALAN 250 M (JL. IWAN JAYA) RT 06/02 KEL. LANDASAN ULIN SELATAN KEC. LIANG ANGGANG KOTA BANJARBARU	62,500,000
19	PT. SANTURY GARUDA	KELURAAHAN LANDASAN ULIN SELATAN KECAMATAN LIANG ANGGANG	LINGKUNGAN	PEMBERIAN SUMUR BOR DAN TENDON PENAMPUNGAN AIR 4 TITIK DI RT 04/02/LUS	120,000,000
	280,000,000	KELURAAHAN LANDASAN ULIN SELATAN KECAMATAN LIANG ANGGANG	LINGKUNGAN	PEMBANGUNAN JEMBATAN UK 4 X 7 M RT 04/02 KELURAHAN LANDASAN ULIN SELATAN	20,000,000
		KELURAAHAN LANDASAN ULIN SELATAN KECAMATAN LIANG ANGGANG	LINGKUNGAN	PEMBERIAN TANDON PENAMPUNGAN 3 UNIT DI RT 06/02 KELURAHAN LANDASAN ULIN SELATAN	60,000,000
		KELURAAHAN LANDASAN ULIN SELATAN KECAMATAN LIANG ANGGANG	LINGKUNGAN	PROGRAM AIR BERSIH DAN PEMASANGAN JARINGAN AIR MINUM 3 TITIK DI RT. 06/02 KELURAHAN LANDASAN ULIN SELATAN	10,000,000
		KELURAAHAN LANDASAN ULIN SELATAN KECAMATAN LIANG ANGGANG	LINGKUNGAN	PEMBANGUNAN POSYANDU DI RT. 05/02 KEL. LANDASAN ULIN SELATAN	70,000,000

20	PT. GRAFIKA WANGI KALIMANTAN	KELURAAHAN LANDASAN ULIN SELATAN KECAMATAN LIANG ANGGANG	LINGKUNGAN	BANTUAN BERUPA POT BUNGA YANG DISERAHKAN PADA BULAN FEBRUARI 2017 KEPADA DINAS TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU	1,500,000
	6,250,000	KELURAAHAN LANDASAN ULIN SELATAN KECAMATAN LIANG ANGGANG	LINGKUNGAN	BANTUAN BERUPA POT BUNGA YANG DI SERAHKAN PADA BULAN FEB 2017 KEPADA DINAS TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU	1,500,000
		KELURAAHAN LANDASAN ULIN SELATAN KECAMATAN LIANG ANGGANG	KEAGAMAAN	BANTUAN KEGIATAN KEAGAMAAN MESJID DARUT TAQWA DALAM RANGKA MAULID NABI MUHAMMAD SAW 2 X BANTUAN	250,000
		KELURAAHAN LANDASAN ULIN SELATAN KECAMATAN LIANG ANGGANG	LINGKUNGAN	BANTUAN PERCETAKAN BUKU PENCAPAIAN KINERJA KELURAHAN LANDASAN ULIN SELATAN DALAM RANGKA LOMBA KELURAHAN	3,000,000
21	PT. TURSINA. A. S	KELURAHAN MENTAOS, KECAMATAN BANJARBARU UTARA	SOSIAL	DI SERAHKAN PADA BULAN MARET 2018	100,000
22	PT. DAYA MITRA SEJATI	KELURAHAN MENTAOS, KECAMATAN BANJARBARU UTARA	SOSIAL	DI SERAHKAN PADA BULAN JANUARI 2020	50,000
23	CV. HUMAIDA	KELURAHAN MENTAOS, KECAMATAN BANJARBARU UTARA	SOSIAL	DI SERAHKAN PADA BULAN FEBRUARI 2018	100,000
24	CV. CINTA PURI PRATAMA	KELURAHAN MENTAOS, KECAMATAN BANJARBARU UTARA	SOSIAL	DI SERAHKAN PADA BULAN JUNI 2018	5,000,000
25	SAFWAH GUEST HOUSE	KELURAHAN MENTAOS, KECAMATAN BANJARBARU UTARA	SOSIAL	DI SERAHKAN PADA BULAN JUNI 2018	650,000
26	PT. CITRA PRIMA UTAMA	KELURAHAN MENTAOS, KECAMATAN BANJARBARU UTARA	SOSIAL	DI SERAHKAN PADA BULAN APRIL DAN JULI 2018	8,000,000
27	YBM PLN UP KALIMANTAN BAG. TENGAH	KELURAHAN MENTAOS, KECAMATAN BANJARBARU UTARA	SOSIAL	DI SERAHKAN PADA BULAN JUNI 2018	7,200,000
28	PDAM INTAN BANJAR	KELURAHAN MENTAOS, KECAMATAN	SOSIAL	DI SERAHKAN PADA BULAN JUNI 2018	1,500,000

		BANJARBARU UTARA			
29	PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK	KELURAAHAN LANDASAN ULIN SELATAN KECAMATAN LIANG ANGGANG	KEMANUSIAAN	KERJASAMA DENGAN PMI DALAM RANGKA DONOR DARAH	FREE
		JUMLAH		2.702.686.535	

Sumber : Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setdako Banjarbaru Tahun 2018



BAB VII. P E N U T U P

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Banjarbaru Tahun Anggaran 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Pada tahun 2018 Tema Pembangunan yang ditetapkan yaitu



“PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI UPAYA MEMACU PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”.

Sebagaimana telah diuraikan dalam laporan ini maka beberapa hal yang perlu diketahui adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.087.333.858.577,92 (Satu Triliun Delapan Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah Sembilan Puluh Dua Sen) dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.007.157.442.545,00 (Satu Triliun Tujuh Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah pada APBD tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 204.642.528.120,00 (Dua Ratus Empat Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 229.786.552.300,92 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah Sembilan Puluh Dua Sen)



- b. Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp. 688.403.776.590,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 728.790.689.110,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Sepuluh Rupiah)
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 114.111.137.835,00 (Seratus Empat Belas Miliar Seratus Sebelas Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 128.756.617.166,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah)
2. Realisasi Belanja Daerah pada Tahun 2018 terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung untuk Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 1.117.675.602.945,00 (Satu Triliun Seratus Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Lima Juta Enam Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.035.577.164.814,80 (Satu Triliun Tiga Puluh Lima Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah Delapan Puluh Sen) atau 92,65%.
3. Beberapa kegiatan Pemerintah Kota Banjarbaru selama Tahun Anggaran 2018 adalah :
- a. Pemerintah Kota Banjarbaru kembali melanjutkan program peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Banjarbaru yang sampai pada akhir tahun 2018 masih tersisa sebesar 87,45 hektar. Berbagai kegiatan penanganan kumuh telah dilaksanakan pada tahun 2018 baik berupa kegiatan skala lingkungan, skala kawasan maupun kegiatan reguler. untuk kegiatan penanganan kumuh skala lingkungan berupa Kegiatan Bantuan Dana Investasi (BDI) yang dilaksanakan di 13 kelurahan oleh lkm dengan dana sebesar Rp. 10.250.000.000,- bersumber dari APBN. Untuk Kegiatan Skala Kawasan berupa Kegiatan Pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) di Kelurahan Guntung Paikat dengan anggaran sebesar Rp. 1.401.179.000,- bersumber dari APBN, sedangkan untuk Kegiatan Penanganan Kumuh Skala Reguler berupa Kegiatan Infrastruktur Kawasan Kemuning dengan anggaran sebesar Rp. 20.098.870.000,-. selain kegiatan penanganan kumuh, juga dilaksanakan kegiatan oleh Satker Penyehatan Lingkungan Permukiman dengan anggaran sebesar Rp. 126.800.000.000,- bersumber dari APBN.
4. Pengembangan Kota Baru Di Kota Banjarbaru
- Pengembangan kota baru di Kota Banjarbaru yang diadakan oleh Pemerintah Pusat melalui beberapa kementerian yang menangani merupakan bagian dari pengembangan 10 kawasan perkotaan baru di Indonesia yang tercantum dalam RJMN 2014 – 2019. Dalam kegiatan pengembangan kota baru di Kota Banjarbaru telah menetapkan kawasan dengan tema “Aero City”, sebuah Kawasan yang akan terintegrasi dan memanfaatkan keberadaan bandara sebagai daya ungkit pertumbuhan wilayah. Luas kawasan yang akan direncanakan



adalah ± 5.620,08 (lima ribu enam ratus dua puluh koma nol delapan) hektar yang terletak di Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang dan Kecamatan Banjarbaru Utara, dengan fokus pengembangan sebagai pusat permukiman baru yang layak huni dan didukung oleh fasilitas ekonomi dan sosial budaya yang lengkap guna mencegah terjadinya permukiman tidak terkendali (*urban sprawl*) akibat urbanisasi di kota otonom terdekatnya. Adapun beberapa Isu Strategis pengembangan wilayah yang menjadi fokus dalam kegiatan pengembangan kota baru tersebut antara lain :

- a. pengembangan lingkungan permukiman dan perumahan;
 - b. pengembangan infrastruktur ekonomi dan sosial budaya yang diharapkan dapat menjadi penggerak aktifitas masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan Bandara Syamsudin Noor harus menjadi center point dalam merencanakan berbagai kebutuhan infrastruktur ekonomi di wilayah tersebut;
 - c. Pengembangan ruang publik dan Kawasan wisata seperti MICE, sport center, Ruang Terbuka Hijau dan lain-lain.
4. Sebagai tindak lanjut dari penutupan lokalisasi pembatuan yang berada di Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin maka dilakukan penataan untuk menjadikan areal tersebut sebagai areal perkantoran Pemerintah Kota Banjarbaru. Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Banjarbaru telah membangun Kantor Kecamatan Landasan Ulin dengan nilai Kontrak Rp.3.737.783.000 yang akan digunakan sebagai pengganti Kantor Kecamatan Landasan Ulin serta membangun Puskesmas Landasan Ulin yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Tahun 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 6.966.605.175.
5. Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2018 memperoleh penghargaan baik Tingkat Nasional maupun Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kota Banjarbaru adalah bentuk apresiasi dari pihak lain, baik Kementerian ataupun Organisasi Non pemerintah (NGO) level nasional atas kinerja, perubahan dan kemajuan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, didukung oleh seluruh jajaran birokrasinya, bersama berbagai unsur seperti DPRD, Komunitas Masyarakat dan tentu seluruh warga. Berbagai penghargaan yang telah diperoleh antara lain :
- a. Menerima Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Menteri PAN dan RB Drs. Syafruddin, M.Si. Pemerintah Kota Banjarbaru meraih predikat B dengan nilai 63,38. Tahapan penerapan SAKIP dimulai dengan menetapkan sasaran strategis pada masing-masing Instansi yang disertai dengan ukuran keberhasilan dan target yang terukur. Dengan Nilai B ini berarti Pemko Banjarbaru berhasil mempertahankan kinerjanya dalam tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.



- b. Pemerintah Kota Banjarbaru meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Tahun 2017 yang merupakan prestasi ketiga secara berturut-turut menerima opini WTP.
- c. Bakti Koperasi dan UKM, Walikota Banjarbaru menerima penghargaan dari Menteri Koperasi dan UKM pada peringatan Hari Koperasi ke-71. Penghargaan ini diberikan karena Walikota Banjarbaru sangat peduli terhadap perkembangan koperasi dan melalui berbagai kegiatan untuk membantu promosi dan pemasaran produk UMKM di Kota Banjarbaru.
- d. Kota Layak Anak, Untuk pertama kalinya Kota Banjarbaru inobatkan sebagai Kota Layak Anak yang diterima Walikota Banjarbaru dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Penghargaan ini dimaksudkan untuk membangun inisiatif Pemerintah Daerah yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the rights of the child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan investasi dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk memenuhi hak-hak anak pada suatu wilayah.
- e. Manggala Karya Kencana, penghargaan ini diberikan kepada Walikota Banjarbaru dan Ketua TP PKK Kota Banjarbaru sebagai tokoh yang telah menunjukkan program dan karya yang menonjol dalam pengembangan inovasi dan sistem yang bermanfaat bagi Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- f. Nata Mukti Nindya, Pemerintah Kota Banjarbaru menerima penghargaan Natamukti Nindya dari ICBS dan Kementerian Koperasi UKM RI, kategori tertinggi untuk kota yang mampu meningkatkan daya saing UKM secara keseluruhan.
- g. Anugerah Pandu Negeri, untuk kedua kali Pemerintah Kota Banjarbaru menerima Penghargaan Anugerah Pandu Negeri Kategori Kota dengang Kinerja dan Tata Kelola yang Baik dari Institute For Public Governance (IIPG).
- h. Pakarti Utama I Nasional, TP PKK Kota Banjarbaru menerima penghargaan Pakarti Utama I Nasional Pelaksana Terbaik Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K). Penghargaan diserahkan oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat pada Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 46 dan Jambore Nasional Kader PKK Tahun 2018.
- i. Nasional Procurement Award, LPSE Kota Banjarbaru menerima Nasional Procurement Award Kategori Komitmen Penerapan Standar LPSE 2014. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja pengadaan secara elektronik di instansi pemerintah dan menunjukkan LPSE Kota Banjarbaru sebagai lembaga yang berintegritas, profesional dan independen.



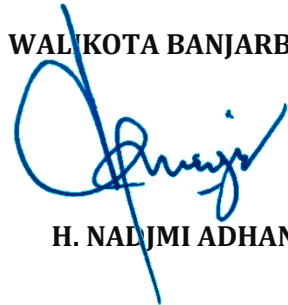
- j. Top 25 Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik, penghargaan diberikan oleh Deputi Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) pada Rapat Koordinasi Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR.
- k. Pendukung KUR Terbaik, Pemerintah Kota Banjarbaru dinobatkan sebagai Pemerintah Daerah Pendukung KUR terbaik Tahun 2018 di Luar pulau Jawa. Penghargaan diserahkan oleh Menko Perekonomian RI.
- l. Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan, Pemerintah Kota Banjarbaru meraih penghargaan dari Ombudsman RI atas kepatuhan terhadap standar pelayanan sesuai dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Tahun 2018. Kota Banjarbaru masuk pada zona hijau dengan predikat Kepatuhan Tinggi Atas Pelayanan Publik dengan nilai 92,09.
- m. Anugerah Paharita Ekapraya, Banjarbaru meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat Madya dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Yosana Susana Yambise, penghargaan ini sebagai bentuk komitmen, kepedulian dan karakter Banjarbaru yang peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- n. Penghargaan Adiwiyata tingkat Nasional, 5 Sekolah penerima penghargaan yaitu SDN 3 Palam, SDN 3 Sungai Besar, SDN 3 Syamsudin Noor, SDN 5 Loktabat Utara, SDN 1 Guntung Paikat.
- o. Penghargaan Adiwiyata Mandiri, 10 Sekolah penerima penghargaan yaitu SDN 1 Palam, SDN 4 Loktabat Utara, SDN 1 Guntung Payung, SDN 1 LU Barat, SDN 1 Mentaos, SDN 3 Komet, SDN 4 Komet, SDN 4 Sungai Besar, SDN 2 Komet, SMPN 2 Banjarbaru.
- p. Adipura, Banjarbaru kembali meraih penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI kategori Kota Sedang yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI.



Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Banjarbaru Tahun Anggaran 2018 yang disusun untuk menjadi keterangan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Banjarbaru selama Tahun 2018. Keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan daerah merupakan upaya bersama antara Pemerintah Kota Banjarbaru, DPRD Kota Banjarbaru dan seluruh masyarakat Kota Banjarbaru. Permasalahan-permasalahan serta tantangan yang terjadi selama tahun 2018 merupakan bagian dari proses pembangunan yang dapat menjadi bahan bagi Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru dalam memberikan rekomendasi serta catatan untuk pembangunan Kota Banjarbaru dimasa akan datang.

Banjarbaru, Maret 2019

WALIKOTA BANJARBARU



H. NALJMI ADHANI



1. LAMPIRAN REKAPITULASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1) URUSAN PENDIDIKAN (DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 1 di bawah:

Tabel 1
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru TA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
I	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI					
1	Pembangunan Gedung Sekolah	15.290.000	13.578.000	1.712.000	88,80	100
2	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	228.000.000	224.380.000	3.620.000	98,41	100
3	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	110.825.000	108.670.000	2.155.000	98,06	100
4	Pengadaan Mebeluer Sekolah	36.100.000	35.400.000	700.000	98,06	100
5	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	28.500.000	28.400.000	100.000	99,65	100
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary	15.685.000	14.500.000	1.185.000	92,45	100
7	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	264.712.000	238.098.000	26.614.000	89,95	99,59
8	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	214.986.700	186.047.650	28.939.050	86,54	99,19
9	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	860.788.300	790.649.950	70.138.350	91,85	70,99
10	Biaya Operasional Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik)	353.173.100	349.272.100	3.901.000	98,90	100
II	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN					
1	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	724.470.600	711.650.200	12.820.400	98,23	100
2	Rehabilitasi sedang/berat Sarana Air Bersih dan Sanitary Bina SMP	30.000.000	28.684.000	1.316.000	95,61	100
3	Penyelenggaraan Paket ASetara SD	70,523,575	70,523,575	-	100	100
4	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	249.247.425	247.207.425	2.040.000	99,18	96,31
5	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Bina SD	26.747.800	20.922.000		78,22	90,06
6	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Bina SMP	24.560.000	22.570.000	1.990.000	91,90	100
7	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary Bina SD	162.054.500	160.078.500	1.976.000	98,78	100
8	Rehab Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Bina SD	1.189.663.540	1.178.651.000	11.012.540	99,07	100
9	Pembangunan Gedung Sekolah Bina SD	2.355.000.000	2.179.931.200	175.068.800	92,57	100
10	Pembangunan Gedung Sekolah Bina SMP	50.000.000	46.684.800	3.315.200	93,37	100
11	Pembinaan Minat Bakat dan Krrpatifitas Siswa Bina SD	372.772.000	347.894.000	24.878.000	93,33	90,99
12	Pembinaan Minat Bakat dan Krrpatifitas Siswa Bina SMP	301.793.740	216.818.700	84.975.040	71,84	90,04

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
13	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Bina SD	597.856.340	339.534.000	258.322.340	56,79	64,12
14	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Bina SMP	414.766.000	338.523.500	76.242.500	81,62	87,54
15	Penyelenggaraan Siswa Baru dan Ujian Bina SD	486.088.000	471.145.000	14.943.000	96,93	90,50
16	Penyelenggaraan Siswa Baru dan Ujian Bina SMP	417.654.000	403.783.000	13.871.000	96,68	99,59
17	Pengadaan Mebeleur Sekolah Bina SD	152.605.400	151.811.400	794.000	99,48	100
18	Pengadaan Mebeleur Sekolah Bina SMP	300.344.440	295.201.000	5.143.440	98,29	100
19	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler SD	19.106.588.744	4.929.137.654,29	14.177.451.089,71	25,80	75,00
20	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler SMP	10.604.779.052	2.789.076.242	7.815.702.810	26,30	75,00
21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuler Sekolah Bina SD	164.832.500	1.040.000	163.792.500	0,63	-
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuler Sekolah Bina SMP	74.494.600	-	74.494.600	0	-
23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Bina SMP	200.447.500	197.251.500	3.196.000	98,41	100
24	Pembangunan Ruang Ibadah Bina SD	448.457.880	389.973.000	58.484.880	86,96	100
25	Pengadaan Perlengkapan Sekolah Bina SMP	1.131.014.440	1.163.024.460	5.663.640	99,52	100
26	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLBSerta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Bina SD	1.613.439.900	1.584.608.100	28.831.800	98,21	97,61
27	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP/MTs Bina SMP	633.860.200	558.842.200	75.018.000	88,16	85,00
28	Pembangunan Ruang Kelas Sekolah Bina SD	366.987.068	347.392.400	19.594.668	94,66	72,73
29	Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI (DAK)	4.060.984.000	4.019.028.000	41.956.000	98,97	100
30	Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SMP/MTs (DAK)	1.197.816.000	1.181.213.200	16.602.800	98,61	100
31	RehabilitasiSedang/Berat Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah Bina SMP	243.758.690	238.205.000	5.553.690	97,72	100
32	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Bina SD	98.593.000	98.580.000	13.000	99,99	100
33	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Bina SMP	135.327.840	132.190.700	3.137.140	97,68	100
34	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Bina SD	164.405.000	148.743.000	15.662.000	90,47	88,50
35	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Bina SMP	141.066.325	131.683.500	9.382.825	93,35	94,57
III	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL					
1	Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	193.734.200	181.892.000	11.842.200	93,89	73,38
2	Pembinaan Pendidikan, Kursus dan Kelembagaan	56.347.200	51.808.350	4.539.000	91,94	61,95
3	Pengembangan Pendidikan Kerpaksaraan	96.800.250	96.800.250	-	100	100
4	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal	157.224.450	143.094.650	14.129.800	91,01	87,07

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	11.232.500	10.952.000	280.500	97,50	80
6	Penyelenggaraan Paket C setara SMU	515.506.100	513.646.100	1.860.000	99,64	95,90
IV	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENSIK	754.050.000	599.686.500	154.363.500	79,53	80
1	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	66.411.300	30.660.300	35.751.000	46,17	93,45
2	Peningkatan Kesejahteraan PTK Bina PAUD dan Dikmas	6.954.076.550	6.731.670.550	222.406.000	96,80	96,84
3	Peningkatan Kesejahteraan PTK Bina SD	6.575.800.650	6.173.000.000	402.800.650	93,87	52,43
4	Peningkatan Kesejahteraan PTK Bina SMP	2.124.822.000	1.930.718.000	194.104.000	90,86	84,16
V	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	649.107.500	522.841.647	126.265.853	80,55	91,80
1	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	87.090.000	55.839.000	31.251.000	64,12	79,34
2	Pembinaan Dewan Pendidikan	34.665.000	25.540.400	9.124.600	73,68	25,92
3	Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan	78.706.000	71.951.750	6.754.250	91,42	100
4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	5.032.000	3.672.000	1.360.000	72,97	80
5	Penyusunan Data Pokok Sekolah	662.078.800	637.548.000	24.530.800	96,29	93,00
6	Penyelenggara Lomba/Pemilihan PTK Beprestasi	195.643.000	166.901.000	28.742.000	85,31	93,49
7	Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah tentang Isu Pendidikan Bina SD	129.980.000	101.269.000	28.711.000	77,91	92,56
8	Pengembangan Sekolah Berbasis Karakter Bina SD	332,232,400	288,611,000	43.621.400	86,87	80,62
9	Pengembangan Sekolah Berbasis Karakter Bina SMP	536,405,000	465.688.000	70.717.000	86,82	68,84

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru TA. 2018

2) URUSAN KESEHATAN (DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 2 di bawah:

Tabel 2
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru TA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
I	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	420.207.500	346.867.500	73.340.000	83	100
1	Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	791.621.035	705.735.235	85.885.800	89,15	100
2	Distribusi E-Logistik	371.058.000	325.989.400	45.068.600	87,85	100
II	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	799.252.600	654.375.355	144.877.245	81,87	
1	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) DAK Non Fisik	799.252.600	654.375.355	144.877.245	81,87	
III	PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	545.677.242	525.903.900	19.773.342	96,38	100

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
1	Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat	545.677.242	525.903.900	19.773.342	96,38	100
IV	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	319.199.600	243.137.300	76.062.300	76,17	95
1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Status Gizi Masyarakat	319.199.600	243.137.300	76.062.300	76,17	95
V	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	419.943.450	414.469.950	5.473.500	98,70	100
1	Peningkatan Penyehatan Lingkungan Air	42.732.000	42.632.000	100.000	99,77	100
2	Peningkatan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	291.711.450	286.437.950	5.273.500	98,19	100
3	Peningkatan Penyehatan Lingkungan TTU & TPM	85.500.000	85.400.000	100.000	99,88	100
VI	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	1.440.622.190	1.224.391.375	216.230.815	84,99	100
1	Peningkatan Imunisasi	160.747.590	160.597.400	150.190	99,91	100
2	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	32.280.000	31.723.000	557.000	98,27	100
3	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Haji	89.992.000	89.884.000	108.000	99,88	100
4	Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.109.365.800	893.950.175	215.415.625	80,58	100
5	Surveillance Penyebab Kematian	48.236.800	48.236.800	0	100	100
VII	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	724.099.038	664.441.388	59.657.650	91,76	100
1	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	188.988.898	182.203.688	6.785.210	96,41	100
2	Evaluasi Dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	285.140.140	241.173.800	43.966.340	84,58	100
3	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	249.970.000	241.063.900	8.906.100	96,44	100
VIII	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN, DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	14.990.192.325	14.255.352.590	734.839.735	95,10	100
	Pengadaan sarana dan Prasarana Puskesmas	5.011.518.015	4.806.242.415	205.275.600	95,90	100
	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK Fisik)	8.783.807.000	8.263.214.175	520.592.825	94,07	100
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1.194.867.310	1.185.896.000	8.971.310	99,25	100
IX	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN	8.582.425.546	8.509.261.548	73.163.998	99,15	100
1	Pelayanan Keluarga Kurang Mampu	8.582.425.546	8.509.261.548	73.163.998	99,15	100
X	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	156.230.778	126.711.700	29.519.078	81,11	
1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi	15.178	0	15.178		
2	Sosialisasi dan Pembinaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	156.215.600	126.711.700	29.503.900	81,11	100
XI	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	546.483.200	504.209.200	42.274.000	92,26	100
1	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Dan Fungsional Bagi Tenaga Kesehatan Dan Non Tenaga Kesehatan	308.553.143	281.100.143	27.453.000	91,10	100
3	Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan Kesehatan	110.252.900	95.452.900	14.800.000	86,58	100
4	Penilaian Kinerja Tenaga Kesehatan Puskesmas	127.677.157	127.656.157	21.000	99,98	100

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
XII	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	1.853.629.250	742.874.850	1.110.754.400	40,08	
1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu	484.966.100	377.323.700	107.642.400	77,80	95
2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak	168.878.000	140.925.200	27.952.800	83,45	98
3	Peningkatan Pelayanan KB	59.820.250	59.340.750	479.500	99,20	100
4	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	1.139.964.900	165.285.200	974.679.700	14,50	61
XIII	PROGRAM PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT	518.300.100	460.250.440	58.049.657	88,80	
1	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	104.808.200	89.051.200	15.757.000	84,97	94,12
2	Pengendalian Penyakit Menular Langsung	139.020.000	113.732.000	25.288.000	81,81	100
3	Fasilitasi Penanggulangan AIDS	274.471.900	257.467.243	17.004.657	93,80	100
XIV	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR	880.948.000	807.350.100	73.597.900	91,65	
1	Peningkatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	551.092.000	493.654.100	57.437.900	89,58	100
2	Peningkatan/ Pencegahan pengendalian NAPZA	234.075.000	225.139.000	8.936.000	96,18	100
3	Peningkatan Pencegahan/ Pengendalian Kesehatan Jiwa	39.972.000	34.288.000	5.684.000	85,78	100
4	Kesehatan Lansia	55.809.000	54.269.000	1.504.000	97,24	100
XV	PROGRAM KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	74.954.000	74.954.000	0	100	
5	Penyelenggaraan Kesehatan Kerja dan Olahraga	74.954.000	74.954.000	0	100	100

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru TA. 2018

3) URUSAN KESEHATAN(RSDI KOTA BANJARBARU)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kesehatan di RSUD Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kesehatan di RSUD Kota Banjarbaru TA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.887.834.640,-	2.003.287.462,-	884.547.178,-	69,38	100
2	Penyediaan alat tulis kantor	82.345.000,-	85.887.000,-	721.200,-	99,12	100
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	78.666.000,-	78.311.000,-	355.000,-	99,55	100
4	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	60.925.600,-	60.652.200,-	273.400,-	99,55	100
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	21.924.000,-	Rp. 17.082.000,-	Rp. 4.842.000,-	77,91	55,2
6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	51.297.000,-	33.781.668,-	17.515.332,-	65,85	100
7	Penyediaan jasa non PNS	1.272.600.000,-	1.264.620.000,-	7.980.000,-	99,37	100
II.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
1	Pengadaan pakaian kerja lapangan	117.500.000,-	117.500.000,-	0,-	100	100

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
III.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata					
1	Pengadaan perlengkapan Rumah tangga Rumah Sakit	190.019.000,-	189.519.200,-	499.800,-	99,74	100
2	Pengadaan Alat Kedokteran/Kesehatan dan Bangunan UTDRS (DAK)	36.683.428.000,-	36.422.361.362,-	261.066.638,-	99,29	100
IV.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit					
1	Pengadaan perlengkapan Rumah tangga Rumah Sakit	190.019.000,-	189.519.200,-	499.800,-	99,74	100
2	Pengadaan Alat Kedokteran/Kesehatan dan Bangunan UTDRS (DAK)	36.683.428.000,-	36.422.361.362,-	261.066.638,-	99,29	100
V.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit					
1	Pemeliharaan rutin/ berkala kebersihan Rumah Sakit	658.444.500,-	633.226.500,-	48.396.500,-	92,90	100
VI.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat (BLUD)					
1.	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Masyarakat (BLUD)	64.054.368.502,-	66.857.878.087,-	(1.134.980.145,-)	104,38	100
	T O T A L	106,159,352,242,	107,764,106,479	1.029.915.081,-	101,51	

Sumber: Laporan Tahunan RSUD Banjarbaru TA. 2018

4) URUSAN PEKERJAAN UMUM (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 4 di bawah:

Tabel 4

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru TA. 2018

No	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
I	Program 1. Pembangunan Jalan dan Jembatan	37.757.909.180	24.875.163.040	12.882.746.140	65.88	100
1	Kegiatan 1. Pembangunan Jalan	26.721.864.980	15.028.510.100	11.693.354.880	56.24	100
2	Kegiatan 2. Pembangunan Jembatan	1.805.995.600	1.683.713.400	122.282.200	93.23	100
3	Kegiatan 3. Pembangunan Jalan (DAK)	9.230.048.600	8.162.939.540	1.067.109.060	88.44	100
II	Program 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	207.480.950	56.470.806,-	151.010.144,-	27.22	100
1	Kegiatan 1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat	207.480.950	56.470.806,-	151.010.144,-	27.22	100
III	Program 3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	69.599.014.336,-	62.599.890.233,-	6.999.124.103,-	89.94	115.66

No	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
1	Kegiatan 1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	13.384.586.304,-	12.452.658.800	931.927.504,-	93.04	100
2	Kegiatan 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)	6.504.686.400	5.864.407.133,-	640.279.267,-	90.16	100
3	Kegiatan 3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	765.363.500	636.804.000	128.559.500	83.20	100
4	Kegiatan 4. Perbaikan Jalan Lingkungan	3.094.013.900	2.718.190.900	375.823.000	87.85	156,-
5	Kegiatan 5. Peningkatan Jalan Lingkungan	42.403.448.000	37.652.097.000	4.751.351.000	88.79	137.98
6	Kegiatan 6. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	3.446.916.232,-	3.275.732.400	171.183.832,-	95.03	100
IV	Program4 Penyediaan Air Minum	12.451.682.600	11.512.793.900	938.888.700	92.46	100
1	Kegiatan 1 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	2.025.589.000	1.810.420.000	215.169.000	89.38	100
2	Kegiatan 2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum	1.413.036.600	1.391.132.600	21.904.000	98.45	100
3	Kegiatan 3 Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Minum (DAK)	9.013.057.000	8.311.241.300	701.815.700	92.21	100
V	Program5 Penyediaan Sistem Air Limbah	10.514.086.000	10.421.938.300	92.147.700	99.12	100
1	Kegiatan 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	1.333.255.000	1.314.455.000	18.800.000	98.59	100
2	Kegiatan 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	875.000.000	869.073.500	5.926.500	99.32	100
3	Kegiatan 3. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK)	8.305.831.000	8.238.409.800	67.421.200	99.19	100
VI	Program 6. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	7.226.294.020	6.234.954.000	991.340.020	86.28	100
1	Kegiatan 1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan irigasi	2.427.779.020	2.280.352.000	147.427.020	93.93	100
2	Kegiatan 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	4.798.515.000	3.954.602.000	843.913.000	82.41	100
VII	Program 7. Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	12.576.931.500	10.377.065.100	2.199.866.400	82.51	100
1	Kegiatan 1. Peningkatan Pengelolaan Sungai dan SDA Lainnya	9.034.208.600	6.928.673.900	2.105.534.700	76.69	100
2	Kegiatan 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sungai dan SDA Lainnya	3.542.722.900	3.448.391.200	94.331.700	97.34	100
VIII	Program 8. Pembangunan Fasilitas Umum	3.984.701.769,-	3.943.127.269,-	41.574.500	98.96	100
1	Kegiatan 1. Pembangunan Fasilitas Umum	3.617.476.000	3.583.069.500	34.406.500	99.05	100
2	Kegiatan 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas Umum	367.225.769,-	360.057.769,-	7.168.000	98.05	100
IX	Program 9. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.199.446.250	1.052.869.797,-	146.576.453,-	87.78	-
1	Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	172.200.000	100.202.740	71.997.260	58.19	-
2	Kegiatan 2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	42.000.000	33.600.000	8.400.000	80	-

No	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
3	Kegiatan 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	14.238.300	13.925.600	312.700	97.80	-
4	Kegiatan 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.398.000	10.205.000	1.193.000	89.53	-
5	Kegiatan 5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.574.750	10.318.088,-	1.256.662,-	89.14	-
6	Kegiatan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.240.000	6.240.000	-	100	-
7	Kegiatan 7. Penyediaan Makanan dan Minuman	175.372.500	158.540.000	16.832.500	90.40	-
8	Kegiatan 8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	326.022.700	325.158.369,-	864.331,-	99.73	-
9	Kegiatan 9. Penyediaan Jasa Non PNS	440.400.000	394.680.000	45.720.000	89.62	-
X	Program 10. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.382.138.539,-	6.464.765.874,-	917.372.665,-	87.57	99.85
1	Kegiatan 1. Pembangunan Rumah Jabatan	200.900.000	196.286.000	4.614.000	97.70	100
2	Kegiatan 2. Pembangunan Gedung Kantor	4.764.600.000	4.021.092.000	743.508.000	84.40	100
3	Kegiatan 3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	51.020.000	43.680.000	7.340.000	85.61	-
4	Kegiatan 4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	226.470.000	204.040.000	22.430.000	90.10	-
5	Kegiatan 5. Pengadaan Mebeleur	67.070.000	59.045.000	8.025.000	88.03	-
6	Kegiatan 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	1.000.000	1.000.000	-	100	100
7	Kegiatan 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.807.628.539,-	1.747.043.039,-	60.585.500	96.65	99.54
8	Kegiatan 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	30.400.000	22.630.150	7.769.850	74.44	-
9	Kegiatan 9. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	213.450.000	153.548.685,-	59.901.315,-	71.94	-
10	Kegiatan 10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	8.600.000	6.650.000	1.950.000	77.33	-
11	Kegiatan 11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	11.000.000	9.751.000	1.249.000	88.65	-
XI	Program 11. Peningkatan Disiplin Aparatur	19.250.000	19.250.000	-	100	-
1	Kegiatan 1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	19.250.000	19.250.000	-	100	-
XII	Program 12. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	124.279.500	51.707.200	72.572.300	41.61	-
1	Kegiatan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	70.000.000	20.216.500	49.783.500	28.88	-
2	Kegiatan 2. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	40.979.600	25.083.100	15.896.500	61.21	-

No	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
3	Kegiatan 3. Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	13.299.900	6.407.600	6.892.300	48.18	-
XIII	Program 13. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	38.255.227.900	33.974.899.100	4.280.328.800	88.81	188.56
1	Kegiatan 1. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	9.939.938.800	8.371.717.800	1.568.221.000	84.22	240.58
2	Kegiatan 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Jalan Lingkungan	3.670.470.600	3.652.718.600	17.752.000	99.52	402.23
3	Kegiatan 3. Normalisasi Drainase Jalan Kota	13.395.386.900	11.704.272.600	1.691.114.300	87.38	100
4	Kegiatan 4. Pembangunan Drainase Jalan Kota	6.953.039.200	5.967.114.800	985.924.400	85.82	100
5	Kegiatan 5. Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Jalan Kota	4.296.392.400	4.279.075.300	17.317.100	99.60	100
XIV	Program 14. Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	93.063.333,-	65.071.800	27.991.533,-	69.92	-
1	Kegiatan 1. Penyusunan/Pendataan sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	37.426.400	27.083.000	10.343.400	72.36	-
2	Kegiatan 2. Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi IUJK	18.999.800	18.714.500	285.300	98.50	-
3	Kegiatan 3. Pengendalian dan Uji Mutu	36.637.133,-	19.274.300	17.362.833,-	52.61	-

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru TA. 2018

5) TATA RUANG (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Tata Ruang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 5 di bawah:

Tabel 5
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Tata Ruang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru TA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
I	Program 1. Pemanfaatan Ruang	322.206.900	254.345.500	67.861.400	78.94	-
1	Kegiatan 1. Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang	126.536.100	76.436.600	50.099.500	60.41	-
2	Kegiatan 2. Survei dan Pemetaan untuk Perencanaan Tata Ruang	195.670.800	177.908.900	17.761.900	90.92	-
II	Program 2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang	92.435.000	57.006.000	35.429.000	61.67	-
1	Kegiatan 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	92.435.000	57.006.000	35.429.000	61.67	-
III	Program 3. Perencanaan Tata Ruang	586.467.000	547.490.475,-	38.976.525,-	93.35	-
1	Kegiatan 1. Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Tata Ruang	586.467.000	547.490.475,-	38.976.525,-	93.35	-
IV	Program 4. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	11.618.345.555,-	8.472.138.100	3.146.207.455,-	72.92	100

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
1	Kegiatan 1. Perencanaan dan Penataan RTH	11.618.345.555,-	8.472.138.100	3.146.207.455,-	72,92	100

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru TA. 2018

6) URUSAN PERUMAHAN (DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perumahan di Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 6 di bawah:

Tabel 6
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perumahan di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru TA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
I	Program Pengembangan Perumahan					
1	Pengendalian Penyelenggaraan Pengembangan Bangunan dan Perumahan	588.499.900	481.857.500	106.642.400	81,9	172,67
II	Program Lingkungan Hidup Sehat Perumahan					
1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan	3.380.000.000	3.167.422.000	212.578.000	93,7	100
III	Program Pengelolaan Arerpal Pemakaman					
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	1.382.537.660	1.372.236.000	10.301.660	99,3	100
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	683.020.000	666.200.000	16.820.000	97,5	100
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	6.906.100	6.906.100	-	100	100
IV	Program Pembangunan/ Pemeliharaan Taman					
1	Peningkatan Penataan Taman Kota	1.070.953.835	1.057.018.520	13.935.315	98,7	100
2	Pemeliharaan Taman Kota	2.471.118.000	2.438.042.500	33.075.500	98,7	100
V	Program Penataan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum					
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Penerangan Jalan Umum	2.669.900.000	2.577.935.764	91.964.236	96,6	100
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	3.721.972.000	3.667.495.000	54.477.000	98,5	100
VI	Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh					
1	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	3.365.706.500	3.331.897.700	33.808.800	99	100
2	Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh	24.685.600	24.653.600	32.000	99,9	100
	Koordinasi penyelenggaraan permukiman kumuh	164.259.600	157.605.401	6.654.199	95,9	100

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Banjarbaru TA. 2018

7) URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARBARU)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 7 di bawah:

Tabel 7

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru TA. 2018

No	Program/Kegiatan	Anggaran			Persentase	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran (%)	Fisik (%)
1	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal					
1	Peningkatan kerjasama dengan aparat kerpamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	360.603.200	335.303.200	25.300.000	91,41%	100%
2	Patroli kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	753.305.800	752.745.800	5650.000	99,99%	100%
3	Koordinasi dan pelaksanaan pengamanan acara insidentil	0	0	0	0%	100%
2	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan kerpamanan					
1	Sosialisasi Pentingnya Keberadaan dan Fungsi satlinmas dalam Masyarakat	59.788.600	34.728.600	25.060.000	14,99%	14,99%
3	Program Peningkatan Kerpamanan dan Kenyamanan Lingkungan					
1	Pembangunan pos / jaga ronda	48.070.000	47.450.000	620.000	98,14%	98,14%
2	Pelatihan pengendalian kerpamanan dan kenyamanan lingkungan swakarsa	27.316.750	27.316.750	0	53,53%	53,53%
3	Pengendalian kerpamanan lingkungan	0	0	0	0	0
4	Pengamanan rutin rumah dinas dan aset	791.478.600	791.470.600	8.000	99,99%	100%
5	Pengamanan pejabat	59.130.000	59.084.000	46.000	99,92%	100%
4	Program penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota					
1	penegakan peraturan daerah, keputusan walikota, dan penertiban perijinan	195.391.400	186.391.400	9.000.000	99,99%	100%
2	Pengawasan potensi pelanggaran perda dan perwali	95.353.400	95.353.400	0	99,95%	100%
3	Pembinaan dan penyuluhan/sosialisasi perda /perwali	39.200.600	38.800.600	400.000	99,36%	100%
5	Program Penanggulangan Kebakaran					
	Peningkatan Kesiagaan Penanggulangan Kebakaran	600.144.910	455.708.079	144.436.831	73,08%	73,08%

Sumber: Laporan Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2018

8) URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 8 di bawah:

Tabel 8

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru TA. 2018

No	Program/Kegiatan	Anggaran			Persentase	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran (%)	Fisik (%)
I	Program Peningkatan Kerpamanan dan Kenyamanan Lingkungan	382.437.600	334.436.400	48.001.200	87,45	80,25
1	Pengendalian kerpamanan lingkungan	270.465.800	241.139.600	29.326.200	89,16	100
2	Pemantauan kegiatan orang asing, LSM/NGO dan Lembaga Asing	44.578.600	31.003.600	13.575.000	69,55	60
3	sosialisasi Peraturan /Kebijakan Pemerintah	67.393.200	62.293.200	5.100.000	92,43	80,75
II	Program Pengembangan Wawasan	262.538.100	226.628.894	35.909.206	86,32	92,55

	Kebangsaan					
1	Sosialisasi pendidikan wawasan kebangsaan	129.024.650	112.124.650	16.900.000	86,90	77,66
2	Sosialisasi peningkatan kesadaran bela negara	28.754.250	28.754.250	-	100	100
3	Gugus tugas gerakan revolusi mental	104.759.200	85.749.994	19.009.206	81,85	100
III	Program Pendidikan Politik Masyarakat	218.927.000	141.411.300	77.515.700	64,59	83,95
1	Penyuluhan kepada Masyarakat	12.929.100	12.829.100	100.000	99,23	100
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	24.019.000	18.019.000	6.000.000	75,02	100
3	Sosialisasi Perundang-undangan bantuan keuangan parpol	31.781.900	29.601.500	2.180.400	93,14	100
4	sosialisasi Perundang-undangan tentang pemilu	33.900.000	29.580.000	4.320.000	87,26	71,00
5	Pengukuran Indeks demokrasi Indonesia	28.852.000	13.683.200	15.168.800	47,43	66,00
6	Dukungan pelaksanaan pemilu	87.445.000	37.698.500	49.746.500	43,11	66,70
IV	Program Peningkatan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	155.213.400	128.996.000	26.217.400	83,11	98,66
1	Rakor, Raker, Sosialisasi Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	14.490.800	11.680.800	2.810.000	80,61	100
2	Monitoring dan pelayanan administrasi pendaftaran ormas, Verifikasi Faktual dan penerbitan SKT	53.551.400	31.763.000	21.788.400	59,31	96,00
3	Peningkatan toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama.	87.171.200	85.552.200	1.619.000	98,14	100

Sumber: Laporan Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TA. 2018

9) URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 9 di bawah:

Tabel 9
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru TA. 2018

No	Program / Kegiatan	Anggaran			Presentasi (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
	2	3	4	5	6	7
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	379.514.200	379.364.846	149.354	99,96	100
	Penyediaan jasa,komunikas,sumber daya air dan listrik	23.600.000	23.533.554	66.466	99,72	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	51.000.000	51.000.000	-	100	100
	Penyediaan alat tulis kantor	16.581.000	16.581.000	-	100	100
	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	17.480.000	17.469.000	11.000	99,94	100
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	34.996.200	34.996.200	-	100	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.600.000	3.600.000	-	100	100
	Penyediaan makanan dan minuman	41.307.000	41.251.000	56.000	99,86	100
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	166.950.000	166.934.092	15.908	99,99	100
	Penyediaan jasa non pns	24.00.000	24.000.000	-	100	100
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	311.922.000	286.873.700	25.048.300	91,97	100
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	144.450.000	119.450.000	25.000.000	82,69	100
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	32.768.000	32.739.700	28.300	99,91	100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	118.972.000	118.952.000	20.000	99,98	100
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.370.000	4.370.000	-	100	100
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8.740.000	8.470.000	-	100	100
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2.622.000	2.622.000	-	100	100

No	Program / Kegiatan	Anggaran			Presentasi (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
3	Program peningkatan disiplin aparatur	78.500.000	62.560.000	15.940.000	76,69	100
	Pengadaan pakaian khusus petugas pelayanan	78.500.000	62.560.000	15.940.000	76,69	100
4	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	27.612.700	27.606.700	6.000	99,98	100
	Penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan	21.102.700	21.102.700	-	100	100
	Perencanaan dan pelaporan manajemen aset/barang	6.510.000	6.504.000	6.000	99,91	100
5	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	436.085.300	256.121.000	257.635.300	99,88	100
	pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	178.500.000	178.450.000	50.000	99,97	100
	pengadaan sarana dan prasarana evakuasi	68.460.000	67.960.000	500.000	99,27	100
	peningkatan kesiagaan penanggulangan bencana	89.725.800	88.772.000	953.000	98,94	100
	simulasi dan peningkatan keterampilan aparat penanggulangan bencana	99.399.500	99.389.000	10.500	99,99	100
6	Program penanganan tanggap darurat bencana	403.654.000	397.283.000	6.371.000	98,42	100
	Pengerahan SDM dan Logistik untuk pemulihan darurat penanggulangan bencana	102.858.000	98.653.000	4.205.000	95,91	100
	Pos komando siaga bencana	300.796.000	298.630.000	2.166.000	99,28	100
7	Program pasca bencana	46.908.000	40.873.000	6.035.000	88,07	100
	Pendataan dampak kejadian bencana	32.793.000	26.758.000	6.035.000	81,60	100
	Pengembangan partisipasi dan kerjasama rehabilitasi dan rekonstruksi	14.115.000	14.115.000	-	100	100

Sumber: Laporan Tahunan BPBD TA. 2018

10) URUSAN SOSIAL (DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Sosial di Dinas Sosial Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 10 di bawah:

Tabel 10
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Sosial di Dinas Sosial
Kota Banjarbaru TA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
I	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya					
1	Pendampingan Program Keluarga Harapan	216.615.600	201.351.600	15.264.000	92,95	100%
2	Santunan Tali Asih Kepada Masyarakat	444.000.000	375.175.000	68.825.000	84,50	100%
3	Peningkatan Kualitas Pendataan PMKS	111.793.200	33.003.200	78.790.000	29,52	100%
4	Pengumpulan, Pengolahan Data, Eskpose dan Pelaporan	386.462.000	330.561.000	55.901.000	85,54	100%
5	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Anak Terlantar dan Keluarga Miskin	46.220.000	30.818.000	15.402.000	66,68%	100%
II	Program Perlindungan Sosial					
1	Penyediaan Distribusi dan Konsumsi Beras untuk Keluarga miskin	275.632.000	210.940.400	64.691.600	76,53	100%
2	Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	87.535.500	78.178.000	9.357.500	89,31	100%

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
III	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial					
1	Pembinaan dan Rehabilitasi Para Lanjut Usia (LANSIA)	115.973.800	115.973.800	0	100	100%
2	Penjangkauan Penyalahgunaan Narkoba	62.817.000	57.467.000	5.350.000	91,48	100%
3	Pembinaan dan rehabilitasi para Gelandangan, pengemis dan Orang Terlantar	42.998.900	16.248.900	26.750.000	37,79	100%
4	Pembinaan dan Pelatihan bagi Anak Jalanan	21.845.000	0	21.845.000	0	0
IV	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma					
1	Pendidikan dan pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	89.100.000	14.750.000	74.350.000	16,35	25%
V	Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Masyarakat) Lainnya					
1	Pelaksanaan Rumah Aman	31.737.500	0	31.737.000	0%	
2	Pelaksanaan Rumah Singgah	387.549.800	290.839.629	96.710.171	75,05	100%
VI	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial					
1	Pembinaan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat	43.684.000	33.551.000	10.133.000	76,80	100%
2	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial	36.809.000	19.388.000	17.421.000	52,67	100%
VII	Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan serta Kesetiakawanan					
1	Pembinaan Veteran dan Janda Veteran	129.142.500	127.662.000	1.480.500	98,85	100%
2	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	131.888.500	106.377.500	25.511.000	80,66	100%
3	Pemeliharaan Taman makam Pahlawan	88.168.900	85.338.900	2.830.000	96,79	100%

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Sosial Kota Banjarbaru TA. 2018

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

1) URUSAN KETENAGAKERJAAN (DINAS KOPERASI, UKM, DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Ketenagakerjaan di Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 11 di bawah:

Tabel 11
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Ketenagakerjaan di Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru TA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
I	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
1	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja	544.826.600	542.066.800	2.759.800	99,49	100 %
II	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA					

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
1	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	53.218.000	53.216.300	1.700	100	80 %
2	Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbaris Masyarakat	218.815.480	216.451.250	2.364.230	98,92	100 %
III	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN					
1	Fasilitas Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	42.474.600	38.873.400	3.601.200	91,52	100
2	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	43.430.700	38.605.100	4.825.600	88,89	100
3	Sosialisasi Upah Minimum Provinsi Kalimantan Selatan	23.994.000	17.057.500	6.936.500	71,09	100
4	Pembinaan dan Penyuluhan Kelembagaan Ketenagakerjaan	9.473.900	9.472.900	1.000	99,99	100
5	Penyuluhan Kelembagaan Ketenagakerjaan	15.505.200	13.905.200	1.600.000	89,68	100
6	Forum Lembaga Kerjasama Tripartit	23.512.300	20.287.300	3.225.000	86,28	100
7	Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	15.818.000	12.640.000	3.178.000	79,91	100
8	Pembinaan Jaminan Sosial	25.184.100	7.264.100	17.920.000	28,84	100

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja Kota BanjarbaruTA. 2018

2) URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANJARBARU)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 12 di bawah:

Tabel 12

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru TA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
I	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN					
1	Kota Layak Anak	57.381.000	56.841.000	540.000	99,1 %	100 %
	Pembinaan P2WKSS & GSI	72.119.300	72.119.300	0	100 %	100 %
	Pembinaan Perempuan Indonesia Maju Mandiri	12.524.800	12.024.800	500.000	96,0 %	100 %
	Perlindungan Perempuan dan Anak	32.171.500	27.671.500	4.500.000	86,1 %	90%
II	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN					
1	Sosialisasi Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	34.471.300	26.956.300	7.515.000	78,2 %	80 %
2	Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	200.000.000	199.450.000	550.000	99,8 %	100 %
3	Pembinaan Organisasi DWP	200.000.000	193.118.500	6.881.500	96,6 %	100 %
4	Pembinaan Organisasi Gatriwara	200.000.000	196.198.500	3.801.500---	98,1 %	100 %

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
5	Pembinaan Organisasi Perempuan	62.822.550	62.822.550	0	100 %	100 %

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru TA. 2018

3) URUSAN KETAHANAN PANGAN (DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARBARU)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Ketahanan Pangan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 13 di bawah:

Tabel 13
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Ketahanan Pangan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Dan Perikanan Kota Banjarbaru TA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
I	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	460.216.230	450.597.630	9.618.600	97,91	100
1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Penyuluhan Pertanian (DAK)	125.000.000	123.736.000	1.264.000	98,99	100
2	Peningkatan Kualitas SDM dan Penerapan Metode Informasi UPPT Banjarbaru	33.367.800	32.107.800	1.260.000	96,22	100
3	Peningkatan Kualitas SDM dan Penerapan Metode Informasi UPPT Cempaka	31.306.600	31.306.000	600	100	100
4	Peningkatan Kualitas SDM dan Penerapan Metode Informasi UPPT Liang Anggang	34.355.800	33.387.800	968.000	97,18	100
5	Peningkatan Kualitas SDM dan Penerapan Metode Informasi UPPT Landasan Ulin	31.066.800	31.066.800	0	100	100
6	Peningkatan Kemampuan Lembaga Penyuluhan, Pendampingan Petani, dan Pelaku Agribisnis	205.119.230	198.993.230	6.126.000	97,01	100
II	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	745.027.360	737.916.390	7.110.970	99,05	100
1	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	29.978.200	29.978.200	0	100	100
2	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	145.560.000	141.120.000	4.440.000	96,95	100
3	Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	35.852.600	34.727.600	1.125.000	96,86	100
4	Peningkatan Mutu dan Kerpamanan Pangan	52.749.770	52.586.400	163.370	99,69	100
5	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	133.898.090	132.848.090	1.050.000	99,22	100
6	Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Landasan Ulin	23.497.000	23.497.000	0	100	100
7	Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Banjarbaru	24.603.100	24.603.100	0	100	100
8	Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Cempaka	15.863.000	15.863.000	0	100	100
9	Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Liang Anggang	26.850.000	26.850.000	0	100	100
10	Pendataan dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan	52.440.000	52.440.000	0	100	100
11	Pendataan Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	15.122.800	15.122.000	800	99,99	100
12	Ketersediaan Pangan Masyarakat	140.700.800	140.369.000	331.800	99,76	100
13	Pengembangan Informasi dan Kemitraan Pelaku Usaha Pertanian	47.912.000	47.912.000	0	100	100

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	163.031.000	135.012.000	28.019.000	82,81	100
1	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	163.031.000	135.012.000	28.019.000	82,81	100

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Dan Perikanan Kota Banjarbaru TA. 2018

4) URUSAN LINGKUNGAN HIDUP (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 14 di bawah:

Tabel 14
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru TA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
I	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	13.558.279.050	12.127.009.999	1.431.269.051	89,44	100
1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1.398.910.000	1.343.639.999	55.270.001	96,05	100
2	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	8.493.907.675	7.426.318.100	1.067.589.575	87,43	100
3	Peningkatan Pengelolaan Air Limbah dan Sampah TPA	3.055.461.375	2.799.167.100	256.294.275	91,61	100
4	Pemeliharaan Rutin TPS dan Kontainer	285.000.000	275.209.000	9.791.000	96,56	100
5	Peningkatan pengelolaan Instalasi Lumpur tinja (IPLT)	325.000.000	282.675.800	42.324.200	86,98	100
II	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	430.704.850	419.387.900	11.316.950	97,37	100
1	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura	151.322.000	146.630.150	4.691.850	96,90	100
2	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	49.199.000	48.649.000	550.000	98,88	100
3	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	18.283.000	18.283.000	0	100	100
4	Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih	46.889.000	46.889.000	0	100	100
5	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	51.821.400	46.152.000	5.669.400	89,06	100
6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	15.927.500	15.781.800	145.700	99,09	100
7	Kota Bersih, Hijau dan Sehat	60.176.000	59.926.000	250.000	99,58	100
8	Pembinaan dan Koordinasi Penegakan Hukum	37.086.950	37.076.950	10.000	99,97	100
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	222.633.828	217.129.728	5.504.100	97,53	100
1	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	93.917.900	91.406.000	2.551.900	97,33	100
2	Pengelolaan Kerpanekaragaman Hayati dan Ekosistem	34.959.928	34.947.728	12.200	99,97	100
3	Penilaian Kantor berwawasan lingkungan (Eco-Office Award)....	93.756.000	90.776.000	2.980.000	96,82	100
V	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	200.258.500	179.783.500	20.475.000	89,78	100
1	Peningkatan Edukasi dan komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan	180.180.500	161.725.500	18.445.000	89,76	100
2	Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah	20.078.000	18.058.000	2.020.000	89,94	100
VI	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	107.543.500	106.065.750	1.477.750	96	100

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
1	Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	49.285.600	47.807.850	7.995.000	97	100
2	Pemantauan Kualitas Lingkungan	58.257.900	58.257.900	0	100	100
VII	PROGRAM KUALITAS KEBERSIHAN LINGKUNGAN	5.766.525.792	5.373.525.740	393.000.052	93.18	100
1	Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Kebersihan Kota	3.045.483.092	2.742.617.550	302.865.542	90,06	100
2	Pemeliharaan kebersihan Jalan dan Saluran Drainase	557.727.300	546.824.800	10.902.500	98,05	100
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebersihan	494.602.400	463.291.590	31.310.810	93.67	100
4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Kebersihan Lingkungan	1.668.713.000	1.620.791.800	47.921.200	97,13	100

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru TA. 2018

5) URUSAN PERTANAHAN (BAGIAN KERJASAMA DAN AGRARIA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARBARU)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pertanahan di Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 15 di bawah:

Tabel 15

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pertanahan di Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru TA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
I	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	10,625,539,700	9,480,207,176	1,145,332,524	89.22%	90.32%
1	Pembakuan Nama Rupa Bumi	63.655.600	9.585.600	54.070.000	15,06	100.00%
2	Penataan dan Penegasan Tata Batas Wilayah	354.176.400	256.318.400	97.858.000	72,37	40.90%
3	Penyelesaian Permasalahan Tanah dan Sertifikasi Tanah	1.139.929.150	1.039.289.423	100.639.727	91,17	91.37%

Sumber: Laporan Tahunan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru TA. 2018

6) URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL (DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA BANJARBARU)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 16 di bawah:

Tabel 16

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru TA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
I	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
1	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	276.562.105,-	249.845.400	26.716.705,-	9,66	90,33
2	Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan	619.054.000	544.915.000	74.139.000	11,97	88,02
3	Sosialisasi Kebijakan	64.600.00	63.600.00	1.000.00	1,54	98,45

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
	Kependudukan					
4	Penatausahaan Data Kependudukan	72.547.200	67.622.000	4.925.200	6,78	93,21
5	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	698.839.000	638.492.947,-	60.346.053,-	8,63	91,50
6	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil	173.450.000	136.310.000	37.140.000	21,41	78,58

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru TA. 2018

7) URUSAN ADMINISTRASI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANJARBARU)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 17 di bawah:

Tabel 17

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru TA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
I	PROGRAM KELUARGA BERENCANA					
1	Bimbingan Teknis Kelompok UPPKS	79.758.000	79.748.000	10.000	99,9	100%
2	Kesehatan Reproduksi Remaja	28.956.000	28.956.000	0	100	100%
3	Kampung KB	31.858.000	31.454.000	404.000	98,8	100%
4	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Keluarga Berencana	154.766.000	146.153.000	8.613.000	94,5 %	100%
II	PROGRAM PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA					
1	Penyediaan Data Informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana	102.333.400	85.049.500	17.283.900	82,3 %	90 %
2	Penyusunan Laporan Kependudukan dan Keluarga Berencana	26.507.750	7.157.750	19.350.000	27,0 %	30%
III	PROGRAM PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN					
1	Pembinaan Forum Kerjasama Pengendalian Kependudukan	32.689.300	32.689.000	0	100 %	100 %
IV	PROGRAM PENINGKATAN DUKUNGAN SARANA PENINGKATAN PELAYANAN KB					
1	Pembangunan Alih/Fungsi Balai Penyuluh (DAK)	426.098.000	423.005.000	3.093.000	99,3 %	100 %
V	PROGRAM PENINGKATAN DUKUNGAN OPERASIONAL KKBPK LINI LAPANGAN					
1	Operasional Bagi Balai Penyuluh KB (DAK Non Fisik)	821.390.000	514.895.000	306.495.000	62,7 %	60 %

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru TA. 2018

8) URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANJARBARU)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 18 di bawah:

Tabel 18

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru TA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
I	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN					
1	Peringatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	23.060.700	22.340.700	720.000	96,9 %	100 %
2	Lomba Kelurahan	155.154.000	149.089.000	6.065.000	96,1 %	100 %
3	Pembinaan Kelembagaan LPM Kelurahan	215.672.300	213.002.700	2.670.000	98,8 %	100 %
4	Gerakan Terpadu Pembangunan Masyarakat untuk Pengentasan Kemiskinan	22.638.300	16.863.300	5.775.000	74,5 %	80 %
II	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT					
1	Pembinaan Kelompok Kerja Nasional Posyandu	188.412.600	186.912.600	1.500.000	99,2 %	100
2	Pembinaan Peran PKK Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	716.119.600	714.943.950	1.175.650	99,8 %	100
3	Gelar Sosialisasi Tepat Guna	88.360.100	87.690.100	670.000	99,3 %	100

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru TA. 2018

9) URUSAN PERHUBUNGAN (DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perhubungan di Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 19 di bawah:

Tabel 19

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perhubungan di Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru TA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
I	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN					
1	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	54.438.975	48.477.000	5.961.975	89,05%	100%
2	Pelaksanaan Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN)	24.113.200	12.566.200	11.547.000	52,11%	100%
II	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ			-		
1	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Halte/Shelter	109.250.000	93.588.000	15.662.000	85,66%	100%
2	Rehabilitasi/pemeliharaan rambu jalan dan lampu peringatan	65.550.000	62.608.500	2.941.500	95,51%	100%
III	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN			-		
1	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum	46.289.000	42.319.000	3.970.000	91,42%	100%

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
	jalan raya					
2	Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	43.335.500	43.132.500	203.000	99,53%	100%
3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	3.532.783.000	3.320.765.850	212.017.150	94,00%	100%
4	Pemilihan pelajar pelopor berlalu lintas	38.840.000	28.593.000	10.247.000	73,62%	100%
IV	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS			-		
1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	113.236.000	105.589.300	7.646.700	93,25%	100%
2	Pengadaan lampu peringatan jalan	129.966.500	128.699.600	1.266.900	99,03%	100%
3	Pengadaan marka jalan	87.398.000	85.646.000	1.752.000	98,00%	100%
4	Pengamanan lalu lintas jalan dan pengawalan	129.600.000	129.582.000	18.000	99,99%	100%
V	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR			-		
1	Pengawasan dan pembinaan kelaikan kendaraan bermotor	39.644.600	39.644.600	-	100%	100%
2	Pendataan/Pembinaan Usaha Perbengkelan Umum	21.800.200	21.300.200	500.000	97,71%	100%
3	Monitoring dan pembinaan usaha perbengkelan umum	41.077.600	38.019.600	3.058.000	92,56%	100%

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Perhubungan Kota BanjarbaruTA. 2018

10) URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DINAS KOMINFO KOTA BANJARBARU)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Komunikasi dan Informatika di Dinas Kominfo Kota BanjarbaruTA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 20 di bawah:

Tabel 20
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Komunikasi dan Informatika di Dinas Kominfo Kota BanjarbaruTA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
I	PROGRAM LAYANAN PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH					
1	Pemantauan Isu Publik Pendapat Umum dan Aduan Masyarakat	40.000.000	40.000.000	0	100	100
II	PROGRAM LAYANAN PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH					
1	Fasilitasi dan Konsultasi Sumber Daya Komunikasi Publik	90.262.500	90.184.699	77.801	99,91	100
2	Pengelola dan Pemanfaatan Saluran Komunikasi Publik	29.804.900	29.781.150	23.750	99,92	
3	Pelayanan Permintaan Informasi Publik	35.044.900	34.294.900	750.000	97,86	
V	PROGRAM LAYANAN PENINGKATAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEMANFAATAN TIK					
1	Penyelenggaraan Akses Internet dan Intranet Pemerintah Daerah	343.400.000	322.869.488	20.530.512	94,02	84,03
2	Penyelenggaraan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery dan TIK	5.354.998.880	4.993.511.427,81	361.487.452,19	93,25	
3	Penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen Yang Terintegrasi	69.520.000	26.546.000	42.974.000	38,18	

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
VI	PROGRAM LAYANAN PENJAMINAN KEDAULATAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH					
1	Penyelenggaraan Nama Domain dan Sub Domain Bagi Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah	95.000.000	86.900.000	8.100.000	91,47	
2	Penyelenggaraan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten / Kota	382.510.000	356.439.760	26.070.240	93,18	
3	Perumusan Regulasi, Kebijakan dan Monev di Bidang Nama Domain, Sub Domain serta Website dan Konten	6.103.700	5.127.500	976.200	84,01	
VII	PROGRAM LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEMANFAATAN TIK					
1	Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik Berbasis Elektronik	234.290.000	183.016.000	51.274.000	78,12	100
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI					
1	Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan	75.889.800	75.889.800	0	100	
2	Penyusunan dan Analisis Data / Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi	60.835.625	60.835.400	225	99,99	
3	Penyusunan Profil Daerah	19.873.800	19.873.800	0	100	
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN PERSANDIAN NASIONAL					
1	Pembinaan Penyelenggaraan Persandian	50.260.000	19.105.250	31.154.750	38,01	
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Kerpamanan Informasi Berklasifikasi	43.118.000	22.622.000	20.496.000	52,47	
3	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Persandian	14.250.000	6.964.000	7.286.000	48,87	

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kominfo Kota BanjarbaruTA. 2018

11) URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (DINAS KOPERASI, UKM, DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Ketenagakerjaan di Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 21 di bawah:

Tabel 21
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Ketenagakerjaan di Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru TA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
I	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif					
1	Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	13.088.000	11.488.000	1.600.000	87,78	100
	Pengembangan Usaha Kecil Menengah	206.000.000	204.000.000	2.000.000	99,03	100
	Perluasan Akses Pasar bagi produk UMKM	42.100.000	40.100.000	2.000.000	95,25	100
II	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah					
1	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	167.490.200	163.190.200	4.300.000	97,43	100
2	Sarana Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	365.237.560	363.385.000	1.852.560	99,49	100

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
III	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah					
1	Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	34.868.700	32.708.700	2.160.000	93,81	100
2	Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Masyarakat	55.804.900	43.924.900	11.880.000	78,71	100
IV	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	329.740.200	325.512.400	4.227.800	98,72	100
1	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi berprestasi	65.550.000	64.050.000	1.500.000	97,71	100
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	13.590.600	13.590.600	0	100	100
3	Penyuluhan Perkoperasian	100.550.000	100.212.200	337.800	99,66	100
4	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi	84.740.000	82.450.000	2.290.000	97,30	100
5	Pembinaan dan Pembinaan Kelompok Usaha Rakyat	65.309.600	65.209.600	100.000	99,85	100

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru TA. 2018

12) URUSAN PENANAMAN MODAL (DINAS PM DAN PTSP KOTA BANJARBARU)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Penanaman Modal di Dinas PM dan PTSP Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 22 di bawah:

Tabel 22
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Penanaman Modal di Dinas PM Dan PTSP
Kota Banjarbaru TA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
I	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI					
1	Penyelenggaraan Pameran Investasi	202.950.000	199.765.000	0	98,43%	100
II	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI			0	100%	100
1	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	18.926.000	18.926.000	0	100%	100
2	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	44.459.300	42.059.300	0	94,60%	100

Sumber: Laporan Tahunan Dinas PM Dan PTSP Kota Banjarbaru TA. 2018

13) URUSAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (DINAS PM DAN PTSP KOTA BANJARBARU)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pelayanan Perijinan Terpadu di Dinas PM dan PTSP Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 23 di bawah:

Tabel 23
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pelayanan Perijinan Terpadu di Dinas PM dan PTSP Kota Banjarbaru TA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
I	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT					
1	Pendataan dan Survey Perizinan	75.293.300	73.797.550	1.495.750	98.01%	100%
2	Pendataan dan Survey Perizinan Reklame	114.725.000	85.194.000	29.531.000	74.25%	80%
3	Pengukuran IKM	33.649.000	33.649.000	0	100%	100%
4	Pengolahan data perizinan	317.791.400	293.528.400	24.263.000	92.36%	100%
5	Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Perizinan Tertentu	94.468.800	58.154.800	36.314.000	61.55%	75%

Sumber: Laporan Tahunan Dinas PM Dan PTSP Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru TA. 2018

14) URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN, PARIWISATA KOTA BANJARBARU)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 24 di bawah ini:

Tabel 24
Alokasi dan Realisasi Anggaran Kepemudaan dan Olahraga di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata Kota Banjarbaru TA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
I	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN					
1	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	736.368.000	700.945.500	35.422.500	95.19	100
2	Peningkatan Keterampilan dan Peran Serta Pemuda	239.351.000	239.151.000	200.000	99.92	100
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA					
1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	1.661.065.367	1.633.542.873	27.522.494	98.34	100
III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA					
1	Pembinaan Cabang Olahraga berprestasi di Tingkat Daerah	578.759.195	521.548.500	57.210.695	90.11	100
2	Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat	88.767.600	87.292.600	1.475.000	79.27	100

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata Kota Banjarbaru TA. 2018

15) URUSAN BUDAYA (DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA KOTA BANJARBARU)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Budaya di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 25 di bawah:

Tabel 25

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Budaya di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Banjarbaru TA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
I	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA					
1	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	467.900.000	462.250.000	5.650.000	98,79	100
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	249.035.850	242.835.850	6.200.000	97,51	100
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA					
1	Pelestarian Peninggalan Sejarah	43.700.000	39.620.000	4.080.000	90,66	100

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Dan Pariwisata Kota Banjarbaru TA. 2018

16) URUSAN PERPUSTAKAAN (DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA BANJARBARU)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perpustakaan di Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 26 di bawah:

Tabel 26

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perpustakaan di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru TA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
I	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	491.431.000	470.548.000	20.883.000	95,75	95,75
1	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	40.567.000	40.567.000	-	100	100
2	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	93.278.000	92.968.000	310.000	99,67	99,67
3	Suervisi, Pembinaan & Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah & Perpustakaan Masyarakat	41.366.000	34.956.000	6.770.000	83,63	83,63
4	Publikasi & Sosialisasi Minat & Budaya Baca	269.970.000	269.877.000	93.000	99,97	99,97
5	Pengembangan Perpustakaan	46.250.000	32.540.000	13.710.000	70,36	70,36
II	PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN JASA PERPUSTAKAAN & INFORMASI	124.508.000	110.918.000	13.590.000	89,09	89,09
1	Peningkatan Layanan Perpustakaan	124.508.000	110.918.000	13.590.000	89,09	89,09

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru TA. 2018

17) URUSAN KEARSIPAN (DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA BANJARBARU)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kearsipan di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 27 di bawah:

Tabel 27
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kearsipan di Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru TA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
I	Program Perbaikan Sistem Administrasi KEARSIPAN	36.201.000	19.212.250	16.988.750	53,07	53,07
1	Pengadaan Sarana Penyimpanan	36.201.000	19.212.250	16.988.750	53,07	53,07
II	Program Penyelamatan & Pelestarian dokumen/Arsip Daerah	56.024.000	36.975.500	19.048.500	66,00	66,00
1	Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	8.547.000	7.525.500	1.048.500	87,77	87,77
2	Pendataan & Penataan Dokumen/Arsip Daerah	47.450.000	29.450.000	18.000.000	62,07	62,07
III	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana & Prasarana KEARSIPAN	15.450.000	15.241.825,-	208.175,-	98,65	98,65
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	15.450.000	15.241.825,-	208.175,-	98,65	98,65

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru TA. 2018

18) URUSAN STATISTIK (DINAS KOMINFO KOTA BANJARBARU)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Statistik di Dinas Kominfo Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 28 di bawah:

Tabel 28
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Statistik di Dinas Kominfo Kota Banjarbaru TA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
I	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI					
1	Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan	75.889.800	75.889.800	0	100	
2	Penyusunan dan Analisis Data / Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi	60.835.625	60.835.400	225	99,99	
3	Penyusunan Profil Daerah	19.873.800	19.873.800	0	100	

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kominfo Kota Banjarbaru TA. 2018

19) URUSAN PERSANDIAN (DINAS KOMINFO KOTA BANJARBARU)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Persandian di Dinas Kominfo Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 29 di bawah:

Tabel 29
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Persandian di Dinas Kominfo Kota Banjarbaru TA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
I	PROGRAM PENGEMBANGAN PERSANDIAN NASIONAL					
1	Pembinaan Penyelenggaraan Persandian	50.260.000	19.105.250	31.154.750	38,01	
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Kerpamanan Informasi Berklasifikasi	43.118.000	22.622.000	20.496.000	52,47	
3	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Persandian	14.250.000	6.964.000	7.286.000	48,87	

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kominfo Kota Banjarbaru TA. 2018

C. URUSAN PILIHAN

1) URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARBARU)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kelautan dan Perikanan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 30 di bawah ini:

Tabel 30

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perikanan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarbaru TA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
I	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	488.812.400	485.967.400	2.845.000	99,42	100
1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan	299.200.000	297.317.500	1.882.500	99,37	100
2	Pembinaan dan Pengawasan Kelestarian Sumber Daya Perikanan	25.021.000	24.908.500	112.500	99,55	100
3	Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar	164.591.400	163.741.400	850.000	99,48	100
II	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	174.961.864,00	160.241.864,00	14.720.000	91,59	87,50
1	Peningkatan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	135.768.000	135.328.000	440.000	99,68	100
2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Benih Ikan	39.193.864,00	24.913.864,00	14.280.000	63,57	75

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarbaru TA. 2018

2) URUSAN PERTANIAN DAN PETERNAKAN (DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARBARU)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pertanian dan Peternakan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 31 di bawah:

Tabel 31

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pertanian dan Peternakan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarbaru TA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
I	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1.455.590.200	1.212.567.200	243.023.000	83,30	94,28
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	8.526.000	8.526.000	0	100	100
2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK)	620.487.000	560.487.000	60.000.000	90,33	100
3	Pengembangan Upaya Khusus Padi,Jagung dan Kedelai	143.484.000	132.944.000	10.540.000	92,65	100
4	Pengembangan Sarana dan Prasarana Holtikultura	168.237.500	157.746.500	10.491.000	93,76	100
5	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Holtikultura	319.612.000	161.620.000	157.992.000	50,57	60
6	Pengembangan Benih/Bibit Unggul Holtikultura	82.629.700	82.399.700	230.000	99,72	100
7	Pengembangan Usaha Perkebunan	112.614.000	108.844.000	3.770.000	96,65	100
II	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	144.156.400	136.176.700	7.979.700	94,46	100
1	Pembinaan Kesehatan Masyarakat Veteriner	26.760.000	26.342.500	417.500	98,44	100
2	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Zoonosis	40.559.200	39.875.200	684.000	98,31	100
3	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Masyarakat	37.005.200	35.693.000	1.312.200	96,45	100
4	Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Kesehatan Ternak Milik Masyarakat	39.832.000	34.266.000	5.566.000	86,03	100

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
III	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	640.641.800	637.272.800	3.369.000	99,47	100
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak	130.000.000	129.350.000	650.000	99,50	100
2	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	149.500.000	148.054.000	1.446.000	99,03	100
3	Pengembangan Agribisnis Peternakan	99.336.800	99.316.800	20.000	99,98	100
4	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Melalui Pembibitan dan Penetasan	261.805.000	260.552.000	1.253.000	99,52	100

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Dan Perikanan Kota Banjarbaru TA. 2018

3. URUSAN PARIWISATA (DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, PARIWISATA KOTA BANJARBARU)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pariwisata di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 32 di bawah:

Tabel 32

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perdagangan di Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru TA. 2018

No	Program/Kegiatan	Anggaran			Prosentase	
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	Anggaran (%)	Fisik (%)
I.	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA					
1	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Daerah	335.109.900	293.879.900	41.230.000	87.70	100
2	Penyelenggaraan seleksi duta	297.475.000	292.048.000	5.427.000	98.18	100
II.	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA					
1	Pengembangan Jenis & Paket Wisata Unggulan	48.185.368	40.704.000	7.481.368	99.61	100
2	Penataan Kawasan dan Amenitas Pariwisata (DAK)	1.517.564.500	1.446.869.840	70.694.660	80.85	100
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN					
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	149.996.000	133.911.500	16.084.500	98.9	100

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata Kota Banjarbaru TA. 2018

4. URUSAN PERDAGANGAN (DINAS PERDAGANGAN)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perdagangan di Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 33 di bawah:

Tabel 33

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perdagangan di Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru TA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
I	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	76.740.500	74.845.500	1.895.000	83,62	100
1	Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	28.082.500	27.917.500	165.000	99,41	100
2	Pengawasan Perdagangan	34.073.000	33.573.000	500.000	98,53	100
3	Uji Petik Standarisasi Produk	14.585.000	13.355.000	1.230.000	91,56	100
II	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	288.955.650	281.930.650	7.025.000	97,56	100
1	Pameran Inacraft	57.970.250	57.595.250	375.000	99,35	100
2	Monitoring dan Evaluasi	12.077.600	11.397.100	11.397.100	94,36	100
3	Pameran produk nasional	58.002.250	57.902.250	100.000	99,82	100
4	Operasionalisasi dan Pengembangan Pasar	160.905.550	154.355.550	6.550.000	95,92	100
III	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	67.702.500	64.311.900	3.390.600	94,99	100
1	Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki	67.702.500	64.311.900	3.390.600	94,99	100

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
	Lima dan Asongan					
IV	Program Peningkatan dan Pengelolaan pasar	4.729.342.000	4.335.056.025	34.545.875	91,66	100
1	Peningkatan dan Pengelolaan Pasar	363.097.000	333.561.125	29.535.875	91,86	100
2	Peningkatan dan Pengawasan PAD Pasar	72.547.000	67.537.000	5.010.000	93,09	100
3	Operasionalisasi dan Pengembangan Pasar (DAK)	4.293.698.000	3.933.957.900	359.740.100	92,78	100

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru TA. 2018

5. URUSAN PERINDUSTRIAN (DINAS PERDAGANGAN)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perindustrian di Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 34 di bawah:

Tabel 34
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perindustrian di Dinas Perdagangan
Kota Banjarbaru TA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
I	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	322.775.300	311.132.550	11.642.750	96,39	100
1	Kegiatan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri	183.559.300	178.876.550	4.682.750	97,44	100
2	Kegiatan Pengembangan usaha melalui ekonomi kreatif	139.216.000	132.256.000	6.960.000	95	100
II	Program Peningkatan Promosi Produk Industri	275.620.000	268.605.000	7.015.000	97,45	100
1	Kegiatan Pameran Produk Industri	275.620.000	268.605.000	7.015.000	97,45	100
III	Program Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Bahan Tambahan Makanan dan Minuman	18.537.000	15.187.000	3.350.000	81,92	100
1	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Bahan Tambahan Makanan dan Minuman	18.537.000	15.187.000	3.350.000	81,92	100

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru TA. 2018

D. URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1) URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DPRD)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Administrasi Pemerintahan di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 35 di bawah:

Tabel 35
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pengawasan di Inspektorat Kota Banjarbaru TA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
1	2	3	4	5	6	7
I	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	20,299,244,300	16,428,909,916	3,870,334,384	80.93	80
1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	7,390,538,000	6,665,529,029	725,008,971	90.19	100
2	Hearing/ Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama	85,616,800	37,959,500	47,657,300	44.34	100
3	Rapat Rapat Alat Kelengkapan Dewan	289,088,500	240,353,500	48,735,000	83.14	100
4	Kegiatan Reses	2,224,550,000	1,552,898,000	671,652,000	69.81	100
5	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Dalam Daerah	469,566,000	139,748,000	329,818,000	29.76	100
6	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	9,839,885,000	7,792,421,887	2,047,463,113	79.19	80
II	Penataan Peraturan Perundang - undangan	473,536,175	83,000,000	390,536,175	17.53	100
1	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang - undangan	233,647,350	83,000,000	150,647,350	35.52	80.65
2	Penanganan Kasus Pengadaan dan Penyelesaian Sengketa Hukum	239,888,825	-	239,888,825	0.00	-
	JUMLAH	27,381,416,886	21,977,747,978	5,403,668,908	80.27	100

Sumber: Laporan Tahunan Inspektorat Kota Banjarbaru TA. 2018

2) URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DAERAH KOTA)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Administrasi Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 36 di bawah:

Tabel 36
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pengawasan di Inspektorat Kota Banjarbaru TA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
1	2	3	4	5	6	7
I	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.087.759.350	948.152.346	139.607.004	87,17	
1	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	205.038.950	159.334.950	45.704.000	77,71	
2	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	212.678.600	207.428.100	5.250.500	97,53	
3	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	123.645.000	82.430.000	41.215.000	66,67	
4	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	166.491.100	146.360.600	20.130.500	87,91	
5	Penanganan Kasus Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Hukum	310.755.000	302.395.000	8.360.000	97,31	
6	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Perjanjian Kerjasama / MOU	13.003.000	1.633.000	11.370.000	12,56	
7	Sosialisasi Rencana Aksi Nasional HAM	21.602.500	15.342.500	6.260.000	71,02	
8	Pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	34.545.200	33.228.196	1.317.004,00	96,19	
II	Program Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah	404.534.800	394.784.800	9.750.000	97,59	

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
1	2	3	4	5	6	7
1	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	147.658.000	142.738.000	4.920.000	96,67	
2	Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	256.876.800	252.046.800	4.830.000	98,12	
III	Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah	510.201.600	507.196.600	3.005.000	99,41	
1	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	510.201.600	507.196.600	3.005.000	99,41	
IV	Program Penataan Organisasi dan Anggaran Pemerintah Kelurahan	315.761.500	300.157.999	15.603.501	95,06	
1	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan	217.305.500	212.951.999	4.353.501	98,00	
2	Pembinaan Adminstrasi Pemerintahan di Bawahnya	98.456.000	87.206.000	11.250.000	88,57	
V	Program Peningkatan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah	317.500.600	313.105.600	4.395.000	98,62	
1	Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah	32.795.000	30.800.000	1.995.000	93,92	
2	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	164.724.000	164.074.000	650.000	99,61	
3	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	119.981.600	118.231.600	1.750.000	98,54	
VI	Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan	756.208.050	650.586.050	105.622.000	86,03	
1	Penyusunan Produk Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	136.916.000	78.576.000	58.340.000	57,39	
2	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	81.526.400	76.764.400	4.762.000	94,16	
3	Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarbaru	81.391.750	81.391.750	0	100	
4	Penyusunan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Standar Pelayanan Minimal	146.422.900	135.022.900	11.400.000	92,21	
5	Asistensi/Pendampingan Penyusunan Rancangan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) AP dan Standar Pelayanan (SP) SKPD	65.872.600	41.382.600	24.490.000	62,82	
6	Penyusunan Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan	244.078.400	237.448.400	6.630.000	97,28	
VII	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	3.884.786.400	3.734.329.575	150.456.825	96,13	
1	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	181.132.800	158.068.200	23.064.600	87,27	
2	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	317.643.000	312.669.908	4.973.092	98,43	
3	Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan	395.320.000	376.759.389	18.560.611	95,30	
4	Publikasi Kegiatan Pimpinan	995.190.600	957.112.078	38.078.522	96,17	
5	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1.995.500.000	1.929.720.000	65.780.000	96,70	
VII	Program Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah	1.234.239.900	1.208.356.892	25.883.008	97,90	
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1.234.239.900	1.208.356.892	25.883.008	97,90	
VIII	Program Peningkatan Kinerja Administratif Perekonomian	197.782.500	107.618.900	90.163.600	54,41	
1	Peningkatan Koordinasi Pengembangan UKM	20.746.500	16.821.900	3.924.600	81,08	
2	Indeks Optimalisasi Pemanfaatan Potensi	10.716.250	10.716.250	0,00	100,00	
3	Ekonomi Daerah Koordinasi BUMD dan Kajian Investasi	58.290.000	6.583.000	51.707.000	11,29	
4	Koordinasi Peningkatan Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah	81.051.750	57.399.750	23.652.000	70,82	
5	Koordinasi Penanganan Permasalahan Sarana dan Prasarana Perekonomian	26.978.000	16.098.000,00	10.880.000,00	59,67	
IX	Program Kerjasama Pembangunan	80.120.000	37.180.000	42.940.000	46,41	

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyelenggaraan Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Dunia Usaha	80.120.000	37.180.000	42.940.000	46,41	
X	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	472.052.000	394.503.600	77.548.400	83,57	
2	Pelaksanaan Rukun Kematian	472.052.000	394.503.600,00	77.548.400,00	83,57	
XI	Program Peningkatan Kinerja Administratif Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	1.207.273.150	1.121.096.525	86.176.625	92,86	
1	Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	321.132.000	315.963.975	5.168.025	98,39	
2	Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial Budaya Koordinasi Pelaksanaan	750.134.900	725.557.150,00	24.577.750,00	96,72	
3	Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Fasilitas Bantuan Sosial	9.500.000	9.336.800	163.200	98,28	
4	Pembinaan dan Pengembangan UKS	85.828.250	33.085.600	52.742.650	38,55	
XII	Program Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	40.678.000	37.153.000	3.525.000	91,33	
1	Penyelenggaraan Kegiatan Peribadatan	2.140.250.800	1.956.896.528	183.354.272	91,43	
2	Keagamaan Program Fasilitas Pengadaan	2.140.250.800	1.956.896.528	183.354.272	91,43	
3	Barang/Jasa Pemerintah	227.004.750	137.245.050	89.759.700	60,46	
4	Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	41.991.000	41.697.000	294.000	99,30	
5	Koordinasi Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Layanan Informasi dan	110.376.750	47.896.050	62.480.700	43,39	
6	Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa	74.637.000	47.652.000	26.985.000	63,85	
XIII	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	189.457.900	160.936.900	28.521.000	84,95	
1	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik	189.457.900	160.936.900	28.521.000	84,95	
XV	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1.557.761.150	1.305.193.423	252.567.727	83,79	
1	Pembakuan Nama Rupa Bumi	63.655.600	9.585.600	54.070.000	15,06	
2	Penataan dan Penegasan Tata Batas Wilayah	354.176.400	256.318.400	97.858.000	72,37	
3	Penyelesaian Permasalahan Tanah dan Sertifikasi Tanah	1.139.929.150	1.039.289.423	100.639.727	91,17	

Sumber: Laporan Tahunan SETDAKO Banjarbaru TA. 2018

3) URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (KECAMATAN BANJARBARU SELATAN)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Administrasi Pemerintahan di Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 37 di bawah:

Tabel 37
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Administrasi Pemerintahan di Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru TA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
I	Program Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Pemerintah Kecamatan	1.449.110.800	1.405.778.600	43.332.200	99,05	100
1	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah	1.087.364.200	1.044.546.000	42.818.200	96,06	100
2	Pembinaan Penyelenggaraan Ekonomi Pembangunan	100.406.800	100.126.800	280.000	99,72	100
3	Pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	191.339.800	191.285.800	54.000	99,97	100
4	Pembinaan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	70.000.000	69.820.000	180.000	99,74	100

Sumber: Laporan Tahunan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru TA. 2018

4) URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (KECAMATAN BANJARBARU UTARA)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 38 di bawah:

Tabel 38
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru TA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
I	Program Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Pemerintah Kecamatan	1.460.376.300	1.340.053.800	120.322.500	92%	100%
1	Pembinaan penyelenggaraan pemerintah	1.078.081.500	1.011.900.000	66.181.500	94%	100%
2	Pembinaan penyelenggaraan Ekonomi Pembangunan	109.250.000	102.080.000	7.170.000	93%	100%
3	Pembinaan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	208.364.200	193.323.200	15.041.000	93%	100%
4	Pembinaan penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	64.680.600	32.750.600	31.930.000	51%	100%

Sumber: Laporan Tahunan Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru TA. 2018

5) URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (KECAMATAN CEMPAKA)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 39 di bawah:

Tabel 39
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru TA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
I	Program Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Pemerintah Kecamatan	1,335,256,400	1,284,287,500		96%	100%
1	Pembinaan penyelenggaraan pemerintah	1,074,241,900	1,029,294,500		96%	100%
2	Pembinaan penyelenggaraan Ekonomi Pembangunan	46,151,000	45,862,000		99%	100%
3	Pembinaan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	180,210,500	175,210,000		97%	100%
4	Pembinaan penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	34,653,000	33,921,000		98%	100%

Sumber: Laporan Tahunan Kec. Cempaka Kota Banjarbaru TA. 2018

6) URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (KECAMATAN LANDASAN ULIN)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 40 di bawah:

Tabel 40
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru TA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
I	Program Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Pemerintah Kecamatan	1.602.484.300	1.449.567.500	152.916.800	90,46%	100%
1	Pembinaan penyelenggaraan pemerintah	1.289.083.300	1.161.563.500	127.519.800	90,11%	100%
2	Pembinaan penyelenggaraan Ekonomi Pembangunan	70.430.000	58.664.000	11.766.000	83,29%	100%
3	Pembinaan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	200.174.000	189.832.000	10.342.000	94,83%	100%
4	Pembinaan penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	42.797.000	39.508.000	3.289.000	92,31%	100%

Sumber: Laporan Tahunan Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru TA. 2018

7) URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (KECAMATAN LIANG ANGGANG)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Administrasi Pemerintahan di Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 41 di bawah:

Tabel 41
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Administrasi Pemerintahan di Kec Liang Anggang
Kota Banjarbaru TA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
I	Program Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Pemerintah Kecamatan	1.060.813.700	969.624.800	91.188.900	91,40	100%
1	Pembinaan penyelenggaraan pemerintah	666.991.700	643.202.000	23.789.700	96,43	100%
2	Pembinaan penyelenggaraan Ekonomi Pembangunan	109.230.000	91.925.000	17.305.000	84,16	100%
3	Pembinaan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	188.468.000	174.878.800	13.505.000	92,79	100%
4	Pembinaan penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	96.124.000	59.619.000	36.505.000	62,02	100%

Sumber: Laporan Tahunan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru TA. 2018

8) URUSAN PENGAWASAN (INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pengawasan di Inspektorat Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 42 di bawah:

Tabel 42
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pengawasan di Inspektorat
Kota Banjarbaru TA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
I	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN					
1	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	35.000.000	25.400.000	9.600.000	72,57%	100
2	Diklat Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan	252.000.000	250.879.975	1.120.025	99,56%	100
II	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH					
1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	1.007.890.000	925.070.000	82.820.000	91,78%	100
2	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	228.321.900	227.421.900	900.000	99,61%	100
3	Evaluasi sistem pengendalian internal pemerintah	126.766.200	122.806.200	3.960.000	96,88%	100
4	Pengawasan inventarisasi aset	63.902.000	63.902.000	-	100%	100
5	Evaluasi Lakip SKPD	128.900.000	123.050.000	5.850.000	95,46%	100
6	Penanganan Kasus dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	881.662.350	860.672.350	20.990.000	97,62%	100
	Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	195.378.400	183.105.684	12.272.716	93,72%	100%
	Diklat pemeriksa dan aparatur pengawasan	195.378.400	183.105.684	12.272.716	93,72%	100%

Sumber: Laporan Tahunan Inspektorat Kota Banjarbaru TA. 2018

9) URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (BAPPEDA)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perencanaan Pembangunan di Bappeda Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 43 di bawah:

Tabel 43
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perencanaan Pembangunan di Bappeda
Kota Banjarbaru TA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
I	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	921.186.000	852.291.800	68.894.200	92,52%	100
1	Penyusunan Rancangan RKPD	80.282.000	76.926.000	3.356.000	95,82%	1 Dokumen
2	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	133.541.000	126.841.000	6.700.000	94,98%	2 Dokumen
3	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	112.845.000	93.094.000	19.751.000	82,50%	4 Kali (Rapat Tw)
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan	243.036.000	223.301.000	19.735.000	91,88%	3 Dokumen
5	Penyusunan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Daerah	296.978.400	281.001.200	15.977.200	94,62%	2 Aplikasi
6	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota	54.503.600	51.128.600	3.375.000	93,81%	100%
II	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	169.529.700	164.018.200	5.511.500	96,75%	100
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	13.925.500	12.682.000	1.243.500	91,07%	9 Kali (Rakor Monev) 1 Dokumen
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah	155.604.200	151.336.200	4.268.000	97,26%	3 Dokumen
III	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA	403.726.000	332.706.000	71.020.000	82,41%	100%
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial dan budaya	28.321.000	10.741.000	17.580.000	37,93%	12 Bulan
2	Pembinaan Program Kemiskinan	34.500.000	24.564.000	9.936.000	71,20%	12 Bulan
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	289.379.000	283.906.000	5.473.000	98,11%	4 Dokumen
4	Koordinasi Pengembangan Kawasan Kota Sehat	51.526.000	13.495.000	38.031.000	26,19%	12 Bulan
IV	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	2.715.547.623	2.650.712.323	64.835.300	97,61%	100%
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	21.831.000	21.799.800	31.200	99,86%	10 Kali (Rakor) 1 Dokumen
2	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	639.805.300	576.241.400	63.563.900	90,07%	5 Dokumen
3	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air	2.053.911.323	2.052.671.123	1.240.200	99,94%	3 Dokumen

Sumber: Laporan Tahunan Bappeda Kota Banjarbaru TA. 2018

10) URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDA KOTA BANJARBARU)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pengembangan dan Penelitian di Bappeda Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 44 di bawah:

Tabel 44

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pengembangan dan Penelitian di Bappeda Kota Banjarbaru TA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
I	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN	484.813.000	361.312.400	123.500.600	74,53%	100%
1	Diseminasi Hasil Penelitian	24.515.600	6.268.000	18.247.600	25,57%	4 Kali (Rapat)
2	Jaringan Penelitian	9.528.000	-	9.528.000	0%	1 Kali (rakor)
3	Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	163.132.200	142.892.200	20.240.000	87,59%	3 Dokumen
4	Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	287.637.200	212.152.200	75.485.000	73,76%	3 Dokumen

Sumber: Laporan Tahunan Bappeda Kota Banjarbaru TA. 2018

11) URUSAN KEPEGAWAIAN (BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH KOTA BANJARBARU)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kepegawaian di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 45 di bawah:

Tabel 45

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kepegawaian di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjarbaru TA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
I	Program Pendidikan Kedinasan	2.757.156.400	2.474.415.668	282.740.732	89,75	106
1	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional	1.378.599.900	1.280.720.768	97.879.132	92,90	112
2	Pendidikan dan Pelatihan Jabatan	1.378.556.500	1.193.694.900	184.861.600	86,59	100
II	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.881.368.400	1.317.530.300	563.838.100	70,03	174
1	Seleksi Penerimaan Calon PNS	624.165.000	290.390.600	333.774.400	46,52	96,8
2	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	58.719.600	50.896.600	7.823.000	86,68	162
3	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	267.831.200	112.351.700	155.479.500	41,95	50
4	Penyusunan Data Formasi	68.449.900	34.473.900	33.976.000	50,36	94
5	Seleksi Jabatan Aparatur Sipil Negara	495.432.200	483.955.200	11.477.000	97,68	100
6	Penyelenggaraan Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar Akademik	28.601.600	14.957.800	13.643.800	52,30	84,23
7	Penyelenggaraan Verifikasi dan Evaluasi Dokumen Prestasi Kerja Aparatur	280.255.800	277.911.400	2.344.400	99,16	
8	Mutasi dan Alih Jenis Status Kepegawaian	15.306.800	13.440.150	1.866.650	87,81	23
9	Pengembangan Jabatan Fungsional	42.606.300	39.152.950	3.453.350	91,89	142
III	Program Peningkatan Informasi dan Kedudukan Hukum Pegawai	772.892.400	599.934.050	172.958.350	77,62	96
1	Pengawasan dan Pembinaan Disiplin Kerja PNS, PTT dan Tenaga Kontrak	229.048.000	214.245.700	14.802.300	93,54	100
2	Penyelenggaraan Pemberhentian, Pensiun dan Usul Penetapan Pertimbangan Status Kepegawaian	20.591.600	18.731.400	1.860.200	90,97	93

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
3	Penyelenggaraan Kesejahteraan Anggota Korpri	215.601.800	184.202.500	31.399.300	85,44	95
4	Pemberian Penghargaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	59.794.800	46.243.850	13.550.950	77,34	100
5	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin dan Bantuan Hukum PNS	90.171.900	17.120.100	73.051.800	18,99	100
6	Pengelolaan Data Kepegawaian	157.684.300	119.390.500	38.293.800	75,71	100

Sumber: Laporan Tahunan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjarbaru TA. 2018

12) URUSAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH (BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Administrasi Keuangan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 46 di bawah:

Tabel 46

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Administrasi Keuangan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru TA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
I	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	2.699.857.950	2.485.542.800	214.315.150	92,06 %	100
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	1.657.488.350	1.579.827.500	77.660.850	95,3 %	100
2	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	178.720.000	143.037.500	35.682.500	80 %	100
3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	111.177.600	102.237.600	8.940.000	91,9 %	100
4	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	168.642.000	140.332.000	28.310.000	83,2 %	100
6	Penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah	223.091.000	219.104.500	3.986.500	98,2 %	100
7	Monitoring dan Evaluasi Dana Perimbangan	106.641.600	98.715.400	7.926.200	92,5 %	100
8	Monitoring dan Evaluasi Dana Lain-lain Pendapatan Yang Sah	16.355.400	15.111.300	1.244.100	92,3 %	100
9	Penyusunan Standar Satuan Harga	237.742.000	187.177.000	50.565.000	78,7 %	
10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	66.380.100	58.058.600	8.321.500	87,4 %	100
11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	29.076.000	25.387.800	3.688.200	87,3 %	100
12	Peningkatan Manajemen Sistem Penggajian PNS	29.920.000	23.451.000	6.469.000	78,3 %	100
13	Peningkatan Pengelolaan dan Penatausahaan Uang dan Investasi Daerah	174.990.000	153.450.000	21.540.000	87,6 %	100
14	Rekonsiliasi Dana Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah	29.794.500	29.457.000	337.500	98,8 %	100
15	Rekonsiliasi Persediaan barang dan jasa Pemerintah Kotadengan SKPD	93.820.700	90.850.625	2.970.075	96,8 %	100
16	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	720.528.500	679.690.625	40.837.875	94,3 %	100
17	Percepatan Penyelesaian Masalah Aset	920.541.000	774.466.085	146.074.915	84,1 %	100
18	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah (SKPKD)	788.208.500	620.562.471	167.646.029	78,7 %	100

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
19	Penyusunan Data Standar Rencana Kebutuhan Barang Unit SKPD	174.791.400	172.129.600	2.661.800	98,4 %	100
II	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	198.615.000	182.840.500	15.774.500	92 %	100
1	Pendataan dan Pengawasan Tim Penilai Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	198.615.000	182.840.500	15.774.500	92 %	100
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	493.802.000	350.040.890	143.761.110	70,8 %	100
1	Penyusunan laporan keuangan Konsolidasi Pemerintah Daerah	347.952.000	261.443.290	86.508.710	75,1 %	100
	Penyusunan dan pelaporan Realisasi anggaran Pemerintah Daerah	145.850.000	88.597.600	57.252.400	60,7 %	100
IV	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi :	434.264.200	326.412.191	107.852.009	75,1 %	100
1	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Administrasi Keuangan Daerah	434.264.200	326.412.191	107.852.009	75,1 %	100

Sumber: Laporan Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota BanjarbaruTA. 2018

13) URUSAN ADMINISTRASI KEUANGAN (BPPRD KOTA BANJARBARU)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pajak dan Retribusi Daerah di BPPRD Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 47 di bawah:

Tabel 47
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Administrasi Keuangan BPPRD
Kota Banjarbaru TA. 2018

No	Program / Kegiatan	Anggaran			Persentasi (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
1.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.443.268.092	3.074.272.403	368.995.689	89,28	100
1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	558.991.402,-	300.101.033	258.890.369	53,69	100
2	Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak PBB dan BPHTB	1.183.759.700	1.139.122.696	44.637.004	96,23	100
3	Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan Daerah	100.787.100	91.361.600	9.425.500	90,65	100
4	Pembinaan dan Penyuluhan PBB dan Pajak Daerah	123.877.990	120.220.000	3.657.990	97,05	100
5	Intensifikasi Penagihan Pajak	1.162.774.000	1.117.020.600	45.753.400	96,07	100
6	Monitoring Objek Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lain Yang Sah	21.762.000	20.442.000	1.320.000	93,93	100
7	Penyusunan Laporan Pendapatan Pemerintah Daerah	73.206.300	72.810.974	397.326	99,46	100
8	Rekonsiliasi dan Verifikasi PAD	60.603.000	60.493.000	110.000	99,82	100
9	Peningkatan Pelayanan Kepada Wajib Pajak	77.671.600	74.769.000	2.902.600	96,26	100
10	Penyebarluasan Informasi Tentang Pajak Daerah	16.597.000	15.049.500	1.547.500	90,68	100
11	Monitoring dan Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat	63.236.000	62.882.000	354.000	99,44	100

UPT PAJAK DAERAH WILAYAH I

No	Program / Kegiatan	Anggaran			Persentasi (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	188.217.000	167.449.320	20.767.680	88,97	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.664.000	9.898.462	13.667.538	41,83	100
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7.200.000	7.200.000	0	100	100
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	17.656.000	17.655.700	300	100	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.429.000	7.387.000	42.000	99,43	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.030.000	9.020.500	9.500	99,89	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.352.000	2.352.000	0	100	100
	Penyediaan Makanan dan Minuman	23.416.000	20.432.000	2.984.000	87,26	100
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	15.750.000	11.783.658	3.966.342	74,82	100
	Penyediaan Jasa Non PNS	81.720.000	81.720.000	0	100	100
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	103.145.000	261.110.495	12.617.505	95,39	100
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	19.250.000	10.250.000	9.000.000	53,25	100
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	38.898.000	38.303.250	594.750	98,47	100
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kantor	70.064.000	69.200.000	864.000	98,77	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	13.476.000	12.442.245	1.035.755	92,33	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	2.350.000	2.350.000	0	100	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4.600.000	4.565.000	35.000	99,24	100
	Pemeliharaan Gedung Kantor	125.090.000	124.000.000	1.090.000	99,13	100

UPT PAJAK DAERAH WILAYAH II

No	Program / Kegiatan	Anggaran			Persentasi (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	180.977.050	151.249.932	29.727.118	83,57	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.200.000	19.761.632	20.438.368	49,16	100
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.840.000	6.840.000	0	100	100
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	16.950.000	16.947.700	3.000	99,98	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.691.600	5.891.800	0	100	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.297.150	8.255.000	42.150	99,49	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.560.000,-	1.440.000	120.000	92,31	100
	Penyediaan Makanan dan Minuman	15.477.600	12.966.000	2.511.600	83,77	100
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	16.000.000	9.388.000	6.612.000	58,68	100
	Penyediaan Jasa Non PNS	69.960.000	69.960.000	0	100	100
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	73.410.000	65.481.995	7.928.005	89,20	100
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	20.150.000	20.030.000	120.000	99,40	100
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	13.000.000	12.975.000	25.000	99,81	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12.362.000	10.181.995	2.180.005	82,37	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3.210.000	1.745.000	1.465.000	54,36	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4.680.000	1.050.000	3.630.000	22,44	100
	Pemeliharaan Gedung Kantor	20.008.000	19.500.000	508.000	97,46	100

14) URUSAN KEPEGAWAIAN (BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH KOTA BANJARBARU)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kepegawaian di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjarbaru TA. 2018 dapat dilihat sebagaimana Tabel 48 di bawah:

Tabel 48

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kepegawaian di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjarbaru TA. 2018

NO	Program Kegiatan	Anggaran			Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
I	Program Pendidikan Kedinasan	2.757.156.400	2.474.415.668	282.740.732	89,75	106
1	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional	1.378.599.900	1.280.720.768	97.879.132	92,90	112
2	Pendidikan dan Pelatihan Jabatan	1.378.556.500	1.193.694.900	184.861.600	86,59	100
II	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.881.368.400	1.317.530.300	563.838.100	70,03	174
1	Seleksi Penerimaan Calon PNS	624.165.000	290.390.600	333.774.400	46,52	96,8
2	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	58.719.600	50.896.600	7.823.000	86,68	162
3	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	267.831.200	112.351.700	155.479.500	41,95	50
4	Penyusunan Data Formasi	68.449.900	34.473.900	33.976.000	50,36	94
5	Seleksi Jabatan Aparatur Sipil Negara	495.432.200	483.955.200	11.477.000	97,68	100
6	Penyelenggaraan Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar Akademik	28.601.600	14.957.800	13.643.800	52,30	84,23
7	Penyelenggaraan Verifikasi dan Evaluasi Dokumen Prestasi Kerja Aparatur	280.255.800	277.911.400	2.344.400	99,16	
8	Mutasi dan Alih Jenis Status Kepegawaian	15.306.800	13.440.150	1.866.650	87,81	23
9	Pengembangan Jabatan Fungsional	42.606.300	39.152.950	3.453.350	91,89	142
III	Program Peningkatan Informasi dan Kedudukan Hukum Pegawai	772.892.400	599.934.050	172.958.350	77,62	96
1	Pengawasan dan Pembinaan Disiplin Kerja PNS, PTT dan Tenaga Kontrak	229.048.000	214.245.700	14.802.300	93,54	100
2	Penyelenggaraan Pemberhentian, Pensiun dan Usul Penetapan Pertimbangan Status Kepegawaian	20.591.600	18.731.400	1.860.200	90,97	93
3	Penyelenggaraan Kesejahteraan Anggota Korpri	215.601.800	184.202.500	31.399.300	85,44	95
4	Pemberian Penghargaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	59.794.800	46.243.850	13.550.950	77,34	100
5	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin dan Bantuan Hukum PNS	90.171.900	17.120.100	73.051.800	18,99	100
6	Pengelolaan Data Kepegawaian	157.684.300	119.390.500	38.293.800	75,71	100

Sumber: Laporan Tahunan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjarbaru TA. 2018

2. LAMPIRAN REKAPITULASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

A. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Rincian Dana Alokasi Khusus untuk pekerjaan fisik yang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

NO.	BIDANG DANA ALOKASI KHUSUS	ANGGARAN	TANGGAL PENYALURAN	REALISASI	KURANG LEBIH
1.	DAK Bidang Pendidikan	6.099.693.000,00		6.075.489.200,00	(24.203.800,00)
	- SD	4.027.216.000,00	25/05/2018	1.524.923.250,00	
	- SMP	1.197.816.000,00	19/07/2018	2.744.861.850,00	
	- SKB	874.661.000,00	30/10/2018	1.805.704.100,00	
2.	DAK Bidang Kesehatan	45.893.333.000,00		45.629.473.362,00	(263.859.638,00)
	- Pelayanan Kesehatan Dasar	7.487.198.000,00	25/05/2018	11.473.333.250,00	
	- Pelayanan Kesehatan Kefarmasian	1.296.609.000,00	19/07/2018	20.651.999.850,00	
	- Pelayanan Kesehatan Rujukan (RSUD)	6.788.828.000,00	30/10/2018	13.504.140.262,00	
	- Keluarga Berencana	426.098.000,00			
	- Prioritas Daerah	29.894.600.000,00			
3.	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	15.054.875.000,00		13.590.787.000,00	(1.464.088.000,00)
	- Infrastruktur Jalan	15.054.875.000,00	25/05/2018	3.763.718.750,00	
			19/07/2018	6.774.693.750,00	
			30/10/2018	3.052.374.500,00	
4.	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	4.451.020.000,00		3.629.089.000,00	(821.931.000,00)
	- Infrastruktur Irigasi	4.451.020.000,00	25/05/2018	1.112.755.000,00	
			19/07/2018	2.002.959.000,00	
			26/10/2018	513.375.000,00	
5.	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	8.777.608.000,00		8.133.887.000,00	(643.721.000,00)
	- Infrastruktur Air Minum	8.777.608.000,00	10/07/2018	390.728.500,00	
			10/07/2018	1.803.673.500,00	
			27/08/2018	703.311.300,00	
			30/08/2018	3.246.612.300,00	
			26/10/2018	208.507.200,00	
			30/10/2018	1.781.054.200,00	
6.	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	6.009.611.000,00		5.990.352.000,00	(19.259.000,00)
	- Infrastruktur Sanitasi	6.009.611.000,00	10/07/2018	557.402.750,00	
			10/07/2018	945.000.000,00	
			30/08/2018	1.003.324.950,00	
			30/08/2018	1.701.000.000,00	
			26/10/2018	666.232.300,00	

NO.	BIDANG DANA ALOKASI KHUSUS	ANGGARAN	TANGGAL PENYALURAN	REALISASI	KURANG LEBIH
			30/10/2018	1.117.392.000,00	
7.	DAK Bidang Pertanian	745.487.000,00		745.487.000,00	-
	- Pertanian	745.487.000,00	25/05/2018	745.487.000,00	
8.	DAK Bidang Lingkungan Hidup	1.668.713.000,00		1.620.791.800,00	(47.921.200,00)
	- Lingkungan Hidup	1.668.713.000,00	19/07/2018	314.678.250,00	
			27/08/2018	566.420.850,00	
			21/09/2018	402.243.800,00	
			26/10/2018	337.448.900,00	
9.	DAK Bidang Perdagangan	4.293.698.000,00		3.937.642.900,00	(356.055.100,00)
	- Pasar	4.293.698.000,00	25/05/2018	1.073.424.500,00	
			30/08/2018	1.932.164.100,00	
			26/10/2018	932.054.300,00	
10.	DAK Bidang Pariwisata	1.490.000.000,00		1.435.732.000,00	(54.268.000,00)
	- Penataan Kawasan Pariwisata	1.490.000.000,00	19/07/2018	372.500.000,00	
			27/08/2018	670.500.000,00	
			26/10/2018	392.732.000,00	
	JUMLAH	94.484.038.000,00		90.788.731.262,00	(3.695.306.738,)

Sumber: BPKAD Kota Banjarbaru 2018

B. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Rincian Dana Alokasi Khusus untuk pekerjaan non fisik yang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

NO.	BIDANG DANA ALOKASI KHUSUS	ANGGARAN	TANGGAL PENYALURAN	REALISASI	KURANG LEBIH
1.	DAK Non Fisik Bidang Pendidikan	53.901.840.509,00		55.811.928.500,00	1.910.087.991,00
	- Bantuan Operasional Penyelenggara PAUD	4.520.400.000,00	18/04/2018	4.520.400.000,00	
	- Tunjangan Profesi Guru PNS	48.633.590.509,00	10/04/2018	15.211.872.000,00	
			29/06/2018	12.676.560.000,00	
			28/09/2018	12.676.560.000,00	
			09/11/2018	10.141.249.000,00	
	- Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS	747.850.000,00	20/04/2018	284.400.000,00	
			29/06/2018	237.000.000,00	
			01/11/2018	63.887.500,00	

NO.	BIDANG DANA ALOKASI KHUSUS	ANGGARAN	TANGGAL PENYALURAN	REALISASI	KURANG LEBIH
2.	DAK Non Fisik Bidang Kesehatan	5.997.247.181,00		5.997.247.181,00	-
	- Bantuan Operasional Kesehatan	4.607.200.181,00	20/02/2018	2.484.885.181,00	
	- Akreditasi Puskesmas	250.000.000,00	10/08/2018	3.512.362.000,00	
	- Jaminan Persalinan	1.140.047.000,00			
3.	DAK Non Fisik Bidang Keluarga Berencana	652.535.000,00		652.535.000,00	-
	- Bantuan Operasional Keluarga Berencana	652.535.000,00	06/03/2018	241.840.000,00	
			14/08/2018	410.695.000,00	
4.	DAK Non Fisik Bidang Administrasi Kependudukan	551.559.900,00		551.559.900,00	-
	- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	551.559.900,00	29/03/2018	551.559.900,00	
	JUMLAH	61.103.182.590,00		63.013.270.581,00	1.910.087.991,00

Sumber: BPKAD Kota Banjarbaru 2018

3. LAMPIRAN REKAPITULASI DANA DEKONSENTRASI YANG DITERIMA SKPD PADA TAHUN 2018

Pada tahun 2018 ada beberapa SKPD yang menerima dana dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan yang mendukung didalam pelaksanaan pembangunan di Kota Banjarbaru yaitu sebagai berikut :

No.	Unit Pelaksana	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Lokasi
1	Kementrian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Kegiatan Pembedayaan Pekarangan Pangan - Kegiatan Koordinasi Kelembagaan dan pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar - Kegiatan Dukungan manajemen dan Administrasi	290.300.000,-	- Kecamatan Cempaka - Kecamatan Banjarbaru Utara - Kecamatan Banjarbaru Selatan
2	Kementeriaan Pertanian RI Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian melalui Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru sebagai Pelaksana Kabupaten/Kota	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Kegiatan : - Fasilitasi Teknis dan Dukungan Pengelolaan Sistem dan pengawasan Alat mesin Pertanian - Layanan Dukungan manajemen Eselon I - Pembinaan dan Pendampingan Kegiatan Mendukung UPSUS - Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Tani - Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Pembiayaan Pertanian	342.350.000,-	
3	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan	Kegiatan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS)		

No.	Unit Pelaksana	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Lokasi
	sedangkan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru sebagai Pelaksana Kabupaten/Kota.	SIWAB) Tahun 2018 yang terdiri dari operasional IB, PKB, dan Pendataan Kelahiran	29.750.000,-	
4	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	10.250.000.000	Kota Banjarbaru
5	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melalui Balai Perikanan Budidaya Air tawar Mandiangin, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan	Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya		
		Kegiatan Unit Perbenihan Rakyat (UPR)		
		Bantuan benih ikan Lele	50.000 ekor	Kota Banjarbaru
		Kegiatan Pengawasan		
		Paket Bantuan Restocking Ikan Lokal (ikan papuyu)	75.000 ekor	Danau Galuh Cempaka, Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka
		Paket Bantuan Restocking Ikan Lokal (ikan papuyu)	75.000 ekor	Sungai Suriah, Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka
		Paket Bantuan Restocking Ikan Lokal		
		- Ikan jelawat	30.000 ekor	Sungai Kemuning Kel. Guntung Paikat Kec Banjarbaru Selatan
		- Ikan papuyu	1.000 ekor	
		Kegiatan Pengembangan kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar		
		Bantuan Bibit Ikan Patin	20.000 ekor	Pokdakan Mina Agro Wisata IV Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara
		Pakan	700 kg	
		Bantuan bibit nila	20.000 ekor	Pokdakan Mina Agro Wisata II Kel.

No.	Unit Pelaksana	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Lokasi
				Mentaos Kec. Banjarbaru Utara
		Calon induk	10 paket	
		Bantuan bibit mas	200.000 ekor	Pokdakan Mina Agro Wisata III Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara
JUMLAH TOTAL			10.912.400.000,-	

Sumber : Laporan Tahunan SKPD Tahun 2018

4. LAMPIRAN REKAPITULASI DANA DEKONSENTRASI, HIBAH DARI PROVINSI/KEMENTERIAN, DITERIMA SKPD PADA TAHUN 2018

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No.	Unit Pelaksana	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Cipta Karya c.q. Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman Kota Banjarbaru	4.575.045.000,-

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018

SKPD : DINAS PENDIDIKAN

No	Nama Kegiatan/Penggunaan	Yang Menerima	Asal Bantuan	Sistem Penyaluran
1	APE Dalam	15 PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan	Langsung Ke Sekolah
2	BUKU	19 PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan	Langsung Ke Sekolah
3	APE Motorik	5 PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan	Langsung Ke Sekolah
4	Mesin Jahit dan Alat Memasak	7 PKBM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan	Langsung Ke Lembaga
5	Mesin Jahit dan Alat Memasak	7 LKP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan	Langsung Ke Lembaga
6	Mesin Jahit dan Alat Memasak	SKB Banjarbaru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan	Langsung Ke SKB

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Pendidikan Tahun 2018



WALIKOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Panglima Batur Nomor. 1 Banjarbaru Kal-Sel Telepon (0511) 4772569 fax.4772185

SAMBUTAN PADA
RAPAT PARIPURNA PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP
4 (EMPAT) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BANJARBARU SEKALIGUS PENYAMPAIAN LKPJ WALIKOTA
BANJARBARU AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

Rabu, 13 Maret 2019
Ruang Sidang Graha Paripurna DPRD Kota Banjarbaru

=====

ASSALAMU'ALLAIKUM WR, WB

YTH. SAUDARA KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU.

YTH. SAUDARA WAKIL WALIKOTA, SEKRETARIS DAERAH, PARA
ASISTEN, STAF AHLI, INSPEKTUR, KEPALA DINAS, KEPALA
BADAN, DIREKTUR RSUD IDAMAN, KEPALA KANTOR, KEPALA
BAGIAN, CAMAT DAN LURAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANJARBARU.

SERTA HADIRIN UNDANGAN DAN REKAN-REKAN WARTAWAN
YANG BERBAHAGIA.

PUJI SYUKUR KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA BERKAT RAHMAT DAN KARUNIA-NYA JUALAH KITA PADA HARI INI DAPAT BERHADIR DALAM RAPAT PARIPURNA DENGAN AGENDA PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP 4 (EMPAT) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU SEKALIGUS PENYAMPAIAN LKPJ WALIKOTA BANJARBARU AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018.

TAK LUPA SHALAWAT DAN SALAM TERCURAH BAGI JUNJUNGAN KITA, NABI BESAR MUHAMMAD SAW BESERTA KELUARGA, SAHABAT SERTA PARA PENGIKUT BELIAU YANG SETIA DARI DAHULU HINGGA YAUMIL AKHIR

PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG TERHORMAT

MENGAWALI SAMBUTAN INI, TERLEBIH DAHULU SAYA MENGUCAPKAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN KEPADA PANSUS DPRD DAN EKSEKUTIF ATAS KERJA KERASNYA MELAKUKAN PEMBAHASAN SEHINGGA PADA HARI INI DAPAT DILAKSANAKAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP 4 (EMPAT) BUAH RAPERDA YANG SALAH SATUNYA MERUPAKAN USUL INISIATIF DPRD, UNTUK DAPAT MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU.

ADAPUN SECARA GARIS BESAR DAPAT SAYA GAMBARKAN MENGENAI KEEMPAT BUAH PERATURAN DAERAH TERSEBUT SEBAGAI BERIKUT :

1. RAPERDA TENTANG PERIZINAN BERUSAHA PADA BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PADA AWALNYA KEBERADAAN RAPERDA INI MERUPAKAN TINDAKLANJUT ATAS DIUNDANGKANNYA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 7/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP). NAMUN PADA SAAT PEMBAHASAN DITEMUKAN BAHWA PEMERINTAH TELAH MENERBITKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK, DIMANA PERATURAN INI BERTUJUAN UNTUK MEMANGKAS PROSES PENERBITAN IZIN USAHA YANG SELAMA INI BERBELIT-BELIT.

DENGAN TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 77 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA

ELEKTRONIK DIBIDANG PERDAGANGAN, MAKA BEBERAPA PELAYANAN PERIJINAN DIBIDANG PERDAGANGAN TERMASUK SIUP HARUS DILAKSANAKAN DENGAN SISTEM PERIJINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (OSS). BERDASARKAN HAL TERSEBUT MAKA DRAF AWAL YANG TADINYA MATERI MUATAN MENGAKOMODIR KETENTUAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 7/M-DAG/PER/2/2017 KEMUDIAN DALAM PEMBAHASAN PANSUS MATERI TERSEBUT BERUBAH DENGAN MENGACU KEPADA KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 77 TAHUN 2018. DENGAN PERUBAHAN MATERI MUATAN YANG MELEBIHI 50 % (LIMA PULUH PERSEN) TERSEBUT MAKA RAPERDA TENTANG PERIZINAN BERUSAHA PADA BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN INI SEKALIGUS MENCABUT PERDA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERIJINAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN.

ADAPUN MATERI MUATAN YANG DIATUR DALAM RAPERDA ANTARA LAIN MENGENAI JENIS PERIZINAN BERUSAHA BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH; TAHAPAN PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA YANG MELIPUTI PENDAFTARAN; VERIFIKASI PERMOHONAN; DAN MASA

BERLAKU, SERTA MENGATUR MENGENAI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN PENGAWASAN.

DENGAN KEBERADAAN PERDA INI NANTINYA DIHARAPKAN DAPAT MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SEKALIGUS MEMPERMUDAH MEREKA DALAM PROSES PENERBITAN IZIN USAHA.

2. RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN

KEBERADAAN RAPERDA INI MERUPAKAN SALAH SATU SOLUSI TERHADAP PERMASALAHAN KESEMRAWUTAN DAN KETIDAK PROPORSIONALAN PARKIR YANG MENYEBABKAN TIMBULNYA KEMACETAN LALU LINTAS DAN KETIDAK NYAMANAN BAGI PENGGUNA JALAN.

UNTUK ITULAH MAKA DALAM RANGKA MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT GUNA MENDAPATKAN KENYAMANAN DAN KEAMANAN DIAJUKAN RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN PARKIR YANG AKAN MENJADI DASAR HUKUM DAN SEKALIGUS PAYUNG HUKUM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA PEMERINTAH KOTA UNTUK MELAKSANAKAN PENGELOLAAN PARKIR, YANG

PADA HARI INI DIPUTUSKAN UNTUK MENJADI PERDA KOTA BANJARBARU.

ADAPUN MATERI MUATAN YANG DIATUR ANTARA LAIN :

- PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN OLEH PEMERINTAH DAERAH YANG MELIPUTI: JENIS PARKIR, PARKIR DI DALAM DAN DI LUAR RUANG MILIK JALAN;
- PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN OLEH ORANG ATAU BADAN MELIPUTI : PERIZINAN DAN KEWAJIBAN;
- TATA TERTIB PARKIR;
- PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN TEMPAT PARKIR DILUAR RUANG MILIK JALAN; SERTA
- PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN PARKIR.

DENGAN KEBERADAAN PERDA INI DIHARAPKAN PENGELOLAAN PARKIR DI KOTA BANJARBARU DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN TERTIB DAN TERATUR SEHINGGA SELAIN MEMBERIKAN KENYAMANAN DAN KEAMANAN BAIK BAGI PENGGUNA PARKIR MAUPUN MASYARAKAT LAINNYA, JUGA SECARA TIDAK LANGSUNG AKAN MENAMBAH KEINDAHAN KOTA BANJARBARU DENGAN TERTATANYA PARKIR DENGAN BAIK.

3. RAPERDA TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2019 – 2034;

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH MERUPAKAN BAGIAN DARI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL. DAN SEBAGAI BAGIAN DARI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL MAKA SESUAI AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN, PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH DISELENGGARAKAN BERDASARKAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH (RIPPARDA) YANG DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH.

PERDA TENTANG RIPPARDA TERSEBUT AKAN MENJADI PEDOMAN UTAMA BAGI PERENCANAAN, PENGELOLAAN, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH SESUAI DENGAN POTENSI-POTENSI WISATA YANG ADA SEHINGGA MAMPU MENJADI DAYA TARIK DAERAH.

BERDASARKAN HAL TERSEBUT MAKA DISUSUNLAH RAPERDA TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2019 - 2034, YANG PADA HARI INI DISEPAKATI UNTUK MENJADI PERDA.

ADAPUN MATERI MUATAN YANGN DIATUR ANTARA LAIN MENGENAI:

A. CAKUPAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN;

- B. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN;
- C. PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA;
- D. PEMBANGUNAN WILAYAH DESTINASI PARIWISATA DAERAH;
- E. PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA;
- F. PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA;
- G. PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA;
- H. PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA;
- I. INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN;
- J. PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN; SERTA
- K. KAWASAN STRATEGIS DAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA.

DENGAN KEBERADAAN PERDA INI DIHARAPKAN PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA MAMPU MENJADI MOTOR PENGGERAK BAGI PEREKONOMIAN, KARENA DIKEMBANGKAN DENGAN PENDEKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PEMBANGUNAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN WILAYAH, BERTUMPU PADA MASYARAKAT, DAN BERSIFAT MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT YANG MENCAKUPI BERBAGAI ASPEK SEPERTI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMASARAN, DESTINASI, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, KETERKAITAN LINTAS SEKTOR, PEMBERDAYAAN USAHA KECIL SERTA

TANGGUNG JAWAB DALAM PEMANFAATAN SUMBER
KEKAYAAN ALAM DAN BUDAYA.

PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG BERBAHAGIA

RAPERDA SELANJUTNYA YANG DISEPAKATI UNTUK MENJADI PERDA HARI INI YAKNI RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT ADALAH MERUPAKAN RAPERDA USUL INISIATIF DPRD. KITA PATUT BANGGA ATAS PENCAPAIAN KINERJA ANGGOTA DEWAN. MESKIPUN DISELA KESIBUKAN AKTIFITAS YANG BEGITU PADAT DI TAHUN POLITIK INI, MEREKA MASIH SEMPAT MENGUSULKAN RAPERDA YANG MEMANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH PEMERINTAH KOTA SEBAGAI PAYUNG HUKUM DALAM MELAKSANAKAN PENATAAN PASAR.

MEMANG TIDAK DAPAT DIPUNGKIRI, SAAT INI KEADAAN PASAR TRADISONAL DI KOTA BANJARBARU TIDAK MEMBERIKAN KENYAMANAN BAGI MASYARAKAT YANG BERBELANJA KARENA KONDISI PASAR YANG KUMUH, BECEK DAN BAU. KONDISI YANG DEMIKIAN TENTU SAJA TIDAK DAPAT DIBIARKAN TERUS MENERUS KARENA AKAN MEMPENGARUHI EKSISTENSI PASAR TRADISONAL. UNTUK ITULAH MAKA KEBERADAAN RAPERDA INI SANGAT DIBUTUHKAN, DENGAN MATERI MUATAN YANG DIATUR ANTARA LAIN MENGENAI:

- A. PENGELOLAAN PASAR RAKYAT;
- B. PERENCANAAN, INFRASTRUKTUR, STANDARISASI DAN REVITALISASI PASAR RAKYAT;
- C. PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT;
- D. KETENTUAN JAM OPERASIONAL PASAR;
- E. HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEDAGANG PASAR; SERTA
- F. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.

DENGAN USULAN RAPERDA INISIATIF DPRD INI, SAYA ATAS NAMA PEMERINTAH KOTA DAN MASYARAKAT MENGUCAPKAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN ATAS KEPEKAAN ANGGOTA DEWAN DALAM MEMBERIKAN SOLUSI TERHADAP SALAH SATU PERMASALAHAN YANG DIHADAPI KOTA BANJARBARU.

DENGAN KEBERADAAN PERDA INI DIHARAPKAN AKAN MEWUJUDKAN CITRA PASAR TRADISIONAL YANG BERSIH, AMAN, NYAMAN, EFISIEN, DAN BERDAYA SAING DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN FUNGSI PASAR TRADISIONAL SEBAGAI PILAR EKONOMI KERAKYATAN SEHINGGA EKSISTENSI PASAR TRADISIONAL DAPAT TERJAGA.

HADIRIN PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG TERHORMAT,

DEMIKIAN YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN TERKAIT 4 (EMPAT) BUAH RAPERDA YANG DISEPAKATI UNTUK MENJADI PERDA, DAN TERKAIT AGENDA SELANJUTNYA YAKNI PENYAMPAIAN LKPJ WALIKOTA BANJARBARU AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018 DAPAT SAYA SAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT:

LKPJ MERUPAKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DIBUAT OLEH WALIKOTA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH YANG SEJALAN DENGAN UPAYA MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERTANGGUNGJAWAB SERTA MAMPU MENJAWAB TUNTUTAN PERUBAHAN SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN SESUAI DENGAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK.

LKPJ INI DISAMPAIKAN DENGAN TUJUAN UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA BANJARBARU KEPADA DPRD KOTA BANJARBARU SELAKU MITRA DALAM PEMERINTAHAN DAERAH, YANG MEMUAT KETERANGAN BERUPA KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH, KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

DAN PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN SELAMA TAHUN 2018.

ADAPUN KETERANGAN TERSEBUT DAPAT KAMI URAIKAN SEBAGAI BERIKUT:

BERKENAAN DENGAN PERKEMBANGAN SALAH SATU INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH YAITU KONDISI PEREKONOMIAN, PADA TAHUN 2018 KONDISI PEREKONOMIAN KOTA BANJARBARU MENGALAMI PERLAMBATAN DIBANDINGKAN TAHUN 2017, PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA BANJARBARU PADA TAHUN 2018 MENCAPAI 6,92% (ENAM KOMA SEMBILAN PULUH DUA PERSEN), MENURUN APABILA DIBANDINGKAN DENGAN KONDISI TAHUN 2017 YANG MENCAPAI 6,96% (ENAM KOMA SEMBILAN PULUH ENAM PERSEN). PENURUNAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBESAR 0,04 % (NOL KOMA NOL EMPAT PERSEN) DIPERKIRAKAN DIPENGARUHI OLEH LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL DI KALIMANTAN SELATAN YANG CENDERUNG MELAMBAT DAN DISEBABKAN OLEH KEADAAN EKONOMI INDONESIA SECARA UMUM JUGA PEREKONOMIAN DUNIA SECARA GLOBAL. PADA SKALA REGIONAL, PERTUMBUHAN EKONOMI DI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2018 JUGA MENGALAMI PENURUNAN SEBESAR 0.16% (NOL KOMA ENAM BELAS PERSEN) DARI TAHUN SEBELUMNYA BERDASARKAN DATA YANG TERDAPAT PADA DOKUMEN RANCANGAN AWAL RENCANA

KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) PROPINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020.

PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG BERBAHAGIA,

TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARBARU PADA TAHUN ANGGARAN 2018, DAPAT KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. REALISASI PENDAPATAN DAERAH KOTA BANJARBARU PADA TAHUN 2018 ADALAH SEBESAR RP. 1.087.333.858.577,92 (SATU TRILIUN DELAPAN PULUH TUJUH MILIAR TIGA RATUS TIGA PULUH TIGA JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU LIMA RATUS TUJUH PULUH TUJUH RUPIAH SEMBILAN PULUH DUA SEN) LEBIH BESAR 107,96% DARI TARGET YANG DITETAPKAN YAKNI SEBESAR RP.1.007.157.442.545,00 (SATU TRILIUN TUJUH MILIAR SERATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH LIMA RUPIAH), PENINGKATAN PENDAPATAN INI DIKARENAKAN REALISASI SEMUA KOMPONEN PENDAPATAN SEPERTI PAD, DANA PERIMBANGAN DAN LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH RATA RATA MENGALAMI PENINGKATAN WALAUPUN PADA SISI RETRIBUSI DAERAH DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) MASIH BELUM MEMENUHI TARGET.

JIKA DIBANDINGKAN DENGAN REALISASI TAHUN 2017, SECARA UMUM DAPAT DIKATAKAN TERDAPAT SELISIH

PENINGKATAN REALISASI PENDAPATAN SEBESAR 4,91% ATAU Rp. 50.331.335.296,30 (LIMA PULUH MILYAR TIGA RATUS TIGA PULUH SATU JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU DUA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM RUPIAH TIGA PULUH SEN) DIMANA PADA TAHUN 2017 REALISASI HANYA 103,05 % SEDANGKAN DITAHUN 2018 TERDAPAT REALISASI PENDAPATAN SEBESAR 107,96%.

LEBIH RINCI KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT :

- a. PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA APBD TAHUN 2018 DITARGETKAN SEBESAR RP. 204.642.528.120,00 (DUA RATUS EMPAT MILIAR ENAM RATUS EMPAT PULUH DUA JUTA LIMA RATUS DUA PULUH DELAPAN RIBU SERATUS DUA PULUH RUPIAH) DAN TEREALISASI SEBESAR RP.229.786.552.300,92 (DUA RATUS DUA PULUH SEMBILAN MILIAR TUJUH RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH DUA RIBU TIGA RATUS RUPIAH SEMBILAN PULUH DUA SEN), INI BERARTI BAHWA JIKA DIBANDINGKAN DENGAN PAD TAHUN 2017 ADA PENINGKATAN YANG SEBAGIAN BESAR DISOKONG DARI SEKTOR PENDAPATAN PAJAK DAERAH.
- b. DANA PERIMBANGAN, YANG MELIPUTI BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK, DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PADA TAHUN 2018 MENGALAMI PENINGKATAN DIBANDINGKAN PADA TAHUN 2017. YANG TERDIRI DARI DANA BAGI HASIL BAGI HASIL BUKAN PAJAK,

DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK).

DANA PERIMBANGAN DITARGETKAN SEBESAR RP.688.403.776.590,00 (ENAM RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN MILIAR EMPAT RATUS TIGA JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU LIMA RATUS SEMBILAN PULUH RUPIAH) DAN TEREALISASI SEBESAR RP. 728.790.689.110,00 (TUJUH RATUS DUA PULUH DELAPAN MILIAR TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU SERATUS SEPULUH RUPIAH)

DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK TAHUN 2018 TEREALISASI SEBESAR RP.146.446.620.267,00 (SERATUS EMPAT PULUH ENAM MILYAR EMPAT RATUS EMPAT PULUH ENAM JUTA ENAM RATUS DUA PULUH RIBU DUA RATUS ENAM PULUH TUJUH RUPIAH), MENGALAMI PENINGKATAN SEBESAR 50,49% DIBANDINGKAN TAHUN 2017 SEBESAR RP. 97.316.278.727,00 (SEMBILAN PULUH TUJUH MILYAR TIGA RATUS ENAM BELAS JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH TUJUH RUPIAH).

DANA ALOKASI UMUM (DAU) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2018 TEREALISASI SEBESAR RP. 428.542.067.000,00 (EMPAT RATUS DUA PULUH DELAPAN MILIAR LIMA RATUS EMPAT PULUH DUA JUTA ENAM PULUH TUJUH RIBU RUPIAH), SAMA DENGAN REALISASI TAHUN SEBELUMNYA.

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN ANGGARAN 2018 TEREALISASI SEBESAR RP. 153.802.001.843,00 (SERATUS LIMA PULUH TIGA MILYAR DELAPAN RATUS DUA JUTA SERIBU DELAPAN RATUS EMPAT PULUH TIGA RUPIAH) MENGALAMI PENINGKATAN SEBESAR 28,06% DIBANDING TAHUN 2017 SEBESAR RP.120.102.822.449,00 (SERATUS DUA PULUH MILIAR SERATUS DUA JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH DUA RIBU EMPAT RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RUPIAH).

- c. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH DITARGETKAN SEBESAR RP. 114.111.137.835,00 (SERATUS EMPAT BELAS MILIAR SERATUS SEBELAS JUTA SERATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU DELAPAN RATUS TIGA PULUH LIMA RUPIAH) TEREALISASI SEBESAR RP. 128.756.617.166,00 (SERATUS DUA PULUH DELAPAN MILIAR TUJUH RATUS LIMA PULUH ENAM JUTA ENAM RATUS TUJUH BELAS RIBU SERATUS ENAM PULUH ENAM RUPIAH).

2. BELANJA DAERAH KOTA BANJARBARU PADA TAHUN ANGGARAN 2018 TEREALISASI SEBESAR RP. 1.035.577.164.814,80 (SATU TRILIUN TIGA PULUH LIMA MILIAR LIMA RATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA SERATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU DELAPAN RATUS EMPAT BELAS RUPIAH DELAPAN PULUH SEN) ATAU 92,65%., LEBIH TINGGI DARI REALISASI BELANJA TAHUN 2017 SEBESAR 91,84%.

3. SEBAGAI BAGIAN DARI PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DALAM BENTUK PENYEDIAAN FASILITAS-FASILITAS PUBLIK, ALOKASI BELANJA MODAL PADA TAHUN 2018 SEBESAR RP.281.427.456.550,81 (DUA RATUS DELAPAN PULUH SATU MILIAR EMPAT RATUS DUA PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH RUPIAH DELAPAN PULUH SATU SEN). PADA BELANJA MODAL TERJADI EFISIENSI BELANJA MODAL SEBESAR RP. 37.798.990.386,19 (TIGA PULUH TUJUH MILIAR TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH RIBU TIGA RATUS DELAPAN PULUH ENAM RUPIAH SEMBILAN BELAS SEN) BERUPA SISA TENDER YANG KEMUDIAN DIMANFAATKAN KEMBALI UNTUK BELANJA TAHUN BERIKUTNYA.

PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG BERBAHAGIA,

DI TAHUN 2018 PEMERINTAH KOTA BANJARBARU MENETAPKAN TAG LINE “BANJARBARU BERINOVASI”. BERKENAAN DENGAN TAGLINE TERSEBUT SELAMA TAHUN 2018 PEMERINTAH KOTA BANJARBARU TELAH MEWUJUDKAN BEBERAPA INOVASI YAITU :

1. SI SEPTIMANJA (FUNGSI SEPTIC TANK SELAIN TEMPAT LIMBAH TINJA).
2. TRANSMODIS UNTUK LAYANAN PELAJAR DAN KESEHATAN (TRANSPORTASI MOBIL DINAS GRATIS UNTUK LAYANAN PELAJAR DAN KESEHATAN).

3. INOVASI PENATAAN KHUSUS SUNGAI KEMUNING (PANSUS SUNGAI KEMUNING).

SEDANGKAN BERKAITAN DENGAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISELENGGARAKAN PADA TAHUN 2018 ADALAH SEBANYAK 10 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR, 19 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR, 5 URUSAN PILIHAN, DAN 13 URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN.

ADAPUN URUSAN YANG SECARA GARIS BESAR DAPAT KAMI SAMPAIKAN YAITU:

1. URUSAN PENDIDIKAN DILAKSANAKAN OLEH DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH. UNTUK ALOKASI BELANJA PENDIDIKAN TAHUN 2018 ADALAH SEBESAR 25,73% DARI APBD YAITU RP.249.627.889.690,- (DUA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN MILIAR ENAM RATUS DUA PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU ENAM RATUS SEMBILAN PULUH RUPIAH). HAL INI TELAH MEMENUHI KETENTUAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL BAHWA ALOKASI ANGGARAN MINIMAL UNTUK BIDANG PENDIDIKAN ADALAH SEBESAR 20%. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM YANG MENDUKUNG URUSAN PENDIDIKAN SELAMA TAHUN ANGGARAN 2018 MENCAPAI 96% ATAU SEBESAR RP.239.630.637.347,13(DUA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN

MILIAR ENAM RATUS TIGA PULUH JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU TIGA RATUS EMPAT PULUH TUJUH RUPIAH, TIGA BELAS SEN).

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PADA JENJANG SD/MI/PAKET A PADA TAHUN 2018 SEBESAR 99,43% DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA SEBESAR 98,56%, TERJADI KENAIKAN DIKARENAKAN ADANYA KEBIJAKAN TENTANG BATASAN USIA MASUK SEKOLAH DASAR HARUS BERUSIA 7 TAHUN.

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PADA JENJANG SMP/MTS/PAKET B PADA TAHUN 2018 SEBESAR 78,81% TERJADI PENURUNAN DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA YANG MENCAPAI SEBESAR 79,91% MENJADI 78,81 HAL INI TERJADI KARENA MASIH ADANYA JUMLAH ANAK USIA DI BAWAH USIA 12 TAHUN YANG BERSEKOLAH DIJENJANG SMP/MTS/PAKET B.

UNTUK ANGKA MELEK HURUF DI TAHUN 2018 SUDAH MENCAPAI 99,57%, HAL INI MENUNJUKKAN BAHWA DARI 200 ORANG PENDUDUK KOTA BANJARBARU DIPERKIRAKAN HANYA 1 ORANG YG BANJARBARU YANG BUTA AKSARA.

DAN PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA DI SEKTOR PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU TERUS MELAKSANAKAN PROGRAM PENDIDIKAN BERKARAKTER DENGAN MENANAMKAN NILAI-NILAI RELIGIUS, BERAKHLAK MULIA,

CINTA TANAH AIR, CINTA LINGKUNGAN HIDUP DAN BERJIWA KEWIRAUSAHAAN.

2. URUSAN KESEHATAN DILAKSANAKAN OLEH DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

PADA TAHUN ANGGARAN 2018 DIALOKASIKAN BELANJA KESEHATAN SEBESAR 20,96% DARI BELANJA APBD YAITU SEBESAR RP.234.244.953.341,- (DUA RATUS TIGA PULUH EMPAT MILIAR DUA RATUS EMPAT PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS EMPAT PULUH SATU RUPIAH). HAL INI TELAH MEMENUHI KETENTUAN DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENYATAKAN BAHWA PEMERINTAH DAERAH HARUS MENGALOKASIKAN ANGGARAN URUSAN KESEHATAN MINIMAL 10% DARI TOTAL BELANJA APBD.

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM YANG MENDUKUNG URUSAN KESEHATAN SELAMA TAHUN ANGGARAN 2018 MENCAPAI 95,05% ATAU SEBESAR RP.229.509.922.071,80 (DUA RATUS DUA PULUH SEMBILAN MILIAR LIMA RATUS SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH DUA RIBU TUJUH PULUH SATU RUPIAH DELAPAN PULUH SEN).

PADA TAHUN 2018, PEMERINTAH KOTA BANJARBARU TELAH MEMBANGUN PUSKESMAS LANDASAN ULIN, DENGAN NILAI

KONTRAK SEBESAR RP.6.966.605.175,- (ENAM MILIAR SEMBILAN RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA ENAM RATUS LIMA RIBU SERATUS TUJUH PULUH LIMA RUPIAH) YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN.

SELANJUTNYA, PEMERINTAH KOTA BANJARBARU JUGA TELAH MENGINTEGRASIKAN PESERTA JAMKESDA MENJADI PESERTA JKN. PADA TAHUN 2018 TERCAPAI SEBESAR 60,86% ATAU SEBANYAK 16.227 Jiwa dari target 26.663 jiwa pada tahun 2019.

ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) PADA TAHUN 2018 YAITU 78,5 PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP, MENURUN DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2017 YANG MENCAPAI 97,5 PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP. SELANJUTNYA, ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) PADA TAHUN 2018 SEBESAR 1,96 PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP, MENURUN DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2017 YANG SEBESAR 3,5 PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP.

DI TAHUN 2018, DALAM RANGKA MENDUKUNG PENDANAAN PEMBANGUNAN URUSAN KESEHATAN DILAKUKAN UPAYA PENDANAAN LAIN YANG BERASAL DARI DANA DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (TJSP/CSR).

PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG TERHORMAT

BERKENAAN DENGAN PENCAPAIAN PROGRAM KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2018 DAPAT SAYA LAPORKAN SEBAGIAN DARI CATATAN SEBAGAI BERIKUT:

1. PEMERINTAH KOTA BANJARBARU KEMBALI MELANJUTKAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH KOTA BANJARBARU YANG SAMPAI PADA AKHIR TAHUN 2018 MASIH TERSISA SEBESAR 87,45 HEKTAR. BERBAGAI KEGIATAN PENANGANAN KUMUH TELAH DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2018 BAIK BERUPA KEGIATAN SKALA LINGKUNGAN, SKALA KAWASAN MAUPUN KEGIATAN REGULER. UNTUK KEGIATAN PENANGANAN KUMUH SKALA LINGKUNGAN BERUPA KEGIATAN BANTUAN DANA INVESTASI (BDI) YANG DILAKSANAKAN DI 13 KELURAHAN OLEH LKM DENGAN DANA SEBESAR RP. 10.250.000.000,- (SEPULUH MILIAR DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) BERSUMBER DARI APBN. UNTUK KEGIATAN SKALA KAWASAN BERUPA KEGIATAN PEMBANGUNAN PUSAT DAUR ULANG (PDU) DI KELURAHAN GUNTUNG PAIKAT DENGAN ANGGARAN SEBESAR Rp. 1.401.179.000,- (SATU MILYAR EMPAT RATUS SATU JUTA SERATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH) BERSUMBER DARI APBN, SEDANGKAN UNTUK KEGIATAN PENANGANAN KUMUH SKALA REGULER BERUPA KEGIATAN INFRASTRUKTUR KAWASAN KEMUNING DENGAN ANGGARAN SEBESAR RP. 20.098.870.000,- (DUA PULUH MILIAR SEMBILAN PULUH

DELAPAN JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH). SELAIN KEGIATAN PENANGANAN KUMUH, JUGA DILAKSANAKAN KEGIATAN OLEH SATKER PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DENGAN ANGGARAN SEBESAR RP. 126.800.000.000,-(SERATUS DUA PULUH ENAM MILIAR DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH) BERSUMBER DARI APBN.

DANA DEKONSENTRASI DARI KEMENTERIAN PERTANIAN SEBESAR RP. 632.650.000,- (ENAM RATUS TIGA PULUH JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH), RP. 10.250.000.000,- (SEPULUH MILIAR DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH), SERTA DARI SATKER DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALSEL SEBESAR RP.29.750.000,-(DUA PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH).

TOTAL DANA DEKONSENTRASI SELAMA TAHUN 2018 YANG DIALOKASIKAN DI KOTA BANJARBARU ADALAH SEBESAR RP. 10.912.400.000,- (SEPULUH MILIAR SEMBILAN RATUS DUA BELAS JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH).

2. MENYELENGGARAKAN TUGAS PEMBANTUAN BERUPA PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DENGAN KEGIATAN PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI DALAM BENTUK PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT LAURA KELURAHAN LANDASAN ULIN UTARA KOTA BANJARBARU DENGAN ALOKASI ANGGARAN SEBESAR RP.6.000.000.000,- (ENAM MILIAR RUPIAH) DAN NILAI KONTRAK SEBESAR RP.5.325.388.304,- (LIMA MILYAR

TIGA RATUS DUA PULUH LIMA JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU TIGA RATUS EMPAT RUPIAH).

3. PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN YANG BERSUMBER DARI DANA TJSP/CSR SELAMA TAHUN 2018 BERJUMLAH RP.2.702.686.535 (DUA MILIAR TUJUH RATUS DUA JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU LIMA RATUS TIGA PULUH LIMA RUPIAH) YANG TERSEBAR PADA 109 (SERATUS SEMBILAN) KEGIATAN.
4. SELAMA TAHUN 2018 PEMERINTAH KOTA BANJARBARU JUGA MENERIMA HIBAH DARI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI SEJUMLAH RP.4.575.045.000 (EMPAT MILIAR LIMA RATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA EMPAT PULUH LIMA RIBU RUPIAH) BERUPA PEMBANGUNAN DRAINASE LINGKUNGAN PERMUKIMAN KOTA BANJARBARU.

ADAPUN PROGRAM PRIORITAS DAN STRATEGIS YANG DILAKSANAKAN SELAMA TAHUN 2018 ANTARA LAIN ADALAH PENGEMBANGAN KOTA BARU.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA BARU DIADAKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT MELALUI BEBERAPA KEMENTERIAN YANG MENANGANI. PENGEMBANGAN KOTA BARU MERUPAKAN BAGIAN DARI PENGEMBANGAN 10 KAWASAN PERKOTAAN BARU DI INDONESIA YANG TERCANTUM DALAM RJMN 2014 - 2019. BENTUK KEGIATAN PENGEMBANGAN KOTA BARU INI, DIWUJUDKAN OLEH PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DENGAN MENETAPKAN KAWASAN BERTEMA “AERO CITY”, YAKNI

SEBUAH KAWASAN YANG AKAN TERINTEGRASI DAN MEMANFAATKAN KEBERADAAN BANDARA SEBAGAI DAYA UNGKIT PERTUMBUHAN WILAYAH.

LUAS KAWASAN YANG AKAN DIRENCANAKAN ADALAH $\pm 5.620,08$ (LIMA RIBU ENAM RATUS DUA PULUH KOMA NOL DELAPAN) HEKTAR YANG TERLETAK DI KECAMATAN LANDASAN ULIN, KECAMATAN LIANG ANGGANG DAN KECAMATAN BANJARBARU UTARA, DENGAN FOKUS PENGEMBANGAN SEBAGAI PUSAT PERMUKIMAN BARU YANG LAYAK HUNI DAN DIDUKUNG OLEH FASILITAS EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA YANG LENGKAP GUNA MENCEGAH TERJADINYA PERMUKIMAN TIDAK TERKENDALI (*URBAN SPRAWL*) AKIBAT URBANISASI DI KOTA OTONOM TERDEKATNYA.

ADAPUN BEBERAPA ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN WILAYAH YANG MENJADI FOKUS DALAM KEGIATAN PENGEMBANGAN KOTA BARU TERSEBUT ANTARA LAIN :

- a. PENGEMBANGAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN;
- b. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA YANG DIHARAPKAN DAPAT MENJADI PENGGERAK AKTIFITAS MASYARAKAT DI WILAYAH TERSEBUT. KEBERADAAN BANDARA SYAMSUDIN NOOR HARUS MENJADI CENTER POINT DALAM MERENCANAKAN BERBAGAI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR EKONOMI DI WILAYAH TERSEBUT;

- c. PENGEMBANGAN RUANG PUBLIK DAN KAWASAN WISATA
SEPERTI MICE, SPORT CENTER, RUANG TERBUKA HIJAU DAN
LAIN-LAIN.

PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG TERHORMAT,

DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, TERDAPAT BEBERAPA PRESTASI YANG DICAPAI OLEH PEMERINTAH KOTA BANJARBARU SELAMA TAHUN 2018. PRESTASI TERSEBUT BERUPA PENGHARGAAN YANG DITERIMA PADA TINGKAT NASIONAL MAUPUN TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN YAITU :

1. MERAH PREDIKAT B DENGAN NILAI 63,38 ATAS PENILAIAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DARI MENTERI PAN DAN RB DRS. SYAFRUDDIN, M.SI.

TAHAPAN PENERAPAN SAKIP DIMULAI DENGAN MENETAPKAN SASARAN STRATEGIS PADA MASING-MASING INSTANSI YANG DISERTAI DENGAN UKURAN KEBERHASILAN DAN TARGET YANG TERUKUR. DENGAN NILAI B INI, BERARTI PEMKO BANJARBARU BERHASIL MEMPERTAHANKAN KINERJANYA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.

2. MERAH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) TERHADAP LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017.

PREDIKAT WTP INI MERUPAKAN PRESTASI YANG DITERIMA OLEH PEMERINTAH KOTA BANJARBARU SECARA BERTURUT-TURUT SELAMA TIGA TAHUN.

3. PENGHARGAAN DARI MENTERI KOPERASI DAN UKM PADA PERINGATAN HARI KOPERASI KE-71 YANG DIBERIKAN ATAS KEPEDULI PEMERINTAH KOTA BANJARBARU TERHADAP PERKEMBANGAN KOPERASI YANG DILAKUKAN MELALUI BERBAGAI KEGIATAN UNTUK MEMBANTU PROMOSI DAN PEMASARAN PRODUK UMKM DI KOTA BANJARBARU.
4. PENOBATAN KOTA BANJARBARU SEBAGAI KOTA LAYAK ANAK OLEH MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI.

PENGHARGAAN INI DIMAKSUDKAN UNTUK MEMBANGUN INISIATIF PEMERINTAH DAERAH YANG MENGARAH PADA UPAYA TRANSFORMASI KONVENSI HAK-HAK ANAK (*CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD*) DARI KERANGKA HUKUM KE DALAM DEFINISI, STRATEGI DAN INVESTASI DALAM BENTUK KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN UNTUK MEMENUHI HAK-HAK ANAK PADA SUATU WILAYAH.

5. MENERIMA PENGHARGAAN MANGGALA KARYA KENCANA DARI MENTERI KOORDINATOR PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.

PENGHARGAAN INI DIBERIKAN KEPADA WALIKOTA BANJARBARU DAN KETUA TP PKK KOTA BANJARBARU SEBAGAI TOKOH YANG TELAH MENUNJUKKAN PROGRAM DAN KARYA YANG MENONJOL DALAM PENGEMBANGAN INOVASI DAN SISTEM YANG BERMANFAAT BAGI PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA.

6. MENERIMA PENGHARGAAN NATAMUKTI NINDYA DARI ICBS DAN KEMENTERIAN KOPERASI UKM RI, KATEGORI TERTINGGI UNTUK KOTA YANG MAMPU MENINGKATKAN DAYA SAING UKM SECARA KESELURUHAN.

7. PENGHARGAAN ANUGERAH PANDU NEGERI KATEGORI KOTA DENGAN KINERJA DAN TATA KELOLA YANG BAIK DARI INSTITUTE FOR PUBLIC GOVERNANCE (IIPG).

PENGHARGAAN INI DITERIMA OLEH PEMERINTAH KOTA BANJARBARU UNTUK YANG KEDUA KALINYA.

8. PENGHARGAAN PAKARTI UTAMA I NASIONAL PELAKSANA TERBAIK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA (UP2K) BAGI TP PKK KOTA BANJARBARU.

PENGHARGAAN INI DISERAHKAN OLEH KETUA UMUM TIM PENGGERAK PKK PUSAT PADA PUNCAK PERINGATAN HARI KESATUAN GERAK (HKG) PKK KE 46 DAN JAMBORE NASIONAL KADER PKK TAHUN 2018.

9. NASIONAL PROCUREMENT AWARD KATEGORI KOMITMEN PENERAPAN STANDAR LPSE 2014 YANG DITERIMA OLEH LPSE KOTA BANJARBARU. PENGHARGAAN INI SEBAGAI BENTUK APRESIASI TERHADAP KINERJA PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI INSTANSI PEMERINTAH DAN MENUNJUKKAN LPSE KOTA BANJARBARU SEBAGAI LEMBAGA YANG BERINTEGRITAS, PROFESIONAL DAN INDEPENDEN.
10. PENGHARGAAN SEBAGAI TOP 25 PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK, PENGHARGAAN DIBERIKAN OLEH DEPUTI PELAYANAN PUBLIK, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (KEMENPAN DAN RB) PADA RAPAT KOORDINASI JARINGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK (JIPP) DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) LAPOR.
11. PENGHARGAAN SEBAGAI PENDUKUNG KUR TERBAIK, PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINOBATKAN SEBAGAI PEMERINTAH DAERAH PENDUKUNG KUR TERBAIK TAHUN 2018 DI LUAR PULAU JAWA. PENGHARGAAN DISERAHKAN OLEH MENKO PEREKONOMIAN RI.
12. PENGHARGAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP STANDAR PELAYANAN DARI OMBUDSMAN RI ATAS KEPATUHAN TERHADAP STANDAR PELAYANAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2018.

KOTA BANJARBARU MASUK PADA ZONA HIJAU DENGAN PREDIKAT KEPATUHAN TINGGI ATAS PELAYANAN PUBLIK DENGAN NILAI 92,09.

13. PENGHARGAAN ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA (APE) TINGKAT MADYA DARI MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA YOSANA SUSANA YAMBISE,
PENGHARGAAN INI SEBAGAI BENTUK KOMITMEN, KEPEDULIAN DAN KARAKTER BANJARBARU YANG PEDULI TERHADAP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
14. PENGHARGAAN ADIWIYATA TINGKAT NASIONAL YANG DITERIMA OLEH 5 SEKOLAH YAITU SDN 3 PALAM, SDN 3 SUNGAI BESAR, SDN 3 SYAMSUDIN NOOR, SDN 5 LOKTABAT UTARA, SDN 1 GUNTUNG PAIKAT.
15. PENGHARGAAN ADIWIYATA MANDIRI YANG DITERIMA OLEH 10 SEKOLAH YAITU SDN 1 PALAM, SDN 4 LOKTABAT UTARA, SDN 1 GUNTUNG PAYUNG, SDN 1 LU BARAT, SDN 1 MENTAOS, SDN 3 KOMET, SDN 4 KOMET, SDN 4 SUNGAI BESAR, SDN 2 KOMET, SMPN 2 BANJARBARU.
16. PENGHARGAAN ADIPURA DARI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI KATEGORI KOTA SEDANG YANG DISERAHKAN LANGSUNG OLEH WAKIL PRESIDEN RI.

PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG BERBAHAGIA,

DEMIKIAN TADI GARIS BESAR YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN TERKAIT LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2018. ADAPUN LAPORAN INI SELENGKAPNYA TELAH TERANGKUM SECARA RINCI DALAM DOKUMEN LKPJ YANG TELAH SAYA SERAHKAN UNTUK DILAKUKAN PEMBAHASAN SESUAI DENGAN MEKANISME YANG ADA.

SAYA MENYADARI BAHWA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DI TAHUN 2018 MASIH TERDAPAT BERBAGAI KEKURANGAN, OLEH KARENA ITU, SAYA AKAN MENERIMA DAN MEMPERHATIKAN DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH PERTIMBANGAN, PENILAIAN DAN SARAN-SARAN DARI SELURUH PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT SERTA DARI SEMUA PIHAK GUNA PERBAIKAN DAN PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.

DEMIKIANLAH SAMBUTAN YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN, SEKALI LAGI SAYA MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN KEPADA PIMPINAN DEWAN DAN SELURUH ANGGOTA DEWAN SERTA EKSEKUTIF ATAS DEDIKASI DAN KERJASAMANYA YANG SOLID UNTUK KEMAJUAN KOTA BANJARBARU.

AKHIRNYA SAYA MOHON MAAF JIKA DALAM SAMBUTAN INI TERDAPAT TUTUR KATA YANG TIDAK PADA TEMPATNYA ATAU TERDAPAT PENYAMPAIAN YANG TIDAK BERKENAN DIHATI, SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MEMBERIKAN PETUNJUK DAN BIMBINGAN-NYA KEPADA KITA SEMUA DALAM MENGEMBAN TUGAS PENGABDIAN KEPADA BANGSA, NEGARA DAN MASYARAKAT, KHUSUSNYA KOTA BANJARBARU YANG KITA CINTAI.

AMIN...

WASSALAMMUALAIKUM WR.WB

WALIKOTA BANJARBARU

H. NADJMI ADHANI